



2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2027

“Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung Pelayanan Publik yang berkualitas dan Infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup”



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG



SALINAN

BUPATI SERANG
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERANG TAHUN 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2027.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD Serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas . . .

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
14. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut MUSRENBANG adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Serang.
17. Badan Perencanaan Pembangunan, dan Riset Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, dan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Serang.

Pasal 2

RKPD ditetapkan dengan maksud sebagai landasan dalam prioritas pembangunan dengan pertimbangan meliputi:

- a. memiliki dampak yang besar pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan dengan sasaran terukur sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat;
- b. mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
- c. merupakan tugas Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama; dan
- d. berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD.

Pasal . . .

Pasal 3

RKPD memiliki tujuan untuk menjadi acuan dalam:

- a. menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2027;
- b. menetapkan Renja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2027;
- c. menyeleraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dan
- d. mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembangunan secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 4

RKPD memiliki fungsi sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- b. penyusunan APBD tahun 2027;
- c. pembahasan dan penyusunan dokumen KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; dan
- d. penyusunan RKA-SKPD setelah KUA dan PPAS disepakati.

Pasal 5

RKPD ditetapkan dengan prinsip meliputi:

- a. keselarasan yaitu dengan mengintegrasikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. keadilan guna mengurangi kesenjangan dan menciptakan sinergitas secara regional;
- c. keseimbangan yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan menggali potensi pendanaan dari masyarakat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan; dan
- d. keterlibatan masyarakat yaitu perencanaan partisipatif yang melibatkan sejumlah *stakeholder* pembangunan, baik unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

BAB . . .

BAB II

MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan RKPD tahun 2027 dengan materi muatan meliputi:
 - a. penjabaran rencana program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk tahun 2027;
 - b. rancangan kerangka ekonomi Daerah dan prioritas dalam pembangunan Daerah; dan
 - c. sumber pendanaan dalam pembangunan Daerah yaitu dari APBD dan/atau dari partisipasi masyarakat
- (2) RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sistematika terdiri atas:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum kondisi daerah;
 - c. bab III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII penutup.
- (3) RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Materi muatan dan sistematika RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juli 2026
BUPATI SERANG,

ttd

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

ZALDI DHUHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

ANTON HERMAWANTO, SH., M.Si
NIP. 19830131 201101 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, sehingga proses penyusunan dokumen **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2027** pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) ini telah selesai.

Pada prinsipnya dokumen ini menyajikan tentang; Pendahuluan, Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, serta Penutup.

Akhir kata, Kami berharap semoga dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 ini dapat bermanfaat sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2027. Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi seluruh pihak dalam seluruh proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Serang, Juni 2026

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR.....	XI
DAFTAR GRAFIK	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	10
2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SERANG	10
2.1.1 Kondisi Geografis Wilayah.....	10
2.1.1.1 Letak dan Batas Wilayah.....	10
2.1.1.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lahan	11
2.1.1.3 Kondisi Iklim dan Curah Hujan.....	12
2.1.1.4 Kondisi Hidrologi	14
2.1.1.5 Kondisi Geologi.....	17
2.1.1.6 Penggunaan Lahan.....	19
2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana.....	21
2.1.2 Demografi.....	23
2.1.3 Kondisi Ekonomi Wilayah.....	28
2.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	28
2.1.3.2 PDRB per Kapita.....	32
2.1.4 Kondisi Fasilitas / Infrastruktur Wilayah	34
2.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAERAH	35
2.2.1 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	35
2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	37
2.2.1.2 Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD serta SMP	41
2.2.1.3 Harapan Lama Sekolah.....	43
2.2.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah	44
2.2.1.5 Umur Harapan Hidup.....	47
2.2.1.6 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	48
2.2.1.7 Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit.....	49
2.2.1.8 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).....	51
2.2.1.9 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).....	52
2.2.1.10 Indeks Partisipasi Olahraga.....	53
2.2.1.11 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).....	55

2.2.1.12	Tingkat Kemiskinan	56
2.2.1.13	Indeks Kesejahteraan Sosial.....	62
2.2.1.14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	63
2.2.1.15	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63
2.2.1.16	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	64
2.2.1.17	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	65
2.2.1.18	Persentase Unit Rumah Didalam Perumahan Yang Terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.....	65
2.2.1.19	Laju Pertumbuhan Ekonomi	67
2.2.1.20	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	70
2.2.1.21	Rasio Konektivitas.....	71
2.2.1.22	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	74
2.2.1.23	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.....	75
2.2.1.24	Persentase Koperasi Sehat	77
2.2.1.25	Rasio Kewirausahaan	77
2.2.1.26	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	78
2.2.1.27	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	80
2.2.1.28	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	83
2.2.1.29	PDRB Pengeluaran	84
2.2.1.30	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	88
2.2.1.31	Persentase Peningkatan Investasi.....	91
2.2.1.32	Indeks Gini	91
2.2.1.33	Indeks Desa	93
2.2.1.34	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	94
2.2.1.35	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas.....	95
2.2.1.36	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB.....	96
2.2.1.37	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	98
2.2.1.38	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	99
2.2.1.39	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	100
2.2.1.40	Jumlah Total Produksi Perikanan	103
2.2.1.41	Indeks Reformasi Birokrasi	104
2.2.1.42	Indeks Pelayanan Publik.....	105
2.2.1.43	Nilai SAKIP Pemda.....	105
2.2.1.44	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	106
2.2.1.45	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	106
2.2.1.46	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	107
2.2.1.47	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	109
2.2.1.48	Indeks Profesionalitas ASN	111
2.2.1.49	Indeks SPBE	112
2.2.1.50	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	112
2.2.1.51	Indeks Pembangunan Statistik	113
2.2.1.52	Indeks Keamanan Informasi	113
2.2.1.53	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemda.....	114
2.2.1.54	Indeks Kepuasan Masyarakat.....	115

2.2.1.55	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	116
2.2.1.56	Nilai SAKIP Kecamatan	117
2.2.1.57	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	118
2.2.1.58	Persentase Hasil Riset, Inovasi, dan Inovasi Yang Dimanfaatkan.....	119
2.2.1.59	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	120
2.2.1.60	Capaian Aksi HAM.....	121
2.2.1.61	Indeks Kerukunan Umat Beragama	122
2.2.1.62	Tingkat Warisan Seni Budaya dan Tradisi Yang Dilestarikan.....	123
2.2.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025.....	124
2.2.2.1	Aspek Geografi dan Demografi	124
2.2.2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	125
2.2.2.3	Aspek Daya Saing Daerah	127
2.2.2.4	Aspek Pelayanan Umum	129
2.2.2.5	Indikator Kinerja Kunci.....	131
2.2.3	Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Capaian 2023-2025)	150
2.3	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH PADA RPJMD KABUPATEN SERANG TAHUN 2025-2029.....	165
2.3.1	Permasalahan Urusan Pemerintahan Daerah.....	166
2.3.2	Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Serang.....	184
2.3.3	Isu-Isu Strategis.....	193
2.3.4	Lingkungan Strategis	194
2.3.5	Kelompok Isu Strategis RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029.....	203
2.4	TELAHAH USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2027	205
2.4.1	Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	205
2.4.2	Penelaahan Hasil Musrenbang	205
2.5	INOVASI DAERAH PENDUKUNG LAYANAN PUBLIK	206
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH		212
3.1	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	212
3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	212
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten.....	218
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Serang	221
3.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	240
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	244
3.2.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	248
3.2.1.2	Pendapatan Transfer.....	250
3.2.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	252
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	253
3.2.2.1	Belanja Operasi	256
3.2.2.2	Kebijakan Belanja Modal.....	265
3.2.2.3	Kebijakan Belanja Tidak Terduga	266
3.2.2.4	Kebijakan Belanja Transfer	267
3.2.2.5	Kebijakan Belanja Mandatori.....	268
3.2.2.6	Kebijakan Belanja Lainnya	271
3.2.3	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	276
3.3	PENDANAAN NON APBD	281

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027.....	282
4.1 TUJUAN DAN SASARAN RKPD TAHUN 2027.....	282
4.1.1 Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2027	289
4.1.1.1 Hasil Kesepakatan Desk ProSN/Tematik	289
4.1.1.2 Hasil Kesepakatan Desk Urusan Pemerintahan.....	302
4.2 TEMA DAN FOKUS PEMBANGUNAN	347
4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	352
4.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027.....	353
4.3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2027.....	369
4.3.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2027.....	375
4.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	386
4.5 PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2027	401
4.5.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi.....	401
4.5.2 Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2027.....	456
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	551
5.1 RENCANA KERJA	551
5.2 PENDANAAN DAERAH	551
5.2.1 Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2027.....	552
5.2.2 Pendanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	582
5.2.3 Pendanaan Dukungan Daerah terhadap Program Strategis Nasional (ProSn).....	599
5.2.4 Pendanaan Urusan Pemerintahan	613
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	658
BAB VII PENUTUP	699

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa	10
Tabel 2. 2 Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Serang (Hari) Tahun 2021 – 2025	13
Tabel 2. 3 Curah Hujan Di Kabupaten Serang (mm) Tahun 2021 – 2025	14
Tabel 2. 4 Kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) Di Kabupaten Serang	17
Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Serang Tahun 2022.....	20
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Serang Tahun 2025	23
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Serang Tahun 2025	25
Tabel 2. 8 Komposisi Penduduk Kabupaten Serang Menurut Kelompok Umur Dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2021-2025.....	26
Tabel 2. 9 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 -2025	30
Tabel 2. 10 PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2021-2025	31
Tabel 2. 11 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2021- 2025	31
Tabel 2. 12 PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Serang Tahun 2021-2025	32
Tabel 2. 13 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Dan Daerah Berbatasan Dengan Kabupaten Serang Tahun 2021-2025	33
Tabel 2. 14 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Serang (mm) Tahun 2021-2025.....	34
Tabel 2. 15 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Di Kabupaten Serang (Km).....	34
Tabel 2. 16 Capaian IKU Misi I RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.....	35
Tabel 2. 17 IPM Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2021 - 2025	39
Tabel 2. 18 Rata-Rata Pertumbuhan IPM Kabupaten Serang Dengan Realisasi Nasional Tahun 2021-2025	39
Tabel 2. 19 Karakteristik IPM di Kabupaten Serang Tahun 2021-2025	40
Tabel 2. 20 Indikator Pembentuk IPM Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2025.....	41
Tabel 2. 21 Capaian Literasi Dan Numerasi Tahun 2025	42
Tabel 2. 22 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2025.....	43
Tabel 2. 23 Rata-Rata Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Serang Tahun 2021-2025.....	44
Tabel 2. 24 Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Serang Dalam Kurun Waktu Tahun 2021-2025.....	45
Tabel 2. 25 ATS Per-Kecamatan Tahun Ajaran 2025/2026.....	46
Tabel 2. 26 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Dari Data (UHH SP2020) Kabupaten Serang, Provinsi Banten Dan Nasional Tahun 2022-2025	47
Tabel 2. 27 UHH Menurut Kabupaten / Kota Di Provinsi Banten Tahun 2021-2025.....	48
Tabel 2. 28 Rata-Rata Pertumbuhan UHH Kabupaten Serang Tahun 2021-2025.....	48
Tabel 2. 29 Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2021-2025	49
Tabel 2. 30 Survei Akreditasi RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara	49
Tabel 2. 31 Capaian Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2021-2025.....	50
Tabel 2. 32 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2021 – 2025	51
Tabel 2. 33 Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2021-2024.....	52
Tabel 2. 34 Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Serang 2021-2025.....	53
Tabel 2. 35 Jumlah Perolehan Medali Kabupaten Serang Di Tingkat Nasional Dan Internasional	54

Tabel 2. 36 Perkembangan Rasio Lapangan/Prasarana Di Kabupaten Serang.....	54
Tabel 2. 37 IPLM Kabupaten Serang Tahun 2021-2025.....	55
Tabel 2. 38 Presentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) Di Kabupaten Serang.....	61
Tabel 2. 39 Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020 – 2025	63
Tabel 2. 40 Penanganan Kawasan Kumuh Di Kabupaten Serang Tahun 2021-2024.....	64
Tabel 2. 41 Capaian IKU Misi II RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	66
Tabel 2. 42 Nilai PDRB ADHK Kabupaten Serang Tahun 2021-2024 (Dalam Miliar Rupiah)	68
Tabel 2. 43 Unsur Layanan Infrastruktur.....	70
Tabel 2. 44 Rincian Data Kebutuhan Trayek	72
Tabel 2. 45 Rincian Data Trayek Yang Dilayani.....	72
Tabel 2. 46 Rincian Data Kebutuhan Lintas.....	73
Tabel 2. 47 Rincian Data Lintas Yang Dilayani	73
Tabel 2. 48 Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	74
Tabel 2. 49 Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.....	75
Tabel 2. 50 Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Serang Tahun 2022-2025	77
Tabel 2. 51 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Serang Tahun 2024-2025	78
Tabel 2. 52 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Kabupaten Serang Tahun 2021-2025	79
Tabel 2. 53 Capaian IKU Misi III RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	79
Tabel 2. 54 Penduduk Usia Kerja Dan Angkatan Kerja (Ribu Orang) Kabupaten Serang 2021-2025.....	81
Tabel 2. 55 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2021-2025 (Persen) ..	82
Tabel 2. 56 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Serang Tahun 2021- 2025 (Milyar Rp).....	84
Tabel 2. 57 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kabupaten Serang Tahun 2021- 2025 (Milyar Rp).....	85
Tabel 2. 58 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Serang Tahun 2021-2025	86
Tabel 2. 59 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen) 2021 – 2025	87
Tabel 2. 60 Jumlah Jam Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja	88
Tabel 2.61 Penduduk Kabupaten Serang Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Tahun 2021-2024.....	89
Tabel 2. 62 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Di Kabupaten Serang 2021-2024	90
Tabel 2. 63 Persentase Penduduk Kabupaten Serang Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Agustus Tahun 2023-2024.....	90
Tabel 2. 64 Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten	91
Tabel 2. 65 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Dan Daerah Berbatasan Kabupaten Serang Tahun 2021-2025	93
Tabel 2. 66 Indeks Desa Membangun (Idm) Kabupaten Serang 2021-2025	94
Tabel 2. 67 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh).....	95
Tabel 2. 68 Capaian IKU Misi IV RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.....	96
Tabel 2. 69 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Serang	97
Tabel 2. 70 Data Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan Dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota Tahun	

2021-2025.....	99
Tabel 2. 71 Pertumbuhan Angka PoU Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2025	101
Tabel 2. 72 Jumlah Penduduk Yang Mengalami Ketidacukupan Konsumsi Pangan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2025.....	101
Tabel 2. 73 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen) Per Kabupaten/Kota (Persen) Di Provinsi Banten Tahun 2021-2024.....	102
Tabel 2. 74 Capaian IKU Misi V RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.....	103
Tabel 2. 75 Layanan Kinerja Sekretariat Daerah.....	105
Tabel 2. 76 Opini BPK Tahun 2021-2025.....	108
Tabel 2. 77 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal.....	109
Tabel 2. 78 Derajat Desentralisasi Tahun 2021-2024	109
Tabel 2. 79 Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pad	110
Tabel 2. 80 Layanan Urusan Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2025.....	112
Tabel 2. 81 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	114
Tabel 2. 82 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Pelayanan	120
Tabel 2. 83 Capaian IKU Misi VI RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	121
Tabel 2. 84 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Aspek Geografi Dan Demografi Tahun 2025.....	124
Tabel 2. 85 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025.....	125
Tabel 2. 86 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2025.....	128
Tabel 2. 87 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Aspek Pelayanan Umum Tahun 2025	130
Tabel 2. 88 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025	131
Tabel 2. 89 Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023- 2025.....	153
Tabel 2. 90 Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Dikabupaten Serang Tahun 2021- 2025.....	171
Tabel 2. 91 Jumlah Pelanggaran K3 Menurut Kecamatan Di Kabupaten Serang Tahun 2025.....	172
Tabel 2. 92 Cakupan Pelayanan BPBD Menurut Jenis Di Kabupaten Serang Tahun 2024	173
Tabel 2. 93 Jumlah Sarana Dan Prasarana Tanggap Bencana Di Kabupaten Serang Tahun 2021-2024	173
Tabel 2. 94 Jumlah Kejadian Kebakaran Dan Penyelamatan Menurut Kecamatan Dikabupaten Serang Tahun 2021-2024	174
Tabel 2. 95 Jumlah Penanganan Kebakaran Di Daerah Perbatasan Kabupaten Serang Tahun 2024	175
Tabel 2. 96 Jumlah Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Menurut Jenis Dan Kecamatan Di Kabupaten Serang Tahun 2024	176
Tabel 2. 97 Rata-Rata Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran Di Kabupaten Serang Tahun 2021-2024	176
Tabel 2. 98 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.....	188
Tabel 2. 99 Hasil Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027.....	205
Tabel 2. 100 Hasil Penelaahan Usulan Musrenbang Tingkat Desa Dan Kecamatan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027.....	206
Tabel 2. 101 Inovasi Kabupaten Serang.....	208
 Tabel 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi.....	 212
Tabel 3. 2 Sasaran Makro Pembangunan RKP 2027.....	216
Tabel 3. 3 Target Dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2026 Dan Tahun 2027	220

Tabel 3. 4 Realisasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025.....	223
Tabel 3. 5 Realisasi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021- 2025	226
Tabel 3. 6 PDRB Per Kapita Kabupaten Serang Tahun 2021-2025.....	229
Tabel 3. 7 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Serang (Ribu Orang)	231
Tabel 3. 8 Kemiskinan Dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Serang.....	233
Tabel 3. 9 Angka Kemiskinan. Tingkat Kemiskinan Dan Garis Kemiskinan Tahun 2025.....	234
Tabel 3. 10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang Tahun 2020-2025.....	235
Tabel 3. 11 Target Indikator Makro Daerah Tahun 2026 – 2027	238
Tabel 3. 12 Sandingan Target Indikator Makro Nasional Dan Daerah Tahun 2027	239
Tabel 3. 13 Target Indikator Makro 2027 Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Provins Banten	239
Tabel 3. 14 Realisasi Pendapatan Kabupaten Serang Tahun 2024, APBD 2025, APBD 2026 Dan Proyeksi Tahun 2027	243
Tabel 3. 15 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024-2025.....	249
Tabel 3. 16 Capaian Pendapatan Transfer Kabupaten Serang Tahun 2024-2025	250
Tabel 3. 17 Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Serang Tahun 2024-2025	252
Tabel 3. 18 Capaian Target Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024-2025	255
Tabel 3. 19 Alokasi Belanja Hibah TA. 2027.....	263
Tabel 3. 20 Alokasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2027	265
Tabel 3. 21 Realisasi Belanja Kabupaten Serang Tahun 2024, APBD Tahun 2025, Pagu APBD 2026 Dan Indikatif Rancangan Akhir RKPD 2027	267
Tabel 3. 22 Target Penerimaan Pajak Dari Hasil Yang Telah Ditentukan Penggunaannya TA. 2027.....	274
Tabel 3. 23 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024, APBD-P 2025, Pagu APBD 2026 Dan Pagu Indikatif Rancangan Akhir RKPD 2027	277
Tabel 3. 24 Proyeksi Pendapatan Tahun 2027	279
Tabel 3. 25 Proyeksi Belanja Tahun 2027	280
 Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	283
Tabel 4. 2 Hasil Kesepakatan Rakortekbang Desk Prosn/Tematik	289
Tabel 4. 3 Hasil Kesepakatan Desk Urusan Pemerintahan	302
Tabel 4. 4 Misi, Program Unggulan Dan Program Prioritas Daerah	376
Tabel 4. 5 Pemetaan Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Nasional Dalam Asta Cita Presiden.....	378
Tabel 4. 6 Program Perangkat Daerah Dalam Kegiatan Prioritas Utama Rjpmn 2025-2029.....	382
Tabel 4. 7 Strategi Dan Arah Kebijakan	387
Tabel 4. 8 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Dengan Prioritas Provinsi Banten Dan Prioritas Nasional	401
Tabel 4. 9 Agenda, Sasaran, Dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Indonesia	404
Tabel 4. 10 Program Prioritas Dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.....	408
Tabel 4. 11 Program Perangkat Daerah Dalam Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029.....	410
Tabel 4. 12 Outcome Prioritas, Program, Dan Subkegiatan Dalam Mendukung Asta Cita.....	415
Tabel 4. 13 Program Strategis Nasional (ProSn)	455
Tabel 4. 14 Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2027.....	456

Tabel 4. 15 Cascading RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027	481
Tabel 5. 1 Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2027	552
Tabel 5. 2 Indikatif Prioritas RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027	554
Tabel 5. 3 Pendanaan Indikatif Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027	582
Tabel 5. 4 Pendanaan Indikatif Dukungan Daerah Terhadap Program Strategis Nasional (ProSn) Tahun 2027	599
Tabel 5. 5 Pendanaan Indikatif Urusan Pemerintahan Tahun 2027	614
Tabel 6. 1 Target Kinerja Utama (IKU) Dan Target Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKPPD) Tahun 2027	659
Tabel 6. 2 Indikator Makro Kabupaten Serang.....	665
Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Serang Tahun 2027	666
Tabel 6. 4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Serang Tahun 2027	672
Tabel 6. 5 Cascading Indikator SPM.....	682

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	2
Gambar 1. 2 Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027.....	3
Gambar 2. 1 Peta Kelas Lereng Kabupaten Serang.....	12
Gambar 2. 2 Peta Daerah Aliran Sungai	15
Gambar 2. 3 Peta Sumber Daya Air.....	15
Gambar 2. 4 Peta Jenis Tanah Dan Luas Sebarannya di Kabupaten Serang.....	19
Gambar 2. 5 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2022.....	21
Gambar 2. 6 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Serang	23
Gambar 2. 7 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Serang Dari Telaahan Visi Misi	185
Gambar 2. 8 Skema Perumusan Isu Strategis Kabupaten Serang	194
Gambar 2. 9 Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	204
Gambar 3. 1 Kerangka Ekonomi Makro 2025- 2029	215
Gambar 4. 1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027	353
Gambar 4. 2 Tahapan RPJPN Tahun 2025-2045	403
Gambar 4. 3 Tahapan RPJPN Tahun 2025-2045	404

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Piramida Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2025.....	26
Grafik 2. 2 Pertumbuhan Nilai IPM Kabupaten Kota Di Provinsi Banten Tahun 2021-2025	37
Grafik 2. 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang Dan Provinsi Bantentahun 2021-2025	38
Grafik 2. 4 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2024.....	44
Grafik 2. 5 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Serang 2021-2025 (Ribu Jiwa).....	57
Grafik 2. 6 Grafik Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan Kabupaten Serang Tahun 2021-2025.....	58
Grafik 2. 7 Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Serang Dan Provinsi Banten	59
Grafik 2. 8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Serang Dan Provinsi Banten 2021-2025	60
Grafik 2. 9 Sebaran Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Serang Tahun 2026	61
Grafik 2. 10 Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.....	68
Grafik 2. 11 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Dan Nasional (%), Tahun 2021-2025.....	70
Grafik 2. 12 TPT (Persen) Kabupaten Serang Dan Provinsi Banten 2021-2025.....	81
Grafik 2. 13 Indeks Gini Kabupaten Serang Dan Provinsi Banten, 2021-2025.....	93
Grafik 2. 14 Pertumbuhan Angka PoU Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2025	100
Grafik 2. 15 Peringkat Angka PoU Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2025.....	101
Grafik 2. 16 Tingkat Warisan Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Serang Tahun 2021-2024.....	123
 Grafik 3. 1 PDRB ADHB Dan PDRB ADHK Kabupaten Serang 2021-2025.....	223
Grafik 3. 2 Kontribusi Sektor Terbesar Terhadap PDRB ADHB Tahun 2021-2025	225
Grafik 3. 3 Kontribusi Sektor Terkecil Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Serang Tahun 2021-2025.....	226
Grafik 3. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang Tahun 2020- TW 1 2026.....	227
Grafik 3. 5 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)	228
Grafik 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serang Tahun 2021-2025	231
Grafik 3. 7 Sebaran Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang 2026.....	232
Grafik 3. 8 Sebaran Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang 2026.....	233
Grafik 3. 9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten Serang Tahun 2020-2025.....	234
Grafik 3. 10 IPM Kabupaten Serang 2020-2025	235
Grafik 3. 11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi Banten Dan Kabupaten Serang 2020 – 2025 ..	236
Grafik 3. 12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang Dan Nasional Tahun 2020-2025.....	236
Grafik 3. 13 Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Serang Tahun 2020-2026.....	238

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap perubahan. Hal ini, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan diantaranya adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja beserta pendanaan indikatif untuk 1 (satu) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kondisi yang perlu disampaikan di dalam Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, bahwa dokumen RKPD Tahun 2027 ini merupakan penjabaran dari tahun ke tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD tahun 2027 ini memuat Visi dan Misi Kabupaten Serang sebagaimana Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, dan dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, fokus pembangunan, strategi dan arah kebijakan sampai dengan rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2027.

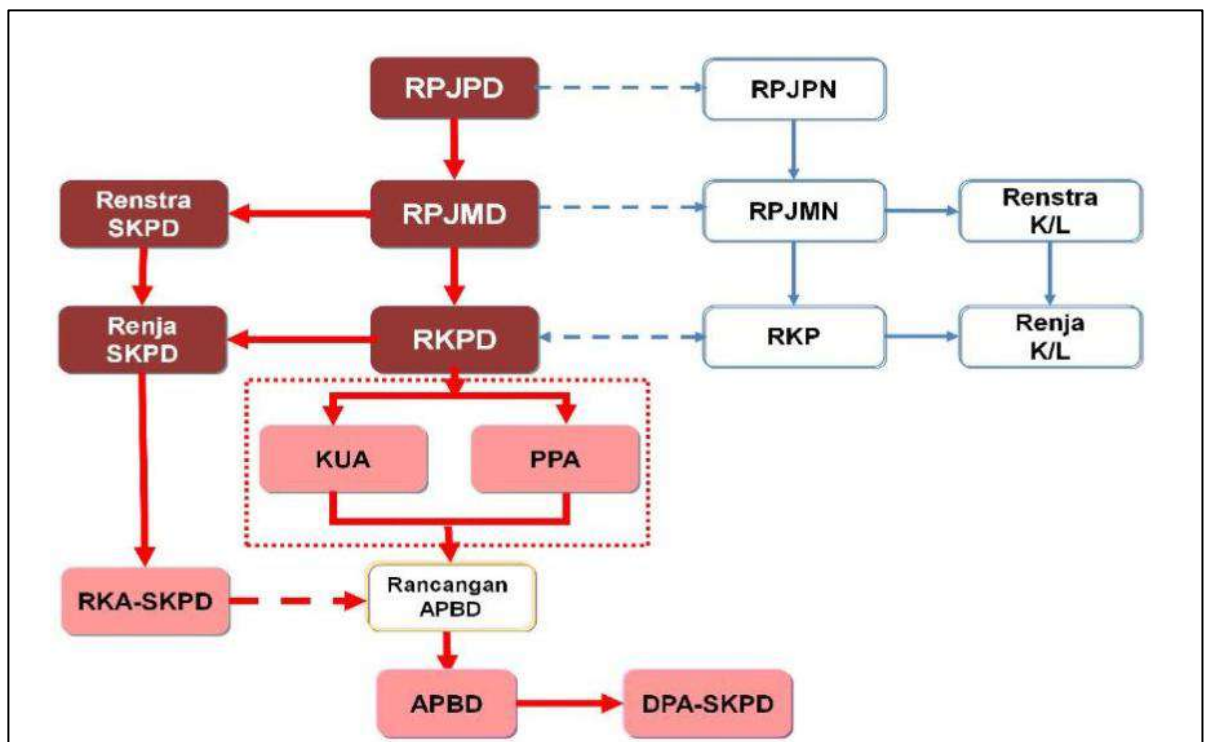
Nilai strategis RKPD Kabupaten Serang terletak pada fungsinya sebagai dokumen operasional tahunan yang menjembatani RPJMD dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Selain itu, RKPD juga menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS).

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, RKPD tahun 2027 ini

perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya; tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam 8 (delapan) misi pembangunan yang disebut Asta Cita sebagai mana tertuang dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Banten Tahun 2027, RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045, serta RPJMD tahun 2025-2029. Selain itu, juga memperhatikan hasil evaluasi pembangunan Tahun 2025.

Pentingnya RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 maupun RKPD Provinsi Banten Tahun 2027 adalah untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung akselerasi pertumbuhan melalui produktivitas, investasi, dan industri melalui sinergi dan sinkronisasi perencanaan program kerja tahunan, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai dengan dukungan dan peranserta pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

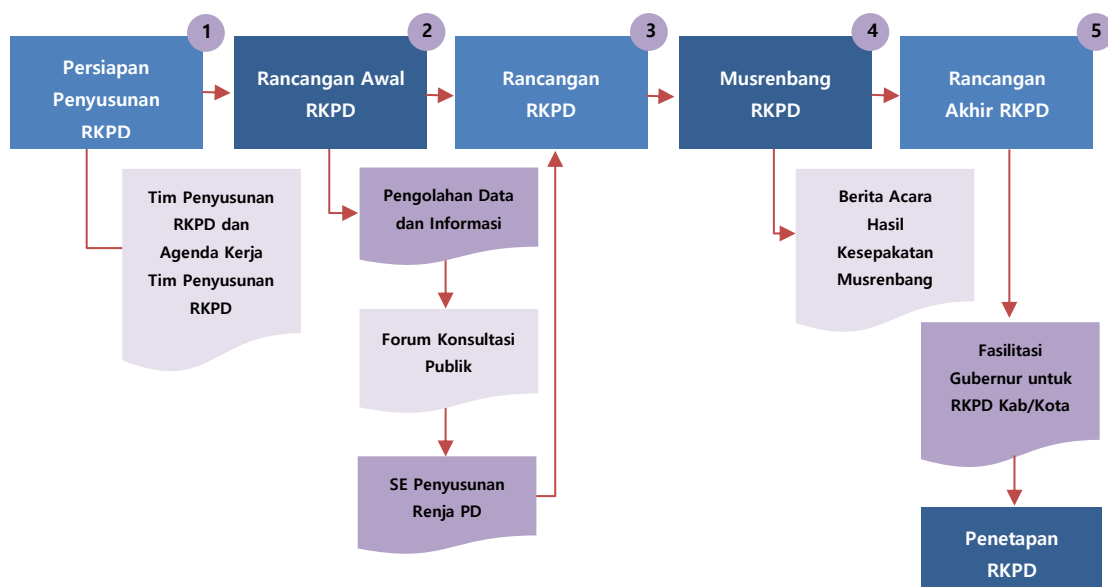


Secara lebih teknis, terkait tahapan, proses maupun tata cara penyusunan RKPD telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Alur proses penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027, secara lengkap meliputi :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. Penyusunan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan RKPD

Untuk lebih jelasnya, proses penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 disajikan pada **Gambar 1.2**.

Gambar 1. 2 Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut :

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
- 6 Undang-undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 20 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027.
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
- 22 Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 100.2.4/3207/SJ, Nomor: 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 No.4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
- 25 Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2027;
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 82);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 117);
 - 28 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031;
 - 29 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 - 30 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 No.8).
 - 31 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 disusun dengan maksud menetapkan rencana kerja, arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Adapun tujuannya adalah :

- 1 Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027;
- 2 Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027;
- 3 Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten Serang dengan provinsi, dan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Permendagri Nomor 14 tahun 2026, sistematika penulisan dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan RPJMD dan RKPD tahun n-2 perencanaan, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis, meliputi:

- a. Kondisi Umum Daerah menggambarkan kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah pelayanan umum dan pelayanan umum;
- b. Evaluasi pelaksanaan RPJMD dan RKPD terhitung sampai dengan tahun 2023 mencakup capaian indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah;
- c. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah dan permasalahan urusan;
- d. penyelenggaraan daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2025 dan target indikator tahun 2027;
- e. Isu strategis yang dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta isu strategis.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kerangka ekonomi daerah, kapasitas keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Kabupaten Serang dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan

nasional dan Provinsi Banten.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2027 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2027, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Nasional, dan Provinsi Banten.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2027.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat dan menjelaskan kaidah pelaksanaan umum dan pengorganisasian pelaksanaan agenda pembangunan di Kabupaten Serang pada Tahun 2027

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Serang

Gambaran umum wilayah akan menguraikan kondisi geografis, kondisi sosio demografi, kondisi sosio ekonomi, kondisi infrastruktur dan potensi pengembangan wilayah

2.1.1 Kondisi Geografis Wilayah

2.1.1.1 Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten, yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Lokasi Kabupaten Serang cukup strategis karena dilalui jalan tol Jakarta - Merak maupun jalur (rel) kereta api yang merupakan akses utama pulau Jawa dan pulau Sumatera melalui Pelabuhan penyeberangan Merak. Selain itu, wilayah perairan barat Kabupaten Serang (Selat Sunda) merupakan jalur alur pelayaran internasional (ALKI I) yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia.

Secara geografis Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5°50' – 6°21' Lintang Selatan dan 105° 0' – 106° 22' Bujur Timur. Dengan luas wilayah Kabupaten Serang yaitu seluas 1.471,543 km² atau 147.154,3 hektar

Secara administratif, wilayah Kabupaten Serang terbagi menjadi 29 Kecamatan dan 326 Desa, dengan batas wilayah administrasi meliputi:

- Sebelah Utara : Kota Serang, Kota Cilegon, dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Tangerang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
- Sebelah Barat : Kota Cilegon

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa
1	Cinangka	123,09	7
2	Padarincang	97,63	14
3	Ciomas	56,61	11
4	Pabuaran	40,07	8
5	Gunungsari	53,44	7
6	Baros	36,07	14
7	Petir	49,22	15
8	Tunjung Teja	42,40	9

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Desa
9	Cikeusal	56,28	17
10	Pamarayan	45,02	10
11	Bandung	25,79	8
12	Jawilan	44,95	9
13	Kopo	36,51	10
14	Cikande	49,05	13
15	Kibin	30,58	9
16	Kragilan	38,05	12
17	Waringinkurung	46,32	11
18	Mancak	97,94	14
19	Anyar	67,90	8
20	Bojonegara	37,34	9
21	Pulo Ampel	46,12	9
22	Kramatwatu	56,14	15
23	Ciruas	33,62	15
24	Pontang	60,28	11
25	Lebakwangi	34,74	10
26	Carenang	29,07	8
27	Binuang	28,72	7
28	Tirtayasa	60,99	14
29	Tanara	47,58	9
Jumlah		1.471,54	326

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2026, BPS, 2026

2.1.1.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lahan

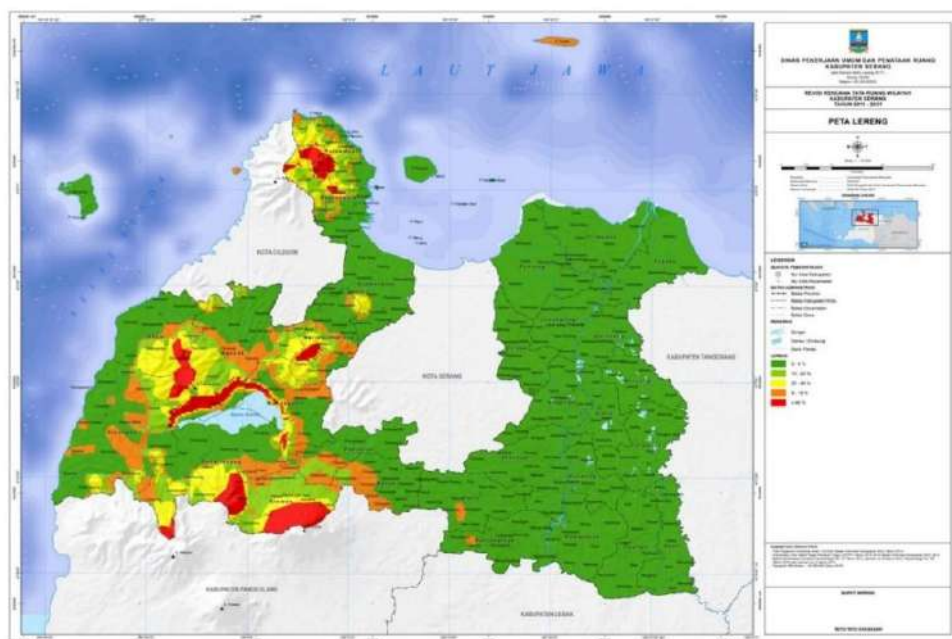
Secara topografi wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian antara 0 - 240 m dari permukaan laut (mdpl) dengan ketinggian wilayah tertinggi di Kecamatan Gunungsari dan terendah tersebar pada wilayah kecamatan yang berada pada kawasan pesisir yang meliputi Kecamatan Cinangka, Anyar, Pulo Ampel, Bojonegara, Kramatwatu, Pontang, Tirtayasa dan Tanara (sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka Tahun 2026, BPS, 2026).

Satuan dataran rendah tersebar di seluruh wilayah dengan penyebaran paling besar di pantai utara dan sebaran terbatas di pantai barat serta sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Ciujung dan Cidurian. Secara administrasi penyebaran dataran rendah ini meliputi wilayah kecamatan Tirtayasa, Pontang, Carenang, Ciruas, dan Kramatwatu. Sedangkan Kecamatan Cikeusal, Pamarayan, Kragilan,

Anyar, Cinangka, Serang hanya sebagian wilayahnya yang termasuk dalam satuan dataran rendah. Penyebaran wilayah perbukitan berada di wilayah bagian barat yang menyebar dari utara ke selatan dengan ketinggian sekitar 100 m. Sedangkan satuan pegunungan menempati bagian selatan dan ujung utara sebelah barat.

Kemiringan tanah (lereng) selain mempengaruhi bentuk wilayah, juga akan mempengaruhi tinggi perkembangan erosi. Jika dilihat dari kelas lerengnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Serang merupakan wilayah dengan kelas lereng 0-2% dengan luas wilayah sebesar 87.511,14 ha atau lebih dari 59% luas total wilayah Kabupaten Serang.

Gambar 2. 1 Peta Kelas Lereng Kabupaten Serang



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2026

2.1.1.3 Kondisi Iklim dan Curah Hujan

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data yang tersedia selama 10 tahun terakhir sesuai metoda klasifikasi iklim oleh Schmidt-Fergusson, di wilayah Kabupaten Serang secara umum termasuk dalam klasifikasi beriklim C (agak basah). Namun jika dipilah lebih spesifik secara kewilayahan kemungkinan di Kabupaten Serang mempunyai iklim yang tidak sama/seragam, karena semakin ke arah hulu (pegunungan/selatan) curah hujan dan jumlah hari hujan agaknya semakin tinggi dan lebih sering dibandingkan dengan wilayah bagian utara dan barat yang berada pada kawasan pesisir karena jumlah curah hujan dan hari hujan cenderung semakin rendah dan jarang.

Jumlah hari hujan di Kabupaten Serang menunjukkan kenaikan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2025, meskipun pada tahun 2023 menunjukkan penurunan jumlah hari hujan. Jumlah total hari hujan terbanyak terjadi pada tahun 2025 dengan jumlah sebesar 239 hari atau sekitar 65,48% dalam setahun, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari 2025.

Sementara itu jika dilihat dari jumlah hari hujan minimum terjadi pada Bulan September dan Oktober 2023 dengan jumlah hari hujan sebesar 3 hari, dan jumlah hari hujan maksimum terjadi pada Bulan Januari 2025 sebanyak 28 hari.

Tabel 2. 2 Jumlah Hari Hujan Di Kabupaten Serang (Hari) Tahun 2021 – 2025

Bulan	Jumlah Hari Hujan (hari)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	24	24	27	25	28
Februari	24	23	24	22	19
Maret	25	21	18	25	23
April	17	20	12	21	21
Mei	14	24	24	24	18
Juni	21	22	22	14	20
Juli	10	11	9	10	13
Agustus	13	13	8	8	17
September	18	16	3	12	13
Oktober	12	19	3	9	21
November	26	21	14	20	19
Desember	25	21	12	27	27
Jumlah Total	229	235	176	217	239
Rata-Rata (hari/bulan)	19	20	15	18	20

Sumber : Kabupaten Serang Dalam Angka 2022-2026 (diolah)

Berdasarkan data curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang pada tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan jumlah curah hujan terbesar terjadi pada tahun 2024 dengan curah hujan sebesar 2.212,6 mm dengan rata-rata curah hujan perbulan sebesar 184,4 mm. Bulan Januari 2025 merupakan bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu sebesar 522,4 mm dan dengan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus dan Oktober 2024. Dalam data curah hujan tersebut terlihat bahwa curah hujan tinggi secara umum terdapat pada bulan November – Maret,

hal ini dapat memberikan gambaran untuk prediksi prakiraan banjir dan antisipasinya.

Tabel 2. 3 Curah Hujan di Kabupaten Serang (mm) Tahun 2021 – 2025

Bulan	Curah Hujan (mm/bulan)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	198,7	109,1	148,7	368,5	522,4
Februari	283,2	121	310,9	197,3	225,5
Maret	120,4	289	276,5	310,5	212,2
April	234	184,5	130,1	163,7	173,1
Mei	49,9	191,6	69,1	305,1	153,0
Juni	127,6	114,6	151,3	129,5	171,1
Juli	45,3	43,1	89	59,3	83,9
Agustus	31,3	101,1	0	6,9	176,8
September	207,9	56,6	0,5	72,2	31,8
Oktober	90,5	200,4	0	98,1	79,6
November	209,2	156,7	138,2	168,7	111,9
Desember	235,7	152,5	77,8	332,8	409,1
Jumlah Total	1.833,7	1.720,2	1.392,1	2.212,6	2.026,3
Rata-Rata	152,8	143,4	116,0	184,4	168,9

Sumber : Kabupaten Serang Dalam Angka 2022-2026 (diolah)

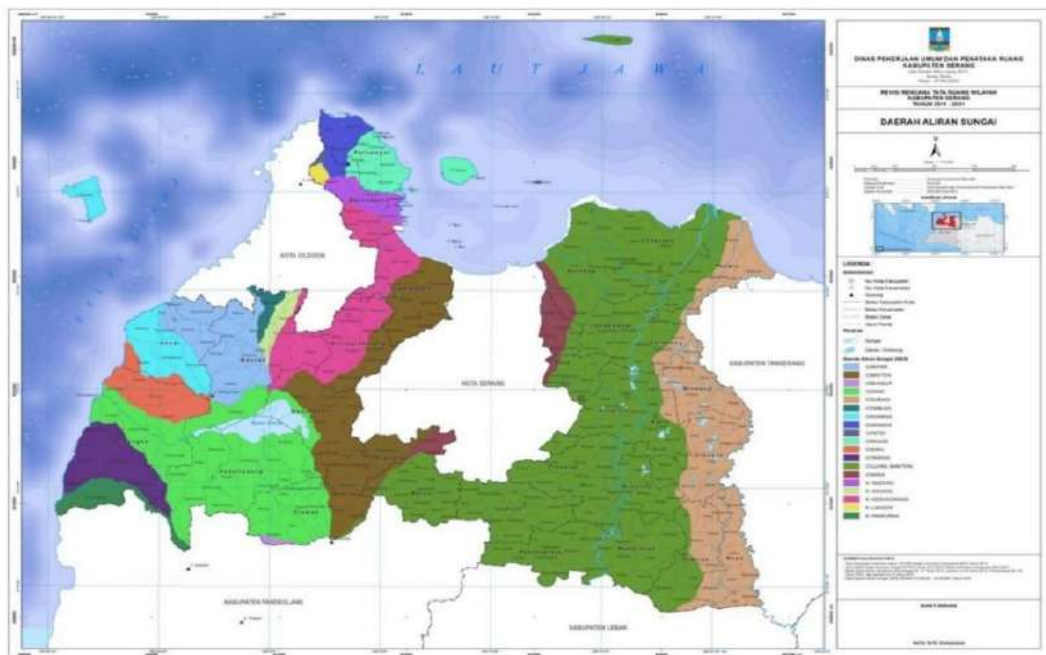
2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Di Kabupaten Serang hanya ada SWS Ciujung-Ciliman, yang terdiri dari DAS-DAS Cidurian, Ciujung, dan Cibanten. Sungai yang besar adalah Cidurian dan Ciujung. Sungai Cidurian berhulu di Kabupaten Tangerang. Sebagian besar sungai mengalir ke arah utara menuju Laut Jawa. DAS Cidanau mengalir ke barat (Selat Sunda). Di sebelah selatannya terdapat DAS Ciliman dimana terdapat dua arah pengaliran, yakni pada umumnya ke utara menuju Laut Jawa atau Teluk Banten, dan sebagian ke barat menuju Selat Sunda.

Ditinjau dari fisiografi dan morfologi permukaan tanahnya, sebagian besar (sekitar 35%) bagian utara Kabupaten Serang merupakan hilir tata air permukaan yang mengarah ke Laut Jawa bagian barat daya, khususnya ke Teluk Banten. Dari 35% tersebut, sekitar 25% merupakan daerah perbukitan sangat rendah atau mengalami pendataran sangat aktif (penneplainisasi) dan 10% berupa dataran pesisir. Aliran air permukaan yang besar terutama berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian dan DAS Ciujung. Sekitar 50% merupakan perbukitan daerah hulu

terutama di bagian selatan dan sedikit di utara-barat laut, yaitu Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel. Sisanya sekitar 14% merupakan wilayah perbukitan yang mengarahkan aliran air permukaannya ke arah barat di Selat Sunda terutama dari DAS Ciliman dengan dataran pesisir hilirnya di sebelah barat yang sangat sempit (1%).

Gambar 2. 2 Peta Daerah Aliran Sungai



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2023

Gambar 2. 3 Peta Sumber Daya Air



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2023

- **Air Permukaan dan Penyebarannya**

Seperti telah disebutkan, Kabupaten Serang dilalui oleh 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian yang keduanya mengalir ke arah utara dan bermuara di Laut Jawa. Selain itu juga terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Cidanau dan Sungai Anyar serta beberapa sungai kecil lainnya yang bermuara di Selat Sunda.

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di daerah ini yang sumber mata airnya berasal dari Gunung Halimun. Sungai Ciujung sebagian airnya telah dimanfaatkan untuk keperluan irigasi yang dialirkan melalui bendungan. Sedangkan Sungai Cidurian terletak di bagian timur yang sekaligus membatasi Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang.

Sungai Cidanau mengalir dari lereng Gunung Karang melalui beberapa anak sungai yang masuk ke Rawa Danau dan membentuk pola aliran rectanguler. Sungai ini mengalir ke arah barat dan bermuara di Selat Sunda. Air Sungai Cidanau telah dimanfaatkan oleh PT Krakatau Steel yang dialirkan dan ditampung di Waduk Krenceng dengan mendapat tambahan air dari Sungai Krenceng dan Sungai Cadas Gantung.

Sungai Cibanten yang mengalir melalui Kota Serang sumber airnya berasal dari Gunung Karang, Gunung Payung, dan Gunung Kupak. Sebagian besar berasal dari mata air yang cukup dan membentuk spring belt pada kaki Gunung Karang. Sungai ini mengalir ke arah utara dan bermuara di Teluk Banten. Sungai ini berpola dendritik dan tidak pernah kering.

- **Air Tanah dan Penyebarannya**

Kondisi air tanah di Kabupaten Serang umumnya dangkal, yaitu antara 0,5 m – 7 m dari permukaan tanah dan cenderung mengikuti pola permukaan tanah. Air tanah di Kabupaten Serang tersedia dalam jumlah yang relatif cukup dan terdapat dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

- 1) Akuifer menerus dalam bentuk sarang, termasuk air tanah dalam kondisi tertekan dan setengah tertekan;
- 2) Akuifer tidak menerus dalam batuan berkekar, misalnya kekar dalam lava;
- 3) Kombinasi akuifer menerus dan tidak menerus.

Pada umumnya air tanah bebas di daerah dataran mempunyai kedalaman antara 0,5 m – 3,0 m; sedangkan di daerah perbukitan kedalamannya ± 15 m. Penyebaran sumber air tanah ini terdapat di bagian tenggara dimana air tanah membentuk mata air di lereng Gunung Karang.

Tabel 2. 4 Kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Serang

CAT		LINGKUP WILAYAH			Litologi Akuifer	Jumlah Air Tanah (Juta m ³ /Th)	
No.	Nama	Luas (km ²)	Kab/Kota	Provinsi		Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)
1.	Rawadanau	375	Kab. Serang & Kab. Pandeglang.	Banten	- Endapan Rawadanau, terutama pasir dan kerikil. - Tuf Banten Atas, terdiri atas tuf batu apung, batu pasir tufan, tuf hablur, dan tuf kaca. - Tuf Banten Bawah, terdiri atas tuf breksi, tuf batu apung, tuf lapili, dan tuf pasiran. - Batuan gunung api G. Karang, terdiri atas breksi, lava, tuf, dan lahar. - Batuan gunung api Danau tua, terdiri atas lava andesit-basal, breksi gunung api, dan tuf.	180	13
2.	Serang-Tangerang	2.822	Kota Serang; Kab. Serang; Kota Cilegon; Kab. Lebak; Kab. Pandeglang; Kota Tangerang; Kab. Tangerang; Kab. Bogor.	Banten & Jabar	- Endapan pematang pantai, terdiri atas pasir halus-kasar. - Endapan sungai, terdiri atas pasir, kerikil, dan kerakal. - Endapan kipas gunung api, terdiri atas pasir, kerikil, dan kerakal. - Tuf Banten, terdiri atas tuf, tuf batu apung, dan batu pasir tufan. - Batuan gunung api G. Gede dan G. Karang, terdiri atas lava, breksi, dan lahar. - Foramsi (F.) Bojong, terutama disusun oleh batu pasir tufan.	1.075	18

Sumber : Peta Cekungan Air Tanah P. Jawa dan P. Madura, Badan Geologi, 2023

2.1.1.5 Kondisi Geologi

Secara umum, diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Serang terdiri dari batuan api dengan endapan permukaan yang sebagian besar berada di pantai utara dan bagian timur Kabupaten Serang. Jenis batuan dan struktur geologi tersebut dibagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

a. Batuan Gunung Api

Batuan Gunung Api terbagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu: Kelompok Batuan Vulkanik yang Relatif Keras. Kelompok-kelompok batuan ini adalah Breksi dan Lava Danau, Breksi dan Lava Gunung Aseupan, Lava Gunung Parakasak, Breksi dan Lava Gunung Karang. Kelompok Batuan Vulkanik yang Relatif Kurang Keras. Batuan ini merupakan hasil aliran fluvio-vulkanik, jatuhnya bom dan abu vulkanik. Kelompok batuan ini adalah Tufa Danau. Tufa Danau sebagian besar merupakan

hasil jatuhan abu vulkanik yang jauh dari pusat erupsinya diduga berada di Rawa Danau.

b. Batuan Terobosan

Batuan terobosan memiliki batuan yang sangat keras dibanding dengan batuan sekitarnya. Sebagian besar terdapat di Gunung Pinang. Jenis batuan terobosan Gunung Pinang berpola hampir membulat, lereng curam hingga miring dengan bagian timurnya lebih curam dan pola alirannya radial. Jenis batuan yang ada adalah bassalt berwarna kelabu kehitaman hingga hitam, halus, tekstur diabasik, bagian luarnya berongga (veskuler).

c. Endapan Permukaan

Endapan permukaan merupakan endapan aluvial sungai yang terdiri dari bongkahan, kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur. Endapan ini penyebarannya luas terutama di timur daerah ini, di lembah aliran Sungai Ciujung dan Cidurian. Pada lembah kedua sungai besar ini, endapan ini terdiri dari rombakan batuan sedimen yang berasal dari hulu (di selatan) daerah ini. Di bagian timur hingga timur laut daerah terdapat endapan rawa pada daerah-daerah cekungan morfologi landai hingga datar yang memiliki air permukaan buruk dan pada daerah akumulasi limpasan banjir. Endapan ini terdiri dari pasir halus, lanau, lempung, lumpur organik dan gambut, sedangkan endapan rawa yang terdapat di Danau Rawa.

d. Struktur Geologi

Struktur geologi ini merupakan struktur sesar yang memiliki ciri penampakan berupa kelurusan lembah dan sungai, kelurusan gawir sesar, ketidak-menerusan batuan vulkanik serta pola paralel dan rectanguler sungai. Kondisi dan struktur geologi memiliki pengaruh tidak langsung pada pemanfaatan lahan.

Jenis tanah di Kabupaten Serang sebagian besar berjenis Aluvial, dengan luas sebarannya kurang lebih 107.851,50 ha atau 73,50% dari luas wilayah Kabupaten Serang. Tanah Aluvial merupakan tanah endapan, dibentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah.

Tanah aluvial ini merupakan tanah yang baik dan dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan palawija) musiman hingga tahunan. Selain tanah alluvial, Kabupaten Serang juga memiliki jenis tanah lain seperti latosol, mediteran dan regosol.

Gambar 2. 4 Peta Jenis Tanah dan Luas Sebarannya di Kabupaten Serang

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2023

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Sesuai dengan data penggunaan lahan tahun 2022, penggunaan lahan di Kabupaten Serang di dominasi oleh lahan non terbangun seluas 126.121,21 ha atau 85,65% luas kabupaten serang. Kawasan non terbangun ini berupa hutan, lahan pertanian maupun lahan yang tidak digunakan seperti tanah kosong, semak belukar dan padang rumput. Sedangkan luas lahan kawasan terbangun pada tahun 2022 adalah seluas 21.131,40 ha atau 14,35% dari luas wilayah Kabupaten Serang. Kawasan terbangun ini dipergunakan untuk hunian dan industri.

Penggunaan lahan non terbangun sebagian besar penggunaan lahannya berupa sawah dengan padi terus menerus seluas 51.162,80 Ha atau sekitar 34,74% luas Kabupaten Serang. Lahan sawah ini tersebar di hampir semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Dominasi lahan terbesar kedua pada kawasan non terbangun adalah lahan hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi seluas 44.030,49 ha atau sekitar 29,9%. Hutan lahan tinggi ini juga tersebar hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Serang. Penggunaan lahan lainnya yang cukup besar di kawasan non terbangun adalah berupa semak belukar seluas 11.099,71 ha atau sekitar 7,54% dari luas wilayah Kabupaten Serang. Lahan semak belukar ini terletak di bagian selatan yaitu di sekitar Kecamatan Mancak, Gunungsari, Padarindang dan Ciomas.

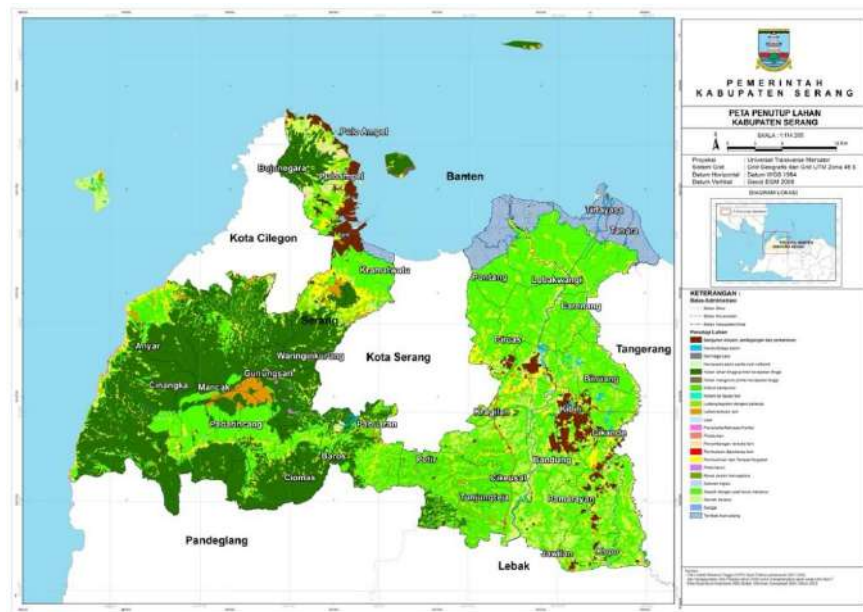
Pada lahan terbangun teridentifikasi lahan yang mendominasi adalah permukiman dan tempat kegiatan yaitu seluas 14.490,81 ha atau sekitar 9,84%. Sedangkan kegiatan dengan bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran menempati lahan seluas 5.344,27 ha atau sekitar 3,63% yang tersebar di sekitar koridor Kragilan-Kibin-Cikande dan disekitar Bojonegara. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah ini.

Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Di Kabupaten Serang Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
A.	Lahan Non Terbangun	126.121,21	85,65
1	Danau/ telaga alami	497,19	0,34
2	Dermaga Laut	24,79	0,02
3	Hamparan pasir pantai non-vulkanik	18,68	0,01
4	Hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi	44.030,49	29,90
5	Hutan mangrove primer kerapatan tinggi	193,37	0,13
6	Kebun campuran	7.669,59	5,21
7	Kolam air tawar lain	110,44	0,07
8	Ladang/tegalan dengan palawija	515,52	0,35
9	Lahan terbuka lain	2.584,67	1,76
10	Laut	0,47	0,00003
11	Rawa pesisir bervegetasi	22,43	0,02
12	Saluran irigasi	47,51	0,03
13	Sawah dengan padi terus menerus	51.162,80	34,74
14	Semak belukar	11.099,71	7,54
15	Sungai	759,64	0,52
16	Tambak ikan/udang	7.383,91	5,01
B.	Lahan Terbangun	21.131,40	14,35
17	Bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran	5.344,27	3,63
18	Pariwisata/Rekreasi pantai	123,22	0,08
19	Pelabuhan	0,73	0,00005
20	Penambangan terbuka lain	702,67	0,48
21	Permukaan diperkeras lain	216,76	0,15
22	Permukiman dan tempat kegiatan	14.490,81	9,84
23	Peternakan	252,94	0,17
Jumlah Total (A + B)		147.252,61	100,00

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2024

Gambar 2. 5 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2022



Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2024

2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana

Kondisi geologi di Selat Sunda sangat mempengaruhi sifat geologi dan geofisika Provinsi Banten secara umum maupun Kabupaten Serang secara khusus. Beberapa potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Serang antara lain:

➤ Banjir

Kawasan rawan banjir umumnya adalah daerah di sepanjang tepi Sungai Ciujung bagian hulu bahkan hingga bagian hilir di daerah muara Sungai Ciujung dengan anak-anak sungainya. Dalam setiap tahunnya Sungai Ciujung ini menyebabkan banjir di daerah muara sungai di Kecamatan Tirtayasa dan kecamatan Pontang, bahkan di beberapa kecamatan yang masih termasuk dalam DAS Ciujung. Beberapa kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cikande, Kecamatan Carenang, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Petir, dan Kecamatan Padarincang. Penyebab banjir lainnya adalah terjadinya sedimentasi/pendangkalan pada sungai-sungai tersebut, sehingga menyebabkan sumbatan. Hal ini lebih terlihat di wilayah muara Sungai Ciujung.

Terjadinya dampak bencana hidrometeorologi ekstrem dan dampak bangkitan aktivitas masyarakat pada beberapa kawasan strategis di wilayah Kabupaten Serang membutuhkan penanganan dalam bentuk program dan kegiatan yang terinternalisasi dengan program prioritas pemerintah daerah.

➤ **Gunung Api**

Potensi bencana gunung meletus yang ada di wilayah Kabupaten Serang berasal dari Gunung Anak Krakatau yang berada di Kawasan Selat Sunda. Wilayah yang potensial terkena dampak letusan gunung ini berada di wilayah pesisir barat Kabupaten Serang yaitu kawasan Anyar dan Cinangka. Selain itu terdapat pula kawasan rawan bencana disekitar Gunung Karang di wilayah Serang bagian Selatan.

➤ **Tanah Longsor**

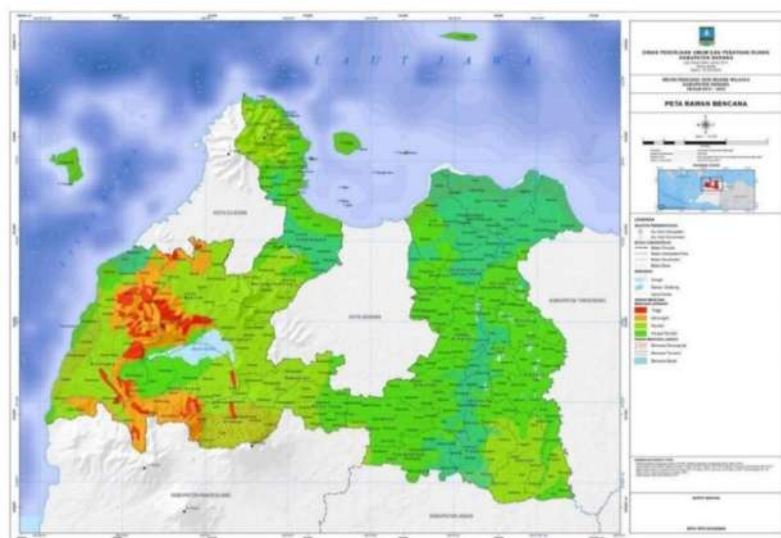
Beberapa kawasan yang rawan terkena bencana tanah longsor antara lain adalah di bagian selatan Kabupaten Serang yang berada di kawasan Gunung Karang yang meliputi Kecamatan Padarincang, Ciomas, Pabuaran, Gunung Sari dan Baros. Selain itu juga dibeberapa kawasan lainnya yaitu di Kecamatan Waringin Kurung, Bojonegara dan Pulo Ampel.

➤ **Gempa Bumi**

Potensi bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Serang secara umum dapat diakibatkan karena adanya aktivitas vulkanik (Gunung Anak Krakatau) maupun pergerakan lempeng tektonik. Seluruh wilayah Kabupaten Serang merupakan daerah yang potensial terkena dampak gempa bumi, terutama adalah wilayah pesisir Barat Kabupaten Serang (Kawasan pesisir Selat Sunda).

➤ **Tsunami**

Kawasan yang berpotensi terkena dampak bencana Tsunami adalah dikawasan Pesisir Kabupaten Serang yang terletak di Kawasan Pantai Barat yaitu sepanjang Pesisir Pantai Anyar sampai Cinangka, kedua daerah ini merupakan daerah dengan potensi terkena tsunami tertinggi karena terletak pada Kawasan Selat Sunda yang merupakan daerah patahan serta Gunung Anak Krakatau. Wilayah pesisir lain yang rawan terkena bencana tsunami adalah kawasan pesisir Utara yang berada di Laut Jawa atau Teluk Banten, walaupun tingkat kerawanannya tidak sebesar wilayah pesisir Barat. Wilayah ini meliputi kawasan Pulo Ampel, Bojonegara, Pontang, Tirtayasa dan Tanara.

Gambar 2. 6 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Serang

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2023

2.1.2 Demografi

Aspek demografi Kabupaten Serang menunjukkan dinamika pertumbuhan jumlah penduduk dan kelompok umur yang berpengaruh pada kebutuhan pelayanan dasar, perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Serang Tahun 2025 mencapai 1.871.330 jiwa yang terdiri dari 971.975 jiwa laki-laki dan 899.355 jiwa perempuan. Jumlah ini terus mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alami penduduk dan mobilitas penduduk. Sebaran penduduk di Kabupaten Serang selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Serang Tahun 2025

No	Wilayah	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kramatwatu	57,505	53,546	111,051
2	Waringinkurung	29,383	27,426	56,809
3	Bojonegara	29,141	27,185	56,326
4	Pulo Ampel	22,446	21,269	43,715
5	Ciruas	47,483	44,573	92,056
6	Kragilan	47,854	45,114	92,968
7	Pontang	27,594	25,976	53,570
8	Tirtayasa	28,348	26,462	54,810
9	Tanara	26,079	24,423	50,502
10	Cikande	65,030	60,850	125,880
11	Kibin	34,935	33,240	68,175

No	Wilayah	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
12	Carenang	23,492	22,192	45,684
13	Binuang	19,272	18,134	37,406
14	Petir	37,960	34,442	72,402
15	Tunjung Teja	28,404	26,088	54,492
16	Baros	36,804	33,040	69,844
17	Cikeusal	45,788	43,093	88,881
18	Pamarayan	36,758	33,202	69,960
19	Kopo	33,302	29,684	62,986
20	Jawilan	36,908	33,421	70,329
21	Ciomas	26,959	24,175	51,134
22	Pabuaran	27,265	24,777	52,042
23	Padarincang	43,192	39,552	82,744
24	Anyar	34,031	31,667	65,698
25	Cinangka	35,921	32,933	68,854
26	Mancak	29,514	26,308	55,822
27	Gunungsari	14,630	13,212	27,842
28	Bandung	22,984	21,532	44,516
29	Lebak Wangi	22,993	21,839	44,832
	JUMLAH	971,975	899,355	1,871,330

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Serang Tahun 2025 (data diolah)

Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi menunjukkan masih kuatnya konsentrasi aktivitas ekonomi dan urbanisasi di wilayah di Kecamatan Cikande dan Kramatwatu kondisi ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar, penyediaan infrastruktur permukiman, lapangan pekerjaan, transportasi serta pengendalian kawasan. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih besar dibanding perempuan. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya aktivitas industri dan urbanisasi pada wilayah Kabupaten Serang.

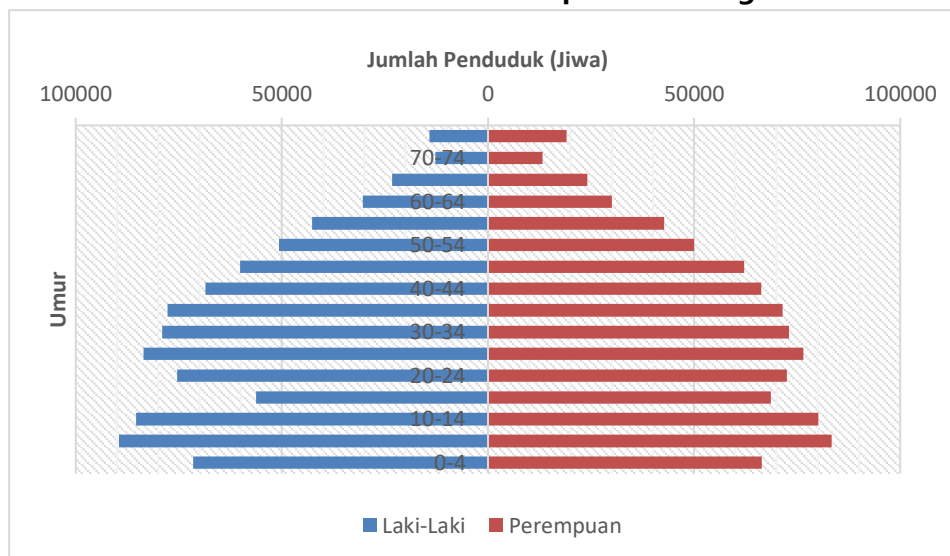
Penduduk sebagai sektor utama dalam pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam dalam penentuan kebijakan.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Serang Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase (%)
0-4	71.473	66.373	137.846	7,57
5-9	89.518	83.367	172.885	9,50
10-14	85.319	80.079	165.398	9,09
15-19	56.252	68.565	124.817	6,86
20-24	75.419	72.441	147.860	8,12
25-29	83.605	76.441	160.046	8,79
30-34	79.073	73.070	152.143	8,36
35-39	77.705	71.452	149.157	8,19
40-44	68.569	66.317	134.886	7,41
45-49	60.142	62.094	122.236	6,71
50-54	50.662	50.021	100.683	5,53
55-59	42.642	42.778	85.420	4,69
60-64	30.354	30.005	60.359	3,32
65-69	23.266	24.084	47.350	2,60
70-74	12.762	13.233	25.995	1,43
75+	14.249	19.035	33.284	1,83
Jumlah	921.010	899.355	1.820.365	100

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Serang Semester II Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel diatas, komposisi penduduk Kabupaten Serang pada Tahun 2025 menurut kelompok umur, menunjukkan bahwa jumlah penduduk tertinggi ada pada kelompok umur 5–9 tahun yaitu sebanyak 172.885 jiwa (9,50%), diikuti kelompok umur 10–14 tahun sebanyak 165.398 jiwa (9,09%) dan paling rendah ada pada kelompok penduduk usia 70-74 tahun yaitu sebanyak 25.995 (1,43%). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Serang didominasi oleh kelompok usia anak dan usia produktif awal. Berdasarkan analisis BKKBN dan data statistik terkait, penduduk Kabupaten Serang didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun).

Grafik 2. 1 Piramida Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2025

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Serang Tahun 2025 (diolah)

Struktur piramida penduduk Kabupaten Serang berdasarkan tabel diatas terlihat Kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi struktur penduduk dengan proporsi yang cukup besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Serang memasuki masa bonus demografi, dimana proporsi angkatan kerja sangat besar dan potensial untuk mendukung pembangunan daerah apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan salah satu indikator kependudukan yang penting, karena dapat menggambarkan dampak dari keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang. Semakin besar angkanya, menunjukkan semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun), dalam membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas). Sebaliknya bila semakin kecil, beban yang ditanggung menjadi lebih ringan.

Tabel 2. 8 Komposisi Penduduk Kabupaten Serang Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2021-2025

Tahun	Komposisi Penduduk (Persen)			Angka Beban Ketergantungan
	0-14 Tahun	15-64 tahun	65 Tahun ke Atas	
2021	25,57	69,96	4,47	42,95
2022	25,40	69,86	4,74	43,14
2023	25,24	69,75	5,01	43,38
2024	25,07	69,63	5,30	43,62
2025	26,16	67,99	5,86	47,10

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Serang Tahun 2026

Komposisi penduduk Kabupaten Serang terlihat didominasi oleh penduduk usia produktif. Namun, persentasenya terus menurun hingga menjadi 67,99 persen pada tahun 2025. Walaupun menurun dari tahun ke tahun, Kabupaten Serang tetap memiliki penduduk usia produktif yang cukup banyak dan sangat potensial untuk digunakan sebagai modal dasar dalam pembangunan.

Sementara itu, persentase penduduk usia 0-14 tahun dapat dikatakan cukup tinggi walaupun besarannya terus menurun. Penurunan tersebut dapat menjadi penanda atas keberhasilan upaya pengendalian kelahiran yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun meningkatnya persentase penduduk usia 65 tahun ke atas, menjadi salah satu bukti adanya perbaikan dalam bidang kesehatan sehingga penduduk dapat hidup lebih lama.

Adanya perubahan komposisi penduduk, jelas sangat mempengaruhi besarnya angka beban ketergantungan. Pada tahun 2025, angka beban ketergantungan Kabupaten Serang sebesar 47,10. Berarti, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung antara 47 orang penduduk usia yang belum atau tidak produktif lagi. Terlihat bahwa beban yang ditanggung mengalami kenaikan. Melihat besaran angka beban ketergantungan yang kurang dari 50 ini, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Serang masih mengalami bonus demografi (demographic dividend). Bahkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk, bonus demografi sudah diraih sejak tahun 2010. Bonus demografi tersebut juga masih akan dinikmati, setidaknya hingga tahun 2030. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan. Hal ini karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi penduduk usia muda sudah semakin kecil dan proporsi penduduk usia lanjut masih belum banyak. Bonus demografi mulai dinikmati bila angka beban ketergantungan terus mengalami penurunan hingga menjadi di bawah 50.

Walaupun sudah lama meraihnya, namun bonus demografi belum tentu bermanfaat bagi Kabupaten Serang. Untuk benar-benar bisa menikmatinya, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Serang harus terus-menerus ditingkatkan. Selain itu, ketersediaan lapangan kerja juga harus ditambah, agar dapat menampung banyaknya penduduk usia produktif.

Setelah bonus demografi, penuaan penduduk (ageing population) sepertinya akan menjadi isu penting pada masa-masa mendatang. Penuaan penduduk adalah suatu fenomena demografi yang akan terjadi ketika umur median penduduk meningkat akibat naiknya angka harapan hidup dan atau menurunnya tingkat

fertilitas. Penuaan penduduk salah satunya dapat diukur melalui proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas. Disebut mengalami penuaan, apabila persentasenya sudah di atas 7 persen.

Kabupaten Serang diproyeksikan akan mulai memasuki era penuaan penduduk antara tahun 2030 sampai 2045. Hal ini berdampak pada keharusan pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung dan peningkatan cakupan jaminan hari tua bagi penduduk lanjut usia. Meskipun demikian, bila bonus demografi benar-benar berhasil dimanfaatkan Kabupaten Serang akan mengalami bonus demografi kedua. Bonus demografi kedua ini adalah suatu kondisi saat proporsi penduduk yang berusia tua semakin banyak namun masih produktif, sehingga tetap mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian.

2.1.3 Kondisi Ekonomi Wilayah

2.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) menggambarkan pergeseran dan struktur ekonomi serta menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

PDRB Kabupaten Serang pada tahun 2025 sebesar 108,865 triliun rupiah. Berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serang menurut lapangan usaha Tahun 2021–2025, struktur perekonomian Kabupaten Serang masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan. Kontribusi sektor ini menunjukkan kecenderungan meningkat dari 45,76 persen pada tahun 2021 menjadi 46,69 persen pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun menjadi 46,44 persen pada tahun 2025. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi Kabupaten Serang dan mencerminkan karakteristik wilayah sebagai salah satu kawasan industri utama di Provinsi Banten.

Sektor dengan kontribusi terbesar kedua adalah Konstruksi, yang memberikan kontribusi antara 11,75–12,28 persen selama periode 2021–2025. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 12,28 persen, kontribusi sektor ini cenderung menurun hingga 11,75 persen pada tahun 2024, kemudian sedikit meningkat menjadi 11,78 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan fisik dan infrastruktur tetap menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Selanjutnya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memiliki peran penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Serang. Kontribusinya mengalami penurunan dari 9,80 persen pada tahun 2021 menjadi 9,37 persen pada tahun 2024, namun kembali meningkat menjadi 9,82 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya penguatan kembali sektor primer yang didukung oleh meningkatnya aktivitas produksi pertanian dan perikanan.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan penyumbang PDRB terbesar berikutnya dengan kontribusi relatif stabil pada kisaran 8,81–9,12 persen. Meskipun sempat mencapai 9,12 persen pada tahun 2023, kontribusinya sedikit menurun menjadi 8,81 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan perdagangan dibandingkan sektor lainnya. Sektor Real Estat memberikan kontribusi yang relatif stabil pada kisaran 4,84–4,96 persen, sedangkan sektor Transportasi dan Pergudangan menunjukkan tren meningkat dari 4,00 persen pada tahun 2021 menjadi 4,39 persen pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan meningkatnya mobilitas barang dan jasa seiring berkembangnya kegiatan industri dan perdagangan di Kabupaten Serang.

Pada kelompok sektor jasa, kontribusi Jasa Pendidikan mengalami peningkatan dari 3,39 persen pada tahun 2022 menjadi 3,55 persen pada tahun 2025, sedangkan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib relatif stabil pada kisaran 2,18–2,34 persen. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga menunjukkan peningkatan bertahap dari 2,25 persen pada tahun 2021 menjadi 2,37 persen pada tahun 2024 dan 2025, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara

itu, beberapa sektor memiliki kontribusi relatif kecil terhadap PDRB Kabupaten Serang, antara lain Jasa Keuangan dan Asuransi (2,43–3,05 persen), Informasi dan Komunikasi (0,81–0,85 persen), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,62–0,66 persen), Jasa Perusahaan (0,22–0,24 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (0,27–0,33 persen), Pertambangan dan Penggalian (0,10–0,11 persen), serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang secara konsisten berkontribusi sebesar 0,03 persen. Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Serang selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa perekonomian masih bertumpu pada sektor sekunder, khususnya industri pengolahan dan konstruksi, dengan dukungan sektor primer berupa pertanian serta sektor tersier seperti perdagangan, transportasi, real estat, dan jasa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi ekonomi Kabupaten Serang tetap didominasi oleh kegiatan industri, namun sektor pertanian dan jasa masih memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi daerah. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Serang tahun 2021 s.d 2025 disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 9 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 -2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,80	9,72	9,47	9,37	9,82
B	Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
C	Industri Pengolahan	45,76	45,75	46,17	46,69	46,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	0,33	0,30	0,29	0,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	12,01	12,28	11,97	11,75	11,8
G	Pedagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepedah Motor	9,02	9,08	9,12	8,94	8,81
H	Transportasi dan Pergudangan	4,00	4,17	4,36	4,31	4,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,25	2,26	2,29	2,37	2,37
J	Informasi dan Komunikasi	0,85	0,83	0,83	0,81	0,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,88	3,05	2,85	2,65	2,43
L	Real Estat	4,96	4,91	4,92	4,84	4,88
M, N	Jasa Perusahaan	0,23	0,22	0,23	0,24	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,34	2,22	2,18	2,31	2,33
P	Jasa Pendidikan	3,70	3,39	3,41	3,51	3,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,64	0,62	0,64	0,66	0,63
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,08	1,05	1,12	1,12	1,11
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021-2025 serta distribusi persentase PDRB ADHB terhadap Provinsi Banten disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 10 PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2021-2025**

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten					
Pandeglang	29.869,92	32.075,99	34.017,44	35.904,68	38.754,23
Lebak	30.830,20	33.474,00	35.570,36	37.631,48	40.576,64
Tangerang	145.283,68	160.164,84	173.301,26	186.104,15	199.839,37
Serang	80.231,26	87.982,20	95.079,21	102.120,37	108.865,89
Kota					
Tangerang	150.156,86	182.401,21	206.597,62	224.790,81	242.163,10
Cilegon	110.495,00	120.765,57	129.531,56	137.989,30	148.562,63
Serang	33.503,98	36.723,31	39.837,92	42.988,41	45.960,61
Tangerang Selatan	88.065,80	96.135,92	104.386,99	112.213,99	119.858,70
Provinsi Banten	665.870,30	747.220,84	814.122,03	873.626,25	936.203,98

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

**Tabel 2. 11 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2021-2025**

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024*	2025*
Kabupaten					
Pandeglang	4,47	4,28	4,16	4,08	4,10
Lebak	4,61	4,46	4,35	4,28	4,30
Tangerang	21,73	21,36	21,18	21,15	21,16
Serang	12,06	11,74	11,62	11,61	11,53
Kota					
Tangerang	22,46	24,33	25,25	25,55	25,64
Cilegon	16,53	16,11	15,83	15,69	15,73
Serang	5,01	4,90	4,87	4,89	4,87
Tangerang Selatan	13,17	12,82	12,76	12,76	12,69
Provinsi Banten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2026

Berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Banten Tahun 2021–2025, kontribusi terbesar berasal dari Kota Tangerang, yang meningkat dari 22,46 persen pada tahun 2021 menjadi 25,64 persen pada tahun 2025. Selanjutnya, Kabupaten Tangerang memberikan kontribusi yang relatif stabil pada kisaran 21 persen, diikuti Kota Cilegon sekitar 15,73–16,53 persen.

Kabupaten Serang menempati urutan ketiga sebagai penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Banten dengan kontribusi sebesar 12,06 persen pada tahun 2021 dan menurun

secara bertahap menjadi 11,53 persen pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan proporsi, Kabupaten Serang tetap menjadi salah satu daerah penopang utama perekonomian Provinsi Banten melalui sektor industri pengolahan, konstruksi, pertanian, dan perdagangan. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang memberikan kontribusi yang relatif stabil dengan pangsa masing-masing di bawah 13 persen selama periode 2021–2025. Secara umum, struktur perekonomian Provinsi Banten masih didominasi oleh wilayah Tangerang Raya, sedangkan Kabupaten Serang tetap memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

2.1.3.2 PDRB per Kapita

Kesejahteraan masyarakat secara ekonomi juga dapat digambarkan dengan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan semakin baik. Perhitungan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.

PDRB per-kapita Kabupaten Serang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Serang rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 2. 12 PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Serang Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	80.231,26	87.982,20	95.079,21	102.120,37	108.865,89
- ADHK 2010	54.844,65	57.605,99	60.370,96	63.255,33	66.523,75
PDRB perkapita (Juta Rp)					
- ADHB	48,92	52,96	56,52	60,01	63,28
- ADHK 2010	33,44	34,67	35,89	37,17	38,67
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	2,37	3,69	3,50	3,57	4,03
Jumlah penduduk (orang)	1.640.115	1.661.374	1.682.133	1.701.830	1.720.321
Pertumbuhan	1,08	1,30	1,25	1,17	

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan data makro ekonomi Kabupaten Serang periode tahun 2021 hingga 2025, daerah ini menunjukkan performa ekonomi yang tumbuh positif secara konsisten, diiringi dengan kendali pertumbuhan penduduk yang stabil. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB): Pada tahun 2021, nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp80.231,26 Miliar. Nilai ini terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp102.120,37 Miliar pada tahun 2024, dan diproyeksikan/tercatat menyentuh Rp108.865,89 Miliar pada tahun 2025. Kenaikan yang konsisten ini mencerminkan adanya perluasan skala ekonomi di Kabupaten Serang. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010): Guna melihat pertumbuhan ekonomi yang riil (tanpa pengaruh inflasi), nilai PDRB ADHK 2010 juga menunjukkan pergerakan positif. Pada tahun 2021, PDRB ADHK berada di angka Rp54.844,65 Miliar dan terus meningkat secara gradual setiap tahun hingga mencapai Rp66.523,75 Miliar pada tahun 2025. Laju pertumbuhan ekonomi per kapita secara riil bergerak fluktuatif namun cenderung menguat. Setelah tumbuh sebesar 2,37% pada tahun 2021, pertumbuhan sempat menguat ke angka 3,69% (2022), sedikit melandai di angka 3,50% (2023) dan 3,57% (2024), sebelum akhirnya melonjak signifikan mencapai 4,03% pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa laju penciptaan kue ekonomi per kapita berjalan lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 13 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Daerah Berbatasan dengan Kabupaten Serang Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	PDRB per kapita (juta rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Pandeglang	23,25	24,70	25,91	27,08	28,95
Kab. Lebak	22,01	23,62	24,81	25,97	27,72
Kab. Tangerang	44,30	48,22	51,54	54,73	58,175
Kabupaten Serang	48,92	52,96	56,52	60,01	63,28
Kota Tangerang	78,53	94,43	105,92	114,46	122,82
Kota Cilegon	251,42	271,35	287,52	302,86	322,68
Kota Serang	47,80	51,55	55,04	58,50	61,64
Kota Tangerang Selatan	64,50	69,73	75,01	80,18	85,48

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2025

Catatan: *) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

2.1.4 Kondisi Fasilitas / Infrastruktur Wilayah

Kabupaten Serang sebagai daerah perindustrian, perdagangan dan jasa yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Serang dilalui oleh jalan raya negara Jakarta-Merak dan juga dilayani oleh kereta api Jakarta-Merak. Sehingga menjadikan Kabupaten Serang jalur utama penghubung lintas Jawa-Sumatera. Kabupaten Serang memiliki prasarana transportasi yang cukup lengkap. Kabupaten Serang dilalui oleh jaringan tol Jakarta – Merak dan Jaringan Tol Serang – Panimbang. Kabupaten Serang memiliki memiliki 4 (empat) stasiun kereta api. Sistem Jaringan Jalan Nasional yang ada di Kabupaten Serang ada sebanyak 5 ruas, yaitu Jalan BTS. Kota Serang - BTS. Kab. Serang/Tangerang, Jalan Cikande – Rangkasbitung, Jalan BTS. Kota Cilegon - BTS. Kota Serang, BTS. Kabupaten Serang - BTS. Kabupaten Pandeglang dan BTS. Kota Cilegon – Pasauran.

Adapun sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Serang terdapat sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) ruas jalan yang tersebar di seluruh kecamatan. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Serang seluruhnya adalah 1004,39 km. Dari keseluruhan panjang jalan tersebut dapat dibedakan sesuai dengan tingkat kewenangan pemerintah, dan kondisi permukaan jalan, sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini merupakan jalan kewenangan kabupaten. Sementara itu, berdasarkan kondisi jalan terlihat bahwa sebagian besar jaringan jalan di Kabupaten Serang dalam kondisi baik.

Tabel 2. 14 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Serang (km) Tahun 2021-2025

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2021	2022	2023	2024	2025
Negara	103	103	103	103	103
Provinsi	183	856,993	856,993	856,993	856,993
Kabupaten	610,33	610,33	1.004,39	1.004,39	1.004,39
Jumlah	896,33	896,33	1.290,39	1.290,39	1.290,39

Sumber : DPUPR Kabupaten Serang Tahun 2025

Tabel 2. 15 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Serang (km)

Kondisi Pemerintahan	2021	2022	2023	2024	2025
Baik	576,55	773,86	614,27	676,18	872,65
Sedang	9,00	48,92	5,88	5,88	25,16
Rusak Ringan	8,72	75,92	280,00	258,46	55,81
Rusak Berat	6,86	120,64	104,23	63,87	50,77
Jumlah	610,33	1.019,34	1.004,39	1.004,39	1.004,39

Sumber : DPUPR Kabupaten Serang Tahun 2025

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Daerah

2.2.1 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Indikator ini juga merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran tugas dan fungsi. Capaian Indikator Kinerja Utama mengindikasikan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD untuk setiap misi kepala daerah.

Tabel 2. 16 Capaian IKU Misi I RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Ket	Bidang Urusan
				Target	Realisasi	Capaian		
	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul. Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan							
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,28	73,83	74,1	100,37	Tercapai	
	Skor Kemampuan Literasi SD	%	51,96	54,46	47,11	86,50	Tidak tercapai	Urusan Pendidikan
	Skor Kemampuan Numerasi SD	%	46,90	49,8	41,72	83,78	Tidak tercapai	Urusan Pendidikan
	Skor Kemampuan Literasi SMP	%	60,70	61,8	64,97	105,13	Tercapai	Urusan Pendidikan
	Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	56,63	58,13	58,85	101,24	Tercapai	Urusan Pendidikan
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	13,48	13,02	96,59	Tidak tercapai	Urusan Pendidikan
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,88	7,89	8,03	101,77	Terccapai	Urusan Pendidikan
	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,91	74,8	75,39	100,79	Tercapai	Urusan Kesehatan
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	95,04	95	93,64	98,57	Tidak tercapai	Urusan Kesehatan
	Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	%	≥ 91,44	≥93	98,93	106,38	Tercapai	Urusan Kesehatan
	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	%	69,08	69	60,42	87,57	Tidak tercapai	Urusan Kesehatan
	Indeks	Angka	59,37	59,42	61,2	103,00	Tercapai	Urusan

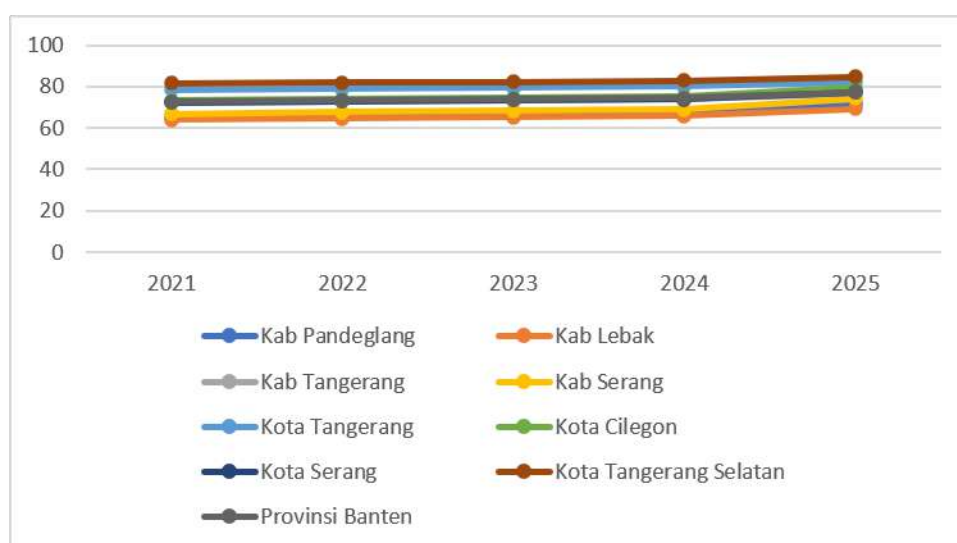
No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Ket	Bidang Urusan
				Target	Realisasi	Capaian		
	Pembangunan Keluarga (iBangga)							Pengendalian Penduduk dan KB
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		57,04	57,04	57,04	100,00	Tercapai	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Indeks Partisipasi Olahraga		0,255	0,256	0,255	99,61	Tidak tercapai	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	54,30	54,3	3,52	6,48	Tidak tercapai	Urusan Perpustakaan
	Tingkat Kemiskinan	%	4,51	4.00-4.08	4,48	90,20	Tidak tercapai	
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	57,17	57,67	57,17	99,13	Tidak tercapai	Urusan Sosial
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,54	92,72	93,75	101,11	Tercapai	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,531	0,518	0,531	97,49	Tidak tercapai	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62,23	62,97	62,23	98,82	Tidak tercapai	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	3,92	5,52	5,52	100,00	Tercapai	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	7,53	10,16	13,1	128,94	Tercapai	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase unit rumah di dalam perumahan yang terfasilitasi Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum	%	61	62,72	62,65	99,89	Tidak tercapai	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Lingkup pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu pembangunan sektor kesehatan untuk mewujudkan umur panjang dan sehat, pembangunan sektor pendidikan untuk mewujudkan kualitas pendidikan, dan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi pembangunan kesehatan menggunakan Umur Harapan Hidup (UHH) dan untuk dimensi pembangunan pendidikan, digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Untuk mengukur dimensi pembangunan ekonomi digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per-kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Nilai IPM yang semakin tinggi dapat mengindikasikan pembangunan manusia yang semakin baik.

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Nilai IPM Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2021-2025

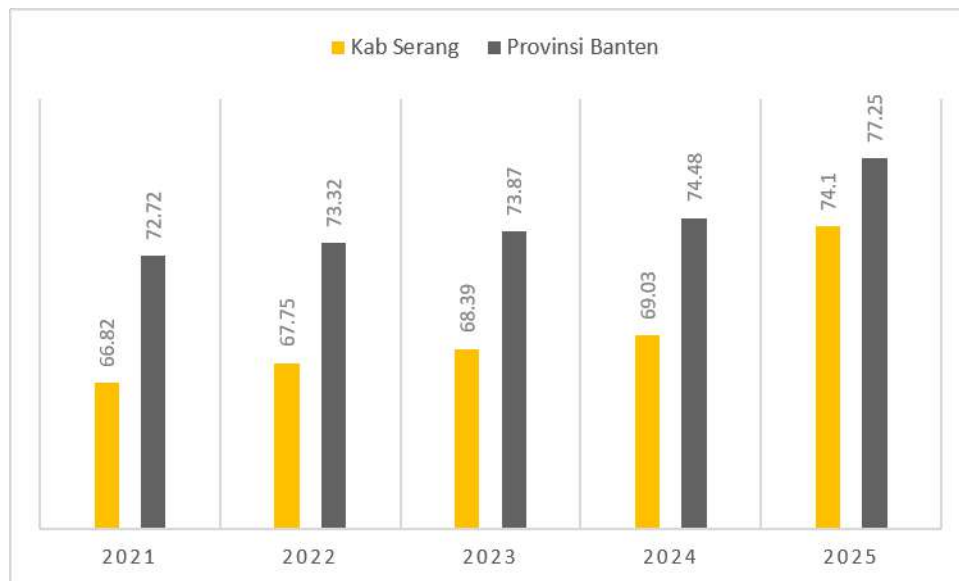


Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan data statistik sektoral

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat di seluruh wilayah. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Kabupaten Serang mengalami kenaikan IPM dari 66,82 pada tahun 2021 menjadi 74,10 pada tahun 2025. Tren serupa juga terjadi di kabupaten lain seperti Pandeglang dan Lebak, meskipun nilainya masih relatif lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan.

Secara umum, peningkatan IPM yang merata di seluruh kabupaten/kota menunjukkan adanya kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Banten. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara wilayah kabupaten dan kota yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan. Upaya pembangunan di Kabupaten Serang berjalan ke arah yang positif, namun tetap diperlukan peningkatan yang lebih optimal untuk memperkecil kesenjangan dengan capaian di tingkat provinsi.

Grafik 2. 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan data statistik sektoral

Pada tahun 2025, capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten menunjukkan variasi yang cukup beragam. Dari 8 kabupaten/kota, Kabupaten Serang berada pada posisi ketiga terbawah, namun masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Peningkatan IPM Kabupaten Serang pada tahun 2025 didorong oleh perbaikan pada seluruh dimensi pembentuknya, terutama pada standar hidup layak dan pendidikan. Hal ini tercermin dari percepatan pertumbuhan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar 3,95 persen serta peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan pada dimensi kesehatan dan pendidikan tertentu mengalami perlambatan. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir meningkat dengan laju yang lebih rendah, dari 0,54 persen pada tahun 2023 menjadi 0,39 persen pada tahun 2024. Demikian pula, pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) melambat cukup signifikan dari 0,63 persen menjadi 0,08 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan manusia terus mengalami kemajuan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menjaga konsistensi peningkatan di seluruh dimensi secara lebih merata. Capaian

nilai IPM tentu saja menjadi target bagi setiap daerah dalam mengukuhkan wilayahnya lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Serang di masa mendatang dalam rangka terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perbandingan perkembangan IPM kabupaten Serang dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 17 IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 - 2025

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kabupaten Pandeglang	65.17	69.70	70.28	70.88	71.84	2.47
Kabupaten Lebak	64.03	67.19	67.68	68.33	69.24	1.97
Kabupaten Tangerang	72.29	75.15	75.56	76.19	76.74	1.51
Kabupaten Serang	71.05	71.99	72.63	73.28	74.10	1.05
Kota Tangerang	78.50	80.44	80.98	81.53	82.41	1.23
Kota Cilegon	73.35	77.68	78.24	78.83	79.54	2.04
Kota Serang	72.44	76.01	76.43	76.90	77.50	1.71
Kota Tangerang Selatan	81.60	83.28	83.57	84.16	84.81	0.97
Provinsi Banten	74.68	75.25	75.77	76.35	77.25	0.85

Sumber : BPS Provinsi Banten 2026

Terlihat pada tabel diatas, rata-rata pertumbuhan IPM dari tahun 2021 s/d 2025, paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Pandeglang (2.47) disusul Kota Cilegon (2.04) dan Kabupaten Lebak (1,97). Kabupaten Serang (1.05) hanya lebih baik dari Provinsi Banten (0.85). Sedangkan untuk capaian IPM tahun 2025, Kabupaten Serang (74.10) lebih baik dari Kabupaten Pandeglang (71.84) dan Kabupaten Lebak yang hanya mencapai 69.24.

Tabel 2. 18 Rata-Rata Pertumbuhan IPM Kabupaten Serang dengan Realisasi Nasional Tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Indonesia	72.29	72.91	74.39	75.02	75.10	0,96
Provinsi Banten	74.68	75.25	75.77	76.35	77.25	0,85
Kabupaten Serang	71.05	71.99	72.63	73.28	74.10	1,06

Sumber : BPS Kab Serang Tahun 2026

Jika mengacu pada laju pertumbuhan sebagaimana disajikan pada tabel diatas, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Serang melampaui laju pertumbuhan Provinsi dan Nasional.

Andil terbesar terhadap peningkatan IPM Kabupaten Serang selama periode 2021–2025 berasal dari komponen pengeluaran per kapita yang menunjukkan kenaikan konsisten dari 10.713 ribu rupiah pada tahun 2021 menjadi 12.065 ribu rupiah pada tahun 2025. Selain itu, komponen pendidikan juga mengalami peningkatan, dimana Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik dari 7,51 tahun 2021 menjadi 8,03 pada tahun 2025, serta Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 12,58 tahun 2021 menjadi 13,02 pada tahun 2025. Pada dimensi kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 73,81 pada tahun 2021 menjadi 75,39 tahun pada tahun 2025.

Seiring dengan peningkatan pada seluruh komponen tersebut, IPM Kabupaten Serang turut mengalami kenaikan dari 71,05 pada tahun 2021 menjadi 74,10 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan daya beli masyarakat, akses terhadap pendidikan, serta kualitas kesehatan secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPM ke depan perlu terus difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan agar pertumbuhan IPM dapat berlangsung lebih optimal dan merata.

Tabel 2. 19 Karakteristik IPM di Kabupaten Serang tahun 2021-2025

Komponen IPM Kabupaten Serang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)				
	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,81	74,22	74,62	74,91	75,39
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,58	12,78	12,86	12,87	13,02
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,51	7,78	7,79	7,88	8,03
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	10.713,00	10.916,00	11.320,00	11.767,00	12.065,00
IPM	71,05	71,99	72,63	73,28	74,1

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan data statistik sektoral

Apabila dilihat dari IPM Banten pada seluruh wilayah kabupaten/kota, dengan IPM tertinggi tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (84,81) pada tahun 2025, sedangkan Kabupaten Serang menempati urutan ke-6 dari 8 Kabupaten/kota, sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 20 Indikator Pembentuk IPM Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2025**

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (ribu rupiah/tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Kab Pandeglang	13,74	9.574	7,16	70,88	76,74
Kab Lebak	12,11	9.631	6,61	68,33	69,24
Kab Tangerang	12,88	13.254	9,06	76,19	74,74
Kab Serang	12,87	11.767	7,88	73,28	74,10
Kota Tangerang	13,90	15.641	11,14	81,53	82,41
Kota Cilegon	13,23	14.294	10,39	78,83	79,54
Kota Serang	12,83	14.603	8,93	76,90	77,50
Kota Tangerang Selatan	14,70	17.208	11,86	84,16	84,81
Provinsi Banten	13,10	13.097	9,23	76,35	77,25

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Serang s.d tahun 2025 masih dibawah Kota Cilegon dan Kota Serang dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

2.2.1.2 Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi SD serta SMP

Permasalahan urusan pendidikan sebagai berikut: Belum berhasil menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan angka rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 7,88 tahun atau hanya pada tingkatan SMP kelas 7 meskipun harapan lama sekolah (HLS) mencapai 12,87 atau pada tingkatan SMA kelas 12, dan untuk mutu pendidikan dapat di ukur melalui indikator Kemampuan literasi dan numerasi jenjang SD dan SMP dapat dilihat dari realisasi indikator setiap tahunnya belum bisa mecapai target namun terdapat ekskalasi di setiap tahunnya. Hal ini menunjukan terdapat upaya Dinas Pendidikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan. Berikut tabel capaian Literasi dan numerasi Pendidikan berdasarkan hasil rapor Pendidikan.

Tabel 2. 21 Capaian Literasi dan Numerasi Tahun 2025

No	Indikator	Tahun							
		2022		2023		2024		2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Skor Kemampuan Literasi SD	40,58	45,38	47,65	52,95	49,92	51,96	54,46	47,11
2	Skor Kemampuan Numerasi SD	n/a	34,67	36,60	43,22	37,44	46,90	49,80	41,72
3	Skor Kemampuan Literasi SMP	55,26	56,17	58,98	57,47	61,79	60,7	61,80	64,97
4	Skor Kemampuan Numerasi SMP	n/a	56,17	58,42	53,33	58,42	56,63	58,13	58,85

Sumber : Rapor Pendidikan

Skor Kemampuan Literasi di Sekolah Dasar (SD) adalah kemampuan dasar membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan menyimak. Lebih jauh, literasi juga mencakup kecakapan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengolah informasi. iterasi SMP adalah kecakapan siswa dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Di tingkat Sekolah Menengah Pertama, literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi mencakup enam literasi dasar: baca-tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan. Skor Literasi SD pada tahun 2025 mencapai 47,11% dari target 54,46%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan diantaranya masih rendahnya semangat siswa untuk gemar membaca, kurangnya ketersediaan buku-buku bacaan baik secara manual maupun digital. Sedangkan untuk skor literasi SMP pada tahun 2025 mencapai 64,97% dari target 61,80%, terdapat ketercapaian target yang ditentukan.

Numerasi adalah kecakapan menggunakan angka, simbol, dan konsep matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dari mata pelajaran matematika konvensional yang berfokus pada teori atau rumus, numerasi menekankan pada penalaran dan aplikasi praktis. Skor Numerasi SD pada tahun 2025 mencapai 41,72% dari target 49,806%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan oleh metode pengajaran yang monoton/pasif, kurangnya konteks dunia nyata dalam

pembelajaran, lemahnya kemampuan literasi dasar (kesulitan memahami instruksi soal), serta minimnya pembiasaan soal penalaran analitis sejak dini. Sedangkan untuk skor literasi SMP pada tahun 2025 mencapai 58,85% dari target 58,13%, terdapat ketercapaian target yang ditentukan.

2.2.1.3 Harapan Lama Sekolah

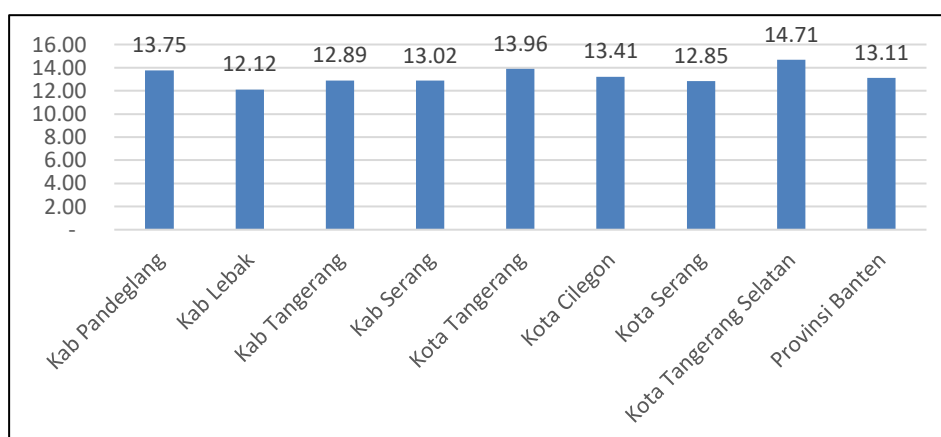
Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke atas, HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Kabupaten Serang dalam kurun waktu tahun 2021-2025 terus meningkat dari sebesar 12,58 (tahun 2021) menjadi 13,02 (tahun 2025). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 22 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2025

Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten					
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab Pandeglang	13.49	13.72	13.73	13.74	13.75
Kab Lebak	11.98	12.09	12.1	12.11	12.12
Kab Tangerang	12.84	12.85	12.87	12.88	12.89
Kab Serang	12.58	12.78	12.86	12.87	13.02
Kota Tangerang	13.87	13.88	13.89	13.9	13.96
Kota Cilegon	13.18	13.2	13.21	13.23	13.41
Kota Serang	12.79	12.81	12.82	12.83	12.85
Kota Tangerang Selatan	14.66	14.67	14.68	14.7	14.71
Provinsi Banten	13.02	13.05	13.09	13.1	13.11

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, HLS Kabupaten Serang pada Tahun 2025 (13,02) dibawah Provinsi Banten (13,11), Kabupaten Serang berada pada posisi ke 7 (tujuh) diatas Kota Serang (12,85) dan Lebak (12,12). Kedepan perlu ada upaya untuk meningkatkan HLS di Kabupaten Serang, agar setara dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 2. 4 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Tabel 2. 23 Rata-rata Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Serang Tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Indonesia	13.08	13.1	13.15	13.21	13,30	0,42
Provinsi Banten	13.02	13.05	13.09	13.1	13,11	0,17
Kabupaten Serang	12.58	12.78	12.86	12.87	13,48	1,74

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

Jika mengacu pada laju pertumbuhan sebagaimana disajikan pada tabel diatas, laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Serang berada diatas laju pertumbuhan Provinsi sebesar (0,17%) dan Nasional (0,42%) dengan rata-rata pertumbuhan Kabupaten Serang pada Tahun 2021-2025 sebesar (1,74%).

2.2.1.4 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Serang mengalami tren positif yaitu dengan adanya peningkatan setiap tahun walaupun relatif rendah. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk di Kabupaten Serang baru mampu mencapai kelas 2 SMP atau putus sekolah pada kelas 3 SMP. Saat ini Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun dan melaksanakan program kegiatan berorientasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan akses layanan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan RLS. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Serang dalam kurun waktu tahun 2021-2025 terus meningkat dari sebesar 7,51 (tahun 2021) menjadi 8,03 (tahun 2025). Berikut Tabel

Capaian Rata-rata Lama Sekolah selengkapnya dapat dilihat pada:

**Tabel 2. 24 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Serang
Dalam Kurun Waktu Tahun 2021-2025**

Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten					
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab Pandeglang	7,11	7,13	7,15	7,16	7,50
Kab Lebak	6,41	6,59	6,60	6,61	6,78
Kab Tangerang	8,93	8,92	8,93	9,06	9,16
Kab Serang	7,51	7,73	7,79	7,88	8,03
Kota Tangerang	10,83	10,84	10,91	11,14	11,46
Kota Cilegon	10,08	10,34	10,38	10,39	10,40
Kota Serang	8,89	8,90	8,91	8,93	8,94
Kota Tangerang Selatan	11,82	11,84	11,85	11,86	12,10
Provinsi Banten	8,93	9,13	9,15	9,23	9,56

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun dan melaksanakan program kegiatan berorientasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan akses layanan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan RLS, dan salah satunya yaitu Penanganan Anak Tidak Sekolah. Terkait Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Serang saat ini sudah mempunyai SK Perceptan Penangan Anak Tidak Sekolah dengan Nomor :400.3.1/Kep.376-Huk.Disdikbud/2026 tentang Pembentukan Tim Gerakan Bahagia Bersekolah lagi.

Sedangkan Peraturan Bupati terkait Penanganan Anak Tidak Sekolah sedang diproses oleh bagian hukum, dan Rencana Aksi Daerah (RAD ATS) masih dalam proses, dan sedang berlangsung kegiatan penyesuaian verifikasi data antara data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai dasar Data Anak Tidak Sekolah Kabupaten Serang yang akan tertuang ke dalam Rencana Aksi Daerah. Rencana untuk Tahun 2026 akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 25.136 orang, Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 22.606 orang dan berhasil mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke Sekolah sebanyak 2.530 orang, kemudian pada bulan Mei Tahun 2026 tercatat sebanyak 16.441 orang dan sudah mengembalikan Anak Tidak Sekolah sebanyak 6.165 orang.

Adapun Data Up Date ATS Per-Kecamatan Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 25 ATS Per-Kecamatan Tahun Ajaran 2025/2026

No	Kecamatan	Jumlah BPB													Jumlah LTM*		Total
			SD						SMP			SMA			SD	SMP	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6	9	
1	Kec. Cinangka	465	0	2	0	5	4	11	8	11	47	38	41	7	74	64	777
2	Kec. Padarincang	638	1	3	5	2	15	20	11	25	33	45	44	5	73	105	1025
3	Kec. Ciomas	423	3	0	3	3	4	8	3	11	27	20	23	5	10	76	619
4	Kec. Pabuaran	203	1	1	4	7	2	11	10	8	30	11	23	5	102	91	509
5	Kec. Baros	519	4	4	9	5	8	8	3	7	30	38	30	6	108	76	855
6	Kec. Petir	327	0	3	1	4	1	11	2	9	36	19	30	7	51	76	577
7	Kec. Cikeusal	372	2	2	2	2	12	4	10	13	32	25	44	38	98	104	760
8	Kec. Pamarayan	341	1	15	4	4	4	11	12	31	60	25	96	7	43	247	901
9	Kec. Jawilan	407	1	5	4	3	6	12	4	26	76	45	42	12	50	173	866
10	Kec. Kopo	338	2	3	3	5	8	13	6	20	43	46	56	45	51	154	793
11	Kec. Cikande	507	2	4	1	2	5	16	8	15	55	38	47	10	33	72	815
12	Kec. Kragilan	338	0	1	1	1	1	25	5	8	22	21	37	17	19	72	568
13	Kec. Waringinkurung	128	1	1	0	2	2	9	5	7	36	13	17	5	18	57	301
14	Kec. Mancak	266	4	2	3	5	5	6	3	14	39	26	39	6	89	99	606
15	Kec. Anyar	303	3	2	3	3	2	16	2	6	33	40	33	4	50	81	581
16	Kec. Bojonegara	210	1	0	1	2	2	10	2	6	6	10	21	5	26	64	366
17	Kec. Kramatwatu	398	2	1	5	5	10	24	7	8	53	24	30	14	61	77	719
18	Kec. Ciruas	369	2	11	10	6	13	16	8	16	42	18	21	9	64	93	698
19	Kec. Pontang	209	3	0	3	2	3	14	13	11	40	41	70	10	12	110	541
20	Kec. Carenang	205	0	2	2	0	4	4	3	3	13	27	14	16	8	7	308
21	Kec. Tirtayasa	224	3	2	1	0	0	7	7	18	28	19	15	7	25	47	403
22	Kec. Tunjung Teja	206	1	2	0	1	0	13	5	7	31	12	39	7	30	97	451
23	Kec. Kibin	226	0	0	0	2	9	9	10	11	29	39	22	9	7	24	397
24	Kec. Pulo Ampel	110	0	0	0	4	1	3	1	3	27	9	24	3	20	74	279
25	Kec. Binuang	189	4	2	2	1	6	6	1	4	26	13	18	6	21	21	320
26	Kec. Tanara	237	3	1	1	0	0	4	10	6	22	15	27	18	13	45	402
27	Kec. Gunung Sari	126	1	1	1	0	1	4	3	14	23	18	56	4	7	19	278
28	Kec. Bandung	213	0	0	0	0	3	2	11	7	20	23	35	8	12	32	366
29	Kec. Lebak Wangi	223	0	0	0	0	0	9	11	11	18	13	17	9	5	44	360
Jumlah		8,720	45	70	69	76	131	306	184	336	977	731	1,011	304	1,180	2,301	16,441

Sumber : Verval ATS Pusdatin Kemendikdasmen Tahun 2025

Strategi yang dilakukan untuk mengurangi angka anak tidak sekolah diantaranya melalui kegiatan koordinasi berupa verifikasi dan validasi data untuk pemutakhiran data dengan pihak terkait, melalui sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM dan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti; pemberian bantuan biaya personil terhadap anak tidak sekolah di tingkat SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan

2.2.1.5 Umur Harapan Hidup

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar salah satunya dimensi umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak saat lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Metode pengukuran IPM mengalami perubahan di tahun 2023 yaitu perubahan data dasar penghitungan, untuk mengukur umur harapan hidup saat lahir sumber data yang digunakan adalah data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF), sehingga perkembangan UHH hanya bisa dibandingkan dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 26 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) dari data (UHH SP2020)
Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2022-2025**

	2021	2022	2023	2024	2025
Kab Serang	73.70	73,81	74,22	74.62	75,39
Provinsi Banten	74,17	74,46	74,77	74,97	75,33
Nasional	73.46	73.60	73.93	74.15	74,47

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

Capaian Pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Serang menunjukkan performa yang sangat positif pada tahun 2025. Hal ini tercermin dari angka Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Serang yang berhasil menyentuh 75,39 tahun. Angka ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, tetapi juga sukses melampaui rata-rata Umur Harapan Hidup tingkat Provinsi Banten yang berada di angka 75,33 tahun. Keberhasilan Kabupaten Serang diatas rata – rata Provinsi menegaskan efektifitas intervensi program kesehatan, peningkatan akses layanan medis, serta perbaikan pemenuhan gizi yang berjalan ditingkat daerah.

Pada tahun 2025 dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Banten, UHH Kabupaten Serang menempati urutan ke 6 (enam) dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di provinsi Banten, diatas Kabupaten Pandeglang (74,56) dan Kabupaten Lebak (74,30).

Perkembangan UHH Kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 27 UHH menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Banten Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (UHH)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab Pandeglang	73,08	73,12	74,01	74,31	74,56
Kab Lebak	72,99	73,04	73,80	74,08	74,30
Kab Tangerang	74,38	74,59	75,18	75,37	75,63
Kab Serang	73,70	73,81	74,62	74,91	75,39
Kota Tangerang	74,99	74,78	75,30	75,58	75,86
Kota Cilegon	74,32	74,25	74,81	75,12	75,45
Kota Serang	74,74	74,54	75,13	75,34	75,63
Kota Tangerang Selatan	75,64	75,16	75,64	75,81	76,09
Provinsi Banten	74,14	74,46	74,77	74,97	75,33

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

Tabel 2. 28 Rata-rata Pertumbuhan UHH Kabupaten Serang Tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Indonesia	73.46	73.60	73.93	74.15	75.39	0.43
Provinsi Banten	74,17.	74.46	74.77	74.97	75.33	0.48
Kabupaten Serang	73.70	74.22	74.22	74.91	74.47	0.64

Sumber: BPS Kabupaten Serang Tahun 2025 (diolah)

Jika mengacu pada laju pertumbuhan sebagaimana disajikan pada tabel diatas, laju pertumbuhan UHH Kabupaten Serang diatas laju pertumbuhan Provinsi dan Nasional.

2.2.1.6 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan (JKN) di Kabupaten Serang saat ini melayani Masyarakat melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan BPJS Kesehatan. Integrasi program ini berfokus pada jaminan Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu melalui skema penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD/Jamkesda, serta optimalisasi jangkauan untuk pekerja sectoral informal. Untuk perkembangan ditahun 2025, focus utamanya bergeser dari sekedar mendaftarkan peserta baru ke Langkah optimalisasi reaktivasi massal bagi peserta PBI yang non aktif, pembaruan regulasi prosedur pengusulan, peningkatan kualitas layanan lapangan. Berikut Tabel Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional selengkapnya dapat dilihat pada:

Tabel 2. 29 Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	73	77	80	84,72	98

Kondisi kepesertaan pada tahun 2021 belum UHC, artinya Kabupaten Serang masih memiliki rapor cakupan terendah dan belum memenuhi Standar Universal Health Coverage minimal 95%, karena pada tahun 2021 baru mencapai 73%, pada tahun 2022 mencapai 77 %, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 80% artinya angka tersebut merupakan transisi krusial dari capaian tahun 2022, tahun 2024 mencapai 84,72, dan pada tahun 2025 berhasil menembus angka 98% dengan Tingkat keaktifan peserta sebesar 80 %, dengan dukungan dari Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sehingga meraih penghargaan UHC Award dengan Kategori Pratama yang diserahkan langsung oleh Pemerintah Pusat. Pastinya untuk kedepan Fokus kepada Strategi Kepesertaan JKN tahun 2025 yaitu dengan Optimalisasi Reaktivasi PBI Non aktif, Gerakan Integrasi SIKS-NG Desa, Skema Pembiayaan Tanggung Renteng, Pemanfaatan Jamkesda sebagai Penyangga.

2.2.1.7 Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit

Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit merupakan salah satu Indikator Kinerja Utamanya RSUD dr.Dradjat Prawiranegara yang digunakan untuk mengukur Tingkat pemenuhan standar mutu pelayanan, keselamatan pasien, tata Kelola rumah sakit, serta efektifitas penyelenggaraan pelayanan Kesehatan sesuai standar akreditasi yang berlaku. Capaian pemenuhan standar akreditasi pada penilaian akreditasi terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 30 Survei Akreditasi RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara

NO	STANDAR AKREDITASI	CAPAIAN
1	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)	91,41%
2	Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)	91,88%
3	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	88,19%
4	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	87,50%
5	Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK)	96,08%
6	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	94,35%
7	Pendidikan Dalam Pelayanan Kesehatan (PPK)	95,65%
8	Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP)	89,39%
9	Hak Pasien dan Keluarga (HPK)	89,74%
10	Pengkajian Pasien (PP)	87,07%

NO	STANDAR AKREDITASI	CAPAIAN
11	Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)	89,53%
12	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)	89,47%
13	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)	88,98%
14	Komunikasi dan Edukasi (KE)	92,00%
15	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	95,83%
16	Program Nasional (Ponek, TB, HIV, Stunting, PKBRS, PPRA)	95,95%
RATA-RATA		91,44%

Sumber: RSDP Kab. Serang 2026

Hasil survei akreditasi terakhir menunjukkan bahwa RSUD dr. Dradjat Prawiranegara berhasil meraih capaian rata-rata 91,44% dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit dengan Akreditasi Paripurna (bintang lima). Pencapaian ini menunjukkan bahwa tata kelola, mutu pelayanan, serta keselamatan pasien telah dilaksanakan dengan baik sesuai standar nasional. Beberapa aspek memperoleh capaian sangat tinggi, seperti Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (96,08%), Sasaran Keselamatan Pasien (95,83%), serta Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (95,65%), yang menjadi kekuatan rumah sakit. Namun, terdapat beberapa standar yang masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (87,50%), Pengkajian Pasien (87,07%), serta Akses dan Kontinuitas Pelayanan (89,39%).

Status Paripurna ini menjadi bukti pengakuan eksternal atas kualitas layanan rumah sakit, sekaligus menjadi dasar penting untuk menjaga konsistensi mutu dan meningkatkan kualitas interaksi langsung antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga. Berikut Tabel Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional selengkapnya dapat dilihat pada:

**Tabel 2. 31 Capaian Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit
Tahun 2021-2025**

No	Indikator	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	capaian
1	Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80	80%	80	100%	80	80 %	80	92 %	80	51,8%

Sumber: RSDP Kab. Serang 2026

2.2.1.8 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan keluarga ditentukan dengan capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang berguna untuk membantu dalam mengelompokkan wilayah-wilayah sebagai daerah yang memiliki keluarga tangguh, berkembang, atau rentan secara pembangunan yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variable serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

**Tabel 2. 32 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2021 – 2025**

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kab. Pandeglang	52,86	52,20	56,39	58,07	52,5
2.	Kab. Lebak	54,18	52,88	59,22	60,84	52,4
3.	Kab. Tangerang	52,87	63,61	64,71	64,24	62,2
4.	Kab. Serang	53,85	54,12	58,31	59,37	61,2
5.	Kota Tangerang	53,94	58,04	64,25	63,29	76,0
6.	Kota Cilegon	53,44	57,91	64,36	64,36	73,2
7.	Kota Serang	53,41	56,50	64,69	65,39	69,3
8.	Kota Tangerang Selatan	54,16	57,72	64,22	65,65	70,8
	Provinsi Banten	53,60	57,00	62,20	62,60	64,8

Sumber : Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) Provinsi Banten Tahun 2026 dan Hasil PK 2025 BKKBN

Pencapaian iBangga di Kabupaten Serang menunjukkan tren pertumbuhan yang progresif, meningkat dari 53,85 pada tahun 2021 menjadi 61,20 pada tahun 2025 dan masuk dalam katagori berkembang. Hal ini merefleksikan keberhasilan intervensi program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Serang. Kenaikan tersebut disebabkan adanya indikator pendukung yang mengalami peningkatan selama tahun 2025 seperti layanan administrasi kependudukan untuk memenuhi legalitas keluarga, peningkatan jaminan kesehatan keluarga melalui JKN/PBI/Jamkesda, beasiswa bagi keberlangsungan pendidikan anak, bantuan usaha ekonomi produktif untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan layanan kesehatan melalui fasilitas Kesehatan yang ada serta kinerja lainnya yang mendukung pada variable iBangga yang terkolaborasikan dengan seluruh perangkat daerah lintas sector baik dalam pemenuhan indicator.

Kabupaten Serang masih memiliki permasalahan dalam penyediaan layanan Kesehatan terkait masih belum meratanya aksesibilitas dan kualitas layanan Kesehatan, belum meratanya tenaga Kesehatan dan permasalahan pembiayaan Kesehatan. Selain itu

masih diperlukannya optimalisasi layanan yang ramah terhadap masyarakat rentan di fasilitas Kesehatan. Terkait layanan kepada lansia, 31 puskesmas yang ada sudah memberikan layanan namun masih belum optimal dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang ramah lansia.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian ibangga adalah cakupan jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Selain itu perlu peningkatan cakupan jaminan Kesehatan dari sisi promotive, preventif, rehabilitative dan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas miskin. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan sinkronisasi data dalam pemenuhan layanan yang ada.

2.2.1.9 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Pembangunan pemuda diarahkan untuk mensukseskan pencapaian target pembangunan prioritas nasional, yaitu pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, optimalisasi bonus demografi dan mencapai Indonesia Emas 2045. Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP merupakan instrumen pengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan berbasis hasil (outcome) yang dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda. Investasi pada peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Untuk memantau kemajuan pembangunan pemuda yang dihasilkan dari investasi ini, perlu ada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tujuannya adalah membangun kerangka analisis situasi, tantangan, dan rumusan kebijakan untuk mendorong perbaikan pembangunan pemuda di tingkat daerah agar lebih baik. Terdapat 5 domain dalam IPP yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminatif. Dalam domain partisipasi dan kepemimpinan terdapat indikator organisasi pemuda yang aktif. Untuk memaksimalkan peranan pemuda, maka diperlukan suatu pembinaan secara kelembagaan/ keorganisasian, dimana lembaga tersebut akan dijadikan sebagai suatu wadah mengembangkan kreativitas pemuda untuk mencapai tujuan bersama.

Tabel 2. 33 Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2021-2024

2020	2021	2022	2023	2024
48,85	59,75	54,80	57, 04	60,49

Sumber: DISPARPORA Kab. Serang 2026

Berdasarkan Tabel diatas, capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Serang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (periode 2020–2024) menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif namun cenderung mengalami

tren positif di akhir periode. Tahun 2020 Capaian IPP berada pada angka 48,85. Rendahnya angka ini tidak lepas dari hantaman pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan pemuda, terutama sektor lapangan kerja dan partisipasi aktif. Tahun 2021 Terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 10,90 poin menjadi 59,75. Kenaikan tajam ini mengindikasikan efektivitas kebijakan pemulihan pascapandemi yang fokus pada penguatan kapasitas pemuda. Tahun 2022 IPP mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 4,95 poin menjadi 54,80. Penurunan ini menjadi catatan penting dalam perencanaan, yang mengisyaratkan adanya tantangan dalam keberlanjutan program kepemudaan atau perlunya penguatan pada domain/indikator tertentu (seperti kesehatan, kesejahteraan, atau kesempatan kerja), untuk IPP tahun 2025 Kemenpora belum merilis nilainya. Mengingat IPP bersifat multi-domain (meliputi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta partisipasi kepemimpinan), Disporapar perlu memperkuat sinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, dan OPD terkait lainnya. Untuk me ningkatkan IPP pemerintah Kabupaten Serang fokus pada program berbasis pemberdayaan pemuda yang sifatnya jangka panjang, seperti pelatihan wirausaha pemuda, peningkatan akses pendidikan vokasi, serta pembukaan ruang-ruang kreasi dan organisasi yang sehat bagi pemuda di Kabupaten Serang.

2.2.1.10 Indeks Partisipasi Olahraga

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, solusi permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Berikut ini merupakan Tabel cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Serang 2021-2025.

Tabel 2. 34 Persentase Cakupan Pembinaan olahraga Kabupaten Serang 2021-2025

2021	2022	2023	2024	2025
0	92,45	100	100	100

Sumber : Disporapar Kabupaten Serang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Serang selama periode 2021-2024 menunjukkan kenaikan persentase yang signifikan. Pada tahun 2021 nilainya 0 persen karena tidak ada event olahraga yang dilaksanakan akibat pandemik Covid-19. Tetapi semakin membaik dari tahun 2022-2024 bahkan mencapai 100% pada tahun 2024.

Pemberian fasilitasi terhadap organisasi kepemudaan dan juga peningkatan kapasitas dan kualitas, pembinaan, serta pengembangan ketrampilan dan bakat, seni dan budaya, termasuk pembinaan olahraga selama ini telah terselenggara sesuai dengan jalur tugas pokok dan fungsi dari OPD atau lembaga yang mengampu bidang ini (seperti KONI beserta pengurus cabangnya). Meskipun selama ini sudah berjalan cukup baik, namun dalam proyeksi ke depannya masih perlu dioptimalkan lagi terutama dalam pengembangan dan tindak lanjut terhadap berbagai program penguatan dan pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Sementara itu, dalam bidang peningkatan prestasi olahraga, pada tahun 2024 jumlah medali yang diperoleh oleh para atlet di Kabupaten Serang dalam kompetisi tingkat daerah dan tingkat nasional sebanyak 15 medali emas, 20 medali perak dan 30 medali perunggu. Dilihat dari rasio prasarana olahraga, tidak terjadi peningkatan secara signifikan namun tetap terjadi penambahan. Namun, sebagian besar prasarana olahraga tersebut merupakan prasarana olahraga rekreasi dan belum memenuhi standar kompetisi. Data mengenai jumlah perolehan medali dan perkembangan rasio prasarana olahraga di Kabupaten Serang disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 35 Jumlah Perolehan Medali Kabupaten Serang
di Tingkat Nasional dan Internasional**

Kompetisi	Emas				Perak				Perunggu			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS)									4		3	
Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)		49				53				129		
Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV)		2				1				10		
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)		16		15		14		18		30		29
Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPAPERDA)		3				2		2				1
Total	-	70	-	15	-	70	-	20	4	169	3	30

Sumber : Disporapar Kabupaten Serang 2025

Tabel 2. 36 Perkembangan Rasio Lapangan/Prasarana di Kabupaten Serang

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah lapangan olahraga	496	536	419	419
Jumlah penduduk	1.640.115	1.661.374	1.756.816	1.791.795
Rasio lapangan olahraga	0,030%	0,032%	0,024%	0,023%

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2025

2.2.1.11 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat (Perpusnas, 2023). Dengan menggunakan IPLM, pemerintah dan organisasi dapat memantau perkembangan literasi masyarakat dari waktu ke waktu, mengidentifikasi area di mana intervensi diperlukan, dan merancang kebijakan pendidikan yang sesuai untuk meningkatkan tingkat literasi secara keseluruhan.

Perhitungan IPLM dipengaruhi oleh jumlah Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) di kabupaten/kota, seperti jumlah perpustakaan, jumlah koleksi perpustakaan, jumlah tenaga perpustakaan, jumlah kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, jumlah keterlibatan masyarakat, dan jumlah anggota perpustakaan. Rincian nilai IPLM dan UPLM disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 37 IPLM Kabupaten Serang tahun 2021-2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (%)				
2021	2022	2023	2024	2025
0	47,13	52,14	54,30	56,22

Sumber : DPKD Kabupaten Serang Tahun 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator krusial yang diadopsi dari parameter Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk mengukur ketersediaan sarana, prasarana, ketercukupan koleksi, hingga tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan akses literasi di suatu daerah. Sepanjang periode 2021 hingga 2025, Kabupaten Serang menunjukkan dinamika pembangunan literasi yang bergerak ke arah positif, meskipun dihadapkan pada tantangan geografis dan pemerataan fasilitas.

Pada tahun 2021, pengukuran IPLM secara nasional masih menggunakan metodologi lama dengan basis skala indeks makro yang kecil, di mana data mandiri tingkat kabupaten belum teragregasi secara masif dan capaian Provinsi Banten secara umum bertumpu di angka 14,57. Titik balik pemetaan literasi daerah secara presisi dimulai pada tahun 2022 seiring dengan pemberlakuan formula baru oleh Perpusnas RI. Pada tahun dasar (*baseline*) metodologi baru ini, Kabupaten Serang mencatatkan skor IPLM sebesar 47,13, yang menempatkannya pada kategori Rendah dan berada cukup jauh di bawah rata-rata Provinsi Banten

yang mencapai 71,03. Rendahnya capaian di tahun 2022 menjadi stimulus bagi Pemerintah Kabupaten Serang untuk menggalakkan program intervensi literasi. Hasilnya mulai terlihat pada tahun 2023, di mana skor IPLM melonjak ke angka 52,14. Kenaikan ini berhasil menaikkan status Kabupaten Serang dari kategori "Rendah" menjadi kategori Sedang, mendekati rata-rata Provinsi Banten pada tahun tersebut yang berada di angka 52,50.

Tren pertumbuhan ini berhasil dipertahankan secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2024, skor IPLM kembali merangkak naik ke angka 54,30, dan berlanjut hingga tahun 2025 dengan capaian sebesar 56,22 (Kategori Sedang). Kenaikan berkelanjutan dalam kurun waktu 2022–2025 ini secara linear didorong oleh perluasan program pojok baca digital (pocadi), peningkatan ketercukupan koleksi buku berbasis komunitas, serta optimalisasi perpustakaan desa. Meskipun Kabupaten Serang secara konsisten menunjukkan tren kenaikan poin setiap tahunnya, capaian ini secara umum masih berada di bawah rata-rata indeks Provinsi Banten dan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa akselerasi pembangunan literasi di Kabupaten Serang masih memerlukan penguatan dari sisi ketercukupan tenaga pustakawan, perluasan akses distribusi buku ke wilayah pelosok, serta peningkatan frekuensi kunjungan masyarakat ke ruang-ruang baca fisik maupun digital.

2.2.1.12 Tingkat Kemiskinan

A. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan multi dimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, digunakan indikator kemiskinan. Indikator tersebut antara lain mencakup garis kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Keempat indikator ini juga digunakan sebagai alat perencanaan dan indikator target pencapaian, serta bahan untuk evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Adapun data kemiskinan yang digunakan bersumber dari Susenas, yang dilaksanakan pada tiap bulan Maret dan September setiap tahunnya.

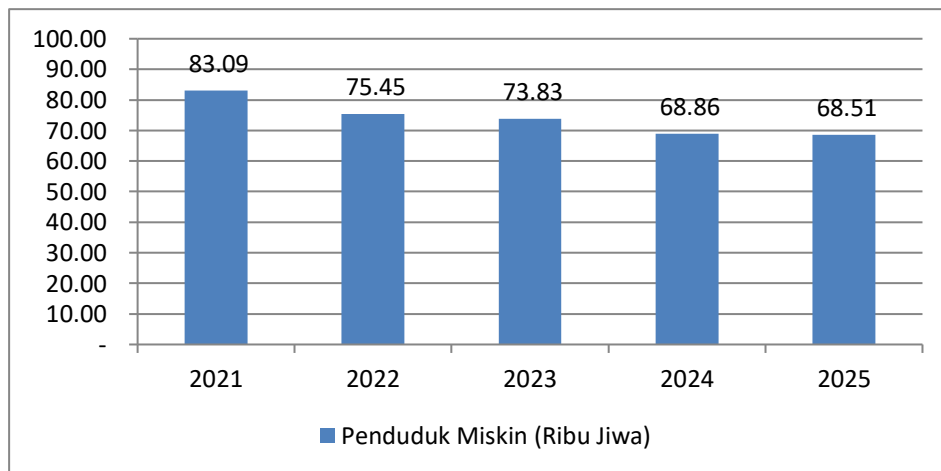
Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Penghitungan angka kemiskinan menggunakan garis kemiskinan yang diperoleh dari data pengeluaran, sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Adapun penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

B. Presentase Penduduk Miskin

Salah satu indikator sosial ekonomi yang juga penting digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan.

BPS mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin dapat definisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum terkait perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Grafik 2. 5 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Serang 2021-2025 (Ribu Jiwa)



Sumber : BPS Kabupaten Serang, 2026

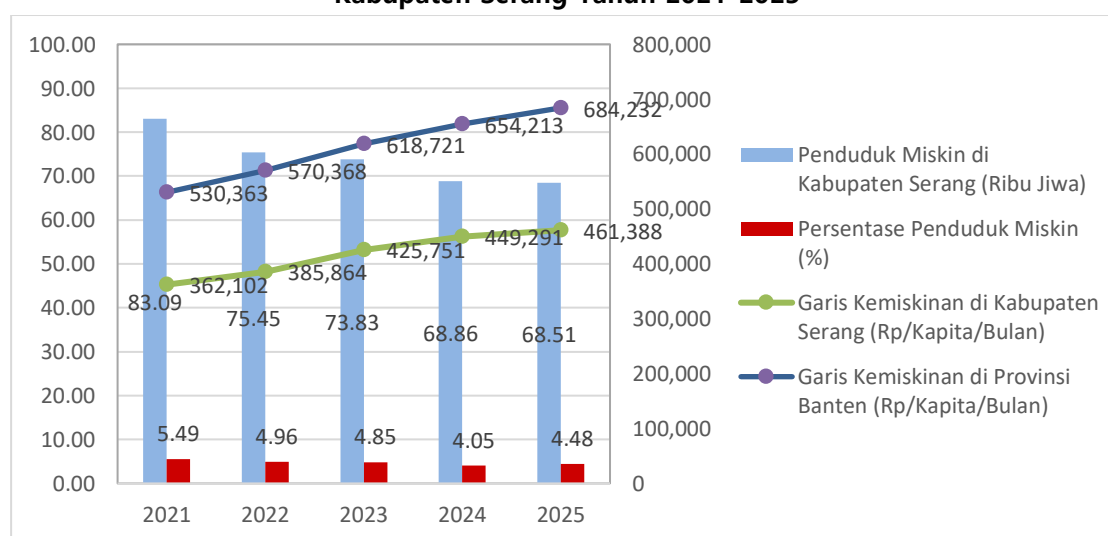
Berdasarkan grafik di atas selama periode 2021-2025, penduduk miskin di Kabupaten Serang mengalami penurunan setiap tahunnya. Sejak tahun 2021 jumlah penduduk miskin yang semula mencapai 83,09 ribu jiwa terus bergerak turun sekitar hingga di tahun 2025 menjadi 68,51 ribu jiwa. Penduduk dikategorikan ke dalam penduduk miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan di daerah tersebut. Berdasarkan grafik 2. 11 di bawah, jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Banten terlihat bahwa selama periode 2021-2025 garis kemiskinan Kabupaten Serang berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Banten. Terlihat pula jika tren garis kemiskinan di Kabupaten Serang terus meningkat, walaupun lebih landai jika dibanding

dengan peningkatan garis kemiskinan Provinsi Banten. Pada tahun 2021, garis kemiskinan Kabupaten Serang mencapai Rp. 362.102 dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,49%. Sedangkan garis kemiskinan Provinsi Banten telah mencapai Rp. 530.363 dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,66%. Demikian pula pada tahun 2022, garis kemiskinan Kabupaten Serang masih berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Banten yaitu sebesar Rp. 385.864 per kapita per bulan.

Selama periode 2021-2025, garis kemiskinan di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahun, dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp 29.063 per tahun. Pada tahun 2021 garis kemiskinan Kabupaten Serang mencapai Rp 362.102 per kapita per bulan, meningkat menjadi sebesar Rp 385.864 per kapita per bulan di tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi Rp 425.751 per kapita per bulan di 2023. Pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 449.291. Hingga pada tahun 2025 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 461.388.

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang pada periode tersebut cenderung menurun. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang mencapai 83,09 ribu jiwa atau 5,49% dari total penduduk, terus menurun di tahun 2025 yaitu menjadi 68,51 ribu jiwa atau 4,48% dari total penduduk. Perlu adanya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin dengan cara pola pelatihan/keterampilan kewirausahaan dan bantuan modal awal untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin tersebut.

Grafik 2. 6 Grafik Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Serang Tahun 2021-2025

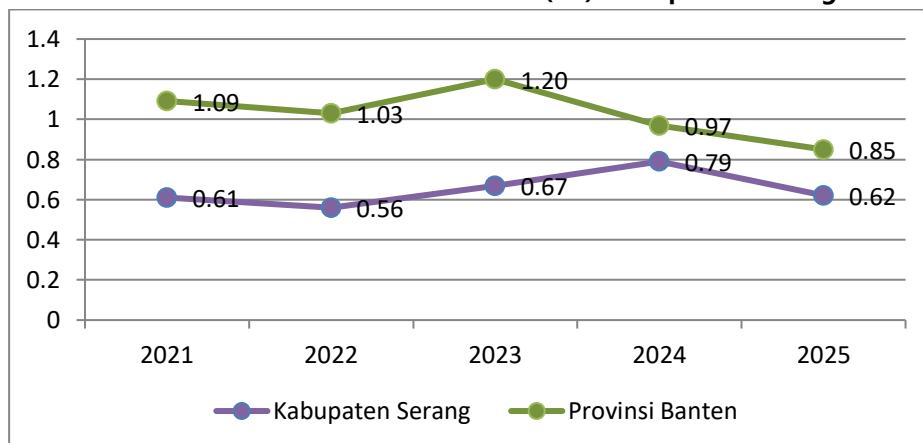


Sumber : BPS Kabupaten Serang dan BPS Provinsi Banten, 2026

C. Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

Untuk mengukur kemiskinan bukan hanya dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Grafik 2. 7 Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten

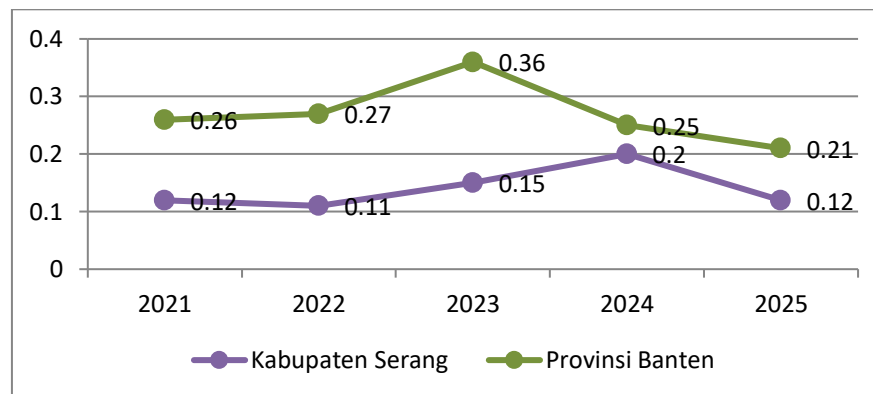


Sumber: BPS Provinsi Banten, 2026

Berdasarkan grafik di atas, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Serang pada periode tahun 2021-2025 cenderung fluktuatif namun dengan pergerakan yang sama dengan nilai Indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Banten. Pada tahun 2021 nilai Kabupaten Serang berada di angka 0,61 sedangkan Provinsi Banten di angka 1,09. Tahun berikutnya di 2022 nilai Kabupaten Serang turun menjadi 0,56 begitu juga dengan Provinsi Banten dengan nilai 1,03. Tahun 2024 merupakan angka tertinggi selama periode tersebut, yaitu mencapai 0,79 sedangkan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Banten turun menjadi 0,97. Tetapi mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 0,62 untuk Kabupaten Serang dan 0,85 untuk Provinsi Banten.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Serang selalu lebih rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Serang cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin juga semakin menyempit bila dibandingkan dengan Provinsi Banten.

Grafik 2. 8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2026

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Serang tahun 2021-2025 cenderung fluktuatif begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Banten. Pada tahun 2021 nilai Kabupaten Serang berada di angka 0,12 sedangkan Provinsi Banten di angka 0,26. Tahun berikutnya di 2022 nilai Kabupaten Serang turun menjadi 0,11 namun Provinsi Banten nilainya naik menjadi 0,27. Tahun 2024 merupakan angka tertinggi selama periode tersebut, yaitu mencapai 0,2 di Kabupaten Serang, namun indeks keparahan kemiskinan Provinsi Banten menurun ke angka 0,25. Sedangkan untuk tahun 2025, Kabupaten Serang mengalami penurunan mencapai 0,12 dan untuk Provinsi Banten mencapai 0,21.

Bila dilihat dari pergerakan grafik di atas, indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Serang nilainya lebih rendah dari Provinsi Banten. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada periode tahun 2021-2025 ketimpangan di antara penduduk miskin di Kabupaten Serang lebih rendah daripada Provinsi Banten.

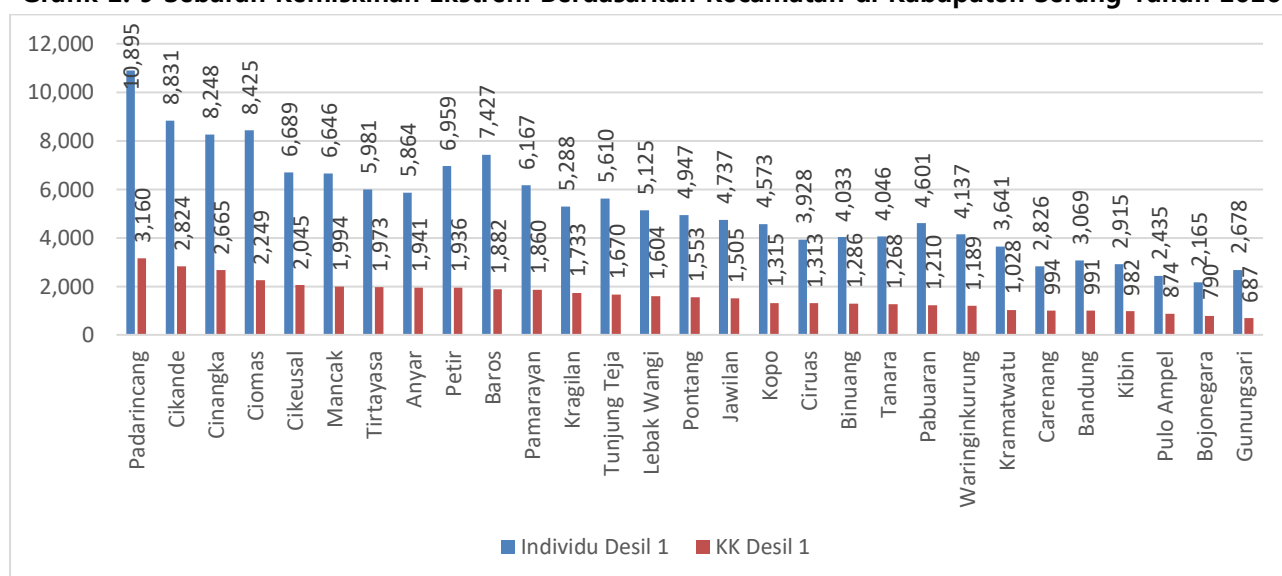
D. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Kemenko PMK adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi masyarakat yang hidup dibawah USD 1,9 PPP (purchasing power parity) per hari berdasarkan definisi Bang Dunia atau World Bank pada tahun dasar tahun 2011. Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin

ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021).

Berdasarkan Grafik dibawah bahwa sebaran kemiskinan berdasarkan desil 1 sampai dengan 4 terdapat kecamatan dengan jumlah sebaran tertinggi di wilayah Kabupaten Serang yaitu berada di Kecamatan Petir dengan jumlah 39.939 jiwa. Sedangkan sebaran kemiskinan ekstrem terendah di wilayah Kabupaten Serang terdapat pada kecamatan Kibin dengan jumlah 3.537 jiwa. Sedangkan untuk desil 1 sebaran terbanyak terdapat di kecamatan Baros yaitu dengan jumlah 10.260 jiwa. Sedangkan sebaran kemiskinan ekstrem terendah berada di Kecamatan Kibin yaitu dengan jumlah 537 jiwa.

Grafik 2. 9 Sebaran Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2026



Sumber: Data DTSEN Periode Maret 2026

Tabel 2. 38 Presentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) di Kabupaten Serang

Tahun	Persentase Penduduk Miskin Eskترم
2021	0,62
2022	0,75
2023	0,34
2024	0,64
2025	0,34

Sumber : TKPK Provinsi Banten Tahun 2026

Dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Serang tahun 2021 adalah sebesar 0,62% dan meningkat menjadi 0,75% di 2022. Dan di tahun 2023 persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Serang turun cukup signifikan di angka 0,34%. Namun di tahun 2024, kembali meningkat menjadi 0,64%. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bahwa pada tahun 2024, target penurunan kemiskinan ekstrem adalah menjadi 0 persen. Untuk itu dibutuhkan program konvergensi /keterpaduan oleh pemerintah Kabupaten Serang dalam menyasar penerima manfaat. Dan pendekatan pada program yang sifatnya saling melengkapi atau menambah program yang sudah ada untuk intervensi kepada individu sasaran program kemiskinan ekstrem.

2.2.1.13 Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks kesejahteraan sosial (ikesos) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat secara komprehensif, baik dari sisi individu maupun kelompok. Indeks ini berfungsi sebagai indikator utama bagi pemerintah khususnya Kementerian Sosial untuk mengevaluasi efektivitas program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang telah dijalankan. Secara garis besar, Ikesos dibangun berdasarkan tiga dimensi utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu; Dimensi Kebutuhan Dasar yang mengukur akses masyarakat terhadap pangan, Kesehatan, Pendidikan, jaminan sosial, tempat tinggal layak dan rasa aman; Dimensi Sosial yang menilai sejauh mana keterlibatan warga dalam aktivitas sosial, kohesi antar warga, serta keberadaan Lembaga yang inklusif; serta Dimensi Keberdayaan Ekonomi yang mencerminkan kemampuan individu dalam memproduksi barang/jasa, kepemilikan asset serta ketahanan ekonomi rumah tangga dalam menghadapi krisis.

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) Kabupaten Serang tahun 2025 mencapai 57,17 poin dari target 57,67 poin (99,13%). Sasaran pelayanan dalam urusan sosial bagi PPKS meningkat setiap tahunnya dengan pemberian bantuan berupa BPNT, PKH dan UEP bagi sasaran yang berada di desil 1 -5 berdasarkan DTSEN yang merupakan menggabungkan antara DTKS, Regsosek dan P3KE. DTSEN ini menjadi acuan dalam pemberian sasaran bagi PPKS. Dalam penanganan urusan sosial ditujukan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi

dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar. Penanganan bagi PPKS mengacu pada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sebagai basis data terpadu pemerintah yang memuat informasi kondisi social, ekonomi dan peringkat kesejahteraan seluruh penduduk untuk menentukan penyaluran berbagai program bantuan social (bansos).

2.2.1.14 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indicator untuk mengevaluasi kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan berdasarkan tiga dimensi utama yaitu kesehatan, Pendidikan dan standar hidup layak. IPG berfungsi sebagai indicator utama untuk memastikan pembangunan adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembangunan inklusif tercermin pada capaian IPG Kabupaten Serang yang mencapai 93,75 persen dari target 92,72 pada tahun 2025.

Tabel 2. 39 Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020 – 2025

No	IPG	2021	2022	2023	2024	2025
	Kabupaten Serang	92,63	93,11	93,40	93,52	93,75

Sumber: DKBP3A Kab. Serang 2026

Salah satu strategi yang mendesak adalah disparitas capaian IPG. Meskipun IPM meningkat setiap tahun, kesenjangan dalam IPG masih terjadi. Perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengenyam Pendidikan, partisipasi kerja dan keterlibatan dalam bidang politik sehingga potensi sumber daya manusia perempuan belum optimal dalam mendukung perekonomian. Untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, maka focus pembangunan di Kabupaten Serang untuk meningkatkan IPG melalui peningkatan akses Kesehatan reproduksi, kualitas Pendidikan dan kemandirian ekonomi bagi kelompok perempuan.

2.2.1.15 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indicator yang menggambarkan pencapaian atas pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Indeks ini merupakan indeks baru yang digunakan pada tahun 2025. Capaian IPA Kabupaten Serang pada tahun 2025 62,23 poin dari target 62,97 poin (98,82 %). Dari capaian ini terlihat bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak belum terlaksana

dengan cukup baik. Diperlukan suatu inovasi dan implementasi kebijakan yang mendukung pada perlindungan anak agar bisa berjalan efektif dan adaptif. Target yang belum tercapai dikarenakan banyaknya kekerasan yang terjadi pada anak dengan orientasi lokasi terjadinya kasus berada dilingkungan rumah tangga.

2.2.1.16 Persentase Penanganan Kawasan Kumuh

Pada Tahun 2024 luas Kawasan kumuh di Kabupaten Serang adalah 1.113,92 Ha. Namun yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang adalah 626,01 Ha. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Serang dilakukan secara bertahap dan terpadu terhadap luasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten. Gambaran data kawasan kumuh disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 40 Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Serang Tahun 2021-2024

No	Uraian	Luasan (Ha)				Total Luasan (Ha)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
I	Pemutakhiran Pendataan Permukiman Kumuh								
1	Luasan SK 2019-2022 Kab/Kota				-				2.490,45
2	Luasan Update 2023 & 2024 Kab/Kota				-				1.319,20
3	Luasan Verifikasi Awal				-				1.113,92
4	Luasan Akhir Kesepakatan				-				1.113,92
II	Klasifikasi Kategori Kekumuhan								
1	Kumuh Kategori Ringan (skor 16-37)				1,049,44				1.113,92
2	Kumuh Kategori Sedang (skor 38-59)				64,48				
3	Kumuh Kategori Berat (skor 60-80)				-				
III	Pembagian Kewenangan								
1	Luasan Kewenangan Kabupaten/Kota (< 10 Ha)				626,01				1.113,92
	a. Kumuh Kategor Ringan (skor 16-37)				592,71				
	b. Kumuh Kategori Sedang (skor 38-59)				33,3				
	C. Kumuh Kategori Berat (skor 60-80)				-				
2	Luasan Kewenangan Provinsi (10 s.d < 15 Ha)				252,75				
	a. Kumuh Kategori Ringan (skor 16-37)				237,12				
	b. Kumuh Kategori Sedang (skor 38-59)				15,63				
	C. Kumuh Kategori Berat (skor 60-80)				-				
3	Luasan Kewenangan Pusat (>= 15 Ha)				235,16				
	a. Kumuh Kategori Ringan (skor 16-37)				219,61				
	b. Kumuh Kategori Sedang (skor 38-59)				15,55				
	C. Kumuh Kategori Berat (skor 60-80)				-				

Sumber : DPRKP Kabupaten Serang Tahun 2025

2.2.1.17 Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Permasalahan pada bidang perumahan dan Kawasan permukiman sebagai berikut: Rumah tidak layak huni yang terehabilitasi hanya mencapai 7,53% pada tahun 2024 dari jumlah rumah tidak layak huni yang terdata. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni belum memperoleh intervensi program peningkatan kualitas rumah. Rendahnya capaian rehabilitasi RTLH dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kemampuan fiskal daerah, belum optimalnya dukungan pendanaan dari berbagai sumber, serta tingginya jumlah rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan. Selain itu, proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan, kesiapan administrasi calon penerima manfaat, serta kebutuhan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak swasta turut memengaruhi percepatan penanganan RTLH.

Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak, aman, sehat, dan nyaman sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila tidak ditangani secara bertahap dan berkelanjutan, keberadaan rumah tidak layak huni berpotensi meningkatkan kerentanan sosial, kesehatan lingkungan, serta memperlambat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni melalui peningkatan alokasi anggaran, optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penguatan kolaborasi dengan pemerintah desa, dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), serta pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, pemutakhiran basis data RTLH secara berkala dan penetapan skala prioritas penanganan menjadi langkah penting agar program rehabilitasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

2.2.1.18 Persentase Unit Rumah Didalam Perumahan Yang Terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Permasalahan Indikator Persentase Unit Rumah di dalam Perumahan yang Terfasilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Persentase unit rumah di dalam kawasan perumahan yang telah difasilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada Tahun 2025 mencapai 62,65% dari target 62,72%, atau terealisasi sebesar 99,89%. Meskipun capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik, target belum sepenuhnya tercapai sehingga

masih diperlukan upaya peningkatan penyediaan dan pengelolaan PSU pada kawasan perumahan.

Belum optimalnya capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh masih adanya kawasan perumahan yang belum dilengkapi prasarana dasar secara memadai, seperti jaringan jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, ruang terbuka, dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan. Selain itu, proses serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah belum seluruhnya dapat diselesaikan, sehingga pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan belum dapat dilakukan secara optimal.

Permasalahan lainnya adalah pertumbuhan kawasan perumahan yang cukup pesat belum sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar, keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam pembangunan dan peningkatan kualitas PSU, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengembang, dan instansi terkait dalam pemenuhan standar pelayanan minimal kawasan perumahan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pembangunan urusan perumahan diarahkan pada peningkatan penyediaan dan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan perumahan, percepatan proses serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah, penguatan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengembang, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pendanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kawasan perumahan yang layak huni, aman, nyaman, dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Tabel 2. 41 Capaian IKU Misi II RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Ket	Bidang Urusan
				Target	Realisasi	Capaian		
	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah							
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,78	5.60-6.60	5,17	92,32	Tidak tercapai	
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Skor	65,62	66,25	71,71	108,24	Tercapai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio Konektivitas	%	44,60	44,6	44,6	100,00	Tercapai	Urusan Perhubungan
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	46,69	46.70-47	46,44	99,44	Tidak tercapai	Urusan Perindustrian
	Kontribusi sektor perdagangan	%	8,94	9,1	8,94	98,24	Tidak tercapai	Urusan Perdagangan

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Ket	Bidang Urusan
				Target	Realisasi	Capaian		
	terhadap PDRB							
	Persentase Koperasi Sehat	%	10,07	14,69	10,92	74,34	Tidak tercapai	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Rasio Kewirausahaan	%	0,2	0,5	0,4	80,00	Tidak tercapai	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi. Makan. Minum	%	2,37	2,4	2,37	98,75	Tidak tercapai	Urusan Pariwisata

2.2.1.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian di suatu wilayah. Apabila terjadi pertumbuhan ekonomi maka kondisi perekonomian di wilayah tersebut juga meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan. Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), merupakan indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari persentase pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik definisi PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB juga dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

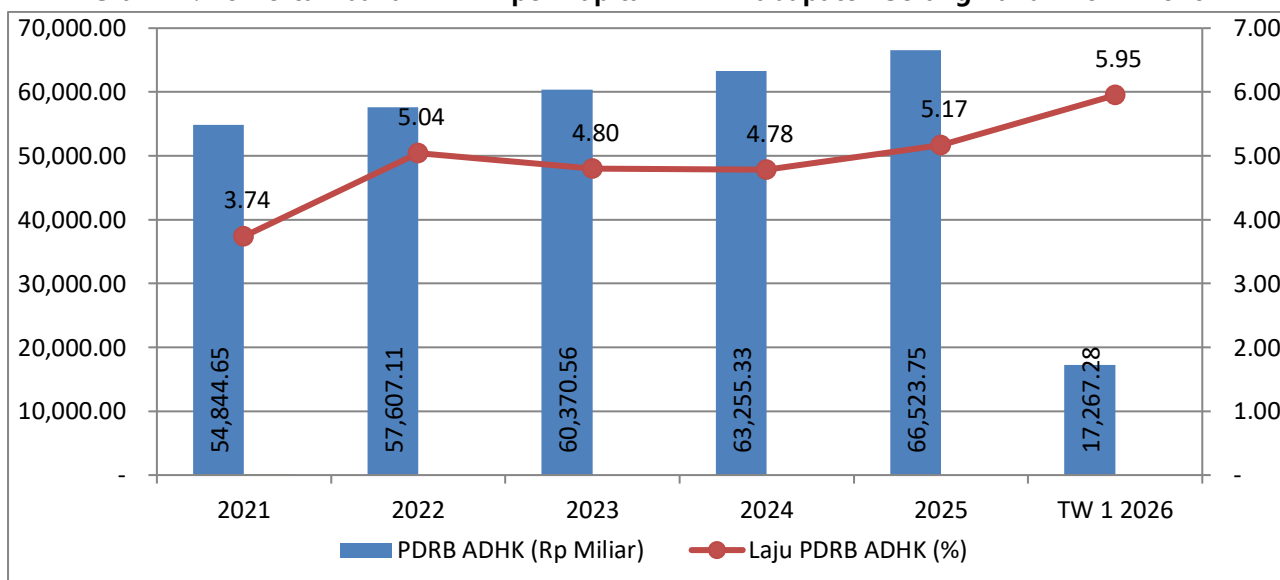
Perhitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dihitung menggunakan harga tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi dan menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Tabel 2. 42 Nilai PDRB ADHK Kabupaten Serang Tahun 2021-2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
ADHB (Harga Berlaku)	80.231,26	87.982,20	95.079,21	102.120,37	108.865,89
ADHK (Harga Konstan 2010)	54.844,65	57.605,99	60.369,96	63.255,33	66.523,75
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
ADHB (Harga Berlaku)	48,92	52,96	56,52	60,01	63,28
ADHK (Harga Konstan 2010)	33,44	34,67	35,89	37,17	38,67
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK (%)	2,37	3,69	3,50	3,57	4,03
Jumlah Penduduk (orang)	1.640.115	1.661.374	1.682.133	1.701.803	1.720.321

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, nilai PDRB terus menunjukkan tren peningkatan baik pada harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan 2010 (ADHK). PDRB ADHB meningkat dari 80.231,26 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 108.865,89 miliar rupiah pada tahun 2025, sementara ADHK naik dari 54.844,65 miliar rupiah menjadi 66.523,75 miliar rupiah pada periode yang sama. Sejalan dengan itu, PDRB per kapita juga mengalami kenaikan, di mana ADHB meningkat dari 48,92 juta rupiah menjadi 63,28 juta rupiah, dan ADHK dari 33,44 juta rupiah menjadi 38,67 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK relatif fluktuatif namun cenderung meningkat, dari 2,37% pada tahun 2021 menjadi 4,03% pada tahun 2025. Di sisi lain, jumlah penduduk juga terus bertambah dari 1.640.115 orang pada tahun 2021 menjadi 1.720.321 orang pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi terjadi di tengah pertumbuhan jumlah penduduk.

Grafik 2. 10 Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Serang Tahun 2021–2026

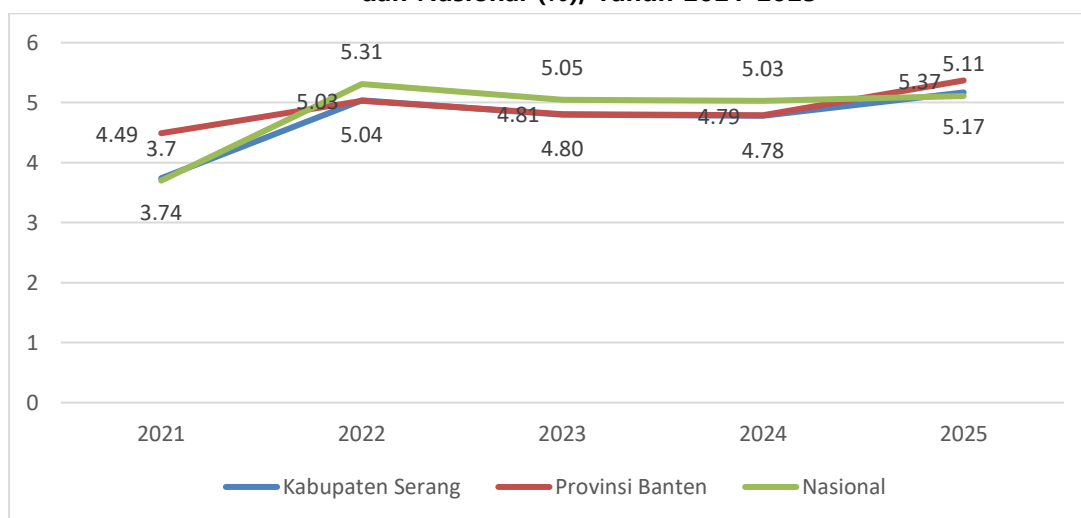
Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2026

Grafik menunjukkan bahwa PDRB per kapita ADHK terus mengalami peningkatan dari 33,44 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 38,67 juta rupiah pada tahun 2025, yang mencerminkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara riil. Sejalan dengan itu, laju pertumbuhan PDRB per kapita cenderung berfluktuasi namun tetap berada pada tren positif, meningkat dari 2,37% pada tahun 2021, mencapai puncak 3,69% pada tahun 2022, kemudian sedikit melambat pada tahun 2023–2024, dan kembali meningkat menjadi 4,03% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi dinamika pertumbuhan, kinerja ekonomi per kapita tetap terjaga dan menunjukkan arah yang semakin membaik.

Salah satu yang dapat memengaruhi proses pertumbuhan ekonomi tersebut adalah telah adanya Mall Pelayanan Publik (MPP). MPP di Kabupaten Serang pada dasarnya adalah pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan pemerintah (pusat, daerah, BUMN/BUMD, bahkan swasta) dalam satu tempat. Kehadiran MPP tidak hanya terkait aspek birokrasi, tetapi juga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah. MPP memberikan layanan cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun pelaku usaha sehingga proses pelayanan lebih terbuka, mengurangi potensi praktik koruptif dan memperkuat kepercayaan publik, mengurangi waktu, biaya, dan prosedur berbelit dalam mengurus perizinan maupun administrasi lainnya.

MPP mengintegrasikan layanan berbasis teknologi informasi dengan perizinan yang lebih cepat dan pasti, investor lebih tertarik menanamkan modal di Kabupaten Serang. Sehingga Kabupaten Serang menjadi lebih kompetitif dibanding daerah lain karena proses izin usaha dan layanan publik lebih efisien. MPP juga mendorong terciptanya pertumbuhan UMKM dikarenakan mudah mengakses legalitas usaha, izin edar, sertifikasi halal, BPOM, hingga akses pembiayaan, sehingga dapat naik kelas. Masuknya investasi baru dan berkembangnya UMKM akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Layanan MPP memperlancar penerimaan pajak/retribusi daerah melalui sistem yang lebih transparan dan efisien. Aktivitas ekonomi meningkat di sekitar MPP (transportasi, kuliner, jasa) serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah. Kehadiran MPP Kabupaten Serang diharapkan tidak hanya sebagai pusat layanan administrasi, tapi juga instrumen strategis untuk memperbaiki iklim usaha, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Grafik 2. 11 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Nasional (%), Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Serang, 2025

2.2.1.20 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh infrastruktur pelayanan memperoleh skor sebesar 71,71 dengan kategori Cukup Puas, dengan capaian sebesar 108,24% dari target yang telah ditetapkan. Nilai IKLI tahun 2025 ini mengalami kenaikan sebesar 6,09 poin dari nilai IKLI pada tahun 2024, serta melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 5,46 poin dari target sebesar 66,25. Jika dilihat dari nilai per unsur layanan infrastruktur, maka layanan infrastruktur Jalan menjadi unsur layanan yang memiliki nilai paling tinggi yaitu sebesar 79,98 yang berarti menunjukkan kinerja layanan sangat memuaskan. Untuk lebih lengkapnya penilaian dari setiap unsur layanan infrastruktur dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2. 43 Unsur Layanan Infrastruktur

No.	Jenis Infrastruktur	Nilai IKLI	Kategori
1	Jalan	79,98	Sangat Puas
2	Jembatan	77,54	Sangat Puas
3	Transportasi Darat	61,34	Cukup Puas
4	Air Bersih	74,71	Cukup Puas
5	PSU Perumahan/Permukiman	64,98	Cukup Puas
Nilai IKLI Kabupaten Serang		71,71	Cukup Puas

Walaupun nilai IKLI Kabupaten Serang tahun 2025 melebihi target namun secara kategori kinerjanya masih "Cukup Puas" yang artinya masih memerlukan peningkatan dan perbaikan agar lebih optimal pelayanannya. Beberapa usulan perbaikan infrastruktur

kewenangan kabupaten untuk lebih mengoptimalkan fungsi layanannya serta meningkatkan nilai IKLI adalah:

- a) Jalan
 - Peningkatan kualitas jalan
 - Perawatan/pemeliharaan jalan
 - Penambahan marka jalan
 - Pengadaan gorong-gorong/drainase
- b) Jembatan
 - Pelebaran dan perbaikan jembatan
 - Pembangunan jembatan
 - Pemeliharaan/perawatan jembatan
- c) Transportasi Darat
 - Perbaikan dan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - Perbaikan, pengadaan dan penambahan marka jalan, halte, dan rambu-rambu lalu lintas
- d) Air Bersih
 - Perbaikan dan perawatan jaringan air bersih
 - Pemenuhan kebutuhan air bersih (perluasan jaringan pelayanan)
 - Pengadaan penampungan air bersih
- e) Infrastruktur Perumahan/Permukiman
 - Pengadaan/pembangunan bak sampah
 - Pengadaan/pembangunan drainase
 - Pembuatan/pembangunan fasilitas sanitasi

2.2.1.21 Rasio Konektivitas

Dalam hal upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah, Rasio Konektivitas pada sektor transportasi dipengaruhi oleh tersedianya layanan trayek angkutan umum dan penyeberangan yang mampu menghubungkan antarwilayah secara efektif, aman, dan berkesinambungan. Ketersediaan trayek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta beroperasinya layanan penyeberangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya. trayek angkutan di wilayah Kabupaten Serang merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan rasio konektivitas daerah. Setiap trayek mencerminkan keterhubungan antarwilayah serta aksesibilitas masyarakat terhadap pusat kegiatan ekonomi, layanan publik, dan fasilitas sosial. Berikut disajikan rincian data kebutuhan trayek serta rincian data trayek yang dilayani di Kabupaten Serang.

Tabel 2. 44 Rincian Data Kebutuhan Trayek

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Bobot
1	01	Nikomas – Tanara	Angkutan Pedesaan	>5x seminggu	1
2	02	Nikomas – Carenang – Tanara	Angkutan Pedesaan	>5x seminggu	1
3	03	Nikomas – Tanara – Via Asem	Angkutan Pedesaan		
4	04	Nikomas – Cikande – Kopo	Angkutan Pedesaan	>5x seminggu	1
5	05	Nikomas – Pamarayan	Angkutan Pedesaan		
6	06	Nikomas – Kragilan – Cikeusal	Angkutan Pedesaan		
7	07	Nikomas – Gorda – Binuang	Angkutan Pedesaan		
8	08	Ciruas – Sentul – Kendayakan	Angkutan Pedesaan		
9	09	Ciruas – Nyapah – Petir – Tunjungteja	Angkutan Pedesaan		
10	10	Tunjungteja – Cikeusal – Pamarayan	Angkutan Pedesaan		
11	11	Tunjungteja – Catang – Pamarayan	Angkutan Pedesaan		
12	12	Baros – Petir – Tunjungteja	Angkutan Pedesaan		
13	13	Ciomas – Pabuaran	Angkutan Pedesaan	>5x seminggu	1
14	14	Anyar – Gunungsari	Angkutan Pedesaan	>5x seminggu	1
15	15	Anyar – Pasauran	Angkutan Pedesaan	>5x seminggu	1
16	16	Bojonegara - Waringinkurung	Angkutan Pedesaan		
					1

Tabel 2. 45 Rincian Data Trayek yang Dilayani

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan	Bobot
1	01	Nikomas – Tanara	Angkutan Pedesaan	>5x seminggu	Tinggi	1
2	02	Nikomas – Carenang – Tanara	Angkutan Pedesaan	>5x seminggu	Tinggi	1
3	04	Nikomas – Cikande – Kopo	Angkutan Pedesaan	>5x seminggu	Tinggi	1
4	13	Ciomas – Pabuaran	Angkutan Pedesaan	>5x seminggu	Tinggi	1
5	14	Anyar – Gunungsari	Angkutan Pedesaan	>5x seminggu	Tinggi	1
6	15	Anyar – Pasauran	Angkutan Pedesaan	>5x seminggu	Tinggi	1
						1

Berdasarkan hasil analisis terhadap data kebutuhan dan layanan trayek di Kabupaten Serang, tingkat konektivitas masih tergolong rendah. Dari total 16 trayek angkutan pedesaan yang dibutuhkan, baru 6 trayek yang benar-benar dilayani. Hal ini berarti rasio konektivitas trayek baru mencapai sekitar 37,5 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rute yang direncanakan belum memiliki layanan, sehingga mobilitas masyarakat di wilayah-wilayah tertentu masih sangat terbatas.

Secara keseluruhan, rasio konektivitas Kabupaten Serang baru mencapai 45 persen dari total kebutuhan. Angka ini menggambarkan bahwa lebih dari separuh konektivitas wilayah belum terlayani. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya dukungan transportasi terhadap akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Dengan demikian, peningkatan jangkauan trayek dan perluasan lintasan menjadi salah satu agenda strategis yang perlu diprioritaskan guna memperkuat keterhubungan wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan daerah.

Tabel 2. 46 Rincian Data Kebutuhan Lintas

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan
1	Pelabuhan Grenyang	Kabupaten Serang – Kabupaten Serang	>5x seminggu	Tinggi
2	Pelabuhan Pulo Panjang	Kota Serang – Kabupaten Serang	3-4x seminggu	Sedang
3	Pelabuhan Pulo Tunda	Kota Serang – Kabupaten Serang	2x seminggu	Rendah
4	Pelabuhan Lontar			

Tabel 2. 47 Rincian Data Lintas yang Dilayani

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan	Bobot
1	Pelabuhan Grenyang	Kabupaten Serang – Kabupaten Serang	>5x seminggu	Tinggi	1
2	Pelabuhan Pulo Panjang	Kota Serang – Kabupaten Serang	3-4x seminggu	Sedang	0,8
3	Pelabuhan Pulo Tunda	Kota Serang – Kabupaten Serang	2x seminggu	Rendah	0,5

Berdasarkan hasil analisis terhadap data kebutuhan dan layanan lintas penyebrangan di Kabupaten Serang, dari total 4 lintasan yang dibutuhkan, 3 lintasan sudah terlayani. Hal ini berarti rasio konektivitas laut mencapai sekitar 75 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa operasional lintas penyebrangan telah berjalan dengan cukup baik, namun belum seluruh kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain terbatasnya jumlah lintasan yang aktif beroperasi, frekuensi pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di dermaga, serta masih perlunya peningkatan koordinasi dengan operator penyebrangan dan instansi terkait dalam menjaga keberlanjutan pelayanan.

Secara keseluruhan, rasio konektivitas Kabupaten Serang baru mencapai 44,6 persen dari total kebutuhan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterhubungan antarwilayah melalui jaringan dan layanan transportasi masih belum optimal, sehingga kebutuhan konektivitas masih perlu ditingkatkan agar aksesibilitas masyarakat dapat terlayani secara lebih merata.

2.2.1.22 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan memegang peran krusial sebagai salah satu motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian daerah. Sebagai sektor produktif, industri tidak hanya memberikan kontribusi nilai tambah tinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi, dan penguatan rantai pasok lokal. Tingginya kontribusi sektor industri menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah telah bergeser menuju fase industrialisasi. Namun, tantangan utama ke depan adalah menjaga konsistensi pertumbuhan ini agar tidak rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Pertumbuhan sektor industri di daerah didorong oleh beberapa faktor struktural. Pertama, adanya penguatan investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), yang berfokus pada hilirisasi komoditas lokal. Kedua, adanya integrasi yang kian membaik antara industri skala besar dengan industri kecil dan menengah (IKM).

Tabel 2. 48 Perkembangan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Total Nilai PDRB-ADHB (juta rupiah)	80,231,260	87,983,133	95,079,210	102,120,370	108,865,895
Total Nilai Perdagangan (juta rupiah)	36,713,310	40,255,800	43,903,170	47,682,560	50,557,740
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB (persen)	45.76	45.75	46.18	46.69	46.44

Sumber: BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel diatas, struktur perekonomian Kabupaten Serang menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten pada periode tahun 2021 hingga 2025. Sektor perdagangan memegang peranan yang sangat krusial dan dominan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari perkembangan data tersebut adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Kabupaten Serang mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, nilai PDRB tercatat sebesar Rp80,23 triliun (80.231.260 juta rupiah) dan terus meningkat hingga mencapai Rp108,86 triliun (108.865.895 juta rupiah) pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan adanya ekspansi aktivitas ekonomi yang stabil di wilayah Kabupaten Serang. Ekspansi Nilai Sektor Perdagangan Sejalan dengan pertumbuhan PDRB, total nilai dari sektor perdagangan juga menunjukkan tren meningkat secara berkelanjutan. Dari nilai Rp36,71 triliun

(36.713.310 juta rupiah) di tahun 2021, sektor ini melesat naik menjadi Rp50,55 triliun (50.557.740 juta rupiah) pada tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa iklim usaha, daya beli masyarakat, serta aktivitas distribusi barang dan jasa di Kabupaten Serang terus berkembang pesat. Kontribusi sektor perdagangan terhadap total PDRB secara konsisten berada pada proporsi yang sangat besar, yaitu berkisar antara 45,75% hingga 46,69% sepanjang periode analisis. Proporsi tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar 46,69% sebelum mengalami sedikit penyesuaian menjadi 46,44% pada tahun 2025

Guna mengoptimalkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada periode perencanaan ini, dirumuskan tiga pilar strategi utama:

1. Hilirisasi berbasis Potensi Lokal: Mendorong transformasi industri dari berbasis komoditas mentah menjadi produk jadi bernilai tambah tinggi guna memperkuat struktur PDRB.
2. Penerapan Teknologi dan Digitalisasi: Memfasilitasi pelaku industri (termasuk IKM) untuk mengadopsi teknologi digital demi meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas akses pasar.
3. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu: Mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung di kawasan industri untuk menarik investasi berkualitas tinggi yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.

2.2.1.23 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Serang tahun 2021-2024 sebesar 9,02%-8,94% sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah. Kontribusi sektor perdagangan terus bergerak naik dari tahun 2021 sampai 2023. Kontribusi pada tahun 2024 terlihat menurun namun nilai PDRB-ADHB dan nilai Perdagangan cenderung meningkat. Peningkatan aktivitas sektor perdagangan tumbuh akibat meningkatnya aksesibilitas, rute distribusi menuju tempat perbelanjaan, seperti ritel, mall dan pertokoan di dukung oleh pembangunan infrastruktur jalan dan akses digital yang mendorong perluasan media pemasaran.

Tabel 2. 49 Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Total Nilai PDRB-ADHB (juta rupiah)	80.231.260	87.983.133	95.079.210	102.120.370	108,865,895
Total Nilai Perdagangan (juta rupiah)	7.239.650	7.987.770	8.671.020	9.132.610	9,592,202
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB (persen)	9,02%	9,08%	9,12%	8,94%	8.81

Sumber: BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel diatas, aktivitas ekonomi di Kabupaten Serang menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil pada periode tahun 2021 hingga 2025. Sektor perdagangan menjadi salah satu penopang struktur ekonomi daerah dengan dinamika perkembangan sebagai berikut:

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serang mengalami kenaikan konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, PDRB tercatat sebesar Rp80,23 triliun (80.231.260 juta rupiah) dan terus tumbuh hingga mencapai Rp108,86 triliun (108.865.895 juta rupiah) pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan dan ekspansi ekonomi makro daerah yang berjalan dengan baik. Peningkatan Nilai Nominal Sektor Perdagangan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi makro, total nilai nominal yang dihasilkan oleh sektor perdagangan terus merangkak naik secara berkelanjutan. Nilai sektor ini meningkat dari Rp7,23 triliun (7.239.650 juta rupiah) pada tahun 2021 menjadi Rp9,59 triliun (9.592.202 juta rupiah) pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa volume transaksi, aktivitas distribusi, dan produktivitas usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Serang terus mengalami perluasan pasar.

Fluktuasi Prosentase Kontribusi Sektorm meskipun secara nominal nilai sektor perdagangan terus meningkat, kontribusinya secara prosentase terhadap total PDRB menunjukkan tren yang fluktuatif namun relatif stabil di kisaran 8,81% hingga 9,12%. Kontribusi sektor ini sempat mengalami kenaikan bertahap dari 9,02% (2021) menuju puncaknya di angka 9,12% (2023). Namun, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi sedikit penurunan persentase masing-masing ke angka 8,94% dan 8,81%. Terjadinya penurunan persentase kontribusi pada tahun 2024-2025 di tengah nilai nominal perdagangan yang sebenarnya tetap naik mengindikasikan bahwa terdapat sektor ekonomi lain di Kabupaten Serang yang laju pertumbuhannya berjalan jauh lebih akseleratif (misalnya sektor industri pengolahan atau sektor jasa lainnya). Kondisi ini memerlukan intervensi kebijakan strategis dalam dokumen perencanaan untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor perdagangan agar tidak tertinggal. Fokus program dapat diarahkan pada penguatan rantai pasok lokal, akselerasi transformasi digital/e-commerce bagi pelaku usaha retail dan UMKM, peningkatan kualitas sarana prasarana pasar tradisional, serta integrasi sektor perdagangan dengan pusat-pusat pertumbuhan industri di Kabupaten Serang.

2.2.1.24 Persentase Koperasi Sehat

Koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian daerah yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, penyedia modal kerja skala mikro, serta wadah penguatan usaha bersama di Kabupaten Serang. Kinerja keberhasilan pembinaan koperasi tidak hanya diukur dari kuantitas atau jumlah kelembagaan yang terbentuk, melainkan dari kualitas tata kelola organisasi dan tingkat kesehatan usaha koperasi tersebut. Persentase koperasi yang masuk dalam kategori "Sehat" di Kabupaten Serang saat ini mencapai 10,92 % dari total koperasi aktif yang dinilai. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar koperasi sektor unggulan (baik koperasi karyawan, koperasi simpan pinjam, maupun koperasi sektor riil seperti perikanan dan pertanian) telah menerapkan prinsip akuntabilitas, manajemen permodalan yang kuat, serta rutin menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai fungsi tertinggi kedaulatan anggota.

Tabel 2. 50 Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Serang Tahun 2022-2025

Indikator	2022	2023	2024	2025
Persentase Koperasi Sehat	8,62	10,46	10,07	10,92

Sumber: Diskoumperindag Kabupaten Serang Tahun 2026

Meskipun secara agregat terdapat kenaikan sebesar 2,3% dari tahun 2022 ke tahun 2025, angka mutlak persentase koperasi sehat yang berada di kisaran ~10% menunjukkan bahwa mayoritas koperasi di Kabupaten Serang masih memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan program fasilitasi, sertifikasi kompetensi pengelola, modernisasi tata kelola (digitalisasi), serta peningkatan intensitas pengawasan oleh Diskoumperindag Kabupaten Serang guna mendorong akselerasi persentase koperasi sehat secara lebih masif.

2.2.1.25 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang krusial dalam mengukur tingkat kemandirian ekonomi daerah dan kapasitas penciptaan lapangan kerja formal secara mandiri. Bagi Kabupaten Serang, peningkatan rasio kewirausahaan menjadi motor penggerak utama dalam mengurangi angka pengangguran terbuka (TPT) dan memperkuat ketahanan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah dinamisnya arus industrialisasi wilayah. Berikut ini adalah tabel Rasio Kewirausahaan Kabupaten Serang Tahun 2024-2025.

Tabel 2. 51 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Serang Tahun 2024-2025

Indikator	2024	2025
Rasio Kewirausahaan	0,2	0,4

Sumber: Disporapar Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Serang pada periode tahun 2024 hingga 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan sebesar 100%, yaitu tumbuh dari angka 0,2 pada tahun 2024 menjadi 0,4 pada tahun 2025. Meskipun tren pertumbuhan ini menunjukkan arah perkembangan yang positif dan mengindikasikan mulai tumbuhnya minat masyarakat dalam sektor wirausaha, nilai rasio yang masih berada di bawah angka 1 ini mengisyaratkan bahwa ekosistem kewirausahaan di daerah masih berada pada tahap rintisan awal. Oleh karena itu, dalam dokumen perencanaan ke depan, capaian ini perlu dijadikan momentum untuk memperkuat intervensi kebijakan melalui penyediaan program pelatihan manajemen usaha yang sistematis, kemudahan akses permodalan bagi UMKM, serta fasilitasi legalitas usaha guna mempercepat akselerasi dan meningkatkan kontribusi sektor kewirausahaan terhadap perekonomian Kabupaten Serang secara lebih masif.

2.2.1.26 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu pilar utama dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serang yang merepresentasikan denyut nadi industri pariwisata, ekonomi kreatif, dan konsumsi domestik. Sebagai wilayah yang memiliki keunggulan geo-strategis mulai dari kawasan wisata pesisir Anyar-Cinangka, destinasi religi, hingga pusat-pusat pertumbuhan baru di sekitar kawasan industri, kontribusi sektor ini menjadi indikator kunci dalam mengukur sejauh mana aktivitas pariwisata dan industrialisasi mampu memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi masyarakat lokal. Peningkatan rasio PDRB makan minum sangat krusial untuk mendorong diversifikasi ekonomi daerah agar tidak hanya bergantung pada sektor industri pengolahan, sekaligus menjadi motor penggerak bagi penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan UMKM sektor kuliner serta perhotelan. Berikut adalah capaian Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Tahun 2021-2025 di Kabupaten Serang.

Tabel 2. 52 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Kabupaten Serang Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Kewirausahaan	3.75	7.67	8.23	8.11	5.95

Sumber: BPS Kabupaten Serang Tahun 2026

Berdasarkan Tabel diatas mengenai Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Kabupaten Serang, perkembangan indikator Rasio Kewirausahaan menunjukkan tren yang fluktuatif sepanjang tahun 2021 hingga 2025. Indikator ini awalnya mengalami peningkatan pesat dari 3,75 pada tahun 2021 menjadi 7,67 pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya di angka 8,23 pada tahun 2023. Namun, performa tersebut menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun berikutnya, bergeser menjadi 8,11 pada tahun 2024 dan turun cukup signifikan hingga menyentuh angka 5,95 pada tahun 2025. Dinamika penurunan di akhir periode ini mengindikasikan adanya tantangan struktural atau perlambatan daya saing pada sektor akomodasi serta penyediaan makan dan minum di daerah, sehingga dalam dokumen perencanaan diperlukan adanya strategi intervensi yang berfokus pada revitalisasi sektor pariwisata, penguatan rantai pasok kuliner lokal, serta insentif kemudahan usaha guna memulihkan kembali kewirausahaan di sektor potensial ini.

Tabel 2. 53 Capaian IKU Misi III RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Ket	Bidang Urusan
				Target	Realisasi	Capaian		
	Misi 3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan							
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,18	9.18-9.74	8,73	110,37	Tercapai	
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp. Triliun	22,1	22,61	22,97	101,59	Tercapai	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta/TK	41,50	84,94	128	150,69	Tercapai	Urusan Tenaga Kerja
	Persentase Peningkatan Investasi	%	84,28	86,82	25,23	29,06	Tidak tercapai	Urusan Penanaman Modal
	Indeks Gini	%	0,267	0.262-0.266	0,252	105,26	Tercapai	
	Indeks Desa	Angka	-	67,51	68,7	101,76	Tercapai	Urusan

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Ket	Bidang Urusan
				Target	Realisasi	Capaian		
								Pembedayaan Masyarakat dan Desa
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	61,406	67,77	64,67	95,43	Tidak tercapai	Urusan Lingkungan Hidup
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	-	65	66,44	102,22	Tercapai	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas

Sumber: Bapperida Kabupaten Serang Tahun 2026 (diolah)

2.2.1.27 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik.

Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah penduduk usia kerja yang tidak punya pekerjaan dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Serang setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,04% pada periode 2021-2023 seiring dengan meningkatnya penduduk usia kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk usia kerja maka angkatan kerja pun akan bertambah.

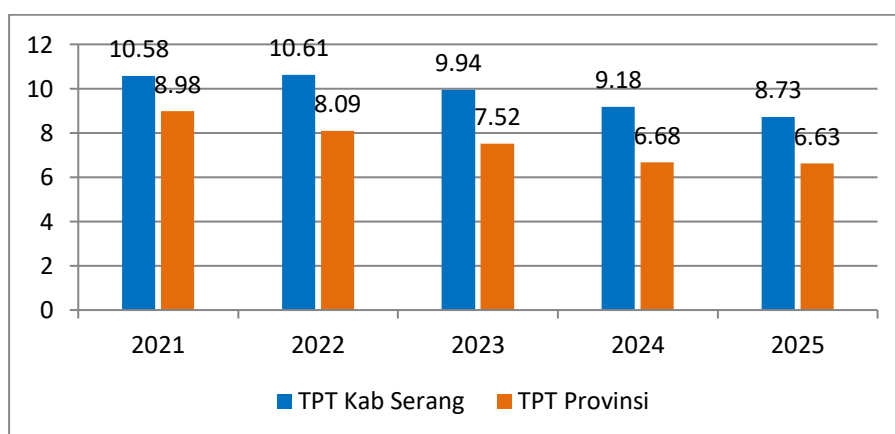
**Tabel 2. 54 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja (Ribuan Orang)
Kabupaten Serang 2021-2025**

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Penduduk Usia Kerja	1.111,65	1.119,99	1260,37	1.277,73	1294.84
Angkatan Kerja	709,94	719,65	796,82	865,90	873,86
Bekerja	634,83	643,28	717,58	786,38	797,49
Pengangguran	75,11	76,37	79,24	79,52	76.33
Bukan Angkatan Kerja	401,72	400,34	463,55	411,83	421.03

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Dari grafik di bawah terlihat selama periode 2021-2025, TPT di Kabupaten Serang berada di atas TPT Provinsi Banten. Rata-rata TPT Kabupaten Serang setiap tahunnya mencapai 10,08%, sedangkan TPT Provinsi Banten mencapai rata-rata 8,2%. Nilai TPT Kabupaten Serang selama periode 2021-2025 mengalami fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2021 berada di nilai 10,58% namun mengalami sedikit kenaikan di Tahun 2022 dengan nilai 10,61% namun hingga di tahun 2025 terjadi penurunan ke 8,73%.

Grafik 2. 12 TPT (Persen) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Serang, 2025

Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang berpengaruh pada pergerakan sebuah perekonomian di suatu daerah. Hal tersebut dapat terlihat dengan meningkatnya TPAK dan peningkatan tersebut diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan, maka dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja tersebut dapat berdampak terhadap semakin menurunnya angka pengangguran.

Dengan demikian, semakin sedikitnya angka pengangguran ini berarti orang yang memiliki pekerjaan sudah lebih banyak dan orang tersebut memiliki pendapatan, sehingga dengan pendapatannya tersebut dapat meningkatkan investasi dalam bentuk tabungan yang berdampak pada pendapatan wilayah akan meningkat melalui pajak (pajak penghasilan) dan ini juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 2. 55 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2021-2025 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab Pandeglang	7,7	9,24	9,05	8,09	8,8
Kab Lebak	7,86	8,55	7,57	6,23	7,3
Kab Tangerang	9,06	7,88	6,94	6,06	5,94
Kab Serang	10,58	10,61	9,94	9,18	8,73
Kota Tangerang	9,07	7,16	6,76	5,92	5,88
Kota Cilegon	10,13	8,1	7,25	6,08	7,41
Kota Serang	9,41	8,17	7,45	7,12	6,95
Kota Tangerang Selatan	8,6	6,59	5,81	5,09	4,13
Provinsi Banten	8,98	8,09	7,52	6,68	6,69

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung menurun, meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa wilayah. Kabupaten Serang, misalnya, mencatat TPT tertinggi pada tahun 2022 sebesar 10,61 persen, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 8,73 persen pada tahun 2025. Pola penurunan juga terlihat di sebagian besar daerah lain, seperti Kota Tangerang Selatan yang mengalami penurunan cukup signifikan dari 8,6 persen pada tahun 2021 menjadi 4,13 persen pada tahun 2025, serta Kabupaten Tangerang yang turun dari 9,06 persen menjadi 5,94 persen pada periode yang sama.

Di sisi lain, beberapa daerah mengalami fluktuasi, seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang sempat mengalami kenaikan sebelum kembali menurun. Kota Cilegon juga menunjukkan penurunan dari 10,13 persen pada tahun 2021 menjadi 7,41

persen pada tahun 2025, meskipun sempat turun lebih rendah pada tahun 2024. Secara keseluruhan, TPT Provinsi Banten mengalami penurunan dari 8,98 persen pada tahun 2021 menjadi 6,69 persen pada tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Namun demikian, masih terdapat disparitas antar daerah yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam pemerataan kesempatan kerja di seluruh kabupaten/kota.

2.2.1.28 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang merepresentasikan aktivitas investasi fisik atau akumulasi barang modal di daerah, memegang peran yang sangat vital dan strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten Serang. Sebagai kontributor utama kedua dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serang menurut pengeluaran, PMTB mencerminkan intensitas pembangunan infrastruktur publik serta dinamika masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Mengingat posisi Kabupaten Serang yang sangat strategis sebagai salah satu koridor industri utama di Provinsi Banten, fluktuasi nilai PMTB secara langsung memengaruhi kapasitas produksi sektor-sektor unggulan, khususnya sektor industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan dan jasa. Akumulasi modal tetap yang kuat di wilayah ini terbukti mampu menciptakan multiplier effect yang luas, mulai dari peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal hingga penyediaan sarana dan prasarana penunjang perekonomian yang lebih berkualitas.

Dalam kerangka dokumen perencanaan ini, penguatan komponen PMTB diarahkan sebagai tuas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Untuk itu, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang difokuskan pada optimalisasi daya tarik investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi sistem perizinan, serta pemberian kepastian hukum dan kemudahan berusaha (ease of doing business). Langkah strategis tersebut disinergikan dengan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah, pengembangan kawasan industri terpadu, serta fasilitasi kemitraan strategis antara industri skala besar dengan pelaku UMKM lokal. Melalui optimalisasi kontribusi PMTB, diharapkan Kabupaten Serang mampu menjaga keberlanjutan investasi, memperluas lapangan kerja, dan mengakselerasi transformasi ekonomi menuju kemandirian daerah yang tangguh.

2.2.1.29 PDRB Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan pengeluaran disusun sebagai salah satu perangkat data ekonomi untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah ataupun sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi di dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan. Publikasi ini telah menggunakan tahun dasar 2010 serta menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations. Perkembangan perekonomian Kabupaten Serang terus mengalami perubahan seiring perkembangan aktivitas perekonomian wilayah dan regional yang mempengaruhinya. Hal ini terlihat dari kinerja perekonomian Kabupaten Serang selama periode tahun 2021–2025. Perkembangan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta tingkat pertumbuhan pada total PDRB. Nilai PDRB Kabupaten Serang (ADHB) menurut pengeluaran selama periode tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan peningkatan dari 80.231,26 miliar rupiah menjadi 102.120,37 miliar rupiah. Gambaran PDRB ADBH menurut pengeluaran selama kurun waktu tahun 2021-2025 di Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 56 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Serang Tahun 2021-2025 (Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
1. Konsumsi Rumah Tangga	43.993,21	48.061,35	50.856,91	55.213,37	58.312,060
2. Konsumsi LNPRT/NPISH	494,79	534,68	567,13	646,22	661,020
3. Konsumsi Pemerintah	2.299,45	2.429,79	2.527,21	2.759,29	3.199,660
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31.879,42	34.949,50	37.131,54	38.556,56	41.998,210
5. Perubahan Inventori	0,20	0,79	15,76	1,23	-134,79
6. Ekspor	1.564,20	2.007,03	3.981,88	4.943,70	4829730
PDRB	80.231,26	87.983,13	95.080,44	102.120,37	108.865,89

Sumber : BPS Kabupaten Serang, Tahun 2026

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku (ADHB), PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga) atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Gambaran PDRB ADHK menurut

pengeluaran di Kabupaten Serang tahun 2021-2025 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 57 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Kabupaten Serang Tahun 2021-2025 (Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
1. Konsumsi Rumah Tangga	31.663,28	32.631,26	33.735,66	35.391,76	36.601,54
2. Konsumsi LNPRT/NPISH	347,71	362,14	364,69	397,37	402,25
3. Konsumsi Pemerintah	1.320,46	1.332,41	1.338,97	1.373,32	1.520,92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20.582,08	20.984,92	21.562,13	22.064,88	22.974,31
5. Perubahan Inventori	0,25	1,00	4,68	1,68	-98,07
6. Ekspor	48.983,97	54.053,68	56.189,87	4.026,31	5.122,80
7. Impor	48.053,10	51.758,31	52.826,44		
PDRB	54.844,65	57.605,99	60.369,96	63.255,33	66.523,750

Sumber : BPS Kabupaten Serang, Tahun 2026

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serang menurut Pengeluaran atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan tren yang meningkat selama periode Tahun 2021–2025. Nilai PDRB meningkat dari sebesar Rp54.844,65 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp66.523,75 miliar pada Tahun 2025, atau bertambah sebesar Rp11.679,10 miliar. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi daerah yang didukung oleh hampir seluruh komponen pengeluaran.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB, dengan nilai yang terus meningkat dari Rp31.663,28 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp36.601,54 miliar pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi motor utama penggerak perekonomian Kabupaten Serang.

Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) juga mengalami peningkatan secara bertahap, yaitu dari Rp347,71 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp402,25 miliar pada Tahun 2025. Demikian pula Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) meningkat dari Rp1.320,46 miliar menjadi Rp1.520,92 miliar, yang mencerminkan meningkatnya peran belanja pemerintah dalam mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan publik.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami peningkatan dari Rp20.582,08 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp22.974,31 miliar pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan investasi, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas

produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Perubahan Inventori menunjukkan fluktuasi selama periode pengamatan. Setelah mencatat nilai positif pada Tahun 2021 hingga Tahun 2024, yaitu masing-masing sebesar Rp0,25 miliar, Rp1,00 miliar, Rp4,68 miliar, dan Rp1,68 miliar, pada Tahun 2025 komponen ini tercatat minus Rp98,07 miliar. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan nilai persediaan (destocking) dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi perdagangan luar daerah/luar negeri, nilai ekspor meningkat dari Rp48.983,97 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp56.189,87 miliar pada Tahun 2023. Adapun pada Tahun 2024 dan 2025, tabel hanya menampilkan nilai impor, yaitu masing-masing sebesar Rp4.026,31 miliar dan Rp5.122,80 miliar, sehingga analisis ekspor neto pada kedua tahun tersebut perlu mengacu pada data BPS yang lengkap.

Secara keseluruhan, peningkatan PDRB Kabupaten Serang Tahun 2025 didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga non-profit, serta investasi (PMTB), meskipun terjadi kontraksi pada komponen perubahan inventori. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Serang masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2. 58 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Serang Tahun 2021-2025

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
1. Konsumsi Rumah Tangga	54.83	59.90	63.39	68.82	72.68
2. Konsumsi LNPRT/NPISH	0.62	0.67	0.71	0.81	0.82
3. Konsumsi Pemerintah	2.87	3.03	3.15	3.44	3.99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	39.73	43.56	46.28	48.06	52.35
5. Perubahan Inventori	0.0002	0.0010	0.020	0.0015	-0.00017
6. Ekspor	1,95	2,28	4,19	4,84	6,01
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Serang, Tahun 2026

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2021-2025, rata-rata produk yang dikonsumsi di wilayah Kabupaten Serang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) sekitar 54,25 persen. Komponen ekspor berkontribusi rata-rata sekitar 3,31 persen. Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 2,87–2,70 persen.

Hal tersebut menunjukkan Proporsi konsumsi akhir pemerintah relatif stagnan pada kisaran rata-rata sebesar 2,74 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 37,76 persen. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Serang merupakan wilayah dengan industri yang bergerak di sektor sekunder (Industri Pengolahan), baik industri padat modal maupun padat karya. Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran juga dipengaruhi oleh pertumbuhan komponen pembentuknya. Tabel di bawah ini menunjukkan sumber pertumbuhan PDRD ADHK menurut pengeluaran. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga Kabupaten Serang cenderung meningkat, namun komponen ekspor dan impor mengalami penurunan.

Tabel 2. 59 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen) 2021 – 2025

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
1. Konsumsi Rumah Tangga	54.83	59.90	63.39	68.82	72.68
2. Konsumsi LNPRT/NPISH	0.62	0.67	0.71	0.81	0.82
3. Konsumsi Pemerintah	2.87	3.03	3.15	3.44	3.99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	39.73	43.56	46.28	48.06	52.35
5. Perubahan Inventori	0.0002	0.0010	0.020	0.0015	-0.00017
6. Ekspor	1,95	2,28	4,19	4,84	6,01
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Serang, Tahun 2024

Catatan : *)Angka Sementara ; **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data pada Tabel diatas, performa ekonomi makro Kabupaten Serang yang diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut pengeluaran menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang tangguh secara agregat, bergerak dari 3,74% pada tahun 2021 hingga mencapai akselerasi tertinggi sebesar 5,17% pada tahun 2025. Komponen PMTB, yang merepresentasikan geliat investasi fisik dan infrastruktur di Kabupaten Serang, menunjukkan lompatan signifikan di akhir periode analisis. Sempat melambat di angka 1,96% pada tahun 2022, pertumbuhan PMTB melesat naik hingga 4,12% pada tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Serang tetap menjadi tujuan investasi yang menarik, baik bagi

penanaman modal sektor industri maupun pembangunan infrastruktur penunjang. Pertumbuhan PDRB Pengeluaran tahun 2025 yang menyentuh 5,17% sangat didorong oleh tingginya Konsumsi Pemerintah (10,75%). Tantangan bagi dokumen perencanaan ke depan adalah memastikan bahwa belanja pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang tetap diarahkan pada belanja modal produktif yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap masyarakat. Mengingat investasi (PMTB) tumbuh kuat di angka 4,12% pada tahun 2025, kebijakan perencanaan harus diarahkan pada kemudahan perizinan, kesiapan kawasan industri, serta penyediaan tenaga kerja lokal yang kompeten agar investasi yang masuk berdampak langsung pada pengurangan pengangguran daerah.

2.2.1.30 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja dapat diukur dengan menggunakan pendekatan jumlah jam kerja. Dengan asumsi semakin lama jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja, akan semakin banyak jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Dengan kata lain, pekerjaanya akan semakin produktif. Penduduk Kabupaten Serang yang Bekerja Menurut Kategorisasi Lama Jam Kerja yang bekerja dapat digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu: pekerja penuh, setengah penganggur, pekerja paruh waktu dan sementara tidak bekerja. Adapun yang dimaksud kategori pekerja penuh ialah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu, dengan jumlah jam kerja minimal 35 jam. Sebaliknya kategori Setengah menganggur dan pekerja paruh waktu, pada prinsipnya adalah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu, namun memiliki jumlah jam kerja kurang dari 35 jam. Pengertian kategori setengah menganggur ini artinya masih berusaha mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Sebaliknya pekerja paruh waktu, tidak lagi mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Ada pula kategori Sementara tidak bekerja adalah pekerja yang memiliki pekerjaan, namun selama seminggu terakhir sedang tidak bekerja.

Tabel 2. 60 Jumlah jam kerja terhadap produktivitas tenaga kerja

Kategori Pekerja	Lama jam kerja
Sementara tidak bekerja	0
Setengah Penganggur/ Pekerja Paruh waktu	<35
Pekerja Penuh	>35

Sumber : Sakernas, BPS 2024

Penduduk Kabupaten Serang yang Bekerja Menurut Kategorisasi Lama Jam Kerja dalam kurun waktu tahun 2021-2024 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.61 Penduduk Kabupaten Serang berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja seminggu yang lalu menurut jumlah Jam Kerja Tahun 2021-2024

Jam Kerja pada seluruh Pekerjaan	Kategori Pekerja	2021	Jumlah Sesuai Kategori	2022	Jumlah Sesuai Kategori	2023	Jumlah Sesuai Kategori	2024	Jumlah Sesuai Kategori
0*	Sementara tidak bekerja	12.501	12.501	9.649	9.649	14.821	14.821	19.693	19.693
1-14	Setengah Penganggur/ Pekerja Paruh waktu	38.348	173.929	39.172	215.964	37.551	181.971	74.470	247.490
15-34	Setengah Penganggur/ Pekerja Paruh waktu	135.581		176.792		144.420		173.020	
35-40	Pekerja Penuh	117.170		160.688		219.280		164.409	
41-48	Pekerja Penuh	158.716		177.073		160.698		354.786	
>48	Pekerja Penuh	172.509		79.903		140.813			
Jumlah		634.825		643.277		717.583		786.378	

Sumber : BPS, Sakernas Agustus, Diolah oleh Bapperida 2025

Catatan : *) sementara tidak bekerja

Berdasarkan Tabel di atas, Terlihat bahwa pekerja berkategori pekerja penuh lebih dari 35 jam menurun dari 520.791 di tahun 2023 menjadi 519.195 pada Agustus 2024. Dengan mengasumsikan tingkat produktivitas dilihat dari lamanya jam kerja, untuk pekerja berkategori paruh waktu atau setengah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam kerja, mengalami kenaikan sekitar 36,0%. Dapat dikatakan bahwa produktivitas pekerja di Kabupaten Serang secara umum telah mengalami pergeseran seiring dengan menurunnya jumlah pekerja penuh dan meningkatnya pekerja paruh waktu. Selain itu pada kategori sementara tidak bekerja mengalami perubahan secara fluktuatif.

Selain berdasarkan jam kerja, untuk mengukur kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja berdasarkan status pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan dapat diasumsikan semakin tinggi kualitasnya. Tabel 2.146 di bawah ini memperlihatkan jenjang pendidikan yang ditamatkan angkatan kerja tahun 2021-2024 di Kabupaten Serang. Terlihat bahwa angkatan kerja dengan pendidikan sarjana fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2021- 2024. Pada tahun 2023 mengalami penurunan namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Dari sisi angkatan kerja pada jenjang sarjana tingkat pengangguran mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2023 ke 2024.

Tabel 2. 62 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Serang 2021-2024

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran		Bekerja	Pengangguran		Bekerja	Pengangguran		Bekerja	Pengangguran	
1	Sampai dengan SD	277.784	13.828	291.612	282.934	3.334	286.268	293.135	14.288	307.423	320.693	8.932	172.051
2	Sekolah Menengah Pertama	132.924	19.684	152.608	165.456	16.075	181.531	146.364	24.526	170.890	172.578	15.729	133.393
3	Sekolah Menengah Atas	186.493	40.637	227.130	221.086	52.867	273.983	172.182	36.571	208.753	253.423	52.820	98.996
4	Perguruan Tinggi	37.624	962	38.586	48.107	6.930	55.037	31.596	983	32.579	39.684	2.040	7.395

Sumber : BPS Kabupaten Serang, Tahun 2022-2025

Kegiatan ekonomi formal terdiri dari mereka yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Adapun sisanya, digolongkan ke dalam kegiatan informal. Persentase Penduduk Kabupaten Serang yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin dalam kurun waktu tahun 2023-2024 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 63 Persentase Penduduk Kabupaten Serang yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Agustus Tahun 2023-2024

Status Pekerjaan Utama	2023			2024		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Formal						
Buruh/Karyawan/ Pegawai	204.669	108.695	313.328	230.304	106.289	336.593
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/ Buruh Dibayar	14.629	3.002	17.631	9.439	1.995	11.434
Informal						
Berusaha sendiri	135.248	73.364	208.612	87.954	49.250	137.204
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar	44.502	15.753	60.255	60.789	36.717	97.506
Pekerja Bebas	53.883	12.442	66.325	81.012	32.343	113.355
Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	21.622	29.810	51.432	26.445	63.841	90.286

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan data yang ada pada Tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar pekerja di Kabupaten Serang bekerja pada sektor ekonomi formal yang berstatus Buruh/Karyawan/Pegawai dan informal yang Berusaha sendiri. Pada tahun 2024 persentase pekerja yang bekerja di sektor formal mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sekitar 5,16%. Meningkatnya sektor ekonomi formal, sebagai buruh/karyawan/ pegawai dapat disebabkan tumbuhnya industri pengolahan, yang ditandai oleh meningkatnya persentase pekerja pada lapangan usaha tersebut. Di sektor ekonomi informal juga mengalami kenaikan sekitar 13,38%. Kenaikan yang signifikan terjadi pada status pekerjaan utama Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar, Pekerja Bebas dan Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar. Sedangkan status pekerjaan Berusaha Sendiri mengalami penurunan jumlah.

2.2.1.31 Persentase Peningkatan Investasi

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu motor penggerak utama (growth engine) dalam transformasi ekonomi Kabupaten Serang. Sebagai salah satu koridor industri utama di Provinsi Banten, Kabupaten Serang secara konsisten berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan kompetitif. Kinerja sektor investasi tidak hanya diukur dari pemenuhan target nilai nominal realisasi, melainkan dari laju pertumbuhan persentase peningkatan investasi tahunan secara berkelanjutan. Peningkatan persentase investasi didominasi oleh ekspansi pada sektor Industri Pengolahan (Kimia, Logam, Tekstil, dan Makanan), serta diikuti oleh sektor Perdagangan dan Jasa. Geliat investasi pada sektor industri ini secara langsung memberikan kontribusi positif terhadap perluasan lapangan kerja lokal serta peningkatan produktivitas daerah.

Tabel 2. 64 Persentase peningkatan investasi di kabupaten

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	27,46	17,084	53,236	84,29	109,09

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Serang, Tahun 2025

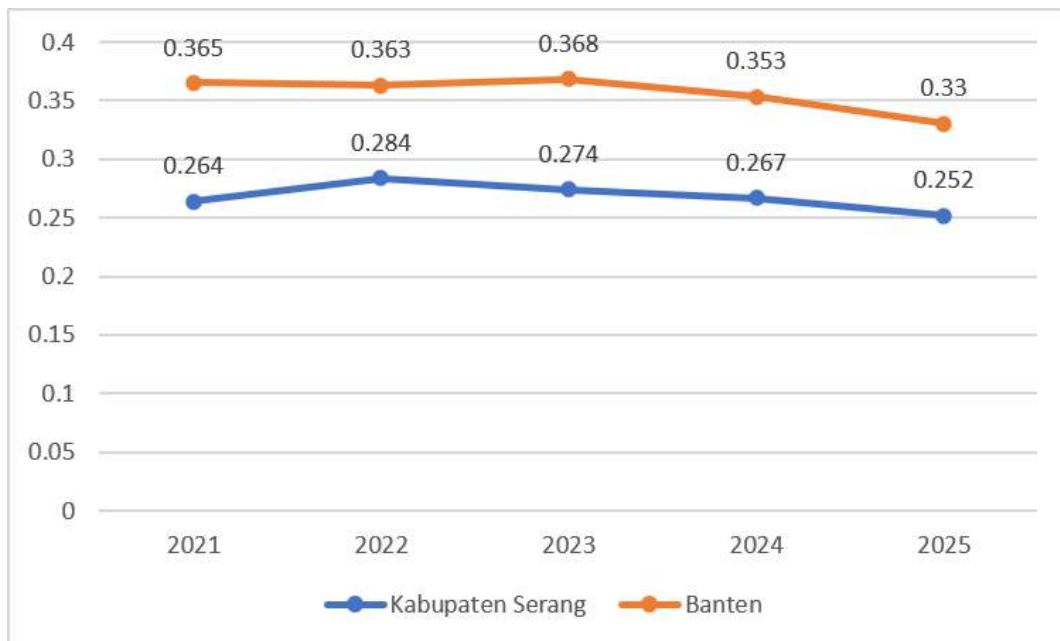
2.2.1.32 Indeks Gini

Indeks gini merupakan indeks yang mengukur tingkat pemerataan melalui pendekatan koefisien gini dimana koefisien tersebut dianalisis menggunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Sehingga Indeks gini digunakan

sebagai alat ukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Nilai rasio gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin tinggi. Sedangkan nilai rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Nilai rasio gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan kesenjangan distribusi pendapatan yang rendah dan pemerataan kesejahteraan antar penduduk. Kategori indeks gini terbagi menjadi tiga yaitu rasio gini lebih dari 0,5 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, rasio gini antara 0,3–0,5 mengartikan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan rasio kurang dari 0,3 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah

Ketimpangan antar wilayah dapat diartikan sebagai tidak meratanya distribusi pendapatan atau distribusi sumber daya lainnya ke setiap wilayah. Pergeseran aktifitas ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri salah satu penyebab ketimpangan ini karena semakin banyak masyarakat yang bekerja disektor yang lebih menjanjikan dan berakibat ketimpangan pendapatan yang tinggi. Indeks gini adalah salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dengan melihat tingkat ketimpangan ekonomi di dalamnya. Semakin besar ketimpangan terjadi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata sehingga terjadi deviasi dari rata-rata pengeluaran per kapita antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi atau antar provinsi dalam suatu negara.

Terdapat keterkaitan antara ketimpangan dengan pembangunan wilayah, dimana pesatnya pertumbuhan ekonomi seringkali diiringi dengan peningkatan ketimpangan. Oleh karena itu, permasalahan ketimpangan perlu segera ditangani karena berpotensi menghambat proses pembangunan wilayah. Secara umum, Indeks Gini Kabupaten Serang selama periode 2021–2025 berada di bawah Provinsi Banten dengan nilai yang berfluktuasi dan masih termasuk dalam kategori ketimpangan rendah (rasio $< 0,3$). Pada tahun 2021, Indeks Gini Kabupaten Serang sebesar 0,264, kemudian meningkat menjadi 0,284 pada tahun 2022. Selanjutnya, nilai tersebut menurun menjadi 0,274 pada tahun 2023, kembali turun menjadi 0,267 pada tahun 2024, dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,252 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan di Kabupaten Serang dalam beberapa tahun terakhir.

Grafik 2. 13 Indeks Gini Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, 2021-2025

Sumber: Sumber : BPS, Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Perbandingan Indeks Gini Kabupten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021-2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 65 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan daerah Berbatasan Kabupaten Serang Tahun 2021-2025

KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024	2025
Kab Pandeglang	0.266	0.302	0,243	0,245	0,227
Kab Lebak	0.332	0.312	0,271	0,257	0,235
Kab Tangerang	0.294	0.282	0,286	0,269	0,261
Kab Serang	0.264	0.284	0,274	0,267	0,252
Kota Tangerang	0.343	0.383	0,379	0,325	0,295
Kota Cilegon	0.363	0.318	0,362	0,360	0,329
Kota Serang	0.340	0.354	0,306	0,324	0,329
Kota Tangerang Selatan	0.370	0.359	0,359	0,395	0,375
Provinsi Banten	0.365	0.363	0,368	0,353	0,330

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2026

2.2.1.33 Indeks Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2025 ditentukan berdasarkan hasil pendataan Indeks Desa (ID) sedangkan pada tahun 2014 sd 2024

masih menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Klasifikasi status desa dihasilkan berdasarkan indeks desa dengan status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 66 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Serang 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Mandiri	3	4	12	15	23
2	Maju	50	64	68	83	113
3	Berkembang	254	254	245	227	190
4	Tertinggal	19	4	1	1	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
	Jumlah Desa	326	326	326	326	326

Sumber : DPMD Kabupaten Serang Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah desa tertinggal di Kabupaten Serang sudah terselesaikan semua dengan keluarnya Desa Cikedung Kecamatan Mancak dari desa tertinggal menjadi desa berkembang pada tahun 2025. Hal ini menunjukan kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Serang menunjukkan hasil yang positif bagi perkembangan desa yang ada.

2.2.1.34 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Gambaran kondisi lingkungan hidup dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah dicapai Kabupaten Serang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 67 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Uraian	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Udara	66,58	71,08	70,99	64,81
Indeks Kualitas Air	66,00	66,70	46,21	69,04
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36,62	36,34	69,77	56,92
IKLH	56,66	57,93	64,38	64,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Tahun 2026

Nilai IKLH Kabupaten Serang sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 terus meningkat. Pada tahun 2025 IKLH Kabupaten Serang tercatat sebesar 64,67 poin berada pada predikat Sedang ($50 \leq x < 70$). Realisasi nilai IKLH tahun 2025 tersebut berada dibawah target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 67,77 atau hanya tercapai sekitar 95,43%.

Nilai IKLH yang tidak mencapai target tersebut diidentifikasi disebabkan karena semakin meningkatkan pencemaran udara yang tercermin dari turunnya nilai Indeks Kualitas Udara dan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan nilai IKLH Kabupaten Serang perlu dilaksanakan beberapa kegiatan seperti peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara, rehabilitasi lahan kritis, penyadaran/sosialisasi maupun kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan maupun pemulihan.

2.2.1.35 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, secara umum pelaksanaan urusan kebencanaan dan kebakaran menunjukkan capaian yang baik. Pada aspek penanggulangan bencana, Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana mencapai 96,67% dari target 100%, menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat telah terlaksana hampir secara menyeluruh. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana mencapai 97,5% dari target 100%, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan respons cepat terhadap kejadian bencana. Sementara itu, Persentase Penanganan Pasca Bencana berhasil mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada urusan kebakaran, Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran telah mencapai 100%, sehingga target yang ditetapkan berhasil terpenuhi. Namun demikian, Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran masih mencapai 67,61% dari target 100%, sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitas pelayanan, baik dari sisi sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun jangkauan layanan. Untuk indikator Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran, realisasi tercatat 13,41 menit, masih berada di bawah batas target maksimal 15 menit. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan respons penanganan kebakaran telah memenuhi standar kinerja yang ditetapkan, meskipun tetap perlu diupayakan peningkatan agar waktu tanggap semakin cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Tabel 2. 68 Capaian IKU Misi IV RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Ket	Bidang Urusan
				Target	Realisasi	Capaian		
	Misi 4. Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan							
	Kontribusi Sektor Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan Terhadap PDRB	%	8,06	8,06	9,82	121,84	Tercapai	
	Persentase peningkatan produksi hasil pertanian							Urusan Pertanian
	1. Tanaman Pangan	%	0,73	0,44	9,65	2.193,18	Tercapai	Urusan Pertanian
	2. Hortikultura	%	173	5	-12	-240,00	Tercapai	Urusan Pertanian
	3. Perkebunan	%	6	5	5	100,00	Tercapai	Urusan Pertanian
	4. Peternakan	%	-29	0,98	14	1.428,57	Tercapai	Urusan Pertanian
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	81,39	81,76	82,12	100,44	Tercapai	Urusan Pangan
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Nilai Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	Ton	63.660,91	64.368,25	67.584,74	105,00	Tercapai	Urusan Kelautan dan Perikanan

2.2.1.36 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan indikator yang menunjukkan besarnya sumbangan nilai tambah sektor tersebut

terhadap total perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Karena menggunakan harga nominal, nilai PDRB ADHB masih dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi maupun deflasi), sehingga indikator ini lebih menggambarkan struktur ekonomi daerah dibandingkan pertumbuhan riil sektor.

Perkembangan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Serang selama periode 2021-2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.110 menunjukkan tren yang fluktuatif. Kontribusi sektor ini menurun secara bertahap dari 9,80% pada tahun 2021 menjadi 9,37% pada tahun 2024 atau berkurang sebesar 0,43 poin persentase, kemudian kembali meningkat menjadi 9,82% pada tahun 2025. Penurunan tersebut tidak serta-merta mencerminkan penurunan kinerja sektor pertanian, melainkan dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor lain yang lebih cepat, peningkatan nilai tambah sektor pertanian yang lebih rendah dibandingkan sektor lainnya, maupun adanya transformasi struktur ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier.

Tabel 2. 69 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Serang

Lapangan Usaha PDRB-ADHB	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,8	9,72	9,47	9,37	9,82

Sumber: BPS Kabupaten Serang Tahun 2026

Dengan demikian, penurunan kontribusi lebih mencerminkan perubahan komposisi perekonomian daerah daripada melemahnya kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sebaliknya, peningkatan kontribusi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa peran sektor ini dalam pembentukan PDRB Kabupaten Serang kembali menguat setelah mengalami penurunan pada beberapa tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama lima tahun terakhir relatif stabil pada kisaran 9,37% hingga 9,82%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi salah satu penopang penting perekonomian Kabupaten Serang serta memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap dinamika ekonomi daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah hasil pertanian, hilirisasi hasil pertanian, dan daya saing komoditas lokal agar agar sektor ini mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1.37 Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian

Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian merupakan indikator kinerja yang baru digunakan. Indikator ini menggambarkan tingkat pertumbuhan produksi komoditas pertanian dari tahun ke tahun sebagai hasil pelaksanaan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Serang. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan intervensi pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian, penerapan teknologi budidaya, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta penguatan kelembagaan petani.

Secara konseptual, indikator ini merefleksikan laju pertumbuhan (growth rate) produksi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Semakin tinggi nilai persentase peningkatan produksi, semakin menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan pertanian mampu meningkatkan kapasitas produksi sektor pertanian secara berkelanjutan. Sebaliknya, penurunan atau stagnasi nilai indikator mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi produksi, baik faktor teknis, ekonomi, maupun lingkungan.

Dalam implementasinya, indikator ini tidak hanya mencerminkan peningkatan volume produksi, tetapi juga menjadi proksi terhadap meningkatnya produktivitas usaha tani, efisiensi pemanfaatan lahan, keberhasilan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta efektivitas layanan penyuluhan dan pendampingan kepada petani.

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan perubahan produksi tahunan pada komoditas strategis yang mewakili seluruh subsektor pertanian, meliputi:

- Tanaman pangan (padi dan jagung);
- Hortikultura (cabai besar, bawang merah, dan buah-buahan);
- Perkebunan (kelapa, kopi, cengkeh, dan lada); serta
- Peternakan yang direpresentasikan melalui peningkatan populasi sapi.

Selanjutnya, persentase peningkatan masing-masing subsektor dihitung berdasarkan perbandingan produksi tahun berjalan terhadap produksi tahun sebelumnya, kemudian dirata-ratakan sesuai definisi operasional indikator. Pendekatan ini menghasilkan ukuran kinerja yang lebih representatif karena mempertimbangkan kontribusi seluruh subsektor utama pertanian Kabupaten Serang. Indikator ini juga memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah oleh karena itu, pencapaiannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan luas tanam dan luas panen, produktivitas

lahan, ketersediaan benih dan sarana produksi, kondisi iklim, pengendalian hama dan penyakit, pembangunan infrastruktur pertanian, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta efektivitas penyuluhan dan pemberdayaan petani.

2.2.1.38 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Berdasarkan data dibawah ini terlihat bahwa Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Serang mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar 79,26 di tahun 2023 menjadi 82,12 di tahun 2025. Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten Serang berada pada peringkat ke 3 dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten dan juga masuk kategori cut off point IKP kelompok 6 (kabupaten dengan nilai IKP di atas 75,68) yang artinya memiliki ketahanan pangan paling baik. Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. Dari sisi pemanfaatan pangan, Kabupaten Serang masih berada dibawah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data IKP, Kabupaten Serang sudah masuk dalam kategori sangat tahan pangan, karena Kabupaten Serang memiliki kontribusi besar pada produksi pertanian terutama beras dan hortikultura, karena mampu memenuhi indikator ketersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas pangan yang memadai.

Tabel 2. 70 Data Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota Tahun 2021-2025

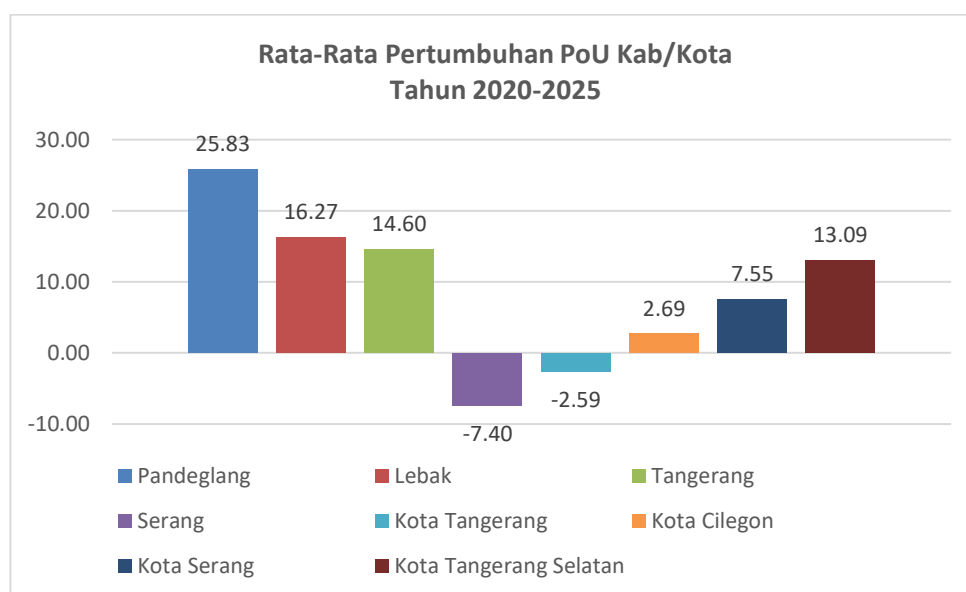
No	Kota	Keterjangkauan					Pemanfaatan					Komposit				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Tangerang Selatan	99,27	97,04	98,52	98,38		71,04	63,77	78,35	80,72		83,74	78,74	87,43	88,67	78,24
2	Kota Serang	70,52	70,08	91,65	91,13		53,64	51,54	54,88	56,25		61,24	59,88	71,42	71,95	78,52
3	Kota Cilegon	85,16	86,29	96,24	95,56		60,18	61,45	69,51	67,48		71,42	72,63	81,54	80,12	76,15
4	Kota Tangerang	80,86	84,36	91,99	91,75		77,27	74,77	81,81	81,14		78,88	79,08	86,39	85,92	81,43
5	Kabupaten Serang	87,55	87,56	84,80	89,39		63,60	66,24	68,59	70,33		77,70	78,63	79,26	81,39	82,12
6	Kabupaten Lebak	78,64	78,94	76,52	78,73		54,96	54,15	56,06	56,05		72,60	71,96	72,32	72,76	75,16
7	Kabupaten Tangerang	87,27	88,21	87,73	89,71		75,65	77,79	82,35	81,86		76,07	77,00	76,49	77,60	79,39
8	Kabupaten Pandeglang	79,53	79,40	81,73	83,20		54,71	52,59	55,95	57,52		73,39	72,32	74,87	75,63	65,24

Sumber : Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2026

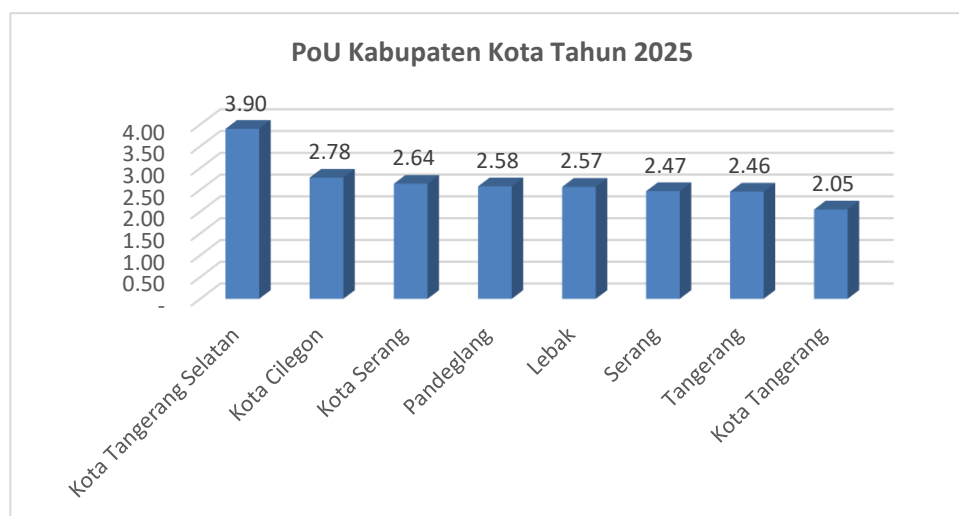
2.2.1.39 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)

Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan salah satu indikator makro dan strategis yang sangat krusial dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, ketahanan pangan, dan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Serang. Sebagai indikator yang diadopsi global dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan ke-2 (Tanpa Kelaparan), PoU merepresentasikan estimasi persentase populasi yang konsumsi energi makanan hariannya berada di bawah kebutuhan energi minimum untuk hidup sehat dan aktif. Di Kabupaten Serang, dinamika nilai PoU sangat dipengaruhi oleh tingkat keterjangkauan daya beli masyarakat, stabilitas harga bahan pangan pokok di pasar domestik, serta efektivitas distribusi pangan ke wilayah pedesaan. Penurunan angka PoU mengindikasikan semakin meratanya akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi, yang secara simultan berkontribusi langsung pada penurunan angka tengkes (stunting) dan peningkatan kualitas hidup generasi mendatang di Kabupaten Serang. Berikut rata-rata pertumbuhan PoU Kabupaten Kota di Provinsi Banten dari tahun 2020-2025

Grafik 2. 14 Pertumbuhan Angka PoU Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2025



Sumber : Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Grafik 2. 15 Peringkat Angka PoU Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025

Sumber : BPS, Tahun 2026

Tabel 2. 71 Pertumbuhan Angka PoU Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2025

Kabupaten/Kota	PoU Kabupaten Kota Tahun 2020-2025						Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Kota Tangerang Selatan	1.51	1.89	1.50	1.92	3.13	3.90	13.09
Kota Cilegon	2.02	2.46	2.04	2.19	1.96	2.78	2.69
Kota Serang	1.29	1.99	2.42	2.30	2.18	2.64	7.55
Pandeglang	3.60	4.37	4.39	4.69	2.70	2.58	25.83
Lebak	3.14	3.87	3.45	4.82	2.52	2.57	16.27
Serang	2.44	3.03	2.90	3.23	2.13	2.47	-7.40
Tangerang	1.84	2.65	2.28	2.59	2.22	2.46	14.60
Kota Tangerang	1.42	2.16	1.71	1.58	1.89	2.05	-2.59

Sumber : BPS, Tahun 2026

Tabel 2. 72 Jumlah Penduduk yang Mengalami Ketidacukupan Konsumsi Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025

KODE	KABUPATEN/KOTA	PoU	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Undernourished (Jiwa)
3603	TANGERANG	2,22	4.065.537	90.331
3674	KOTA TANGERANG SELATAN	3,13	1.834.112	57.482
3671	KOTA TANGERANG	1,89	2.372.958	44.958
3602	LEBAK	2,52	1.323.472	33.383
3601	PANDEGLANG	2,70	1.235.309	33.317
3604	SERANG	2,13	1.527.436	32.601
3673	KOTA SERANG	2,18	736.041	16.048
3672	KOTA CILEGON	1,96	462.145	9.068

Sumber : Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan angka Prevalence of Undernourishment (PoU) di Kabupaten Serang sepanjang periode 2020 hingga 2025 menunjukkan performa yang sangat progresif dan menggembirakan dengan tren pertumbuhan rata-rata yang bernilai negatif, yaitu sebesar -7,40%. Meskipun angka PoU sempat berfluktuasi dari 2,44% pada tahun 2020, naik menjadi 3,03% (2021), turun tipis ke 2,90% (2022), dan kembali meningkat menjadi 3,23% pada tahun 2023, intervensi kebijakan pangan daerah berhasil menekan angka tersebut secara signifikan menjadi 2,13% pada tahun 2024 sebelum mengalami sedikit penyesuaian di angka 2,47% pada tahun 2025. Capaian laju pertumbuhan rata-rata negatif sebesar -7,40% ini menempatkan Kabupaten Serang sebagai salah satu daerah dengan penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan terbaik di Provinsi Banten, sehingga dalam dokumen perencanaan selanjutnya, pemerintah daerah perlu mempertahankan momentum ini dengan memperkuat jaring pengaman sosial pangan serta meningkatkan efektivitas distribusi pangan lokal guna menjamin aksesibilitas pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. 73 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen) Per Kabupaten/kota (Persen) di Provinsi Banten Tahun 2021-2024

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024
1	Kota Tangerang Selatan	1,89	1,5	1,92	3,13
2	Kota Serang	1,99	2,42	2,3	2,18
3	Kota Tangerang	2,16	1,71	1,58	1,89
4	Tangerang	2,65	2,28	2,59	2,22
5	Lebak	3,87	3,45	4,82	2,52
6	Kota Cilegon	2,46	2,04	2,19	1,96
7	Kab Serang	3,03	2,9	3,23	2,13
8	Pandeglang	4,37	4,39	4,69	2,70

Sumber : Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Serang selama periode 2021-2023 mengalami fluktuasi. Sempat mengalami kenaikan di tahun 2023 namun mengalami penurunan di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan jumlah populasi yang kurang energi untuk hidup sehat. Penyebab terjadinya penurunan pravelensi ketidakcukupan pangan diakibatkan oleh ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, yang dipengaruhi oleh aksesibilitas pangan bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah melalui program bantuan pangan.

2.2.1.40 Jumlah Total Produksi Perikanan

Capaian total produksi perikanan tahun 2024 mencapai 63.660,91 ton, dan capaian 2025 sebesar 67.584,74 ton. Melebihi target pada tahun 2025 yang ditargetkan di angka 64.368,25 ton. Untuk meningkatkan jumlah total produksi perikanan, Pemerintah Kabupaten Serang perlu mendorong peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya melalui penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas benih dan pakan, penerapan teknologi budidaya yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan nelayan dan pembudidaya, pengembangan pengolahan hasil perikanan, serta perluasan akses pemasaran guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Tabel 2. 74 Capaian IKU Misi V RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Ket	Bidang Urusan
				Target	Realisasi	Capaian		
	Misi 5.							
	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih. handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima							
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,77	77,4	80,77	104,35	Tercapai	
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,15	4,2	4,15	98,81	Tidak tercapai	Unsur Sekretariat Daerah
	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	77,11	78	77,11	98,86	Tidak tercapai	Unsur Sekretariat Daerah
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3,204	3,25	3,02	92,92	Tidak tercapai	Unsur Pengawasan
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	-	95,25	94,39	99,10	Tidak tercapai	Unsur Perencanaan
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Skor	WTP	WTP	WTP	100,00	Tercapai	Unsur Keuangan
	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	27,05	31,57	31,32	99,21	Tidak tercapai	Unsur Keuangan
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	84,14	84,14	85,43	101,53	Tercapai	Unsur Kepegawaian
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,73	3,75	3,97	105,87	Tercapai	Urusan Komunikasi dan Informatika
	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Nilai	-	-	-	-	-	Urusan Komunikasi dan Informatika
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	94,60	88,5	99,67	112,62	Tercapai	Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Ket	Bidang Urusan
				Target	Realisasi	Capaian		
	(PPID)							
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,55	2,6	2,55	98,08	Tidak tercapai	Urusan Statistik
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	395	497	366	73,64	Tidak tercapai	Urusan Persandian
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	51,33	61	65,13	106,77	Tercapai	Urusan Kearsipan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,89	84	83,81	99,77	Tidak tercapai	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Skor	76,99	81	80,63	99,54	Tidak Tercapai	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	72,2	72,2	72,3	100,14	Tercapai	Unsur Kewilayahan
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Angka	55	62,5	55	88,00	Tidak tercapai	Urusan Pertanahan
	Persentase hasil riset. invensi dan inovasi yang dimanfaatkan	%	-	55	71,43	129,87	Tercapai	Unsur Penelitian dan Pengembangan
	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	-	100	90,98	90,98	Tidak tercapai	Unsur Sekretariat DPRD

2.2.1.41 Indeks Reformasi Birokrasi

Sekretariat Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah. Layanan kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Serang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 75 Layanan Kinerja Sekretariat Daerah

Layanan	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	51.43	54.72	61.11	71.78
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	B	B (67,33)	-77,11
Indeks Kepuasan Masyarakat	81.56	80,19	81.81	82.89

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

2.2.1.42 Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik prima dan cepat masih dalam tantangan yang cukup besar di tingkat daerah, dimana capaian skor indeks pelayanan publik pada level provinsi dan kabupaten/kota masih relatif rendah dibanding K/L; (i) Kabupaten/Kota (3,27), (ii) Provinsi (3,88), dan (iii) K/L (4,00).

2.2.1.43 Nilai SAKIP Pemda

Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Serang pada Tahun 2025 sebesar 77,11 dengan kategori BB (Sangat Baik). Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang telah berjalan dengan baik, yang tercermin dari semakin meningkatnya kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan. Nilai tersebut juga mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berorientasi pada hasil (outcome) dan peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa aspek untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi.

Meskipun memperoleh kategori BB (Sangat Baik), masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Belum optimalnya keterkaitan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja pada seluruh perangkat daerah.
2. Pengukuran kinerja sebagian indikator masih berfokus pada output dan belum sepenuhnya mengukur outcome atau dampak pembangunan.
3. Pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan masih perlu diperkuat.
4. Kualitas penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja program pada beberapa perangkat daerah masih perlu ditingkatkan agar

lebih spesifik, terukur, relevan, dan berorientasi hasil.

5. Kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan manajemen kinerja dan evaluasi berbasis hasil masih perlu terus ditingkatkan.

2.2.1.44 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Serang pada Tahun 2025 mencapai nilai 3,02 dari target sebesar 3,25 atau terealisasi sebesar 92,92 persen terhadap target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang telah berjalan dengan cukup baik, di mana unsur-unsur pengendalian intern telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, capaian tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan, sehingga diperlukan penguatan implementasi pengendalian intern agar mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meminimalkan risiko, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi belum tercapainya target maturitas SPIP antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan program.
2. Kualitas dokumentasi dan implementasi unsur-unsur SPIP masih belum seragam antar perangkat daerah.
3. Kapasitas aparatur dalam pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan evaluasi masih perlu ditingkatkan.
4. Monitoring dan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.
5. Koordinasi antara perangkat daerah dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih perlu diperkuat dalam pembinaan dan pengawasan.

2.2.1.45 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang pada Tahun 2025 mencapai nilai 94,29 dari target sebesar 95,25 atau terealisasi sebesar 98,99 persen terhadap target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah telah terlaksana dengan

sangat baik, yang tercermin dari semakin meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, keselarasan antar dokumen perencanaan, keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan mekanisme perencanaan yang partisipatif dan berbasis data. Meskipun demikian, capaian tersebut masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan sehingga masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa aspek guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang semakin berkualitas, efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi belum tercapainya target Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain:

1. Kualitas data pembangunan yang digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan masih perlu ditingkatkan agar lebih mutakhir, lengkap, dan terintegrasi.
2. Sinkronisasi dan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi masih perlu terus diperkuat.
3. Kualitas indikator kinerja pada sebagian program dan kegiatan masih perlu disempurnakan agar lebih berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak pembangunan.
4. Partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan agar usulan pembangunan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyempurnaan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya optimal.

2.2.1.46 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK di Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 76 Opini BPK Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pemeriksaan Keuangan, 2026

Dalam mencapai opini WTP ini, terdapat beberapa hal yang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, yaitu :

- Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan berpedoman pada tahapan penyusunan APBD sebagaimana amanat peraturan perundang undangan.
- Seluruh OPD menyampaikan laporan GU dan TUP tepat waktu.
- Dilakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan.
- Penggunaan aplikasi dalam proses penatausahaan barang milik daerah sesuai regulasi.
- Pelaporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan Kabupaten Serang yaitu penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara intensif terutama pada beberapa perangkat daerah yang memiliki alokasi anggaran dan pengelolaan BMD yang besar.

Pemerintah Kabupaten Serang telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 13 tahun terakhir berturut-turut. Untuk mempertahankan dan meningkatkan opini WTP, Pemerintah Kabupaten Serang secara intensif berkolaborasi antara eksekutif dan legislatif, memperhatikan rambu-rambu yang diberikan BPK, memastikan pemenuhan norma-norma yang dilaksanakan, memastikan pemenuhan pelaksanaan mata anggaran, bersinergi antar lintas OPD. Upaya lain yang dilaksanakan adalah dengan terus meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, meningkatkan Sistem Pengendalian Internal, meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara.

2.2.1.47 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

A. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dapat menggambarkan derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah guna membiayai pembangunan daerah. Derajat desentralisasi fiskal pada umumnya sebanding dengan rasio kemandirian daerah. Skala interval derajat desentralisasi fiskal disajikan dalam tabel. Gambaran derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian daerah Kabupaten Serang selama kurun waktu tahun 2021-2024 disajikan dalam tabel.

Tabel 2. 77 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Diolah Bapperida Kabupaten Serang Tahun 2026

Tabel 2. 78 Derajat Desentralisasi Tahun 2021-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2021	791.086.613.633	3.134.683.662.174	25,2 %	Cukup
2022	808.234.793.841	3.093.374.494.135	26,13 %	Cukup
2023	878.932.689.941	3.249.548.492.416	27 %	Cukup
2024	944.314.942.625	3.490.788.052.662	25,21 %	Cukup
2025	1.107.264.900.400	3.535.684.299.055	31,32 %	Cukup

Sumber : Diolah Bapperida Kabupaten Serang Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat gambaran derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian daerah Kabupaten Serang selama kurun waktu tahun 2021-2024 mengalami kenaikan setiap tahun. Rata-rata rasio derajat desentralisasi selama periode tahun 2021 – 2025 adalah 26,97% per tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi pemerintahan Kabupaten Serang dalam skala interval Cukup pada skala 20,01-30,00%. Artinya Pemerintah Kabupaten Serang

memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan Pemerintahan, namun Pemerintah Kabupaten Serang perlu melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

B. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD bersumber dari: a) pajak Daerah; b) retribusi Daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah.

Adapun pengertian pajak daerah adalah pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Gambaran kontribusi pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Serang terhadap PAD disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 79 Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2021	431.057.419.963	791.086.613.633	54,49
2022	507.103.393.652	808.234.793.841	62,74
2023	539.805.674.041	878.932.689.941	61,42
2024	573.381.060.252	944.295.326.625	60,72
2025	736.179.846.949	1.107.264.900.400	66,49

Sumber : Diolah Bapperida Kabupaten Serang Tahun 2026

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kabupaten Serang dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021-2025 terus mengalami kenaikan, dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 61,17%. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Serang harus berfokus pada upaya pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

- a. Optimalisasi penguatan pendapatan daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha melalui :

- 1) Memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis Online system;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat.
- b. Optimalisasi kinerja BUMD dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
 - c. Evaluasi dan reformasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah;
 - d. Melakukan pendekatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Serang untuk membantu peningkatan PAD diluar dana bagi hasil yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat;
 - e. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
 - f. Revitalisasi, optimalisasi dan inventarisasi aset-aset daerah untuk untuk peningkatan pendapatan asli daerah

Salah satu cara meningkatkan pengelolaan pemungutan pajak daerah yaitu dengan mengembangkan aplikasi Dashboard Monitoring Pajak Daerah. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi pendapatan daerah, memantau realisasi pendapatan daerah dan menetapkan kebijakan. Kebijakan tersebut diantaranya memberikan stimulus pajak daerah berupa Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, melakukan kerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai strategi dalam mengejar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2.2.1.48 Indeks Profesionalitas ASN

Layanan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang berupa penyelenggaraan diklat, baik diklat teknis maupun diklat struktural, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN Kabupaten Serang. Layanan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BKPSDM pada tahun 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 80 Layanan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025

Layanan	Kinerja
Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	127 orang
Jumlah seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	451 orang
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	28,15%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Serang Tahun 2025

2.2.1.49 Indeks SPBE

Implementasi e-Government walaupun belum optimal memberikan pelayanan digital, cepat, mudah, dan murah sehingga masyarakat terlayani dengan baik namun dari sisi kesiapan pemerintah daerah sudah terlihat ada peningkatan, hal ini diindikasikan dari meningkatnya nilai indeks SPBE pada tahun 2024 sebesar 3,73 menjadi 3,97 pada tahun 2025. Nilai indeks SPBE tahun 2025 tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,75 dengan tingkat capaian sebesar 105,87.

Walaupun nilai Indeks SPBE di Kabupaten Serang telah melebihi target yang ditetapkan namun masih diperlukan beberapa hal penting yang harus dilakukan seperti:

- perlu optimalisasi tim koordinasi dan asesor
- penerapan manajemen yang terintegrasi
- perlunya pengokohan manajemen perubahan
- pelaksanaan audit keamanan yang sesuai prosedur BSSN baik audit internal maupun audit eksternal
- penyebarluasan konsep SPBE secara menyeluruh kepada ASN dan pemilik layanan di Perangkat Daerah

2.2.1.50 Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Serang pada tahun 2025 adalah sebesar 99,67 atau mengalami kenaikan dari nilai tahun sebelumnya (2024) yang sebesar 94,60. Nilai indeks tahun 2025 tersebut juga melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 sebesar 88,5 atau capainnya mencapai 112,62 %.

Capaian ini didukung dengan kompetensi SDM PPID yang memadai, kolaborasi dan koordinasi antar badan publik dan adanya Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) serta ditambah dengan regulasi pendukung. Untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja layanan informasi publik ini perlu dilakukan sosialisasi untuk penyebarluasan tata kelola pemberian informasi publik dan peningkatan kualitas SDM pengelola layanan informasi publik baik pada PPID Utama maupun PPID Pembantu secara menerus (berkelanjutan). Peningkatan nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik ini dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu: penguatan peran PPID Utama dan PPID Pembantu, penyediaan informasi publik secara proaktif dan percepatan layanan permohonan informasi publik.

2.2.1.51 Indeks Pembangunan Statistik

Realisasi IKU Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada tahun 2025 adalah sebesar 2,55 dengan predikat kurang. Nilai realisasi ini sama dengan capaian tahun 2024 (baseline) dan belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 2,66. Tingkat capaian Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2025 adalah 98,08. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian atau pengukuran Indeks Pembangunan Statistik oleh Badan Pusat Statistik sehingga tidak hasil evaluasi terbaru bagi daerah.

Penyebab masih rendahnya nilai IPS dapat diidentifikasi sebagai berikut: kualitas data yang belum optimal, proses bisnis statistic yang belum optimal, kurangnya SDM bidang statistic, dan belum optimalnya forum satu data. Untuk meningkatkan nilai IPS perlu dilakukan beberapa strategi yaitu: portal satu data, peningkatan kualitas SDM bidang statistic, peningkatan sarana dan prasarana penunjang.

2.2.1.52 Indeks Keamanan Informasi

Capaian nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) pada tahun 2025 hanya sebesar 73,46 % dari target yang ditetapkan sebesar 497. Realisasi nilai Indeks KAMI tahun 2025 sebesar 366 ini masih berada dibawah nilai indeks KAMI tahun 2024 (baseline) sebesar 395. Beberapa faktor yang menjadi kendala/hambatan untuk pencapaian target pada tahun 2025, yaitu:

- a) Kebijakan dan Prosedur keamanan informasi belum lengkap atau belum diterapkan secara konsisten
- b) Kesadaran serta kompetensi SDM yang masih kurang terkait terkait keamanan informasi

- c) Manajemen risiko keamanan informasi belum diterapkan dengan baik
- d) Audit, evaluasi dan perbaikan secara berkala pada sistem elektronik belum dilakukan secara konsisten
- e) Kontrol teknis (seperti pengelolaan akses, backup, patching dan monitoring) belum dilakukan secara optimal
- f) Belum mengacu pada standar yang dasar Penilaian Indeks KAMI seperti ISO/IEC 27001:2022

2.2.1.53 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemda

Penyelenggaraan kearsipan yang tertib dan akuntabel merupakan pilar utama dalam mewujudkan good governance dan mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terus mendorong transformasi tata kelola kearsipan melalui akselerasi implementasi aplikasi SRIKANDI guna mewujudkan tata pamong yang terintegrasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk mengukur efektivitas dan kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional, disusunlah dokumen Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Pengawasan periode ini memberikan penekanan khusus pada dua aspek krusial yaitu Pemenuhan kelengkapan bukti dukung (eviden) yang valid sebagai bentuk pertanggungjawaban legalitas aktivitas administrasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Standardisasi tata kelola fisik sarana dan prasarana arsip guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kelestarian arsip konvensional sebagai memori kolektif daerah. Untuk capaian Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 81 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	capaian
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	44,64	44,64	39,10	40,12	41,21	42,34	51,33	51,33	61	65,13

Sumber: DPKD Kabupaten Serang 2026

Pengelolaan fisik sarana dan prasarana arsip memegang peranan krusial guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kelestarian arsip konvensional sebagai memori kolektif daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah, realisasi kinerja dari tahun ke tahun menunjukkan tren perkembangan yang sangat positif dan progresif.

Pada tahun 2022, capaian riil indeks kearsipan berhasil menyentuh angka 40,12%, yang mana hasil tersebut telah melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 39,10%. Tren kenaikan ini terus terjaga secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Puncaknya pada tahun 2025, realisasi capaian mencatat lompatan signifikan hingga mencapai 65,13%. Hasil akhir tersebut tidak hanya menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, tetapi juga berhasil melampaui target tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 61,00% (tingkat ketercapaian sebesar 106,77%).

Keberhasilan realisasi kinerja yang melampaui target hingga akhir tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor pendukung strategis diantaranya Akselerasi Transformasi dan Digitalisasi Kearsipan (Sistem SRIKANDI). Adanya implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) secara menyeluruh di lingkup perangkat daerah. Digitalisasi ini mempermudah penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip secara sistematis dan aman, yang secara signifikan mendongkrak nilai pengawasan eksternal oleh ANRI.

2.2.1.54 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Serang pada Tahun 2025 mencapai nilai 83,81 dari target sebesar 84,00 atau terealisasi sebesar 99,77 persen terhadap target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang berada pada kategori baik. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat telah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, baik dari aspek persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, kompetensi petugas, perilaku pelaksana, maupun sarana dan prasarana pelayanan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih sedikit di bawah target yang ditetapkan sehingga diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Beberapa faktor yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

1. Belum meratanya kualitas pelayanan antar perangkat daerah dan unit pelayanan publik.
2. Waktu penyelesaian pelayanan pada beberapa jenis layanan masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
3. Pemanfaatan layanan digital dan inovasi pelayanan publik masih perlu ditingkatkan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
4. Kompetensi dan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan prima masih perlu terus ditingkatkan melalui pembinaan dan pelatihan.
5. Mekanisme pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan pada beberapa unit layanan masih memerlukan peningkatan agar lebih nyaman, inklusif, dan ramah bagi seluruh kelompok masyarakat.

2.2.1.55 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Serang pada Tahun 2025 mencapai nilai 80,63 dari target sebesar 81,00 atau terealisasi sebesar 99,54 persen terhadap target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan berada pada kategori baik, yang mencerminkan bahwa masyarakat pada umumnya merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, baik dalam penerbitan dokumen kependudukan, kecepatan pelayanan, kompetensi petugas, maupun kemudahan prosedur pelayanan. Namun demikian, capaian tersebut masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan sehingga diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif, cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan antara lain:

1. Belum meratanya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di seluruh wilayah, terutama pada daerah yang memiliki akses pelayanan terbatas.
2. Tingginya jumlah permohonan layanan pada waktu tertentu yang berdampak pada waktu tunggu pelayanan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, termasuk perangkat perekaman dan jaringan sistem informasi administrasi

kependudukan, yang masih memerlukan peningkatan.

4. Gangguan jaringan atau sistem informasi administrasi kependudukan yang sewaktu-waktu dapat memengaruhi kelancaran pelayanan.
5. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan yang masih beragam sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan penyelesaian layanan.
6. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur serta penguatan inovasi pelayanan berbasis digital untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan akurat.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Serang akan terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, pengembangan layanan administrasi kependudukan berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sarana dan prasarana pelayanan, optimalisasi layanan jemput bola bagi masyarakat di wilayah terpencil, serta peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, cepat, mudah, dan akuntabel.

2.2.1.56 Nilai SAKIP Kecamatan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan pada Tahun 2025 mencapai 72,30 dari target sebesar 72,20 atau terealisasi sebesar 100,14 persen terhadap target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas kinerja pada tingkat kecamatan telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, dan penganggaran di tingkat kecamatan. Pencapaian target tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah kecamatan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Beberapa tantangan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Kualitas penyusunan indikator kinerja pada sebagian kecamatan masih perlu ditingkatkan agar lebih spesifik, terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil.
2. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar penyempurnaan program dan kegiatan belum sepenuhnya optimal.

3. Kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen kinerja, pengukuran, dan evaluasi masih perlu terus ditingkatkan.
4. Integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja perlu terus diperkuat agar lebih efektif dan efisien.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja dan pelaporan masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas data dan ketepatan waktu pelaporan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian SAKIP Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Serang akan terus memperkuat penerapan manajemen kinerja melalui peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, penyempurnaan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, penguatan monitoring dan evaluasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan akuntabel.

2.2.1.57 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kabupaten Serang pada Tahun 2025 mencapai nilai 55,00 dari target sebesar 62,50 atau terealisasi sebesar 88,00 persen terhadap target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi pertanahan telah mengalami perkembangan, namun belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penataan administrasi pertanahan, baik dari aspek pengelolaan data, legalitas aset tanah, maupun koordinasi antarinstansi, masih memerlukan penguatan agar mampu mendukung kepastian hukum atas tanah, pengendalian pemanfaatan ruang, serta percepatan pembangunan daerah.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi belum tercapainya target Indeks Tertib Administrasi Pertanahan antara lain:

1. Masih terdapat aset tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, sehingga kepastian hukum atas aset daerah belum sepenuhnya terjamin.
2. Data administrasi pertanahan belum seluruhnya terintegrasi dan mutakhir, sehingga masih terdapat perbedaan antara data pertanahan, aset daerah, dan tata ruang.

3. Koordinasi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan perangkat daerah terkait dalam penataan administrasi pertanahan masih perlu ditingkatkan.
4. Masih terdapat sengketa atau tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan tanah yang memerlukan penyelesaian secara bertahap.
5. Keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun SDM, dalam mendukung percepatan inventarisasi, pemetaan, dan sertifikasi tanah.

Untuk meningkatkan Indeks Tertib Administrasi Pertanahan, Pemerintah Kabupaten Serang akan mempercepat inventarisasi dan sertifikasi aset tanah milik daerah, memperkuat integrasi data pertanahan dengan data aset dan tata ruang, meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pertanahan. Selain itu, penyelesaian sengketa pertanahan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi pertanahan akan terus dilakukan guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

2.2.1.58 Persentase Hasil Riset, Inovasi, dan Inovasi Yang Dimanfaatkan

2025 mencapai 71,43 persen dari target sebesar 55,00 persen atau terealisasi sebesar 129,87 persen terhadap target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan inovasi di Kabupaten Serang telah melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan semakin meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi sebagai dasar penyusunan kebijakan, penyelesaian permasalahan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan berbagai program pembangunan daerah. Hal ini juga mencerminkan semakin baiknya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong ekosistem inovasi daerah.

Meskipun target telah terlampaui, beberapa tantangan yang masih perlu diperhatikan antara lain:

1. Belum seluruh hasil penelitian dan inovasi dapat direplikasi atau diterapkan secara luas pada seluruh perangkat daerah.
2. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat masih perlu diperkuat agar menghasilkan

inovasi yang lebih aplikatif.

3. Diseminasi dan dokumentasi hasil riset serta inovasi belum sepenuhnya optimal sehingga pemanfaatannya belum merata.
4. Kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan dan implementasi inovasi masih perlu ditingkatkan.
5. Dukungan pendanaan, sarana, dan regulasi untuk pengembangan riset dan inovasi perlu terus diperkuat agar keberlanjutan inovasi dapat terjaga.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan hasil riset, invensi, dan inovasi, Pemerintah Kabupaten Serang akan memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui peningkatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat, penguatan budaya inovasi di perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan hasil kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan, serta pemberian dukungan terhadap pengembangan dan hilirisasi inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

2.2.1.59 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Layanan kinerja Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi terselenggaranya peran DPRD sesuai fungsinya, yaitu fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran. Nilai kepuasan pelayanan sekretariat DPRD pada tahun 2024 sebesar 84,43 dari target 88,30 dengan kategori mutu pelayanan "BAIK".

Tabel 2. 82 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 2. 83 Capaian IKU Misi VI RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Ket	Bidang Urusan
				Target	Realisasi	Capaian		
	Misi 6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang							
	Capaian Aksi HAM	point	83,9	85	83,9	98,71	Tidak tercapai	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	70,8	81	73,77	91,07	Tidak tercapai	Unsur Pemerintahan Umum
	Tingkat Warisan Seni, Budaya dan tradisi yang dilestarikan	%	18,18	27,27	27,27	100,00	Tercapai	Urusan Kebudayaan

Sumber : Hasil Analisa Data Bapperida Kabupaten Serang Tahun 2026

2.2.1.60 Capaian Aksi HAM

Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten Serang pada Tahun 2025 mencapai nilai 83,90 dari target sebesar 85,00 atau terealisasi sebesar 98,71 persen terhadap target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Serang telah berjalan dengan baik melalui pemenuhan berbagai indikator yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Meskipun demikian, capaian tersebut masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan peningkatan komitmen dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Aksi HAM antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pemenuhan indikator Aksi HAM.
2. Pemahaman dan kapasitas aparatur mengenai implementasi prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan.
3. Ketersediaan data dan dokumen pendukung sebagai bukti pemenuhan indikator Aksi HAM belum sepenuhnya lengkap dan terintegrasi.
4. Masih diperlukan peningkatan akses pelayanan publik yang inklusif bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat miskin.

5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Aksi HAM perlu diperkuat agar pelaksanaan setiap indikator dapat dipantau secara berkala dan tepat waktu.

Dalam rangka meningkatkan capaian Aksi HAM, Pemerintah Kabupaten Serang akan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan kapasitas aparatur mengenai implementasi HAM, memperbaiki kualitas data dan pelaporan, memperluas akses pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia secara berkelanjutan.

2.2.1.61 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Serang pada Tahun 2025 mencapai nilai 73,77 dari target sebesar 81,00 atau terealisasi sebesar 91,07 persen terhadap target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat yang majemuk di Kabupaten Serang secara umum berlangsung dalam suasana yang kondusif, harmonis, dan saling menghormati antarumat beragama. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif untuk memperkuat toleransi, memperluas dialog antarumat beragama, serta meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kerukunan dan mencegah potensi konflik sosial berbasis perbedaan agama.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi belum tercapainya target Indeks Kerukunan Umat Beragama antara lain:

6. Masih perlunya penguatan sikap toleransi dan moderasi beragama di seluruh lapisan masyarakat.
7. Intensitas dialog dan kerja sama lintas agama belum merata hingga tingkat desa dan kelurahan.
8. Potensi munculnya isu-isu sosial, budaya, maupun informasi yang bersifat provokatif di media sosial dapat memengaruhi hubungan antarumat beragama apabila tidak dikelola dengan baik.
9. Peran organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan

generasi muda dalam membangun kerukunan perlu terus diperkuat.

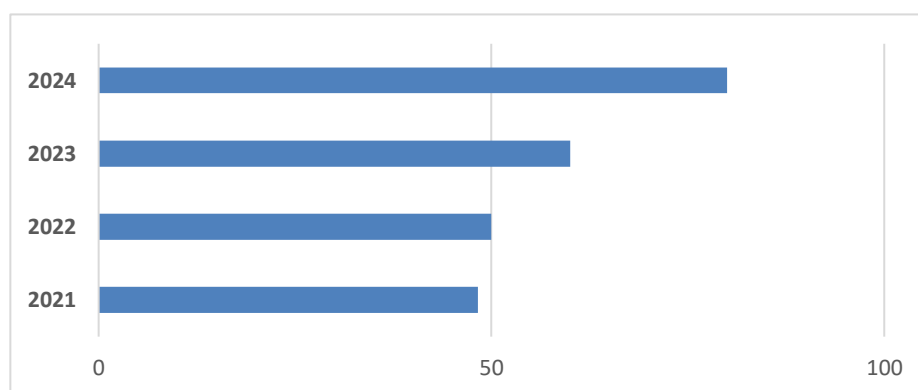
10. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), instansi vertikal, serta organisasi keagamaan perlu terus ditingkatkan dalam upaya deteksi dini dan penyelesaian potensi konflik.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama, Pemerintah Kabupaten Serang akan memperkuat implementasi moderasi beragama melalui peningkatan dialog antarumat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), penguatan pendidikan nilai-nilai toleransi, peningkatan partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penyelesaian potensi konflik sosial. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, harmonis, dan mendukung terciptanya stabilitas sosial sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan daerah.

2.2.1.62 Tingkat Warisan Seni Budaya dan Tradisi Yang Dilestarikan

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Serang digunakan indikator Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan, dalam kurun waktu 2021-2024 nilai Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan mengalami kenaikan setiap tahunnya mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen untuk melestarikan pembangunan kebudayaan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Perkembangan nilai Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 16 Tingkat Warisan Budaya yang dilestarikan Kabupaten Serang Tahun 2021-2024



Sumber: Disdikbud Kabupaten Serang 2025

2.2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah indikator kinerja yang terdiri dari indikator makro dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan ukuran penilaian penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah. IKK merupakan indikator outcome atau program PD.

2.2.2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Pada Aspek Geografi dan Demografi, sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, yaitu Indeks Pembangunan Lingkungan Hidup (IPLH), laju pertumbuhan penduduk, dan rasio penduduk. Belum tercapainya Indeks Pembangunan Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh masih adanya tekanan terhadap kualitas lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, perubahan tutupan lahan, serta belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah. Sementara itu, indikator laju pertumbuhan penduduk dan rasio penduduk merupakan indikator yang dipengaruhi oleh dinamika demografi, seperti angka kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pengendalian penduduk, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2. 84 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Aspek Geografi dan Demografi Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
A.	Aspek Geografi dan Demografi						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81,39	81,76	82,12	100,44	Tercapai
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	2,13	2,123	2,47	116,34	Tercapai
3	Rasio Rumah Tangga Menggunakan Listrik	%	96,66	100	n.a.	-	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Akses aman Air Perpipaan	%	12,87	12,92	12,92	100,00	Tercapai
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	61,406	67,77	64,67	95,43	Tidak tercapai
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Skor	0,99	0,99	0,99	100,00	Tercapai
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	65,62	66,25	71,71	108,24	Tercapai
8	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	25,97	27,85	10,08	36,19	Tidak tercapai
9	Penurunan Intensitas Emisi	%	-	16,63	16,21	97,44	Tidak tercapai

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
	GRK						
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	123,3	123	138,44	112,55	Tercapai
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,71	0,73	0,73	100,00	Tercapai
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,229	1,354	1,22	90,10	Tidak tercapai
13	Rasio Penduduk	%	1,039	10.391	104,15	103,75	Tercapai
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	1.159,9	1.177,9	1.249,10	106,04	Tercapai
15	Kapasitas Air Baku	%	100	100	100	100	Tercapai

Sumber : Hasil Analisa Data Bapperida Kabupaten Serang Tahun 2026

2.2.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, capaian pembangunan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan hasil yang cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, terutama pada sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, serta beberapa indikator kesehatan dan kesejahteraan sosial. Belum optimalnya capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan iklim yang berdampak terhadap produktivitas pertanian, serangan organisme pengganggu tanaman, keterbatasan sarana dan prasarana produksi, fluktuasi harga komoditas, serta kondisi cuaca yang memengaruhi aktivitas perikanan. Pada bidang kesehatan, indikator yang belum tercapai dipengaruhi oleh masih adanya permasalahan gizi masyarakat, perubahan perilaku hidup sehat yang belum optimal, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memengaruhi akses terhadap pangan bergizi. Selain itu, beberapa indikator kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh dinamika jumlah penerima manfaat, keterbatasan kapasitas pelayanan, serta perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mengingat sebagian besar indikator tersebut merupakan indikator outcome, pencapaiannya memerlukan intervensi yang berkesinambungan dan kolaborasi lintas sektor agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara optimal.

Tabel 2. 85 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
B.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,78	5.60-6.60	5,17	78,33	Tidak tercapai
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,51	4.00-4.08	4,48	88,00	Tidak tercapai
3	PDRB per Kapita	Rp Juta	60,01	60-63.58	63,3	99,56	Tidak tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,18	9.18-9.74	8,73	104,90	Tercapai
5	Indeks Gini	%	0,267	0.262-0.266	0,252	103,82	Tercapai

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
6	Persentase BOR (Bed Occupancy Rate)	%	78%	≥78%	90	115,38	Tercapai
7	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	8	8	DINKES	#VALUE!	
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,28	73,83	74,1	100,37	Tercapai
9	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,91	74,8	75,39	100,79	Tercapai
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	95,04	95	93,64	98,57	Tidak tercapai
11	Prevalensi Stunting	%	20,20	18,8	NA	NA	Tidak Tercapai
12	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,88	7,89	8,03	101,77	Tercapai
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	13,48	13,02	96,59	Tidak tercapai
14	Skor Kemampuan Literasi SD	%	51,96	54,46	47,11	86,50	Tidak tercapai
15	Skor Kemampuan Literasi SMP	%	60,70	61,8	64,97	105,13	Tercapai
16	Skor Kemampuan Numerasi SD	%	46,90	49,8	41,72	83,78	Tidak tercapai
17	Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	56,63	58,13	58,85	101,24	Tercapai
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	54,30	54,3	3,52	6,48	Tidak tercapai
19	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintah daerah	Nilai	51,33	61	65,13	106,77	Tercapai
20	Indeks Literasi Digital	Angka	61,66	62,2	57,59	92,59	Tidak tercapai
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	44,10	50,87	85,82	168,70	Tercapai
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	70,8	81	73,77	91,07	Tidak tercapai
23	Tingkat Warisan Seni. Budaya dan tradisi yang dilestarikan	Angka	18,18	27,27	27,27	100,00	Tercapai
24	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62,23	62,97	62,23	98,82	Tidak tercapai
25	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Angka	59,37	59,42	61,2	103,00	Tercapai
26	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,531	0,518	0,531	97,49	Tidak Tercapai
27	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,52	92,72	93,75	101,11	Tercapai
28	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93,3/100.000 KH	122	20 jiwa (69.1/100.000 KH)	143,36	Tercapai
29	Cakupan Penemuan Tuberkulosis	%		90	82	91,11	Tidak tercapai
30	Persentase pasien tuberkulosis sensitif obat yang memulai pengobatan	%	96	95	93	97,89	Tidak tercapai
31	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	%	90	90	91	101,11	Tercapai
32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	44,1	44,1	85,82	194,60	Tercapai
33	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	57,17	57,67	57,17	99,13	Tidak tercapai

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
34	Capaian Produksi Pertanian						
	1. Produksi Tanaman Pangan						
	- Produksi Padi	Ton	576.649	541,435	635.076	117.294,97	
	- Produksi Jagung	Ton	2.747	4,754	259	5.448,04	
	2. Produksi Hortikultura						
	- Produksi Cabai Besar	Kuintal	4.039	4,241	4.904,40	115.642,54	
	- Produksi Bawang Merah	Kuintal	6.190	6,809	7.635,20	112.133,94	
	- Produksi Buah-buahan	Kuintal	132.025	138,626	25.034,76	18.059,21	
	3. Produksi Perkebunan						
	- Produksi Kelapa	Ton	287.563	301,941	7.047.700	2.334.131,50	
	- Produksi Kopi	Ton	629	661	726,60	109,92	Tercapai
	- Produksi Cengkeh	kg	136	142	136,00	95,77	Tidak tercapai
	- Produksi Lada	kg	4	5	4,00	80,00	Tidak tercapai
	3. Populasi Komoditas Peternakan						
	- Populasi Sapi	Ekor	4.875	4,923	5.582	113.386,15	
35	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota	ton	63.660,91	64.368,25	67.584,74	105,00	Tercapai
36	Indeks Zakat Nasional	Poin	-	0,64	0,6	93,75	Tidak tercapai

Sumber : Hasil Analisa Data Bapperida Kabupaten Serang Tahun 2026

2.2.2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Pada Aspek Daya Saing Daerah, sebagian besar indikator telah menunjukkan capaian yang baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, terutama pada bidang investasi, koperasi dan UMKM, pariwisata, lingkungan hidup, serta perdagangan. Belum optimalnya capaian investasi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang masih berfluktuasi, tingkat kehati-hatian investor dalam melakukan investasi, serta persaingan antar daerah dalam menarik investasi baru. Pada sektor koperasi dan UMKM, masih terdapat koperasi yang belum aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), rendahnya legalitas usaha, serta terbatasnya kapasitas pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing produknya. Sementara itu, capaian sektor pariwisata masih dipengaruhi oleh belum optimalnya promosi destinasi wisata, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta pengembangan daya tarik wisata yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, beberapa indikator lingkungan hidup dan perdagangan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika permintaan pasar. Oleh

karena itu, diperlukan penguatan iklim investasi, peningkatan kualitas pembinaan pelaku usaha, pengembangan sektor pariwisata, serta peningkatan daya saing produk daerah agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.

**Tabel 2. 86 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Aspek Daya Saing Daerah
Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
C.	Aspek Daya Saing Daerah						
1	Angka Ketergantungan (usia produktif 15-64 tahun) tidak produktif (0 - 14 dan diatas 65 tahun)	%	43,62	43,75	46,5	106,29	Tercapai
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	46,69	46.70-47	46,69	99,34	Tidak tercapai
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,37	2,4	2,37	98,75	Tidak tercapai
4	Rasio Kewirausahaan	%	0,2	0,5	0,4	80,00	Tidak tercapai
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,77	68	67,48	99,24	Tidak tercapai
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	36,90	37	50,1	135,41	Tercapai
7	Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi Primer di wilayah Kabupaten Serang	%	5	5,5	0,68	12,36	Tidak tercapai
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	40	22,61	22,97	101,59	Tercapai
9	Ekspor Barang dan Jasa	(\$ Juta)	116,96	550	557	101,27	Tercapai
10	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	65,62	66,25	65,62	99,05	Tidak tercapai
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	98,24	98,29	98,43	100,14	Tercapai
12	Persentase Desa Mandiri	%	4,6	5,21	7,06	135,42	Tercapai
13	Indeks Desa	Angka	0	67,51	68,70	101,77	Tercapai
14	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,56	0,57	0,68	119,30	Tercapai
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanagara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	19,87	19,87	52,6	264,72	Tercapai
16	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	2,26	2,35	Dalam proses perhitungan	DISKOUM PERINDAG /DKPP	
17	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	1,38	1,4	0,58	41,43	Tidak tercapai
18	Persentase Koperasi Aktif	%	76,37	77	82	106,49	Tercapai
19	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,29	2,29	2,53	110,48	Tercapai
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	51,86	52,62	49,66	94,37	Tidak tercapai
21	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	%	27,05	31,57	31,32	99,21	Tidak tercapai
22	Kontribusi Sektor Perdagangan	%	8,94	9,1	8,94	98,24	Tidak tercapai

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	Terhadap PDRB						
23	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp	41,50	84,94	128	150,69	
24	Persentase Peningkatan Investasi	%	84,28	86,82	25,23	29,06	Tidak tercapai
25	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	8,06	8,06	9,82	121,84	Tercapai
26	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Poin	3,88	3,95	BPKAD (OJK)	#VALUE!	
27	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	n/a	1	BPS	#VALUE!	

Sumber : Hasil Analisa Data Bapperida Kabupaten Serang Tahun 2026

2.2.2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelaksanaan pembangunan pada Aspek Pelayanan Umum secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, namun masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target, terutama pada urusan persampahan, air minum, sanitasi, perumahan, penataan ruang, reformasi birokrasi, ketenagakerjaan, komunikasi dan informatika, serta penanggulangan bencana. Belum tercapainya indikator persampahan dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), armada pengangkut sampah, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Pada sektor air minum dan sanitasi, pencapaian target masih dipengaruhi oleh keterbatasan jaringan pelayanan, kebutuhan investasi infrastruktur yang cukup besar, serta kondisi geografis yang menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan. Sementara itu, pada bidang perumahan dan penataan ruang, belum optimalnya capaian dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni, keterbatasan anggaran, serta proses penyusunan dokumen tata ruang yang memerlukan koordinasi lintas instansi dan waktu penyelesaian yang relatif panjang.

Adapun pada bidang reformasi birokrasi dan pelayanan pemerintahan, beberapa indikator belum mencapai target karena masih diperlukan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, integrasi sistem informasi, penguatan manajemen kinerja, serta peningkatan kapasitas aparatur. Selain itu, pada bidang ketenagakerjaan dan penanggulangan bencana, capaian indikator masih dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan pasar kerja, keterbatasan pelatihan kompetensi, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana. Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, optimalisasi pendanaan pembangunan, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat.

**Tabel 2. 87 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Aspek Pelayanan Umum
Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
D.	Aspek Pelayanan Umum						
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,56	98	98,9	100,92	Tercapai
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Skor	3,73	3,75	3,97	105,87	Tercapai
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,15	4,2	4,15	98,81	Tidak tercapai
	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	78	78	75,67	97,01	Tidak tercapai
4	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Trantibum dan Perda	%	7,5	5	5,41	108,20	Tercapai
5	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka		65	66,44	102,22	Tercapai
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Poin	83,9	85	83,9	98,71	Tidak tercapai
7	Indeks Rasa Aman	%	98,6	99	SATPOL PP / KESBANG POL	#VALUE!	
8	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,68	3,68	3,66	99,46	Tidak tercapai
9	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah	Jumlah	17	17	28	164,71	Tercapai
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,77	77,4	80,77	104,35	Tercapai
11	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3.20	3,25	3,02	92,92	Tidak tercapai
12	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	blm ada	95,25	94,39	99,10	Tidak tercapai
13	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	100,00	Tercapai
14	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	84,14	84,14	85,43	101,53	
15	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,55	2,6	2,55	98,08	Tidak tercapai
16	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	51,33	61	65,13	106,77	Tercapai
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,89	84	83,81	99,77	Tidak tercapai
18	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Skor	B	81	80,63	99,54	Tidak Tercapai
19	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	72,2	72,2	72,3	100,14	Tercapai
20	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Angka	55	62,5	55	88,00	Tidak tercapai
21	Persentase Hasil Riset. Inovasi dan Inovasi yang Termanfaatkan	%	n/a	55	71,43	129,87	Tercapai
22	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan	%	n/a	100	90,98	90,98	Tidak tercapai

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	Sekretariat DPRD						
23	Jumlah Inovasi Pelayanan	Jumlah	0	9	9	100,00	Tercapai
24	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	Jumlah	10	10	28	280,00	Tercapai
25	Jumlah Gedung UPT Pelayanan	Jumlah	17	29	1	3,45	Tidak tercapai

Sumber : Hasil Analisa Data Bapperida Kabupaten Serang Tahun 2026

2.2.2.5 Indikator Kinerja Kunci

Hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target, terutama pada urusan lingkungan hidup, ketahanan pangan, koperasi dan UMKM, ketenagakerjaan, pariwisata, serta beberapa indikator pelayanan dasar. Belum tercapainya indikator-indikator tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan kapasitas fiskal daerah, perubahan kondisi ekonomi nasional, dinamika harga komoditas, kondisi iklim yang memengaruhi produktivitas sektor primer, serta karakteristik indikator yang bersifat outcome sehingga membutuhkan waktu lebih panjang untuk menunjukkan hasil. Selain itu, terdapat beberapa indikator yang memerlukan dukungan lintas sektor serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta penyempurnaan strategi pembangunan agar target Indikator Kinerja Kunci pada tahun berikutnya dapat dicapai secara lebih optimal.

Narasi tersebut sudah menggunakan gaya penulisan yang lazim ditemukan dalam Bab II Evaluasi RKPD Kemendagri maupun Bappenas, sehingga siap dimasukkan ke dalam dokumen tanpa perlu banyak penyesuaian.

Tabel 2. 88 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
E.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)						
01.	Urusan Pendidikan						
1	Angka Partiipasi Sekolah usia 5-6 dalam PAUD	%	72.13	75.17	76.79	102.16	TERCAPAI
2	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun dalam Pendidikan Dasar	%	100	100	100.59	100.59	TERCAPAI
3	Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 dalam Pendidikan menengah pertama	%	99.81	100	96.86	96.86	BELUM TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
4	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 dalam Pendidikan kesetaraan	%	36.88	41.85	26.51	63.35	BELUM TERCAPAI
02.	Kesehatan						
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93.3/100.000 KH	122	20 jiwa (69.1/100.000 KH)	125.94	TERCAPAI
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (SGGI)	%	20.20	18.8	20.2	92.55	BELUM TERCAPAI
3	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
4	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	98.3	80	100	125.00	TERCAPAI
5	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	82.6	75	44	58.67	BELUM TERCAPAI
6	Jumlah RS rujukan	jumlah	8	8	9	112.50	TERCAPAI
7	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	60	60	60	100.00	TERCAPAI
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91.60%	100	96.42	96.42	BELUM TERCAPAI
9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	86.37%	100	90.75	90.75	BELUM TERCAPAI
10	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	88.17%	100	95.74	95.74	BELUM TERCAPAI
11	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99.31%	100	97.69	97.69	BELUM TERCAPAI
12	Persentase usia pendidikan dasar mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100	100	100.00	TERCAPAI
13	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	88.83%	100	100	100.00	TERCAPAI
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	90.01%	100	88.79	88.79	BELUM TERCAPAI
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60.87%	100	97.16	97.16	BELUM TERCAPAI
16	Persentase penderita DM yang	%	97.57%	100	100	100.00	TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
17	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	84.58%	100	97.77	97.77	BELUM TERCAPAI
18	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
19	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	90.32%	100	100	100.00	TERCAPAI
20	Cakupan penerimaan pemeriksaan kesehatan gratis	%	N/A	36	64	177.78	TERCAPAI
21	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	94.90%	90	88.96	98.84	BELUM TERCAPAI
22	Proporsi Penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%	N/A	65	N/A		
03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	Indikator Baru	10	N/A		
2	Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	100	10	10	100.00	TERCAPAI
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	73.66	75.13	73.8	98.23	BELUM TERCAPAI
4	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	7.33	7,332	N/A		
5	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	57.31	57.8	0.99	1.71	BELUM TERCAPAI
6	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	58.06	6.06	6.6	108.91	TERCAPAI
7	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik				N/A		
8	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	78.57	82.45	78.57	95.29	BELUM TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
9	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	21.05	26.32	N/A		
10	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik	%	89.1	89.1	89.03	99.92	BELUM TERCAPAI
11	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	80	80	80	100.00	TERCAPAI
12	Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang Dalam Pembangunan	%	92	93	93	100.00	TERCAPAI
13	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Skor	100	100	100	100.00	TERCAPAI
04. Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
3	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	%	3.92	5.52	5.52	100.00	TERCAPAI
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	7579	7363	7122	96.73	BELUM TERCAPAI
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	61	62.72	62.65	99.89	BELUM TERCAPAI
6	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	N/A	100	N/A		
05. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	70	70	80	114.29	TERCAPAI
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	38.89	40	46.63	116.56	TERCAPAI
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
5	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	95	100	96.67	96.67	BELUM TERCAPAI
6	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	92	100	97.5	97.50	BELUM TERCAPAI
7	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
8	Cakupan Penyebaran Informasi Edukasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	n/a	100	100	100.00	TERCAPAI
9	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	96.67	100	67.61	67.61	BELUM TERCAPAI
10	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	10.9	15	13.41	110.60	TERCAPAI
06.	Sosial						
1	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	60	100	100	100.00	TERCAPAI
2	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	N/A	100	100	100.00	TERCAPAI
3	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Orang	N/A	1	3	300.00	TERCAPAI
4	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
6	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	80	100	100	100.00	TERCAPAI
7	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
8	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	0	100	100	100.00	TERCAPAI
9	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
10	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Poin	N/A	38.42	38,42	100.00	TERCAPAI
11	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Poin	N/A	59.67	59,67	100.00	TERCAPAI
12	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
13	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
14	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
15	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	10	10	10	100.00	TERCAPAI
16	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	94.68	100	100	100.00	TERCAPAI
17	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	%	N/A	100	100	100.00	TERCAPAI
18	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	N/A	100	100	100.00	TERCAPAI
19	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
07. Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	48	50	56.25	112.50	TERCAPAI
2	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	48.56	50	38	76.00	BELUM TERCAPAI
4	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Perusahaan	425	427	429	100.47	TERCAPAI
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,	%	60.03	70	55.5	79.29	BELUM TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).						
6	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	51.26	53	43.61	82.28	BELUM TERCAPAI
08.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	2.43	3	5	175,67	TERCAPAI
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	51.86	52.62	49,66	94,37	BELUM TERCAPAI
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Pendampingan Komprehensif (per 100.000 penduduk perempuan)	%	65	70	76,61	109,44	TERCAPAI
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	75	75	70	93.33	BELUM TERCAPAI
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	30	30	44,48	148,27	TERCAPAI
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	n/a	58	100	172.41	TERCAPAI
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Pendampingan Komprehensif			70	66.04	94.34	BELUM TERCAPAI
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	n/a	75	64.41	85.88	BELUM TERCAPAI
09.	Pangan						
1	Persentase ketersediaan infrastruktur lumbung pangan	%	10 Unit	33	33.33	101.01	TERCAPAI
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	410 Ton	85	151.79	178.58	TERCAPAI
3	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	93.3	79.5	88.90	111.82	TERCAPAI
4	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Angka	92.55	92.55	91.98	99.38	BELUM TERCAPAI
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3.68	50	12.58	25.15	BELUM TERCAPAI
6	Persentase Pangan Segar yang	%	97.82	95	100	105.26	TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan						
10.	Pertanahan						
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	30	50	N/A		
11.	Lingkungan Hidup						
1	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	2	25	20	80.00	BELUM TERCAPAI
2	Indeks Kualitas Air	point	51.25	56.75	69.04	121.66	TERCAPAI
3	Indeks Kualitas Udara	point	83.25	71.66	64.81	90.44	BELUM TERCAPAI
4	Persentase RTH	%		47.02	47.024	100.01	
5	Persentase Limbah B3 terkelola	%	10	20	10	50.00	BELUM TERCAPAI
6	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	%	50	65.79	51.79	78.72	BELUM TERCAPAI
7	Persentase Penyuluh Lingkungan yang ditingkatkan kompetensinya	%	50	55	55	100.00	TERCAPAI
8	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	20	25	25	100.00	TERCAPAI
9	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
10	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	25.97	27.85	10.083	36.20	BELUM TERCAPAI
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	point	61,406	67.77	64.67	95.43	BELUM TERCAPAI
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	4.21	5	5.42	108.40	TERCAPAI
2	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	%	99	99	98.83	99.83	BELUM TERCAPAI
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	95.5	99	95.80	96.77	BELUM TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
5	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
9	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	63.46	70	60.29	86.13	BELUM TERCAPAI
10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	30	30	30	23	76.67	BELUM TERCAPAI
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	0	100	100	100.00	TERCAPAI
2	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persen	0	100	100	100.00	TERCAPAI
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	51	17	18	105.88	TERCAPAI
4	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	0	8	8	100.00	TERCAPAI
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	0	16.56	16.56	100.00	TERCAPAI
6	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	99.69	100	100	100.00	TERCAPAI
7	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	7.35	3.96	18.5	467.17	TERCAPAI
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate / TFR</i>)	Persen	2.10	2.08	2.15	96,74	BELUM TERCAPAI
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19</i>)	Persen	18.00	17.9	15.1	118.54	BELUM TERCAPAI
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / <i>Modern Contraceptive (mCPR)</i>	Persen	70.66	71.16	73.7	103.57	TERCAPAI
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB	Persen	11.03	9.96	9.85	98.90	BELUM

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)						TERCAPAI
5	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	84.84	84.86	86.36	101.77	TERCAPAI
15.	Perhubungan						
1	Konektivitas Darat	%	37.5	37.5	37.5	100.00	TERCAPAI
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	37	38	39	102.63	TERCAPAI
3	Konektivitas Laut	%	75	75	75	100.00	TERCAPAI
4	Persentase Pengendalian KKOP	%	25	25	25	100.00	TERCAPAI
5	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	88	88	88	100.00	TERCAPAI
16.	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	n/a	71.5	83.24	116.42	TERCAPAI	n/a
2	Indeks SPBE	3.73	3.75	3.97	105.87	TERCAPAI	3.73
3	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)						
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100.00	TERCAPAI	100
5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100.00	TERCAPAI	100
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	100	100	100.00	TERCAPAI	100
7	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100	100	100.00	TERCAPAI	100
8	Akses terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100.00	TERCAPAI	100
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	25.31	25.31	1.39	5.49	BELUM TERCAPAI
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	7.34	10	7.12	71.20	BELUM TERCAPAI
3	Persentase Koperasi Aktif	%	76.37	77	82	106.49	TERCAPAI
4	Persentase Koperasi yang	%	14.39	14.5	38.14	263.03	TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan						
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	11.51	11.6	10.92	94.14	BELUM TERCAPAI
6	Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	51.02	51	51.02	100.04	TERCAPAI
7	Pertumbuhan Wirausaha	%	2.8	3	1.65	55.00	BELUM TERCAPAI
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan	%	1	1	1	100.00	TERCAPAI
9	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	0.86	1.58	0.86	54.43	BELUM TERCAPAI
10	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	11.51	10	10.92	109.20	TERCAPAI
11	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	4.1	2	1.46	73.00	BELUM TERCAPAI
18.	Penanaman Modal						
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rp (Trilyun)	18.96	19	21.51	113.21	TERCAPAI
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	3	3.5	57.96	1,656.00	TERCAPAI
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100.00	TERCAPAI
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	100	100	100	100.00	TERCAPAI
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100.00	TERCAPAI
19.	Kepemudaan dan Olahraga						
1	Rasio Wirausaha Pemuda	%	34.31	38.03	18.62	48.96	BELUM TERCAPAI
2	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	37.49	44.08	39.62	89.88	BELUM TERCAPAI
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	99.57	99.64	99.71	100.07	TERCAPAI
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	0.031	0.031	0.05	161.29	TERCAPAI
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Angka	0.028	0.028	0.055	196.43	TERCAPAI
6	Peningkatan prestasi olahraga	Angka	65	67	0	0.00	BELUM

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
							TERCAPAI
20.	Statistik						
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.55	2.6	2.55	98.08	BELUM TERCAPAI
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data grid dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
3	Persentase OPD yang menggunakan data grid dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
21.	Persandian						
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai	395	497	366	73.64	BELUM TERCAPAI
22.	Kebudayaan						
1	Prosentase Cagar Budaya yang dilestarikan		39.47	39.47	39.47	100.00	TERCAPAI
23.	Perpustakaan						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	68.79	71.83	70.41	98.02	BELUM TERCAPAI
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	persentase	0	0	0.00	0.00	
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	54.3	54.3	3.52	6.48	BELUM TERCAPAI
4	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Nilai	0.099	2,084	0.90	0.04	BELUM TERCAPAI
5	Persentase Ketermanfaatkan Perpustakaan oleh Masyarakat	Indeks	1	69,298	0.36	0.00	BELUM TERCAPAI
6	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persentase	0.3582	0.0189	0.0058	30.76	BELUM TERCAPAI
7	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase	1	0.05	0.05	100	TERCAPAI
8	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca dimasyarakat	Orang	0.2801	596	265.00	44.46	BELUM TERCAPAI
9	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi / dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Naskah	0	0	0.00	0	
10	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Naskah	0	0	0.00	0	
11	Prosentase koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Persentase	0	0	0.00	0	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
24.	Kearsipan						
1	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Persentase	49.98	50.2	44.68	89.00	BELUM TERCAPAI
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban.	Persentase	51.83	52.33	100	191.09	TERCAPAI
3	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
4	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
5	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	44.76	20.86	13.85	66.40	BELUM TERCAPAI
6	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	20.86	20.86	44.76	214.57	TERCAPAI
7	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase	100	100	100	100.00	TERCAPAI
8	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persentase	57.14	57.14	1	1.75	BELUM TERCAPAI
9	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	Kali	1	1	1	100	TERCAPAI
10	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	Kali	1	1	1	100	TERCAPAI
11	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	Kali	1	1	1	100	TERCAPAI
12	Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	Kali	1	1	1	100	TERCAPAI
13	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	Kali	1	1	1	100	TERCAPAI
14	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Kali	1	1	1	100	TERCAPAI
25.	Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	7226.67	7167.94	7453.96	104	TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	56434.24	57200.31	60130.78	105	TERCAPAI
3	Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan	%	30.35	13.98	13.98	100	TERCAPAI
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Thn	-	14.29	14.29	100	TERCAPAI
26.	Pariwisata		2.82	5.63	5.63	100	TERCAPAI
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	3.93	6.43	6.43	100	TERCAPAI
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	30.35	13.98	13.98	100	TERCAPAI
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	-	14.29	14.29	100	TERCAPAI
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	2.82	5.63	5.63	100	TERCAPAI
5	Tingkat hunian akomodasi	Angka	35.96	35.98	N/A		
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2.26	2.27	N/A		
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp.	42,080,33 9,208	44,184,3 56,168	39,905,11 1,953	90.32	BELUM TERCAPAI
27.	Pertanian						
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan						
	Padi	Ton	5.874	2.889	58427	2,022,395. 29	TERCAPAI
	Jagung	Ton	17	16	-2488	-15,550.00	BELUM TERCAPAI
2	Peningkatan Produksi Hortikultura						
	Cabai Besar	Kuintal	-33.07	201.97	865.4	428.48	TERCAPAI
	Bawang Merah	Kuintal	118.92	619.04	1445.2	233.46	TERCAPAI
	Buah-Buahan	Kuintal	110.661	6601.25	-110358	-1,671.77	BELUM TERCAPAI
3	Peningkatan Produksi Perkebunan						
	Kelapa	Ton	193.063.7 2	14378.1	304066.5	2,114.79	TERCAPAI
	Kopi	Ton	-5.412.73	31.5	97.6	309.84	TERCAPAI
	Cengkeh	Kg	-1.284.56	6.8	0	0.00	BELUM TERCAPAI
	Lada	Kg	0	0.2	0	0.00	BELUM TERCAPAI
4	Peningkatan Populasi Komoditas						

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	Peternakan						
	Sapi	Ekor	-1.987	48	707	1,472.92	TERCAPAI
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	n/a	28084.29	32229.36	114.76	TERCAPAI
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	n/a	82.75	82.75	100.00	TERCAPAI
7	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veterinar)	%	n/a	52.63	57.89	109.99	TERCAPAI
8	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	n/a	6.25	8.83	141.28	TERCAPAI
9	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	n/a	17.18	20.21	117.64	TERCAPAI
10	Usaha Pertanian yang Terbina	Usaha Pertanian	n/a	10	50	500.00	TERCAPAI
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	n/a	17	17	100.00	TERCAPAI
12	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	n/a	17	17	100.00	TERCAPAI
28.	Perdagangan						
1	Persentase izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	85.71	85.71	85.71	100.00	TERCAPAI
3	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
4	Nilai Ekspor Barang	\$ (PERJUTA)	512	550	557	101.27	TERCAPAI
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
6	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
7	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	68.25	70	77.49	110.70	TERCAPAI
8	Persentase alat-alat; alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	90	90	100.00	TERCAPAI
29.	Perindustrian						
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan	%	90.34	90.34	93.41	103.40	TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	Industri						
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	50	50	95	190.00	TERCAPAI
5	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	70	80	100	125.00	TERCAPAI
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	0	50	50	100.00	TERCAPAI
9	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
30.	Transmigrasi						
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
2	Persentase Transmigrasi yang Dibina dan Diberdayakan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
31.	Sekretariat Daerah						
1	Indeks Kematangan Penataan Perangkat Daerah	Peringkat / Nilai	n/a	29	41.5	143.10	TERCAPAI
2	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen	100	100	280	280.00	TERCAPAI
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Angka	3,243	3	N/A		
4	Efektivitas Pelaksanaan	Persen	n/a	100	99.02	99.02	BELUM

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						TERCAPAI
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	n/a	100	97.96	97.96	BELUM TERCAPAI
6	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka (Level)	3	3	85	2,833.33	TERCAPAI
7	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen		100	100	100.00	TERCAPAI
32.	Sekretaria DPRD						
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	62.5	100	80	80.00	BELUM TERCAPAI
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	87.5	100	80	80.00	BELUM TERCAPAI
33.	Perencanaan						
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
34.	Kuangan						
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	30	30	36.78	122.60	TERCAPAI
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	25	25	28.49	113.96	TERCAPAI
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	90	90	96.67	107.41	TERCAPAI
4	Persentase Penurunan SILPA	%	5	5	3.01	60.20	BELUM TERCAPAI
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	11	11.1	5.71	51.44	BELUM TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
7	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	27.05	31.57	31.32	99.21	BELUM TERCAPAI
8	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	0	100	100	100.00	TERCAPAI
9	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	%	99.3	91	98	107.69	TERCAPAI
35.	Kepegawaian						
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	%	n/a	7	46.63	666.14	TERCAPAI
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	n/a	5.7	27.33	479.47	TERCAPAI
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	n/a	95	100	105.26	TERCAPAI
4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	n/a	95	98.43	103.61	TERCAPAI
36.	Pendidikan dan Pelatihan						
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	n/a	5	5.12	102.40	TERCAPAI
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	n/a	95	109.5	115.26	TERCAPAI
3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	n/a	6	20.48	341.33	TERCAPAI
4	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	n/a	40	56.38	140.95	TERCAPAI
37.	Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	n/a	50	80	160.00	TERCAPAI
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	n/a	55	40	72.73	BELUM TERCAPAI
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	n/a	55	80	145.45	TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
4	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	%	n/a	55	100	181.82	TERCAPAI
5	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	n/a	n.a	N/A		
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%	n/a	n.a	N/A		
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	n/a	n.a	N/A		
8	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah	%	n/a	n.a	N/A		
38	Inspektorat Daerah						
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3.20	3.25	3.023	93.02	BELUM TERCAPAI
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Skor	3.1	3.15	3	95.24	BELUM TERCAPAI
3	Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan	%	100	100	100	100.00	TERCAPAI
39	Kecamatan						
1	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	100	100	90.40	90.40	BELUM TERCAPAI
2	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	84.52	84.52	BELUM TERCAPAI
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	100	100	76.71	76.71	BELUM TERCAPAI
4	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	100	100	89.24	89.24	BELUM TERCAPAI
5	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	100	100	86.38	86.38	BELUM TERCAPAI
39	Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		100	100	100.00	TERCAPAI
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	100	100.00	TERCAPAI

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	100	100	100	100.00	TERCAPAI
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100.00	TERCAPAI
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100.00	TERCAPAI

2.2.3 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Capaian 2023-2025)

Perkembangan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Serang selama periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan dinamika penyelenggaraan pelayanan dasar pada enam urusan pemerintahan wajib, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Analisis capaian selama kurun waktu tiga tahun tersebut memberikan gambaran mengenai tren penyelenggaraan pelayanan dasar, baik yang mengalami peningkatan, penurunan maupun capaian yang relatif stabil. Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat beberapa penyesuaian indikator sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga sebagian indikator menggunakan definisi dan metode pengukuran yang berbeda dibandingkan Tahun 2023 dan Tahun 2024. Oleh karena itu, evaluasi capaian SPM dalam laporan ini tidak hanya mempertimbangkan besaran persentase capaian, tetapi juga memperhatikan perubahan indikator yang berlaku pada masing-masing tahun pelaporan.

Selama periode Tahun 2023–2025, pelaksanaan SPM pada bidang pendidikan menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan dasar secara konsisten memiliki capaian yang sangat baik dengan tingkat partisipasi warga negara usia 7–15 tahun yang selalu berada di atas 98 persen. Pelayanan pendidikan kesetaraan juga memperlihatkan tren peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 98,18 persen pada Tahun 2025, yang menunjukkan semakin optimalnya akses masyarakat terhadap pendidikan nonformal. Di sisi lain, pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami penurunan capaian dari 92,01 persen pada Tahun 2023 menjadi 78,67 persen pada Tahun 2024 dan kembali menjadi 76,79 persen pada Tahun 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan masih perlunya

peningkatan akses pendidikan anak usia dini serta penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Pada periode Tahun 2023–2025, pelaksanaan SPM bidang kesehatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun pada Tahun 2025 terjadi perubahan beberapa indikator sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat. Pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat dari 95 persen pada Tahun 2023 menjadi 100 persen pada Tahun 2024, kemudian berdasarkan indikator baru pada Tahun 2025 mencapai 96,42 persen. Pelayanan kesehatan ibu bersalin juga mengalami peningkatan hingga mencapai 100 persen pada Tahun 2024 sebelum menurun menjadi 90,75 persen pada Tahun 2025.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita secara umum menunjukkan capaian yang tinggi, sedangkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar kembali mencapai 100 persen setelah menggunakan indikator skrining kesehatan pada Tahun 2025. Selain itu, pelayanan kesehatan usia produktif berhasil meningkat hingga mencapai 100 persen pada Tahun 2025. Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pelayanan bagi penderita diabetes melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat, orang terduga tuberkulosis, dan masyarakat berisiko terinfeksi HIV secara umum mampu mempertahankan capaian yang sangat baik hingga mencapai atau mendekati 100 persen. Hal tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat selama tiga tahun terakhir.

Perkembangan pelaksanaan SPM pada bidang pekerjaan umum selama Tahun 2023–2025 juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Sebelum dilakukan penyesuaian indikator, pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari mengalami penurunan capaian dari 100 persen pada Tahun 2023 menjadi 73,66 persen pada Tahun 2024, sedangkan pelayanan pengolahan air limbah domestik meningkat dari 71,84 persen menjadi 72,41 persen. Seiring diberlakukannya indikator baru pada Tahun 2025, kedua indikator tersebut berhasil mencapai capaian sebesar 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyesuaikan penyelenggaraan pelayanan dasar dengan perubahan indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat terlaksana secara optimal.

Pada bidang perumahan rakyat, perkembangan capaian selama periode Tahun 2023–2025 masih menunjukkan belum adanya realisasi pelayanan pada beberapa indikator. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan indikator yang cukup signifikan pada Tahun 2025, di mana indikator mengenai penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban

bencana serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah digantikan dengan indikator baru. Berdasarkan hasil pelaksanaan selama tiga tahun tersebut, belum terdapat sasaran pelayanan maupun pelaksanaan program yang memenuhi kriteria indikator sehingga capaian masih sebesar 0 persen. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kinerja pelayanan, melainkan lebih dipengaruhi oleh belum adanya kebutuhan pelayanan sesuai indikator yang berlaku.

Perkembangan pelaksanaan SPM pada bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama Tahun 2023–2025 menunjukkan adanya perubahan indikator yang cukup besar, khususnya pada pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Meskipun demikian, sebagian besar indikator mampu mencapai target pelayanan sebesar 100 persen pada Tahun 2025. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang meningkat dari 1,36 persen pada Tahun 2024 menjadi 100 persen pada Tahun 2025. Adapun pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mengalami penurunan dari 100 persen pada Tahun 2024 menjadi 61,67 persen pada Tahun 2025, sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitas pelayanan melalui penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sistem respons penanggulangan kebakaran.

Sementara itu, perkembangan pelaksanaan SPM pada bidang sosial selama periode Tahun 2023–2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan sangat baik. Sebagian besar indikator rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis mampu mencapai target pelayanan sebesar 100 persen, meskipun pada Tahun 2024 terdapat sedikit penurunan pada beberapa indikator sebelum kembali mencapai target pada Tahun 2025. Demikian pula pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana secara konsisten mencapai 100 persen selama tiga tahun berturut-turut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan sosial di Kabupaten Serang telah mampu memenuhi kebutuhan pelayanan bagi kelompok masyarakat rentan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. Secara keseluruhan, perkembangan capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Serang selama periode Tahun 2023–2025 menunjukkan kecenderungan yang positif. Sebagian besar indikator pelayanan dasar telah mencapai target atau mendekati target yang ditetapkan. Adapun beberapa indikator yang mengalami penurunan capaian umumnya dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah sasaran pelayanan, perubahan metode penghitungan, serta penyesuaian indikator sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan

demikian, evaluasi capaian SPM selama tiga tahun ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar melalui pemenuhan standar pelayanan minimal, penyesuaian terhadap kebijakan nasional, peningkatan validitas data sasaran, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, merata, dan berkelanjutan

Tabel 2. 89 Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023- 2025

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025		
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	
1. ASPEK PENDIDIKAN									
1	PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	61.546	92.01	54582	78.67	54,036	76.79	
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada wilayah Kabupaten	66.894		69385		70,371		
2	PELAYANAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang	284.336	100	290239	99.15	293,875	98.79	
	DASAR	Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar yang sudah tamat atau sedang belajar							
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang	284.336		292731				297,475
		Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar							
3	PELAYANAN PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau	16.802	95.6	12950	97.61	5,405	98.18	

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
	KESETARAAN	sedang belajar pendidikan kesetaraan						
		Jumlah anak usia 7-18 tahun	17.577		13267		5,505	
2. ASPEK KESEHATAN								
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayananantenatal sesuai standar di wilayah kerja kaupaten	33.516	95	35664	100	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT	
		Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota	35.442		35664			
		Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				32002	96.42
						33191		
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan	30.119	88	34042	100	28,753	90.75
		persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan						
		kesehatan di wilayah kerja Kabupaten						
		Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten	34.147	34042	31,684			
	PELAYANAN	Jumlah bayi baru					PERGANTIAN INDIKATOR	

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
3	KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	31.274	96	33948	100	DARI PUSAT	
		Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Kabupaten	32.521		33948			
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				28,887	95.74
					30,171			
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan kesehatan	155.261	100	168336	100	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT	
		Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten	155.261		168336		139,320	97.69
							142,610	
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten	202.892	100	217475	74.29	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT	
		Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di	202.892		292731			

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
		wilayah kerja Kabupaten						
		Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				262,357	100.00
							262,357	
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Jumah orang usia 15-59 tahun di kabupaten yang Mendapat pelayanan skrining kesehatan	1.047.693	92	1014519	86.90	1,167,428	100.00
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten	1.133.799		1167428		1,167,428	
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan	105.354	88	121176	80.78	133,201	88.79
		Jumlah semua warga negara berusia usia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah kerja Kabupaten	120.297		150015		150,015	
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq$ 15 tahun yang berada di dalam wiayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan	251.729	78	198385	60.87	76,804	97.16

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
		kesehatan						
		Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan angka Prevalensi kabupaten	323.557		325914		79,048	
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan	18.811	100	18490	97.57	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT	
		Jumlah estimasi diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalansi kabupaten	18.811		18950			
		Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				13,203	100.58
							13,127	
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten yang Mendapat pelayanan kesehatan jiwa	1.815	82	2225	100	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT	

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025		
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	
	(ODGJ) BERAT	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten	3.61		2225				
		Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				2,276	97.77	
							2,328		
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Jumlah orang yang terduga TBC yang dilakukan Pemeriksaan penunjang	30.61	100	37064	100	36,996	100.00	
							36,996		
		Jumlah orang yang terduga TBC	30.61		37064				
12	PELAYAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang Mendapatkan pelayanan	37.597	85	41861	90.41	43,666	100.00	
							43,665		
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di	44.092		46302				
		kabupaten							
3. ASPEK PEKERJAAN UMUM									
1	PENYEDIAAN KEBUTUHA	Jumlah warga negara yang terlayani	6	100	360423	73.66	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT		

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
	N POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan Hari	6		489311			
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				7605	100
			7605					
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Jumlah warga negara yang terlayani	1.355.804	71.84	354324	72.41	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT	
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	1.711.653		489311			
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				39	100
			39					
4. ASPEK PERUMAHAN RAKYAT								
1	PENYEDIAAN & REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KAB/KOTA	Jumlah rumah yang direhab/dibangun		0	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT		PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT	
		Jumlah total rumah yang seharusnya direhab/dibangun	0					
		Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024			0	0		
					1			

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	Jumlah warga negara yang terlayani	0	0	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT			
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	0					
		Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan+Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni			0	0		
					1			
3	Ketersediaan unit Rumah Korban Bencana yang ditangani dan Rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				0	0
							0	
4	Jumlah Warga Negara	Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitas					0	0

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
	yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni					0	
5. ASPEK TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah total yang Terlayani	1	100	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT			
		Jumlah total yang harus dilayani	1					
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				326	100
326								
2	PELAYANAN Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN	0	0	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT		
				285				

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
3	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP JUMLAH PENEGAKAN PERDASESUAI MUTU	Jumlah total yang Terlayani	2.25	0.52	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT			
		Jumlah total yang harus dilayani	436.517					
4	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	Jumlah total yang Terlayani	2.25	100	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT			
		Jumlah total yang harus dilayani	2.25					
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN		341362	100	165056	100
					341362		165056	
5	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAG AAN TERHADAP BENCANA	Jumlah total yang Terlayani	10.121	100	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT			
		Jumlah total yang harus dilayani	10.121					
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN		3300	1.36	165056	100
					242052		165056	

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
6	PELAYANAN DAN PENYELAMATAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Jumlah total yang Terlayani	353	99.72	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT			
		Jumlah total yang harus dilayani	354					
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN		108	100	8340	100
		108			8340			
7	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Jumlah total yang Terlayani	0	0	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT			
		Jumlah total yang harus dilayani	0					
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN		113	100	37	61.67
		113			60			
6. ASPEK SOSIAL								
1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR	Jumlah total yang Terlayani	2	100	77	92.77	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT	
		Jumlah total yang harus dilayani	2		83			
		Jumlah Warga	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				77	100

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025	
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)
	PANTI	Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti					77	
2	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI	Jumlah total yang Terlayani	41	100	5	100	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT	
		Jumlah total yang harus dilayani	41		5			
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				43	100
					43			
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI	Jumlah total yang Terlayani	50	100	30	96.77	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT	
		Jumlah total yang harus dilayani	50		31			
		Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				27	100
					27			
4	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN	Jumlah total yang Terlayani	10	100	1	100	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT	
		Jumlah total yang harus dilayani	10		1			

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2025		
			Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	Target dan Realisasi	(%)	
	PENGEMIS DI LUAR PANTI								
		Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				1	100	
							1		
5	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA	Jumlah total yang Terlayani	5326	100	8900	100	PERGANTIAN INDIKATOR DARI PUSAT		
		Jumlah total yang harus dilayani	5326		8900				
		Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana	INDIKATOR BELUM DITETAPKAN				8284	100	
									8284

Sumber : Perangkat Daerah Tahun 2026

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan periode RPJMD sebelumnya serta hasil analisa kajian lingkungan yang termuat dalam laporan KLHS RPJMD 2025-2029. Selain itu, dalam perumusan permasalahan RKPD 2027 juga memperhatikan muatan yang ada dalam RPJMD 2025-2029, RTRW Kabupaten Serang tahun 2011-2031 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Perspektif lain menjelaskan bahwa mandatori pembangunan sesuai lingkungan dinamis dari pemerintah pusat maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi

menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang ini disebut isu strategis. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan, sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tetap dapat dicapai secara optimal.

2.3.1 Permasalahan Urusan Pemerintahan Daerah

Identifikasi permasalahan per urusan pemerintahan Kabupaten Serang didasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagaimana tercantum dalam Bab II. Masing-masing permasalahan menurut urusan disajikan berikut ini:

1. Pendidikan

Permasalahan pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Serang masih berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025 telah melampaui target dengan capaian sebesar 74,10 atau 100,37% dari target, kualitas pendidikan dasar masih menghadapi berbagai tantangan.

Hal tersebut tercermin dari Skor Kemampuan Literasi SD yang baru mencapai 47,11 atau 86,50% dari target serta Skor Kemampuan Numerasi SD sebesar 41,72 atau 83,78% dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik pada jenjang sekolah dasar dalam memahami bacaan, berpikir kritis, serta menyelesaikan permasalahan matematika kontekstual masih perlu ditingkatkan. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain belum optimalnya kualitas proses pembelajaran, keterbatasan sarana dan media pembelajaran, belum meratanya kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, rendahnya budaya literasi dan numerasi di lingkungan sekolah maupun keluarga, serta terbatasnya pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bagi tenaga pendidik.

Di sisi lain, Harapan Lama Sekolah (HLS) baru mencapai 13,02 tahun atau 96,59% dari target. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesempatan penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi masih perlu

ditingkatkan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh masih adanya peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas, terutama karena keterbatasan kondisi ekonomi keluarga, akses terhadap layanan pendidikan yang belum merata, kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum sepenuhnya memadai, serta masih perlunya optimalisasi berbagai program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Meskipun demikian, beberapa indikator menunjukkan perkembangan yang positif. Skor Kemampuan Literasi SMP, Skor Kemampuan Numerasi SMP, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah pertama mulai mengalami peningkatan sebagai hasil penguatan kualitas proses pembelajaran, penyediaan bahan ajar, asesmen pendidikan, serta peningkatan mutu layanan pendidikan. Namun demikian, keberhasilan tersebut masih perlu diperluas hingga jenjang pendidikan dasar agar kesenjangan capaian pembelajaran antarjenjang dapat diminimalkan.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pembangunan urusan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada penguatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, penguatan budaya literasi di sekolah dan masyarakat, perluasan akses pendidikan yang inklusif dan merata, peningkatan partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan menengah, serta optimalisasi program bantuan pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.

2. Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan sebagai berikut: promosi pola hidup sehat dan prevensi kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai serta meningkatkan deteksi dini dan eliminasi penyakit menular dan tidak menular. Hal ini dijelaskan oleh; (i) indeks keluarga sehat (IKS) yang masih tergolong dalam kategori keluarga tidak sehat dengan nilai kurang dari 0,50, (ii) jumlah kasus TBC signifikan meningkat.

Kemampuan asupan gizi masih perlu ditingkatkan untuk menekan terjadinya balita yang menderita stunting, hal ini dijelaskan oleh angka prevalensi stunting. Kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, hal ini tergambarkan oleh: (i) adanya kasus kematian ibu yang berdampak pada angka kematian ibu yang masih cenderung tinggi, (ii) angka kematian bayi menunjukkan adanya kasus kematian bayi di Kabupaten Serang. Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan masih perlu terus ditingkatkan guna menjamin pelayanan yang berkualitas, merata, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kasus kematian ibu yang menyebabkan Angka Kematian Ibu (AKI) belum dapat ditekan secara optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan ibu, mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas, masih perlu diperkuat, termasuk peningkatan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar, sistem rujukan yang efektif, serta kompetensi tenaga kesehatan. Demikian pula, masih ditemukannya kasus kematian bayi yang tercermin pada Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan neonatal, kesehatan anak, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, serta penanganan faktor risiko pada bayi baru lahir masih memerlukan perhatian yang lebih intensif.

Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh belum meratanya ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana, alat kesehatan, obat-obatan, serta tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Serang, khususnya pada daerah yang memiliki akses pelayanan kesehatan terbatas. Di samping itu, transformasi layanan kesehatan primer, penguatan sistem informasi kesehatan, peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kesehatan masih perlu terus ditingkatkan agar pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, pembangunan urusan kesehatan diarahkan pada penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan upaya promotif dan preventif, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Serang yang sehat, mandiri, dan produktif.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut; Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas terlihat dari indikator yang masih di bawah target dari urusan PUPR pada tahun 2023, yaitu: Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (75,56%), Panjang jalan kondisi baik (58,53%), Panjang jalan dengan jenis permukaan jalan beton (80,18%).

Belum optimalnya pengelolaan tata ruang sesuai dengan RTRW, tergambar dari tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang RTRW kawasan yang masih belum terwujud sesuai dengan rencana pola ruangnya antara lain (i) kawasan perlindungan setampat (63%), (ii) kawasan suaka alam (75%), (iii) Kawasan ekosistem mangrove (38%). Berdasarkan tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang RTRW menjelaskan bahwa jaringan sumber daya air (62%) masih belum optimal.

Sarana prasarana terkait kebutuhan air minum dan pengelolaan limbah masih belum optimal, ditandai indikator rumah tangga yang memiliki akses terhadap air layak minum (73,24%) pada tahun 2023, rumah tangga dengan akses air limbah (0,99%) pada tahun 2024.

Permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas jalan dan gedung di lingkungan Puspemkab karena terkendala pembebasan lahan.
- b. Belum optimalnya penyediaan akses jaringan perpipaan SPAM
- c. Belum optimalnya akses sanitasi aman.
- d. Belum optimalnya penyediaan RTH publik sesuai standar.
- e. Belum optimalnya pengendalian laik fungsi bangunan untuk keselamatan.
- f. Belum diterapkannya skema insentif dan disinsentif sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Serang masih berkaitan dengan upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, aman, sehat, dan berkelanjutan. Meskipun sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target, tantangan pembangunan masih

dihadapkan pada kebutuhan peningkatan kualitas permukiman, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta percepatan penanganan rumah tidak layak huni secara berkelanjutan.

Penanganan kawasan kumuh telah mencapai target yang ditetapkan, namun luas kawasan kumuh yang masih tersisa menunjukkan bahwa upaya penataan kawasan permukiman perlu terus dilanjutkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penyediaan sanitasi yang layak, akses air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Pertumbuhan kawasan permukiman yang relatif cepat juga berpotensi memunculkan kawasan kumuh baru apabila tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.

Selanjutnya, meskipun jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus mengalami penurunan dan telah melampaui target pada Tahun 2025, jumlah RTLH yang masih cukup besar menunjukkan bahwa kebutuhan rehabilitasi rumah layak huni masih menjadi prioritas pembangunan daerah. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menyebabkan penanganan RTLH belum dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga diperlukan optimalisasi pendanaan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program CSR, maupun partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, persentase perumahan yang telah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) serta telah diserahterimakan dalam kondisi baik belum sepenuhnya mencapai target (62,65% dari target 62,72%). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kawasan perumahan yang belum memiliki kelengkapan PSU sesuai standar maupun belum dilakukan serah terima kepada pemerintah daerah, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan infrastruktur permukiman dan keberlanjutan pemeliharaan aset.

Selain itu, penguatan tata kelola penyelenggaraan perumahan juga masih perlu dilakukan, terutama melalui peningkatan sertifikasi dan registrasi penyedia jasa perencanaan perumahan dan PSU. Program ini mulai dialokasikan pada periode 2026–2029 sehingga implementasinya perlu didukung dengan penyusunan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pembangunan perumahan semakin profesional dan memenuhi standar teknis.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan pada percepatan penanganan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), penguatan pengendalian kawasan kumuh, peningkatan sinergi pendanaan lintas sektor, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan perumahan yang memenuhi standar teknis, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan permukiman yang layak huni serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Serang.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Risiko bencana yang masih cukup tinggi (IRB 2023: 136,82; kategori "sedang:) di wilayah Kabupaten Serang belum direspon secara optimal dalam mempersiapkan diri, mencegah, mengatasi, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari bencana (indeks ketahanan daerah 2023: 0,68).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman. Capaian di urusan ini dapat diketahui dari indikator persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sampai tuntas. Pada tahun 2025 masih ada pengaduan yang kasusnya masih dalam proses penyelesaian sehingga belum terselesaikan secara tuntas untuk 2025.

Tabel 2. 90 Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan diKabupaten Serang Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Pengaduan Yang Di Tangani	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk	Presentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Di Selesaikan
2021	46	46	100%
2022	43	43	100%
2023	40	40	100%
2024	37	37	100%
2025	28	35	80%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang Tahun 2026 (data diolah)

Dalam aspek hukum, penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten akan mempengaruhi pula pada kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum dilakukan untuk memastikan peraturan daerah dapat dipatuhi melalui tindakan preventif, sosialisasi hingga tindakan yustisial demi menjaga ketentraman dan ketertiban umum agar tercipta situasi dinamis dimana masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar tanpa adanya gangguan seperti penertiban fasilitas umum, pencegahan balap liar dan penanganan gangguan social sehingga perlindungan masyarakat dapat terwujud dengan melibatkan dan melatih masyarakat untuk berupaya mencegah dan menangani konflik serta membantu pengamanan kegiatan yang ada di masyarakat.

Tabel 2. 91 Jumlah Pelanggaran K3 Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2025

Peraturan	Jumlah Pelanggaran
Perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Serang No.10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031	1
Perda No. 6 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	4
Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung	10
Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13
Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat	4
Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang	2

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang Tahun 2025

Gambaran data terkait pelayanan penanganan bencana disajikan dalam tabel-tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 92 Cakupan Pelayanan BPBD Menurut Jenis
di Kabupaten Serang Tahun 2024**

Jenis Layanan	Jumlah Warga	Cakupan
Informasi Rawan Bencana	318.499	100%
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	318.499	100%
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	74.532	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

**Tabel 2. 93 Jumlah Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana
di Kabupaten Serang Tahun 2021-2024**

Jenis	2021	2022	2023	2024
Kendaraan Roda 2	9	18	19	5
Kendaraan Roda 4	4	12	5	5
Handy Talky	13	41	28	10
Radio Pemancar	1	14	4	4
Tandu	3	10	13	14
Peralatan Air Bersih Lainnya	3	5	0	0
Tenda	10	25	13	15
Dapur Umum	1	1	1	1
Generator	2	6	0	0
Jumlah	46	132	83	54

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa cakupan pelayanan sub urusan bencana di Kabupaten Serang pada tahun 2024 sudah sesuai target SPM. Pencapaian target tersebut didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana tanggap bencana.

Data terkait sub urusan penanganan kebakaran dan penyelamatan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 94 Jumlah Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan Menurut Kecamatan diKabupaten Serang Tahun 2021-2024

Kecamatan	2021	2022	2023	2024	Operasi Penyelamatan (Tahun 2024)
Anyer	4	6	12	3	11
Kramatwatu	11		8	7	9
Waringin Kurung	4	7	1	1	2
Petir	6	-	1	2	24
Cikeusal	4	3	-	-	11
Bojonegara	3	15	3	1	2
Pulo Ampel	3	11	2	5	-
Pontang	4	1	6	1	5
Tanara	2	2	4	1	8
Kopo	6	6	4	-	5
Ciruas	16	11	14	4	8
Kibin	14	14	4	5	3
Jawilan	5	10	13	11	28
Tirtayasa	5	1	2	1	4
Cikande	20	22	14	16	24
Bandung	4	-	-	-	1
Pamayaran	4	-	2	-	5
Ciomas	8	-	2	-	-
Gunung Sari	-	1	-	1	-
Mancak	8	5	2	-	-
Pabuaran	-	2	2	1	4
Padarincang	-	5	2	1	1
Lebak Wangi	-	-	4	1	1
Tunjung Teja	3	5	2	1	10
Kragilan	10	2	6	2	11

Kecamatan	2021	2022	2023	2024	Operasi Penyelamatan (Tahun 2024)
Binuang	-	2	-	1	-
Baros	2	3	-	1	2
Tanara	2	2	6	1	8
Cinangka	4	3	-	2	-
Carenang	2	6	6	1	5
Total	154	145	122	72	192

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan data kejadian kebakaran pada rentang tahun 2021 s.d 2024 terlihat bahwa ada penurunan jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Serang, dari 154 kejadian menjadi 72 kejadian di tahun 2024. Pelayanan penanganan kebakaran juga dilakukan pada daerah perbatasan Kabupaten Serang yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 95 Jumlah Penanganan Kebakaran di Daerah Perbatasan Kabupaten Serang Tahun 2024

Perbatasan Kabupaten Serang	Tahun 2024	Operasi Penyelamatan (Tahun 2023)
Kota Serang	25	59
Kota Cilegon	12	5
Kab. Pandeglang	-	2
Kab. Tangerang	2	37
Kab. lebak	1	-
Jumlah	40	103

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

Data sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 96 Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2024

Kecamatan	Mobil	Pos	APD
Tanara	1	1	1
Petir	1	1	1
Jawilan	1	1	0
Anyer	1	1	3
Total	4	4	5

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

Tabel 2. 97 Rata-rata Waktu Tanggap (response time) Penanganan Kebakaran di Kabupaten Serang Tahun 2021-2024

Tahun	Kejadian Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata- rata
2021	81	969	11,96
2022	79	971	12,29
2023	209	1849	7,12
2024	113	1234	10,9

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, jika mengacu pada standar waktu respon time penanganan kebakaran ≤ 15 menit, terlihat bahwa waktu respon time penanganan kebakaran di Kabupaten Serang sudah melebihi standar.

6. Sosial

Permasalahan pada bidang urusan social adalah :

1. Data penerima bantuan social menggunakan data hasil pemutakhiran dari P3KE, DTKS dan regsosek menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang menyebabkan banyak penerima sasaran yang keluar dari desil sebelumnya;
2. Banyaknya sasaran yang dinonaktifkan PBI nya oleh kementian;

3. Masih lemahnya refungsionalisasi PPKS terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan disabilitas terlantar;

Kurangnya pembiayaan dalam pemenuhan SPM urusan sosial

7. Tenaga Kerja

Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu 9,18% (tahun 2024) dan berada di atas rata-rata Provinsi Banten.

- a. Masih rendahnya penyerapan dan produktivitas tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri).
- b. Belum optimalnya hubungan industrial yang dapat mendorong iklim kemajuan usaha untuk peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Permasalahan pembangunan urusan tenaga kerja di Kabupaten Serang masih dihadapkan pada tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan hubungan industrial yang harmonis. Dinamika perkembangan investasi dan pertumbuhan sektor industri belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga masih terdapat kesenjangan (*skill mismatch*) antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Perencanaan tenaga kerja juga masih perlu diperkuat agar seluruh program ketenagakerjaan dapat mengacu pada dokumen perencanaan tenaga kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah dan potensi sektor unggulan. Penguatan sistem informasi pasar kerja dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja menjadi penting untuk mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.

Produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor prioritas masih perlu terus ditingkatkan melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan industri, serta pengembangan budaya kerja yang produktif dan inovatif. Di sisi lain, penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar daerah, masih memerlukan optimalisasi melalui peningkatan kualitas pelayanan antar kerja, penyediaan informasi lowongan kerja yang akurat, serta perluasan kerja sama dengan dunia usaha dan kawasan industri.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya penerapan norma ketenagakerjaan dan hubungan industrial di perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih perlunya peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola ketenagakerjaan sesuai ketentuan, meliputi penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, penerapan struktur dan skala upah, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perlindungan hak-hak pekerja, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Selain itu, masih diperlukan peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan memperkuat dialog sosial sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Pengawasan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan, peningkatan kesadaran perusahaan terhadap kepatuhan regulasi, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja masih menjadi tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Serang.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pembangunan urusan tenaga kerja diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri, penguatan sistem informasi pasar kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, optimalisasi pelayanan penempatan tenaga kerja, penguatan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

Narasi tersebut telah disusun dengan format analisis yang konsisten dengan Bab II RKPD, yaitu menguraikan kondisi eksisting, permasalahan utama, penyebab, dan arah penyelesaian, sehingga siap dimasukkan ke dalam dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :

- Rendahnya partisipasi perempuan dalam mengembangkan potensi dan berkiprah dalam ranah public khususnya dalam bidang ekonomi, politik, social dan hukum;

- Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga terkait pola pengasuhan, pola hidup dan kesejahteraan keluarga serta ketahanan dalam keluarga;
- Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang berpengaruh pada capaian indeks pembangunan gender;
- Masih rendahnya peran ayah dalam proses pengasuhan Bersama dalam keluarga.

9. Pangan

Mata rantai produksi dan distribusi komoditas pangan seperti komoditas padi, jagung, dan kedelai perlu diperkuat karena adanya alih fungsi lahan yang menyebabkan luas lahan dan panen pertanian mengalami penurunan, sehingga ketergantungan ketersediaan pangan dari daerah sekitar masih terjadi apalagi untuk wilayah yang masih dalam cakupan rentan terhadap ketahanan pangan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan masih cenderung tinggi, sehingga perlu kebijakan pengendalian rawan pangan dan potensi ketidakcukupan konsumsi pangan.

Permasalahan pembangunan urusan pangan di Kabupaten Serang masih dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian, meningkatkan ketahanan pangan daerah, serta memperkuat daya saing sektor pertanian di tengah perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan dinamika pasar hasil pertanian. Meskipun sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target Tahun 2025, keberhasilan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh dukungan program pemerintah serta kondisi produksi yang bersifat fluktuatif.

Produksi tanaman pangan, khususnya padi dan jagung, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun demikian, capaian tersebut masih didorong oleh pelaksanaan program nasional seperti Luas Tambah Tanam (LTT) dan program swasembada pangan, sehingga keberlanjutan peningkatan produksi memerlukan penguatan produktivitas lahan, penyediaan sarana produksi pertanian, peningkatan kualitas irigasi, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta peningkatan kapasitas petani dalam penerapan teknologi budidaya.

Pada subsektor hortikultura dan perkebunan, produksi beberapa komoditas masih berfluktuasi akibat pengaruh perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, perubahan luas panen, serta dinamika harga pasar. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa produktivitas komoditas pertanian masih rentan terhadap faktor eksternal sehingga diperlukan diversifikasi usaha tani, penguatan sistem budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian dan penguatan akses pemasaran.

Di subsektor peternakan, peningkatan populasi ternak masih menghadapi tantangan akibat tingginya tingkat penjualan dan pemotongan ternak dibandingkan dengan angka kelahiran. Selain itu, pengembangan usaha peternakan juga dipengaruhi oleh perubahan pola usaha peternak serta dinamika investasi pada perusahaan peternakan. Oleh karena itu, upaya peningkatan reproduksi ternak, penguatan kesehatan hewan, penyediaan bibit unggul, serta pengembangan kawasan peternakan masih perlu terus ditingkatkan.

Permasalahan lainnya adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang masih memerlukan penguatan melalui penetapan regulasi, pengendalian alih fungsi lahan, dan pemutakhiran data spasial lahan pertanian. Keberadaan LP2B menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian produktif sebagai penopang ketahanan pangan daerah di tengah meningkatnya tekanan pembangunan kawasan permukiman dan industri.

Selain itu, perubahan iklim masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi keberlanjutan produksi pertanian. Meskipun penanganan dampak perubahan iklim dan bencana pertanian telah melampaui target, risiko kekeringan, banjir, serta serangan hama dan penyakit tanaman maupun hewan tetap memerlukan penguatan sistem mitigasi, adaptasi, dan respons cepat agar kerugian petani dapat diminimalkan.

Di sisi kelembagaan, meskipun pembinaan usaha pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh, dan pembentukan kelembagaan petani telah menunjukkan capaian yang baik, kualitas pendampingan kepada petani, penguatan kelembagaan ekonomi petani, regenerasi petani, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan masih perlu terus ditingkatkan agar produktivitas dan daya saing sektor pertanian semakin kuat.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pembangunan urusan pangan diarahkan pada penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim, peningkatan kesehatan hewan dan biosekuriti, pengembangan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas penyuluh, penerapan teknologi pertanian modern, serta

penguatan hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung terwujudnya kemandirian pangan di Kabupaten Serang.

10. Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait urusan lingkungan hidup Kabupaten Serang di Kabupaten Serang yang menonjol pada tahun 2025 antara lain adalah :

- Permasalahan kualitas lingkungan hidup, yang ditandai dengan belum tercapainya target nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diidentifikasi disebabkan karena penurunan nilai kualitas udara dan tutupan vegetasi yang disebabkan belum optimalnya perbaikan kualitas lingkungan hidup terutama pada kualitas lahan, air dan udara
- Permasalahan persampahan, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dan Jumlah/Volume Sampah Terolah Pada Fasilitas Pengolahan Sampah yang masing dibawah target yang ditetapkan. Factor utama permasalahan ini adalah: belum adanya Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), belum optimalnya upaya pengurangan produksi sampah melalui proses daur ulang (3R), belum optimalnya pengelolaan timbulan sampah yang ramah lingkungan, terbatasnya jumlah sampah yang diangkut ke TPA karena ketentuan dalam Kerjasama pengelolaan persampahan dengan daerah lain.
- Permasalahan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), ditandai nilai Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang masih dibawah target. Masih belum tercapainya target penurunan intensitas emisi GRK ini diidentifikasi karena masih belum maksimalnya upaya intervensi melalui kegiatan Pembangunan Rendah Karbon (PRK), masih lemahnya koordinasi antar sektor terkait terutama penghasil emisi GRK, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha berpotensi menghasilkan emisi GRK dan kurangnya SDM di bidang Lingkungan Hidup.

11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemilikan akte kelahiran masih di bawah target (94,61%) dan kartu identitas anak (46,69%). Permasalahan yang ada dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis pada teknologi;

2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung fasilitas administrasi kependudukan karena terbatasnya keuangan daerah
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk kepada Disdukcapil dikarenakan tidak optimalnya sosialisasi dan publikasi yang dilakukan;

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan utama pada urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah:

1. Masih banyaknya desa yang berstatus desa berkembang
2. Pemerataan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan desa masih belum optimal
3. Belum banyaknya Kerjasama desa untuk meningkatkan perekonomian desa
4. Pengelolaan Bumdes yang belum optimal
5. Bumdesma yang belum berjalan aktif
6. Kurang Personil dan Sarana Prasarana
7. Kapasitas Aparatur Desa belum memadai
8. Belum adanya database berkenaan potensi masing masing desa atas kerja sama desa
9. Masih kurangnya kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengurus LKD

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah masih tingginya angka kelahiran dimana belum optimalnya pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga berencana dengan berbagai bermasalahan sebagai berikut :

1. Adanya penurunan persentase pemakaian kontrasepsi modern;
2. Pembangunan berwawasan kependudukan belum menjadi arusutamaan pembangunan daerah;
3. Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) masih tinggi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah;
4. Angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahu masih tinggi
5. Tingkat putus pakai (DO) pemakaian kontrasepsi masih tinggi
6. Pengembangan kampung KB masih belum optimal

14. Persandian

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya layanan keamanan informasi (persandian) tersebut antara lain adalah adanya pembaruan utama yang mencakup penyelarasan dengan standar SNI ISO/IEC 27001:2022 berupa adanya penambahan instrumen yang terkait dengan perlindungan data pribadi dan pengamanan infrastruktur awan (cloud) dan pihak ketiga yang tidak ada pada penilaian indeks keamanan informasi versi sebelumnya yaitu versi 4.2 dan masih kurangnya SDM dibidang keamanan informasi digital.

15. Statistik

Ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral masih belum optimal dijelaskan oleh Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan.karena. belum optimalnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral daerah yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan, Belum terwujudnya satu data daerah yang terintegrasi dan termutakhirkan, masih lemahnya koordinasi antar instansi serta kurangnya SDM dibidang statistic.

16. Perpustakaan

Tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masih dalam kategori sedang, diindikasikan oleh indeks pembangunan literasi masyarakat mencapai 54,30 pada tahun 2024.

Permasalahan utama dalam urusan perpustakaan adalah:

- a. Masih rendahnya literasi masyarakat.
- b. Masih rendahnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

17. Pariwisata

Sektor pariwisata belum berkembang optimal diindikasikan dari: penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Serang masih relatif kecil berkisar 2-3 %.

- a. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b. Masih kurangnya pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
- c. Masih rendahnya tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi.

2.3.2 Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Serang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan diklasifikasikan menjadi permasalahan pokok dan permasalahan, serta akar penyebab masalahnya. Perumusan masalah dalam RPJMD Kabupaten Serang 2025–2029 dirumuskan berdasarkan evaluasi capaian kinerja urusan pemerintahan tahun 2025; dan masukan atau aspirasi masyarakat dalam forum konsultasi publik RKPD 2027, kemudian digabungkan dengan telaah visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa permasalahan utama daerah dijawab dengan visi dan permasalahan pokok daerah dijawab dengan misi. Oleh karena itu telaah visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dijadikan dasar perumusan permasalahan pokok daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah “Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”, dengan mengusung 6 misi. Dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, merefleksikan permasalahan pokok daerah yang hendak diprioritaskan dalam perencanaan tahun 2027. Permasalahan pokok daerah yang diprioritaskan yaitu:

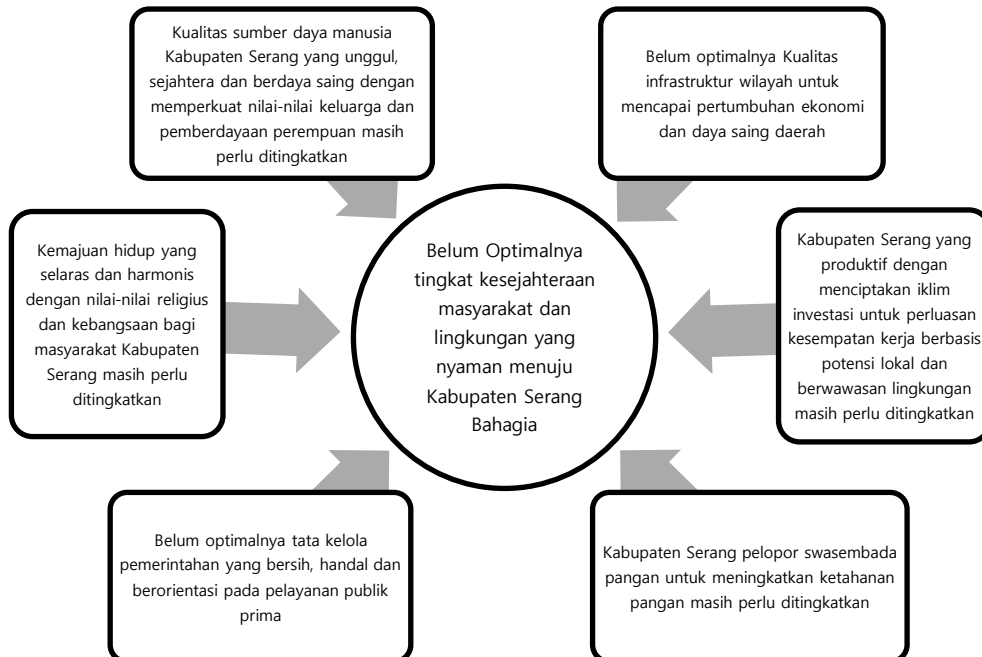
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang unggul, sejahtera dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan. Hal ini terkait dengan peningkatan sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan, serta bagaimana mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan masyarakat yang sejahtera dengan pemberdayaan perempuan.
2. Kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Hal ini mencakup permasalahan pengaturan tata ruang dan infrastruktur sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi seperti industri, koperasi, UMKM dan sektor perdagangan, pariwisata, perikanan, dan sektor lainnya.
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan. Permasalahan ini mencakup bagaimana meningkatkan iklim investasi di seluruh sektor sebagai stimulus penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu, permasalahan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pembangaunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Serang dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan risiko bencana.
4. Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan

ketahanan pangan.

5. Tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima. Hal ini mencakup bagaimana mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan handal serta penyelenggaraan layanan publik yang memuaskan dan kolaboratif dengan pemerintah pusat, kerja sama antara daerah, KPBU, dan kerja sama dengan komunitas masyarakat sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang. Permasalahan ini meliputi bagaimana meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama, dan kebangsaan berlandaskan asas-asas hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan telaah visi misi kepala daerah terpilih dirumuskanlah permasalahan utama pembangunan Kabupaten Serang yakni “Tingkat kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang nyaman menuju Kabupaten Serang bahagia masih belum optimal”. Ringkasan pokok masalah disajikan dalam Gambar berikut ini:

Gambar 2. 7
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Serang dari Telaahan Visi Misi



Perumusan masalah pokok dari telaah visi misi tersebut kemudian dicari permasalahan dan akar masalahnya. Analisis permasalahan dan akar masalah diidentifikasi dari hasil evaluasi kinerja urusan pemerintahan yang tersaji di Bab I dan aspirasi masyarakat Kabupaten Serang pada saat konsultasi publik RKPD. Untuk memperoleh permasalahan

dan akar masalah yang komprehensif, analisis tersebut juga memperhatikan muatan yang ada dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029, KLHS RPJMD 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Serang tahun 2011-2031. Indikator yang masih di bawah target dijadikan dasar analisis masalah dan akar masalah dari setiap komponen permasalahan pokok, sebagaimana disajikan dalam table kolom masalah, akar masalah dan urusan.

1. Permasalahan kualitas sumber daya manusia, nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.
2. Permasalahan kualitas infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
3. Permasalahan iklim investasi dan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan.
4. Permasalahan swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan.
5. Permasalahan Tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima.
6. Permasalahan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang menuntut pemahaman mendalam terhadap kondisi faktual serta akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Di Kabupaten Serang, dinamika pembangunan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan mendasar yang perlu segera direspons secara strategis dalam dokumen RKPD. Identifikasi permasalahan ini tidak hanya mencerminkan capaian dan hambatan pembangunan masa lalu, namun juga menjadi pijakan untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu isu sentral yang dihadapi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih menjadi penghambat utama bagi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Permasalahan ini tampak jelas dalam berbagai aspek, mulai dari masih rendahnya capaian mutu pendidikan, keterbatasan akses dan layanan kesehatan, hingga belum optimalnya ketahanan keluarga dan pengendalian penduduk. Akar masalahnya mencakup keterbatasan sarana prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pendidik, belum maksimalnya program intervensi kesehatan ibu dan anak, serta lemahnya kapasitas kelembagaan yang menangani pembangunan keluarga. Rendahnya kualitas SDM secara langsung memengaruhi efektivitas pembangunan lintas sektor, termasuk upaya peningkatan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Di samping itu, permasalahan lain yang juga sangat fundamental adalah belum optimalnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur wilayah. Ketersediaan infrastruktur

yang layak menjadi prasyarat utama dalam mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Namun, di Kabupaten Serang masih ditemukan kesenjangan signifikan dalam hal akses terhadap jalan yang memadai, air bersih, sanitasi, serta fasilitas permukiman. Keterbatasan anggaran, lemahnya kapasitas teknis, dan kurangnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan kualitas infrastruktur. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada lambannya mobilitas barang dan jasa, namun juga membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang memadai, terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis terpencil.

Permasalahan infrastruktur yang belum tertangani secara menyeluruh juga berimplikasi pada terbatasnya pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, Kabupaten Serang menghadapi tantangan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan. Terbatasnya realisasi investasi, rendahnya pemanfaatan potensi lokal, serta masih lemahnya dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah menjadi cerminan bahwa ekosistem ekonomi daerah belum berjalan secara optimal. Proses perizinan yang belum sepenuhnya efisien, promosi potensi daerah yang belum masif, serta minimnya inovasi dalam pengembangan ekonomi lokal menjadi beberapa akar masalah yang perlu segera diatasi. Tanpa adanya upaya sistematis untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal, maka peluang penciptaan lapangan kerja baru akan semakin sempit dan potensi kemiskinan akan terus mengintai.

Ketahanan pangan, sebagai elemen penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, juga menjadi perhatian serius dalam perumusan RPJMD. Ketersediaan pangan yang stabil, aman, dan terjangkau masih menjadi tantangan akibat berbagai persoalan, seperti produktivitas pertanian yang fluktuatif, gangguan distribusi, serta lemahnya perlindungan terhadap petani. Permasalahan ini diperparah dengan kondisi infrastruktur pertanian yang tidak memadai, alih fungsi lahan yang terus terjadi, serta rendahnya akses petani terhadap sarana produksi dan teknologi pertanian. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat dan berorientasi pada keberlanjutan, maka ketahanan pangan daerah akan terus rapuh, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Serang masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Pelayanan publik yang belum responsif, akuntabilitas yang belum maksimal, serta lemahnya pengawasan internal menunjukkan bahwa masih diperlukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan, integrasi sistem informasi yang belum optimal, serta belum meratanya kapasitas sumber daya aparatur menjadi beberapa faktor yang menghambat peningkatan kualitas layanan

kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang lemah tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya pembangunan.

Di tengah transformasi sosial yang semakin kompleks, permasalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah tergerusnya nilai-nilai religiusitas dan kebangsaan di tengah masyarakat. Fenomena menurunnya toleransi, melemahnya semangat gotong royong, serta meningkatnya konflik sosial berbasis identitas menunjukkan bahwa pembangunan karakter belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Kurangnya ruang partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial-kultural, belum optimalnya peran lembaga keagamaan dan adat, serta rendahnya literasi kebangsaan menjadi pemicu munculnya disintegrasi sosial yang tersembunyi. Pembangunan fisik yang tidak dibarengi dengan pembangunan mental dan karakter masyarakat justru akan menciptakan ketimpangan yang bersifat struktural dan jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling memengaruhi secara sistemik. Ketimpangan dalam satu sektor berpotensi menimbulkan efek domino yang memperburuk kondisi sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bersifat holistik dan intersektoral dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan. RKPD Kabupaten Serang harus mampu menjawab tantangan-tantangan ini dengan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, memperkuat infrastruktur pendukung pertumbuhan, mendorong transformasi ekonomi lokal, serta membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan. Dengan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, permasalahan daerah yang telah diidentifikasi ini dapat ditangani secara tuntas untuk mewujudkan Kabupaten Serang yang bahagia.

**Tabel 2. 98 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Kabupaten Serang**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
1. Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang unggul, sejahtera dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan	Masih rendahnya tingkat intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Masih rendahnya minat baca siswa dan kualitas pembelajaran matematika belum optimal, serta sarana dan prasarana pendukung masih kurang memadai	Pendidikan
		Terbatasnya akses terhadap pendidikan yang merata dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi dan geografis yang kurang mendukung	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
pemberdayaan perempuan masih perlu ditingkatkan		Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial budaya, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan	
	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Pelayanan Antenatal Care (ANC) terpadu masih belum optimal, serta masih terdapat kasus ibu melahirkan yang tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan	Kesehatan
		Koordinasi lintas sektor di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dalam upaya menurunkan prevalensi stunting masih belum optimal	
		Ketersediaan alat diagnosis Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk mendeteksi Tuberkulosis (TB) masih terbatas di Puskesmas dan Rumah Sakit serta belum optimalnya sistem pelaporan	
		Belum optimalnya penginputan data keluarga sehat dalam aplikasi yang digunakan, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi aktual di masyarakat	
	Belum optimalnya kualitas keluarga	Masih rendahnya kemandirian ekonomi keluarga, adanya permasalahan sosial dalam rumah tangga, lemahnya hubungan antar anggota keluarga, kurang akuratnya data keluarga, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB
	Masih rendahnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Minimnya akses pemuda terhadap pendidikan karakter dan kepemimpinan	Kepemudaan dan Olahraga
		Belum tersedia pusat pengembangan olahraga berupa sport center yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemusatan pelatihan bagi atlet dan cabang olahraga	
	Masih rendahnya literasi masyarakat	Urusan perpustakaan masih belum mendapatkan prioritas yang memadai dalam pengembangan sumber daya manusia	Perpustakaan
	Masih rendahnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Tingkat pendidikan dan keterampilan kelompok rentan masih rendah	Sosial
	Belum optimalnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Minimnya data terpilah untuk mengidentifikasi kelompok perempuan rentan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan politik, serta belum optimalnya kebijakan responsif gender	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
		Masih rendahnya dukungan sosial dan ekonomi bagi perempuan	
		Belum optimalnya tata kelola kelembagaan perlindungan anak, yang ditandai dengan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kurangnya pemanfaatan data terpilah anak sebagai dasar perencanaan dan intervensi	
	Belum optimalnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Keterbatasan dan ketidaklengkapan data perumahan	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Belum Optimalnya kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang layak dan berkualitas	Kurangnya perencanaan terintegrasi dan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur fisik yang memadai	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Belum optimalnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Keterbatasan infrastruktur transportasi publik (halte, terminal, jalan akses)	Perhubungan
	Belum optimalnya daya saing industri	Infrastruktur pendukung industri belum memadai	Perindustrian
	Masih rendahnya nilai tambah perdagangan	Lemahnya perencanaan terintegrasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur yang mendukung perdagangan	Perdagangan
	Masih rendahnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Infrastruktur transportasi yang belum memadai menghambat distribusi produk UMKM ke masyarakat	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Masih rendahnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Infrastruktur pendukung pariwisata (akses jalan, fasilitas umum, transportasi) belum memadai	Pariwisata
3. Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	Belum optimalnya peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan sektor produktif berbasis potensi lokal	Tenaga Kerja
	Masih lemahnya daya tarik iklim	Rendahnya kapasitas pelaku usaha lokal	Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
masih perlu ditingkatkan	investasi		
	Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Rendahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat desa dalam mengelola potensi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri	Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	Ketersediaan anggota Satpol PP belum memadai untuk pengamanan di seluruh wilayah	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Limas
	Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah mengenai pentingnya pencegahan serta mitigasi terhadap kawasan rawan bencana	Wilayah geografis Kabupaten Serang cukup luas dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga sosialisasi dan penyuluhan tentang bencana kepada masyarakat belum merata	
4. Kabupaten Serang pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan	Masih rendahnya kesejahteraan petani	Rendahnya kapasitas dan keterampilan petani serta lemahnya kelembagaan	Pertanian
	Belum optimalnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Produktivitas lahan masih rendah akibat teknologi dan sarana produksi terbatas	Pangan
	Masih rendahnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Belum optimalnya rehabilitasi dan pelestarian ekosistem lamun serta akses modal yang sulit dan minimnya lembaga keuangan mikro yang menjangkau nelayan Pencemaran limbah tidak terkelola dan minimnya akses teknologi budidaya modern	Kelautan dan Perikanan
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya transformasi layanan publik berbasis digital	Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum merata dan memadai di seluruh wilayah	Komunikasi dan Informatika
	Belum optimalnya tata kelola	Belum optimalnya penegakan integritas aparat dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah

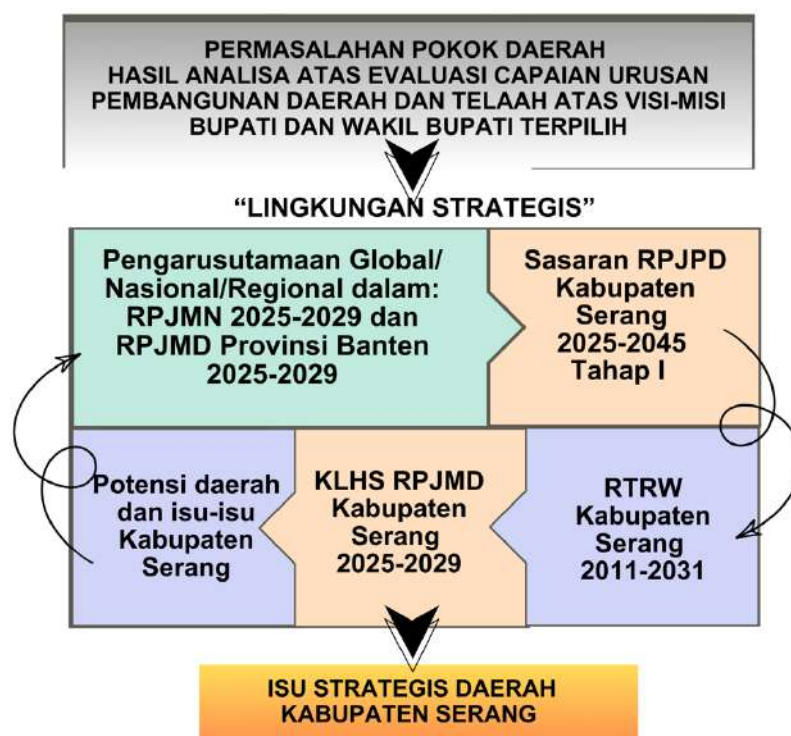
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
	pemerintahan yang efektif dan efisien		
	Masih rendahnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengawas yang masih terbatas, serta sarana dan prasarana yang belum memadai	Pengawasan
	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Kurangnya kapasitas SDM, rendahnya integrasi sistem informasi, serta belum memadainya data dan pengukuran kinerja pembangunan secara akuntabel	Perencanaan
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Belum optimalnya pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD	Keuangan
		Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi	
		Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah	
	Belum optimalnya tingkat profesionalitas ASN	Belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian	Kepegawaian
	Belum optimalnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Belum tersedianya pusat data (data center) daerah	Statistik
	Masih rentannya keamanan informasi Pemerintah Daerah	Belum adanya legalitas dan sistem keamanan yang mengatur penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persandian
	Masih rendahnya tata kelola arsip	Masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan arsip	Kearsipan
	Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif.	Terbatasnya sistem pengaduan publik, belum optimalnya sikap dan kompetensi petugas pelayanan, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung layanan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Masih rendahnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan yang masih terbatas dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
	Kecamatan		
	Belum optimalnya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Masih terbatasnya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi dan dapat diakses publik	Pertanahan
	Masih rendahnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Belum adanya regulasi terkait riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan
	Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur sekretariat DPRD masih terbatas	Sekretariat DPRD
6. Kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Belum optimalnya sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Pemerintahan Umum
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan dan minimnya sarana dan prasarana pendukung	

2.3.3 Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RPJMD tahun 2025, isu dalam RPJPD Kabupaten Serang tahap I (2025-2029), isu dalam RPJMN 2025-2029, isu dalam RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, RTRW Kabupaten Serang 2011-2031, tantangan dan isu Global, dan KLHS RPJMD 2025-2029, serta potensi daerah yang diselaraskan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Skema dalam perumusan isu strategis Kabupaten Serang tersaji pada bagan berikut ini:

Gambar 2. 8
Skema Perumusan Isu Strategis Kabupaten Serang



2.3.4 Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis diartikan sebagai kondisi dalam memahami faktor-faktor eksternal dan internal sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah.

1. Mandatori Isu Global dan isu Nasional

a. Rendahnya Produktivitas

Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Total Factor Productivity selama tahun 2015–2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010–2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971–1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005–2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh:

- i. Kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, khususnya pada perempuan. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada

perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

- ii. Produktivitas sektor ekonomi yang rendah, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005–2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010– 2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015– 2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.
- iii. Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal
- iv. Kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan besar di Indonesia, dimana Indeks modal manusia Indonesia tahun 2020 sebesar 0,54, lebih tinggi dari Filipina (0,45) namun tidak lebih besar dari Singapura (0,88). Rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak terhadap beberapa hal antara lain produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun relatif rendah yang dipicu dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia atau PISA untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) relative rendah, rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang menyebabkan keterserapan tenaga kerja di pasar kerja relatif rendah di bidang keahlian menengah dan tinggi.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Indonesia terjebak dalam pendapatan kelas menengah selama 30 tahun dan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan selama 20 tahun terakhir. Selain itu, tingkat Kemiskinan Indonesia cenderung stagnan di angka 9,0% (rata-rata 2018 – 2024 sebesar 9,6%). Hal tersebut terjadi karena tingginya angka pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Indonesia yang dipicu oleh rendahnya daya beli masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada Agustus 2024 tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Akibatnya, jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, berbanding terbalik dengan populasi kelas menengah yang mengalami penurunan yang berakibat terjadinya risiko pergeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan mempengaruhi perekonomian global disebabkan oleh (i) peningkatan tarif impor Amerika Serikat, (ii) peningkatan produksi minyak AS yang mendorong penurunan harga minyak WTI, (iii) Kebijakan suku bunga The Fed yang cenderung tinggi, dan (iv) penguatan dollar dan pelemahan nilai tukar negara lain. Perekonomian China saat ini masih mengalami trend perlambatan. Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,0 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa faktor penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi China, yaitu permintaan domestik yang masih lemah dan penurunan kinerja sektor perumahan yang terus berlanjut.

Kinerja positif Emerging Market, khususnya perekonomian Vietnam. Perekonomian Vietnam terus menunjukkan kinerja positif, dibuktikan oleh pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 7,09 persen. Kinerja perekonomian Vietnam didukung oleh relokasi sebagian proses produksi dari China. Tensi geopolitik berpotensi menurun. Pemerintahan Trump berkomitmen untuk mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina. Selain itu, adanya deeskalasi konflik di Timur Tengah sebagai dampak dari gencatan senjata antara Israel dan Palestina.

g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dengan memastikan pemberantasan korupsi terus dilakukan. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019–2022 namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya.

Tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2. Mandatori Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Jangka Panjang Daerah, KLHS, dan Perencanaan Daerah Sekitar

a. Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029

Dalam RPJMN tahap pertama 2025–2029 memuat asta cita yang merupakan implementasi RPJPN tahun 2025–2045 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional. Asta cita tersebut diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) prioritas nasional yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Delapan prioritas nasional tersebut meliputi:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat.

b. Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Visi pembangunan Provinsi Banten dalam dokumen RPJMD tahun 2025–2029 yaitu “Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”. Dalam dokumen tersebut sudah digariskan arah pembangunan masing-masing wilayah termasuk Kabupaten Serang. Kabupaten Serang dalam RPJMD Provinsi Banten diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) berupa program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang ditangkap sebagai potensi pembangunan di Kabuapten Serang antara lain Peningkatan Kualitas infrastruktur dasar menuju infrastruktur mantap (jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sarpras pendidikan, kesehatan dan lain-lain), meningkatkan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah, optimalisasi kualitas permukiman dan perumahan layak huni yang menjadi kewenangan provinsi Banten, dan pengembangan koridor industri Cilegon–Serang–Tangerang (sektor industri prioritas: industri kimia, industri makanan dan minuman, dan industri logam, besi, dan baja). Adapun sektor unggulan wilayah Kabupaten Serang mencakup pariwisata, industri, dan pertanian.

c. Amanat RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 Tahap I

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 Tahap ke-1 menjadi acuan kerangka tematik penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029. Pad tahap ke-1, Kabupaten Serang diarahkan untuk melaksanakan penguatan modal dasar pembangunan. Perwujudan penguatan modal dasar pembangunan melalui peningkatan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar, peningkatan peran UMKM, pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana

permukiman, transportasi dan ekonomi, perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh fasilitas yang sudah ada saat ini, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah, rehabilitasi ruang-ruang terbuka publik, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab, konservasi lingkungan, dan risiko bencana, serta penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan.

Adapun sasaran pokoknya yaitu:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
2. Terwujudnya ekonomi tumbuh dan merata;
3. Terwujudnya tatakelola pemerintah yang berintegritas dan inovatif;
4. Terwujudnya masyarakat harmonis, tertib dan agamis serta lingkungan yang bersih dan sehat;
5. Terwujudnya infrastruktur mantap dan berkelanjutan.

Isu strategis RJPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 dikelompokkan menjadi 6 tema besar yaitu:

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Pembangunan ekonomi;
3. Tata kelola pemerintahan;
4. Pembangunan lingkungan dan mitigasi bencana;
5. Infrastruktur;
6. Budaya dan keagamaan.

d. RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031

Arahan kebijakan pengembangan wilayah dan sarana prasarana Kabupaten Serang yang termuat dalam RPJPN 2025-2045, meliputi: (1) pengembangan industri hijau ramah lingkungan yang diarahkan pada lokasi-lokasi pesisir dan pelabuhan seperti Banten Utara; (2) pengembangan kawasan strategis industri pada kawasan industri Serang-Tangerang (kluster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor); (3) pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya terutama di perairan pesisir utara jawa (WPP 712); (4) pemanfaatan ALKI I di wilayah Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestic dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu; dan (5) peningkatan konektivitas Sumatera-Jawa-Bali termasuk sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan barang antara Pulau Jawa dan Sumatera untuk menurunkan biaya logistik.

Berdasarkan sistem pelayanan perkotaan di Provinsi Banten, Kabupaten Serang merupakan PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Ditetapkannya Kabupaten Serang sebagai PKN, maka beberapa fungsi Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pusat kegiatan pemerintahan;
2. Sebagai pusat pendidikan;
3. Sebagai pusat permukiman;
4. Sebagai pusat kegiatan pertanian, kelautan dan perikanan, industri, jasa, dan perdagangan skala nasional atau yang melayani beberapa daerah; dan/atau
5. Sebagai simpul utama transportasi laut dan energi skala nasional atau melayani beberapa daerah.

Berdasarkan RTRW Provinsi Banten, terdapat kawasan lindung dan Kawasan budidaya yang terdapat di wilayah kabuapten Serang. Selain itu, Kabupaten serang juga memiliki kawasan strategis ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Banten antara lain:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan sekitar Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, KSP Kawasan Perkotaan Serang-Cilegon (Seragon), KSP Kawasan Serang Utara Terpadu, KSP Koridor Pantai Barat Banten dan KSP Kawasan Perbatasan Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, berupa KSP Kawasan Banten Lama;
3. Kawasan strategis berdasarkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Teluk Banten, dan KSP Kawasan Rawa Danau.

Pada skala Provinsi, juga terdapat kerja pengembangan sistem transportasi darat secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. Berdasarkan kebijakan RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, merekomendasikan isu tata ruang kota yang urgen yaitu:

1. Terjadi area perkembangan sistem perkotaan;
2. Pengembangan sistem prasarana meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan prasarana lainnya (sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem jaringan persampahan wilayah, sistem jaringan drainase, sistem jaringan evakuasi bencana).

e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

Ada 12 isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan air bersih wilayah Kabupaten Serang masih tergolong dalam klaster sedang dan rendah;
- b. Pengelolaan sampah, Kabupaten Serang belum memiliki TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) serta belum adanya program pengelolaan sampah mandiri di setiap desa yang berada di wilayah Kabupaten Serang;
- c. Peningkatan rerata Angka Harapan Sekolah yang merujuk pada peningkatan kualitas Pendidikan di Kabupaten Serang;
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Kerjasama Instansi Pendidikan dan Industri-Industri di Kabupaten Serang untuk memprioritaskan putra dan putri daerah;
- e. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dengan inovasi pentahelix, klasterisasi pariwisata dan ekspose desa pariwisata;
- f. Peningkatan kualitas lingkungan dalam pengelolaan udara dan air limbah terutama pada daerah-daerah didekat industri;
- g. Peningkatan pengawasan pemerintah daerah terhadap regulasi dan ketaatan terhadap industri di wilayah Kabupaten Serang;
- h. Peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- i. Peningkatan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas guna percepatan pertumbuhan ekonomi;
- j. Peningkatan ekonomi daerah pada sektor pertanian dan perikanan;
- k. Penurunan persentase penduduk miskin disertai peningkatan penjaminan hak-hak penduduk miskin;
- l. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta bebas KKN disertai dengan pelayanan yang ramah.

f. Potensi Daerah Kabupaten Serang

Potensi daerah Kabupaten Serang sangat strategis dan dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berikut ini adalah potensi-potensi utama Kabupaten Serang yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah antara lain:

1. Potensi Industri dan Kawasan Ekonomi

Kabupaten Serang merupakan salah satu pusat industri besar di Banten, baik di wilayah Serang bagian timur maupun Serang bagian barat. Keberadaan kawasan industri di Kabupaten Serang memberikan ruang yang tinggi kepada Kabupaten Serang untuk menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi nasional dan asing (PMA/PMDN). Kawasan industri tersebut seperti modern cikande industrial estate dan kawasan industri wilmar.

2. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dengan luas lahan pertanian yang signifikan, Kabupaten Serang berpotensi menjadi lumbung padi di Banten yang mendukung terlaksananya swasembada pangan. Komoditas unggulan Kabupaten Serang seperti padi, jagung, cabai, dan hortikultura.

3. Kelautan dan Perikanan

Ekonomi biru menjadi salah satu konsep pembangunan ekonomi yang menjadi salah satu unggulan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan ekosistem laut. Saat ini Wilayah pesisir seperti Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Pontang memiliki potensi besar dalam sektor ini, seperti perikanan tangkap dan budidaya (udang, bandeng) serta tambak garam dan produk olahan laut.

4. Pariwisata dan Warisan Budaya

Kabupaten Serang juga memiliki potensi pariwisata dan warisan budaya yang berpotensi besar dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat antara lain pantai di wilayah kecamatan Anyar dan Cinangka, situs kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa, wisata religi dan sejarah Syekh Nawawi al-Bantani di Kecamatan Tanara serta gunung santri di Kecamatan Bojonegara.

5. Letak Geografis Strategis

Kabupaten Serang berada di jalur utama nasional yang berdekatan dengan Jakarta. Tersambung dengan tol Jakarta-Merak serta tol Serang-Panimbang, dan akses ke pelabuhan Merak dan Kawasan Industri Cilegon yang tidak jauh. Hal tersebut mendukung biaya dan akses distribusi logistik antar wilayah, menjadi simpul pertumbuhan ekonomi di Jawa bagian barat, dan mendukung daya tarik tinggi untuk investasi masuk ke wilayah Kabupaten Serang.

6. Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

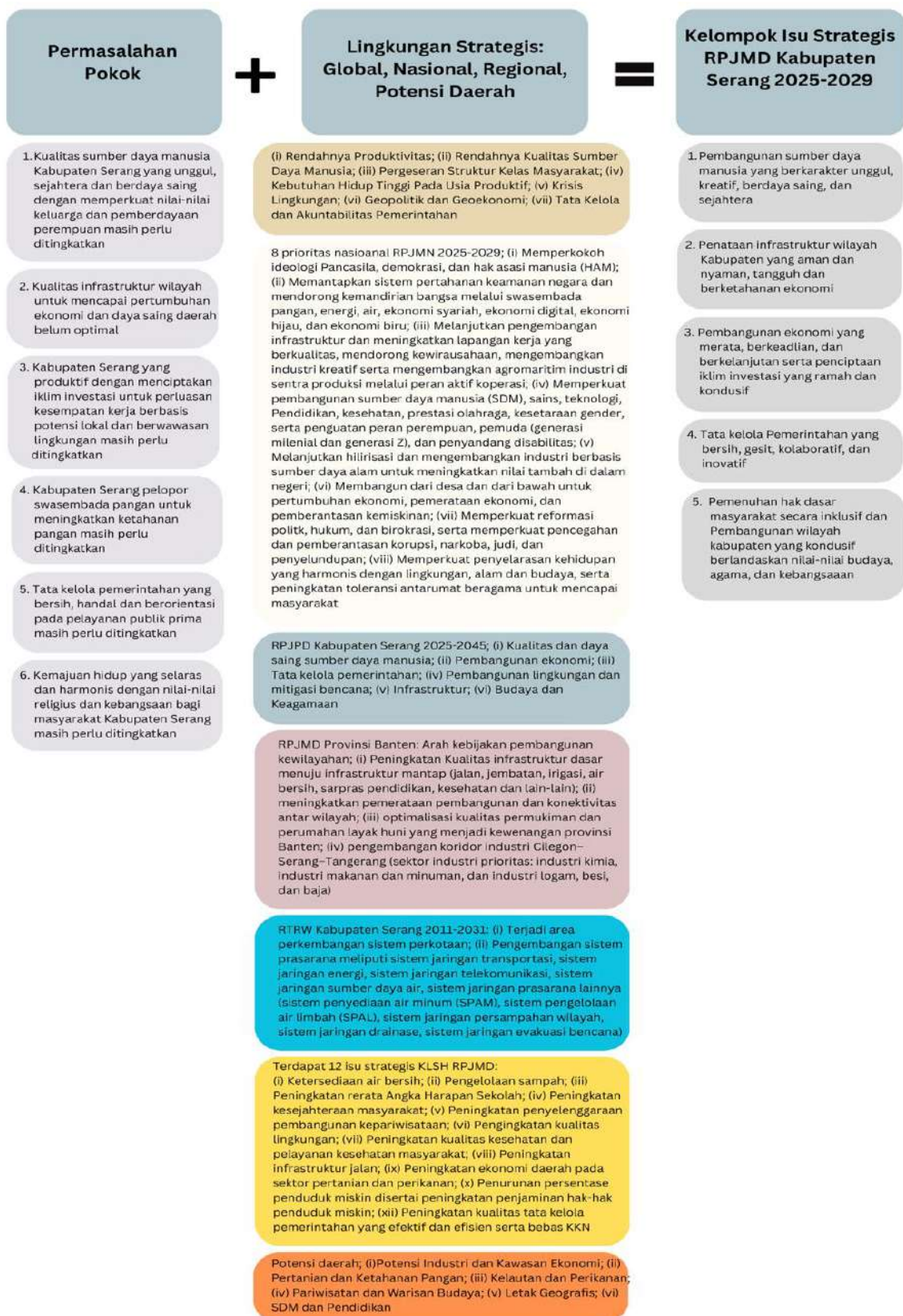
Bonus demografi yang diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2045 menjadi potensi yang besar bagi wilayah Kabupaten Serang dengan melimpahnya sumber daya manusia (SDM) produktif. Potensi tersebut perlu untuk ditangkap dengan semaksimal mungkin oleh seluruh stakeholder terutama pada sektor Pendidikan. Adanya peran sekolah jenjang SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, serta kampus besar seperti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Universitas Syeikh Nawawi Banten, menjadi gerbang utama dalam mendukung SDM Kabupaten Serang yang berdaya saing, unggul, dan inovatif.

2.3.5 Kelompok Isu Strategis RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029

Perumusan isu strategis mendasarkan pada isu RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 Tahap I, isu dalam RPJMN 2020–2024, RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, isu dalam RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, tantangan Global, KLHS RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029, dan potensi daerah, dipadukan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Gambar 2. 9

Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029



2.4 Telaah Usulan Program Pembangunan Tahun 2027

2.4.1 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan usulan aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD dalam pelaksanaan reses. Penelaahan usulan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan dengan mensinkronkan usulan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 merupakan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 99 Hasil Penelaahan Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027**

Usulan	Jumlah Usulan
Bantuan Pembangunan Sarana Keagamaan	9
Bantuan Pengelolaan Perikanan Budidaya	4
Bantuan Penyediaan Sarana Pertanian	22
Bantuan Sosial / Santunan	23
Bantuan untuk Lembaga/Ormas Keagamaan	3
Pelatihan Keterampilan Kesenian Budaya Daerah	1
Pelatihan Keterampilan Perbengkelan, Tataboga dan Menjahit	7
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	243
Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah	49
Pengadaan Penerangan Jalan Umum	79
Pengelolaan Persampahan	19
Jumlah	459

Sumber: SIPD Januari 2026

2.4.2 Penelaahan Hasil Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana tindak prioritas dalam menangani permasalahan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Hasil Musrenbang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 telah dilakukan Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Hasil penelaahan terhadap daftar usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 100 Hasil Penelaahan Usulan Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027

Usulan	Jumlah Usulan
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	99
Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah	26
Pengadaan Penerangan Jalan Umum	81
Pengelolaan Persampahan	54
Jumlah	260

Sumber: SIPD Januari 2026

2.5 Inovasi Daerah Pendukung Layanan Publik

Kabupaten Serang memiliki posisi strategis dalam pengembangan inovasi daerah, ditopang oleh keunggulan geografis, struktur ekonomi yang beragam, serta dukungan kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi. Dalam kerangka pembangunan daerah, inovasi tidak lagi dipandang sebagai aktivitas sektoral, melainkan sebagai instrumen utama dalam mendorong transformasi ekonomi, peningkatan daya saing, serta penyelesaian permasalahan pembangunan secara berkelanjutan.

Merujuk pada dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kabupaten Serang Tahun 2025–2029, inovasi daerah diarahkan pada penguatan ekosistem riset dan pemanfaatan hasil riset untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini menjadi krusial mengingat Kabupaten Serang masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan wilayah, rendahnya produktivitas sektor unggulan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi. Dengan demikian, inovasi daerah harus difokuskan pada upaya menjembatani kesenjangan antara potensi sumber daya dengan tingkat pemanfaatannya.

Secara struktural, potensi inovasi Kabupaten Serang sangat kuat karena didukung oleh sektor ekonomi unggulan yang beragam. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB daerah, sementara sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata menjadi basis ekonomi daerah yang memiliki peluang besar untuk

dikembangkan melalui inovasi berbasis teknologi dan peningkatan nilai tambah. Komoditas unggulan seperti ikan bandeng, rumput laut (*Gracilaria*), serta produk olahan berbasis hasil perikanan menunjukkan adanya potensi hilirisasi yang dapat diperkuat melalui inovasi proses produksi, pengemasan, hingga pemasaran digital.

Dalam konteks kajian Produk Unggulan Daerah (PUD), Kabupaten Serang memiliki karakteristik ekonomi lokal yang mendukung pengembangan inovasi berbasis kearifan lokal dan sumber daya alam. Produk unggulan tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai identitas daerah yang dapat meningkatkan daya saing dan membuka peluang investasi. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai tambah produk unggulan masih relatif rendah akibat keterbatasan teknologi, lemahnya kelembagaan agribisnis, serta belum optimalnya integrasi rantai nilai dan akses pasar. Kondisi ini menegaskan pentingnya inovasi sebagai katalis dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal.

Ke depan, arah pengembangan inovasi daerah Kabupaten Serang dapat difokuskan pada beberapa klaster utama, yaitu:

- Inovasi ekonomi berbasis sumber daya lokal, melalui penguatan hilirisasi produk pertanian dan perikanan;
- Inovasi industri dan teknologi, khususnya dalam pengembangan industri hijau dan efisiensi produksi;
- Inovasi pariwisata berbasis budaya dan lingkungan, yang terintegrasi dengan UMKM lokal;
- Inovasi tata kelola pemerintahan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital;
- Inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat, guna mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan.

Inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang secara terus menerus akan diwujudkan melalui Perangkat Daerah serta sinergi antara dunia usaha, masyarakat dan Perguruan Tinggi dengan sumber daya dan teknologi guna menghasilkan temuan dan inovasi yang aplikatif di Kabupaten Serang.

Berdasarkan data inovasi Kabupaten Serang tahun 2025 (lihat tabel 3.22), Pemerintah Kabupaten Serang memiliki sejumlah inovasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat meliputi pelayanan kesehatan, pengembangan investasi dan pengembangan perikanan serta pengembangan di berbagai bidang.

Tabel 2. 101 Inovasi Kabupaten Serang

No	Nama Inovasi
1.	<i>Sialif (Sistem Aplikasi pelayanan permohonan informasi publik)</i>
2.	<i>PAMANUKAN (Persalinan Aman Bersama Suami Keluarga Dan Kader Kesehatan) UPT PUSKESMAS CIKANDE</i>
3.	SI SUKMA (SISTEM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT)
4.	BEDUK BBM (Beras Dukungan Bagi Bulin Tidak Mampu)
5.	MonPO (Monitoring Pajak Online)
6.	RATU PELITA (Gerakan Persatuan Kader Peduli Kesehatan)
7.	KEREN (KADER REMAJA GENERASI- Z) CEGAH ANEMIA (PKM TUNJUNG TEJA)
8.	e-SIM PKB Online (Sistem Pelayanan PKB secara Online hingga melalui Smartphone Android)
9.	TANTRI (Temukan Analisa Tata Laksana Ibu Hamil dan Ibu Nifas Resiko Tinggi)
10.	GAHARU (KELUARGA HARAPAN BARU) UPT PUSKESMAS KRAMATWATU
11.	Wisata Dilan (Deteksi Intervensi Layanan Anak)
12.	GADIS IMPIAN (Gabungan Medis Tim Interprofesi Rawat Inap dan Persalinan) UPT Puskesmas Ciruas
13.	TEENAGER (POSYANDU REMAJA - UPT PUSKESMAS CIRUAS)
14.	ODHA LINK (ONLINE SERVICE KONSULTASI, DELIVERY ORDER ARV, HIGH ACCES) UPT PUSKESMAS CIRUAS
15.	Kamissiaga (gerakan suami sehat sayang istri anak dan keluarga)UPT Puskesmas kopo
16.	MOLING (Mobil Keliling)
17.	BECA RESE Bersama Cegah Anemia Remaja Putri Sehat Puskesmas Nyompok
18.	KABULIN SELARAS (Kawal Ibu Hamil dan Bersalin Sehat, Selamat Sampai Nifas)
19.	GARDU JEBOL (Gerakan Anc Terpadu Jemput Bola)
20.	DESA GIAT (DESA SADAR GIZI MASYARAKAT)
21.	KECEBUR (Kepedulian Kita Semua Pada ceria/Kasus Gizi Buruk Zibur)
22.	CPNS WPT (Calon Pengantin Selalu Wajib PP Test)
23.	ALPUKAT KITE (Aplikasi Perlindungan Masyarakat Kompeten, Inovatif, Terpadu, Efektif)
24.	AMANAT
25.	SIPROMIN (SISTEM INFORMASI PROMOSI DAN INVESTASI)
26.	Integrasi Aplikasi Secara Online pada Crisis Center BPBD Kabupaten Serang
27.	PROGDIS
28.	LAKMIL
29.	KADER PINTAR
30.	BIDAN KECEH
31.	Pengembangan Tambak Garam Rakyat (MANG TAGAR)

No	Nama Inovasi
32.	Pengembangan Budi Daya Rumput Laut Kotoni (MANG BUDI PUTRA TONI)
33.	Budidaya Air Payau Berwawasan Lingkungan (BUYA WALIKU)
34.	Akta Kelahiran Online dan Jemput Bola Pelayanan Adminduk (AKONJEBOL)
35.	RATU KENCANA (Rakyat Bersatu Untuk Mendukung Keluarga Berencana)
36.	SIMONEVIC (Sistem Monitoring Inovasi Kabupaten Serang)
37.	BAGI PERMATA (Perbaikan Gizi dengan Pemberian Makanan Tambahan)
38.	BAGI PEKAYA (Perbaikan Gizi dengan Pekarangan Berdaya)
39.	PAMANKU MAPAN (Pangan Aman Kunci Masa Depan)
40.	GEBUK (Gerek Ibu Hamil Untuk Kesehatan)
41.	ALARM WaMIL - CHAT ME (Alarm Wa Ibu Hamil dan Curhat Menyusui)
42.	GEMAS KADU (Gerakan Masyarakat, Kades, Kader Sadar Posyandu)
43.	SAKA SAPE SAJES (Sadar KK, Sadar KTP dan Sadar BPJS)
44.	KADARSU (Kader asuh ibu hamil, bersalin, dan nifas)
45.	CA MI MI TEA (Cegah Anemia Dengan Minum Tablet Penambah Darah 1 Minggu 1 Kali)
46.	DATALIN (Data Ibu Hamil)
47.	PENCETDINI (Pencegahan Calon Pengantin Hamil Usia Dini)
48.	GASIEK (Gerakan Ai Eksklusif)
49.	CANTIK BUDI (Cegah Angka Kematian Ibu dan Bayi)
50.	TEBU HALAL (Temukan Ibu Hamil Lebih Awal)
51.	ABU LARFA (Ajak Ibu Lahiran di Faskes)
52.	SAVE BUSUI
53.	AKSI GIZI TIRTA (Aksi Keluarga Peduli Gizi Puskesmas Tirtayasa)
54.	PECI PROPELOR (Penyuluhan Ceria Kespro Pada Remaja Putri dan Pemberian Tablet Tambah Darah dan Cek HB Rutin Terkontrol)
55.	JAKIA (Jaringan Kesehatan Ibu dan Anak)
56.	MOM CELL'S
57.	Penyuluhan Untuk Penganten (PUNTEN)
58.	KAROJI (Kerjasama Karo Paraji)
59.	POWER (Posyandu with Enrichment)
60.	Sistem Pelayanan Uji Laboratorium (SIPUTRI)
61.	TINDIK MAS (PENGANTIN TERDIDIK MENUJU AKAD SEHAT) UPT PUSKESMAS CINANGKA
62.	DASI (Kedai Sanitasi) UPT Puskesmas Baros
63.	BEDUK BBM (Beras Dukungan Bagi Bulin Tidak Mampu)
64.	KABULIN SELARAS (Kawal Ibu Hamil dan Bersalin Sehat, Selamat Sampai Nifas)
65.	SERGAP KIBBLA (Semua Gerkan dan Tanggap Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir)
66.	GARDU JEBOL (Gerakan Anc Terpadu Jemput Bola)
67.	SEDEEP (Sehat dan Terkontrol Emak- Emak Pregnancy)
68.	GAZIBU (Gerakan Peduli Anak Gizi Buruk) UPT Puskesmas Baros

No	Nama Inovasi
69.	SIMFONI REMAS (Sistem Informasi Manajemen Kerja Puskesmas) UPT Puskesmas Ciruas
70.	SiLaKie (Siaran Langsung Komunikasi Informasi dan Edukasi)
71.	Kala senja (kunjungan berkala pasien dengan gangguan jiwa) UPT Puskesmas kopo
72.	SIRAMZI (Aksi Ramah Peduli Pemulihan Gizi) PKM ANYAR
73.	Besti Kopo (best informasi puskesmas Kopo)
74.	AJARIN KE PUSKESMAS (ANTAR JEMPUT IBU BERSALIN KE PUSKESMAS) PUSKESMAS NYOMPOK
75.	BROSIST (OBROLAN SEPUTAR INFORMASI KESEHATAN) UPT Puskesmas Ciruas
76.	SIDOKAR (Sistem Informasi Dokumen Akreditasi) UPT Puskesmas Ciruas
77.	DUREN MAILING / DATANG DUDUK ENTRI MAILING
78.	GERAKAN SILATURAHMI IBU NIFAS TERPADU (GESIT) UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
79.	GETAR CINTA (Gerakan Persatuan Kader Cinta Keluarga)
80.	JEMILAH (JEMPUT IBU BERSALIN BERMASALAH)
81.	CATAT GENTA (CALON PENGANTIN SEHAT GENERASI BERTAQWA)
82.	DUKCAPIL GERMAS (Gerakan Jemput Bola Administrasi Kependudukan Gratis)
83.	PELINDUNG (PENYULUHAN DALAM GEDUNG)
84.	TUBAGUS SAMIL (Satu Barisan Gerak Upaya Selamatkan Ibu Hamil) UPT PUSKESMAS BAROS KABUPATEN SERANG
85.	GENIUS (Generasi Edukatif dan Inovatif untuk Sindangmandi) UPT PUSKESMAS BAROS KABUPATEN SERANG
86.	JETAR HATI (JEMPUT ANTAR IBU HAMIL RESIKO TINGGI) UPT PUSKESMAS BAROS KABUPATEN SERANG
87.	LAPOR BOS (Layanan Aspirasi Pengaduan Masyarakat Puskesmas Baros) UPT PUSKESMAS BAROS KABUPATEN SERANG
88.	GEMA SEJIWA (GERAKAN MASYARAKAT ANYAR MENUJU PUSKESMAS ANYAR MENUJU SEHAT JIWA)
89.	GEMILLIN (gerakan masyarakat peduli ibu hamil dan bersalin)
90.	Aplikasi Serang Tatu

Sumber: Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kabupaten Serang, 2025

Program inovasi daerah yang dijalankan Kabupaten Serang membawa dampak signifikan terhadap pembangunan. Pertama, pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan murah sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Kedua, tata kelola pemerintahan semakin efisien dan efektif berkat pemanfaatan teknologi serta penyederhanaan birokrasi. Selain itu, inovasi memperkuat daya saing daerah, menarik investasi, dan mempercepat pencapaian target pembangunan seperti pengurangan

kemiskinan, peningkatan IPM, serta pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan inovasi juga berpotensi direplikasi oleh daerah lain, menjadikan Kabupaten Serang sebagai contoh praktik baik dalam pembangunan daerah.

Dengan adanya dampak dari inovasi sebagaimana diuraikan di atas, maka pemerintah Kabupaten Serang akan berupaya terus untuk melakukan pengembangan-pengembangan inovasi baik dari yang sudah ada maupun inovasi baru lainnya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah memuat arah kebijakan ekonomi nasional, provinsi dan Kabupaten Serang. Dalam dokumen RKPD Tahun 2027 ini mengacu kepada data dan kondisi saat ini dan dijelaskan dalam arah kebijakan ekonomi sebagai berikut.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Dalam tahap awal untuk mencapai kategori negara maju, diperlukan pertumbuhan ekonomi tinggi yang disertai stabilitas ekonomi. Untuk mencapai target GNI per kapita 7.400-7.670 US\$ pada 2029, diperlukan rata-rata pertumbuhan ekonomi jangka menengah 2025-2029 pada kisaran 5,6-6,1 persen. Peran peningkatan produktivitas sangat penting untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi (productivity led growth). Pertumbuhan ekonomi jangka menengah tersebut didorong oleh terjaganya konsumsi, investasi yang berkualitas, kinerja ekspor yang kuat, serta peningkatan peran sektor industri pengolahan terhadap PDB. Gambaran target pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponennya serta kebutuhan pembiayaan atau resource envelope dijabarkan melalui Kerangka Ekonomi Makro 2025-2029.

Selain itu berbagai lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2025 akan tumbuh pada kisaran 2,7% - 3,2%.

Tabel 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

	2023	2024		2025	
		World Bank	IMF	World Bank	IMF
World	2,6	2,4	3,2	2,7	3,2
Advanced economics	1,5	1,2	1,8	1,6	1,8
United States	2,5	1,6	2,8	1,7	2,2
Euro area	0,4	0,7	0,3	1,6	1,2
Japan	1,8	0,9	0,8	0,8	1,1
China	5,2	4,5	4,8	4,3	4,5
Indonesia	5	4,9	5	4,9	5,1
Vietnam	5,0	3,2	6,1	3,1	6,1

A. Sumber : Publikasi IMF World Economics Outlook October 2024

B. World Bank Global Economic Prospect Januari 2024

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia pada tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 4,9 – 5,1% di tengah perkembangan geopolitik di tingkat global yang kurang kondusif. Asumsi lainnya yang melandasi optimisme perkembangan ekonomi Indonesia adalah kondisi perekonomian negara-negara yang menjadi pasar komoditas ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, China dan Negara Uni Eropa. Kerangka Ekonomi Makro 2025- 2029 jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi sisi produksi yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh transformasi struktural yang diindikasikan dengan peningkatan industri pengolahan
2. Sektor pertanian tetap tumbuh meningkat didorong peningkatan produktivitas
3. Sektor listrik dan konstruksi tumbuh mendukung pengembangan sektor industri dan pembangunan IKN
4. Sektor jasa- jasa produktif dan transportasi akan berkembang seiring pertumbuhan industri pengolahan
5. Sektor infokom berkembang seiring dengan transformasi digital.

Rata- rata pertumbuhan ekonomi 2025- 2029 diperkirakan di angka 5,6 – 6,1 menurut skenario Transformatif dan Super Transformatif. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran adalah sebagai berikut :

1. Konsumsi RT dan LNPRT tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat
2. Konsumsi pemerintah tumbuh terjaga seiring dukungan pemerintah dalam pembangunan
3. Pertumbuhan investasi meningkat mendukung pengembangan industri pengolahan
4. Ekspor tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan sektor industri
5. Impor tumbuh tinggi seiring kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Tema dan arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dituangkan dalam 8 misi Asta Cita pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

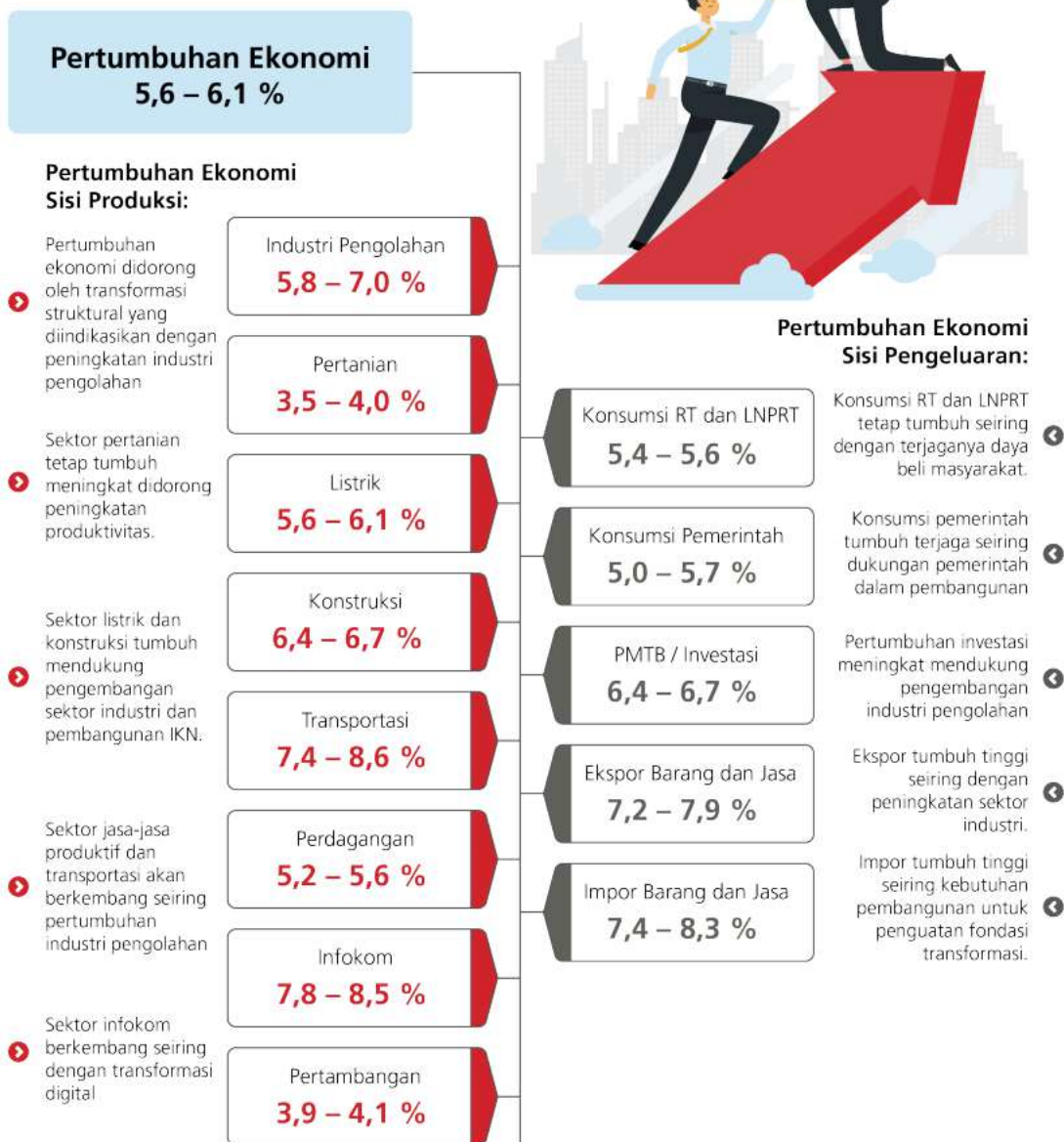
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkata toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 3. 1 Kerangka Ekonomi Makro 2025- 2029

Rata-rata 2025-2029

(Skenario Transformatif dan Super Transformatif)



Sumber : RPJMN Tahun 2025- 2029

Tabel 3. 2 Sasaran Makro Pembangunan RKP 2027

No.	Sasaran dan Indikator	Sasaran 2027
Sasaran Pembangunan Nasional		
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8–6,5
2.	GNI Per Capita (US\$)	5.800–5.840
3.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,57
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,84
5.	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0–6,5
	b. Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0
6.	Rasio Gini	0,362–0,367
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30–4,87
8.	Indeks Modal Manusia	0,575
Indikator Pembangunan		
9.	Indeks Kesejahteraan Petani	0,8038
10.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	40,81
Indikator Ekonomi Makro		
11.	Inflasi (% YoY): Akhir Periode	2,5 ± 1,0
12.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	16.800–17.500

Sumber : RKP Tahun 2027

Kerangka Ekonomi Makro RKP Tahun 2027 disusun sebagai dasar kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mengakselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam tahun ketiga pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029, kebijakan makro diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global serta mempercepat transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri. Dengan demikian, bab ini menjabarkan sasaran makro pembangunan, bauran kebijakan, kebutuhan investasi, dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai instrumen percepatan pertumbuhan. sumber pertumbuhan utama ekonomi tahun 2026 akan didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari sisi lapangan usaha akan didorong utamanya oleh sektor industri pengolahan yang didukung oleh hilirisasi sektor-sektor prioritas serta program di sektor pertanian.

Kebijakan ekonomi makro tahun 2027 diarahkan menjadi pemampuan dalam rangka penguatan fondasi transformasi ekonomi yang mendukung stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan sektor keuangan. Kebijakan Fiskal diarahkan pada produktivitas ekonomi melalui peningkatan pendapatan negara; penguatan kualitas belanja negara; serta perluasan pembiayaan publik inovatif, prudent, dan sustainable. Optimalisasi Belanja Negara diarahkan pada implementasi core tax system menyeluruh; penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan; pembenahan kelembagaan perpajakan; intensifikasi kebijakan dan ekstensifikasi objek cukai; penajaman tax incentive tepat sasaran berbasis sektor dan wilayah prioritas; intensifikasi PNBPN melalui optimalisasi

pemanfaatan aset dan layanan berbasis IT; serta optimalisasi PNBPN SDA Migas, Nonmigas, dan Non SDA.

Peningkatan Kualitas Belanja Negara difokuskan untuk penyiapan landasan transformasi melalui peningkatan kualitas SDM, R&D, kesehatan, dan hidup layak; percepatan dan pemerataan infrastruktur; pembenahan regulasi dan institusi; percepatan reformasi subsidi tepat sasaran; serta mengarahkan TKD untuk implementasi UU HKPD serta penguatan local taxing power dengan teknologi informasi dan digitalisasi. Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan diarahkan pada penerbitan SBN dan pinjaman dengan komposisi optimal (mata uang, suku bunga, dan maturitas); mendorong SBN untuk pembiayaan kegiatan/proyek, mencakup SDGs, serta energi baru terbarukan; pengembangan pasar keuangan melalui perluasan basis investor dan penerbitan obligasi/sukuk; perluasan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan melalui KPBU dan blended finance yang berkesinambungan dan luas; serta optimalisasi pembiayaan investasi utamanya BUMN sebagai agent of development.

Pengendalian Inflasi diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar Rupiah. Sasaran inflasi tahun 2025-2029 dijaga dalam rentang $2,5 \pm 1,0\%$, melalui implementasi kebijakan Suku Bunga BI yang responsif terhadap dinamika perekonomian global dan domestik; stabilisasi nilai tukar Rupiah; pengelolaan subsidi harga energi tepat sasaran; penyelesaian permasalahan struktural; perbaikan dan integrasi data neraca pangan; penguatan komunikasi kebijakan untuk menjangkar ekspektasi; serta penguatan sinergi/koordinasi tim pengendalian inflasi nasional. Nilai tukar Rupiah dijaga sesuai dengan fundamentalnya melalui intervensi spot maupun forward sesuai kebutuhan serta pengelolaan kecukupan cadangan devisa.

Selanjutnya, kebijakan sektor keuangan diarahkan mendukung Stabilitas Sistem Keuangan melalui pendalaman dan intermediasi keuangan, pengembangan keuangan syariah, penguatan peran sektor keuangan non bank, dan peningkatan inklusi keuangan. Pendalaman dan intermediasi keuangan dilakukan melalui diversifikasi produk, peningkatan efisiensi untuk menekan *cost of fund*, serta penguatan daya saing dan kelembagaan. Sementara itu, pengembangan keuangan syariah dilakukan dengan meningkatkan kontribusi keuangan syariah terhadap keuangan nasional melalui pengembangan keunikan produk, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta peningkatan penyaluran pembiayaan syariah ke sektor riil. Selain itu, penguatan peran industri keuangan non bank, utamanya industri dana pensiun, asuransi, pasar modal, dan industri keuangan non bank lainnya, dilakukan melalui perluasan kepesertaan dan basis investor, perbaikan tata kelola, serta peningkatan keberagaman instrumen investasi. Selanjutnya, peningkatan inklusi keuangan dilakukan melalui percepatan akses keuangan termasuk bagi kelompok masyarakat

marginal dan peningkatan literasi keuangan, yang didukung oleh penguatan kolaborasi dengan berbagai stakeholders baik pusat maupun daerah. Kebijakan sektor keuangan juga diperkuat dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen dan investor sektor keuangan.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten

Kondisi perekonomian tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2022 yang sudah mencapai 5,03% serta tahun 2023 sebesar 4,81%. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional maupun nasional serta penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,6 dalam RKP 2025, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,28-5,33%. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi kondusifitas wilayah pasca pelaksanaan pesta demokrasi Pilpres, Pileg dan Pilkada serta peningkatan minat investasi di kalangan investor setelah adanya kepastian kepemimpinan. Dari aspek sektoral, pertumbuhan positif sektor industri pengolahan dan konstruksi yang memberikan dominasi sumbangsih pada perekonomian Banten melahirkan optimisme pencapaian target tersebut. Penyelesaian Tol Serang Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,17 Km diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan sektor konstruksi dan Real estate. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai nilai yang ditargetkan. Proyeksi kinerja perekonomian Banten didasarkan pada beberapa asumsi :

Faktor Pendorong:

1. Peningkatan daya saing untuk produk baja olahan domestik seiring pencabutan kebijakan tax rebate Tiongkok untuk komoditas baja;
2. Mulai beroperasinya sejumlah pabrik baru dan peningkatan kapasitas produksi besar pada industri baja dan petrokimia di Provinsi Banten;
3. Berlanjutnya pembangunan beberapa PSN di wilayah Banten, seperti proyek jalan tol dan bendungan;
4. Akselerasi penjualan ekspor untuk produk baja berupa Hot Rolled Coil dengan level margin yang lebih baik ke negara non tradisional;
5. Konsumsi RT berpotensi meningkat sejalan dengan menguatnya daya beli masyarakat dan mobilisasi, serta didukung oleh berlanjutnya stimulus serta relaksasi perekonomian yang melanjutkan tren peningkatan;

6. Pemulihan kinerja korporasi;
7. Memastikan ketersediaan lapangan kerja dan dialog untuk mempertahankan industri padat karya di Banten;
8. Sektor Pertanian potensial untuk menyerap tenaga kerja, didukung oleh ketersediaan lahan pertanian. Langkah yang ditempuh pemda melalui pembangunan Jalan Usaha Tani dan Irigasi Pertanian;
9. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi – Pro Job, yaitu penguatan efektivitas MOU Pendidikan Vokasi;
10. Banten penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, didukung oleh banyaknya Industri skala besar dan menengah;
11. Insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung investasi lainnya;
12. Adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten;
13. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;
14. Mengurangi jumlah pengangguran khususnya yang berada di wilayah Banten selatan. Upaya yang ditempuh antara lain penguatan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, revitalisasi BLKI. Sementara untuk mengatasi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas;
15. Ekspektasi inflasi yang semakin terkendali pasca penetapan berbagai kebijakan pendukung;
16. Sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah yang terjaga dengan baik berbagai kebijakan dan program nyata Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga harga di level stabil
17. Faktor Penahan:
18. Kondisi geopolitik di tingkat global (Perang Rusia-Ukraina dan Perang Timur Tengah) dapat berimplikasi kepada ekspor komoditas
19. Penerapan berbagai kebijakan dalam negeri di tengah ketidakpastian global dapat mendorong peningkatan harga bahan baku komoditas dunia dan berpotensi menahan konsumsi masyarakat;
20. Pergeseran bentuk pengeluaran masyarakat dari kebutuhan leisure ke non- leisure serta kecenderungan masyarakat berpendapatan tinggi yang masih menahan konsumsi;
21. Potensi risiko perpindahan industri ke provinsi lain dikarenakan Upah Minimum Regional yang lebih rendah;
22. Belum optimalnya penyelarasan (matching) antara kebutuhan Industri dengan

- kurikulum pendidikan atau pelatihan SDM;
23. Perbedaan antara kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Industri dengan kompetensi para pencari kerja;
 24. Rendahnya daya saing pekerja Banten (mayoritas pekerja yang berpendidikan SD ke bawah);
 25. Besarnya jumlah penduduk migran yang datang ke Provinsi Banten untuk mencari pekerjaan dengan tingkat keterampilan dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada relatif tingginya Upah Minimum Regional (UMR) dan adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
 26. Dari 729 SMK (81 Negeri dan 648 Swasta), hanya 281 sekolah yang berorientasi industry;
 27. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
 28. Belum optimalnya orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/Kabupaten untuk dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing kota/Kabupaten;
 29. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
 30. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah berpotensi kepada penurunan anggaran pembangunan di tingkat Pemerintah Provinsi.

**Tabel 3. 3 Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro
Tahun 2026 dan Tahun 2027**

No	Indikator	Satuan	Rancangan RKP 2027	RKPD Prov Banten		RKPD Kab Serang	
				2026	2027	2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8–6,5	6,03	5,6-6,2	5,6-6,2	5,75-6,05
2	PDRB Per Kapita (juta)	Rp.	5.800–5.840 US\$	76,2	80-87,38	65-70,18	65,28-68,00
3	Kontribusi PDRB Provinsi				3,9		11,87-11,95
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,0 – 6,5	4,45-5,15	3,50 - 4,50	3,57-4,00	3,40-4,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,30 – 4,87	6,75-6,89	6,45 - 6,60	8,93-9,18	7,90-8,50
6	Indeks Rasio Gini	Indeks	0,362 – 0,367	0,337-0,365	0,312–0,333	0,257-0,262	0,254
7	Indeks Modal / Pembangunan	Indeks	0,575	0,57	0,575	74,78	75,00-75,60

No	Indikator	Satuan	Rancangan RKP 2027	RKPD Prov Banten		RKPD Kab Serang	
				2026	2027	2026	2027
	Manusia						
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	39,57	46,05	47,58	17,03	17,38
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,84	67,17	67,42	68,02	68,09

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Banten 2027; dan mengacu pada kesepakatan hasil Rakortekbang Tahun 2026, RPJMD Kabupaten Serang Tahunan 2025-2029

Untuk mewujudkan berbagai target indikator diatas maka Kebijakan Perekonomian Daerah perlu diarahkan pada :

- Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang merata antara Banten Selatan dan Banten Utara;
- Peningkatan produktivitas ekonomi melalui modernisasi pertanian dan ekonomi biru;
- Pengembangan industri kimia dasar dan hilirisasi output hasil industry tersebut;
- Peningkatan investasi yang berkualitas melalui optimalisasi kepastian usaha;
- Percepatan peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan belanja daerah untuk belanja produktif;
- Peningkatan creative financing dan peran sektor swasta dalam Pembangunan daerah;
- Peningkatan pendapatan perkapita Masyarakat;
- Peningkatan kontribusi PDRB sektor maritim;
- Peningkatan kontribusi PDRB sektor manufaktur; dan
- Penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Serang

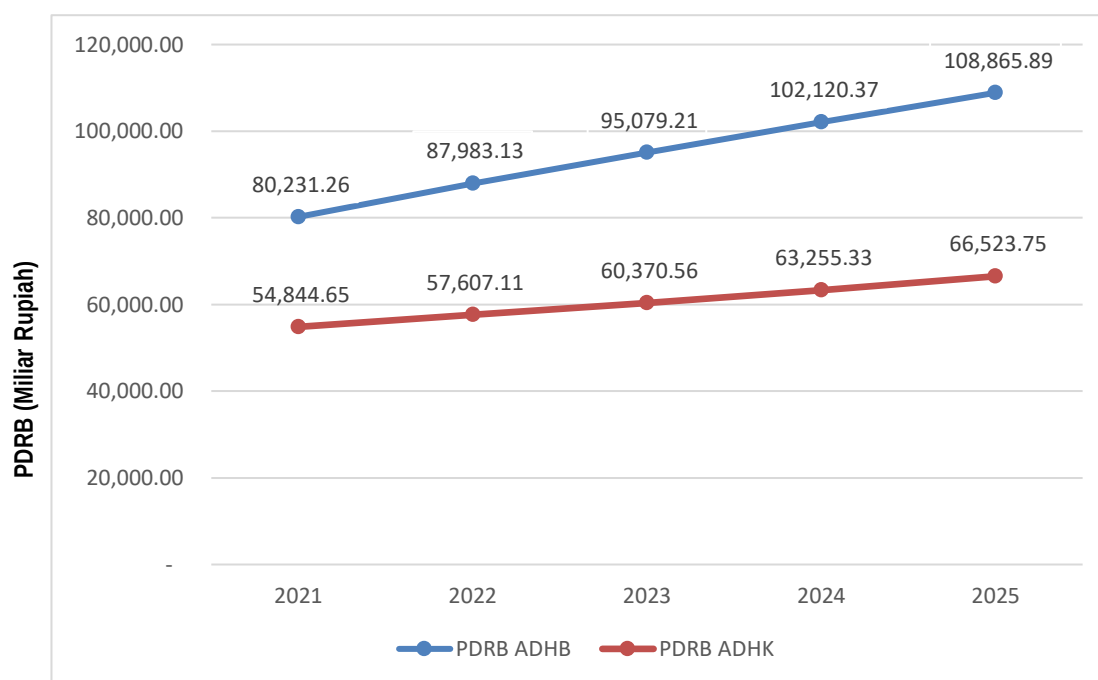
Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2027 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dengan menitikberatkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif searah dengan tema Pembangunan Kabupaten Serang tahun 2027 dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 dalam menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dari desa, yaitu **"Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung Pelayanan Publik yang berkualitas dan Infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup."** Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. pada tahun 2027 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang diproyeksikan juga mengalami pertumbuhan pada target di angka 5,75-6,05%. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Serang tahun 2027 guna mendukung pencapaian target sebesar 5,75-6,05%, maka untuk

meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan pada Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang didukung oleh tersedianya pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan dukungan terhadap kesejahteraan rakyat.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah. yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal). untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil). untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha. menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan. untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang tahun 2021- 2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021. PDRB ADHK Kabupaten Serang mencapai 54.844,65 miliar rupiah. Pada tahun 2024 mencapai 63.255,33. Begitu juga dengan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang tahun 2021- 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, PDRB ADHB Kabupaten Serang mencapai 80.231,26 juta rupiah. Pada periode berikutnya terus mengalami peningkatan mencapai 102.120,37 juta rupiah pada Tahun 2024. Pada periode tahun 2025 mencapai 66.523.753,60 juta rupiah.

Grafik 3. 1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang 2021-2025

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2026**

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang tahun 2021-2025 juga terus mengalami peningkatan. Realisasi dan Proyeksi PDRB ADHB Kabupaten Serang tahun 2021-2025 menurut lapangan usaha/sektor dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 4 Realisasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian. Kehutanan dan Perikanan	0,89005787	8.550.95	9.003.350	9.567.370	10.690.340
B	Pertambangan dan Penggalian	86.84	89.42.00	94.040	97.410	105.255
C	Industri Pengolahan	36.713.31	40.255.80	43.903.170	47.682.560	50.557.739
D	Pengadaan Listrik dan Gas	262.19.00	287.82	286.970	295.730	299.342
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	25.36.00	25.64	27.240	30.830	33.473
F	Konstruksi	9.635.92	0,975509259	11.379.620	12.002.580	12.820.626

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025**
1	2	3	4	5	6	7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.239.64	7.987.77	8.671.020	9.132.610	9.592.203
H	Transportasi dan Pergudangan	0,270092593	0,592662037	4.145.440	4.402.180	4.778.715
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,603252315	0,725775463	2.178.940	2.420.470	2.582.160
J	Informasi dan Komunikasi	684.63	727.99	790.190	831.570	885.684
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,298287037	2.679.65	2.710.820	2.706.460	2.647.596
L	Real Estate	0,805578704	4.317.77	4.680.400	4.947.460	5.309.371
M.N	Jasa Perusahaan	185.79	196.69	219.430	241.120	260.350
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	0,652789352	1.951.74	2.069.410	2.359.700	2.539.639
P	Jasa Pendidikan	2.970.62	0,767094907	3.246.890	3.582.940	3.862.669
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	512.11.00	543.97	607.040	677.020	687.270
R.S.T.U	Jasa lainnya	867.15.00	920.82	1.065.230	1.142.360	1.213.463
	PDRB Kabupaten Serang ADHB	80.231.264.41	87.983.132.91	95.079.210	102.120.370	108.865.895

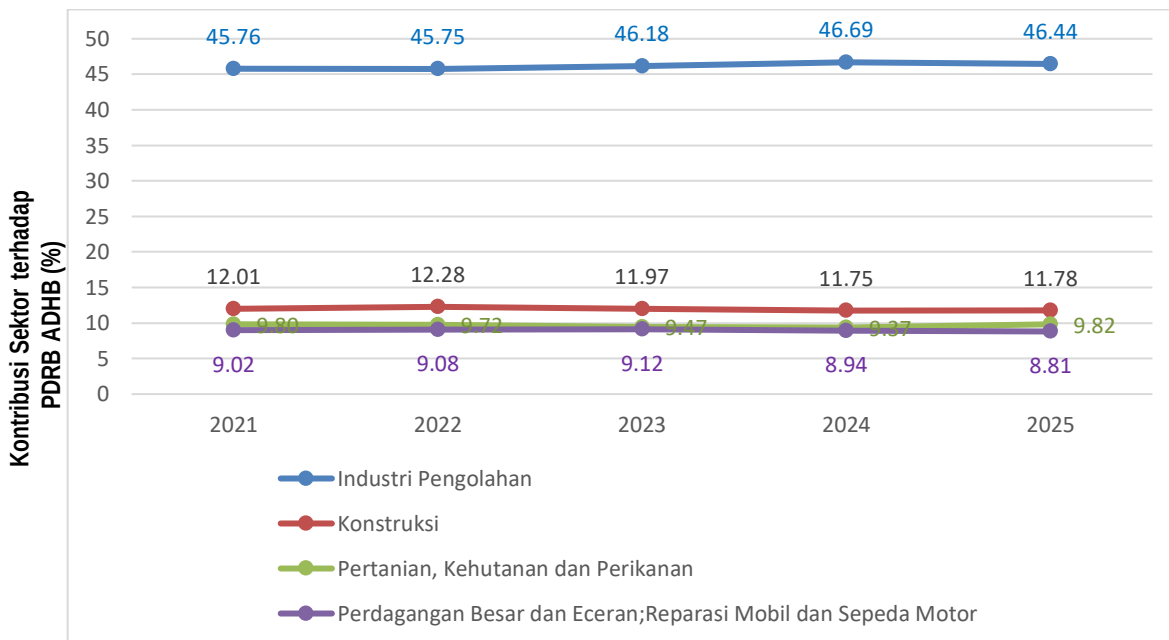
Sumber : BPS Kabupaten Serang 2026

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Serang tahun 2021-2025 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Industri Pengolahan; (b) Konstruksi; (c) Pertanian. Kehutanan dan Perikanan; dan (d) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang kabupaten.

Pada tahun 2025, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 50.557.739 juta rupiah menduduki peringkat pertama. Di posisi ke dua sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 12.820.626 juta rupiah atau sebesar 11,87 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Di posisi ke tiga. sektor Pertanian. Kehutanan dan Perikanan sebesar 10.690.340 juta rupiah atau sebesar 9,82 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Sedangkan di

posisi ke empat. sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 9.592.203 juta rupiah atau sebesar 8,81 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang.

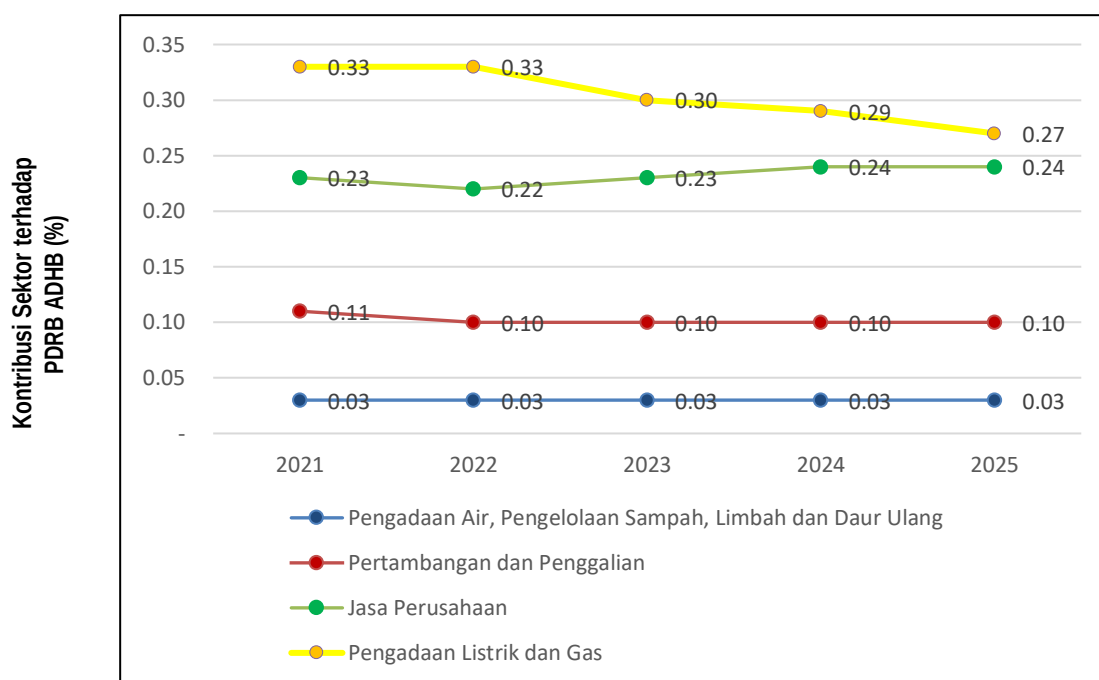
Grafik 3. 2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Serang 2026

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2021-2025. yaitu: (a) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (b) Pertambangan dan Penggalan; (c) Jasa Perusahaan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas, dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen.

Pada tahun 2025, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 33,47 miliar rupiah atau sebesar 0,03 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. dan merupakan kontribusi paling rendah. Di posisi ke dua. sektor Pertambangan dan Penggalan berkontribusi sebesar 105,255 miliar rupiah atau sebesar 0,10 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Di posisi ke tiga. sektor Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 260,35 miliar rupiah atau sebesar 0,24 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Sedangkan posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 299,34 miliar rupiah atau sebesar 0,27 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang.

Grafik 3. 3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kabupaten Serang Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Kabupaten Serang 2026

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Tabel 3. 5 Realisasi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021- 2025

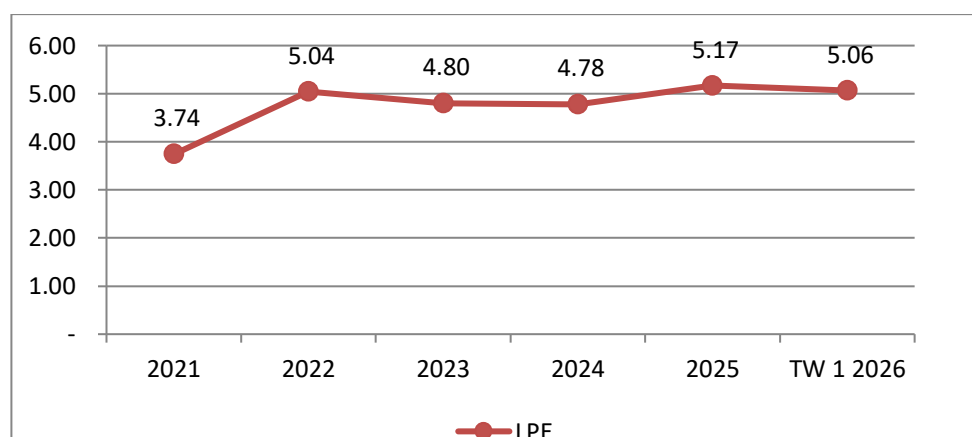
No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.837,85	5.031,47	5.028,39	5.097,92	5.574,92
B	Pertambangan dan Penggalian	53,32	53,93	54,87	56,9	60,42
C	Industri Pengolahan	26.376,57	27.707,99	29.479,51	31.145,08	32.594,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	250,76	273,38	265,84	271,25	270,80
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	21,72	21,84	22,95	24,26	25,50
F	Konstruksi	5.734,12	6.064,97	6.174,77	6.475,64	6.848,31

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025**
1	2	3	4	5	6	7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.077,93	5.363,14	5.585,87	5.743,69	5.983,65
H	Transportasi dan Pergudangan	2.143,98	2.318,77	2.433,09	2.551,10	2.725,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.319,19	1.420,36	1.537,26	1.661,910	1.760,851
J	Informasi dan Komunikasi	748,71	794,38	856,5	895,24	949,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.438,05	1.528,19	1.519,04	1.504,74	1.446,06
L	Real Estate	3.050,88	3.220,82	3.390,91	3.523,10	3.715,77
M.N	Jasa Perusahaan	116,84	119,54	128,19	137,03	146,47
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	1.061,02	1.065,90	1.086,64	1.208,49	1.289,88
P	Jasa Pendidikan	1.732,63	1.707,98	1.810,42	1.895,07	2.033,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	347,45	356,07	384,29	420,38	423,97
R.S.T.U	Jasa lainnya	533,63	558,39	612,02	643,52	673,91
	PDRB Kabupaten Serang ADHK	54.844,65	57.607,11	60.370,56	63.255,33	66.523,75

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2026

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang pada tahun 2021-2022 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2023, LPE Kabupaten Serang menurun mencapai 4,80 dan menurun kembali tahun 2024 menjadi 4,78 persen dari yang sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2022 sampai dengan 5,04 persen. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sampai dengan 5,17 persen.

Grafik 3. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang Tahun 2020- TW 1 2026



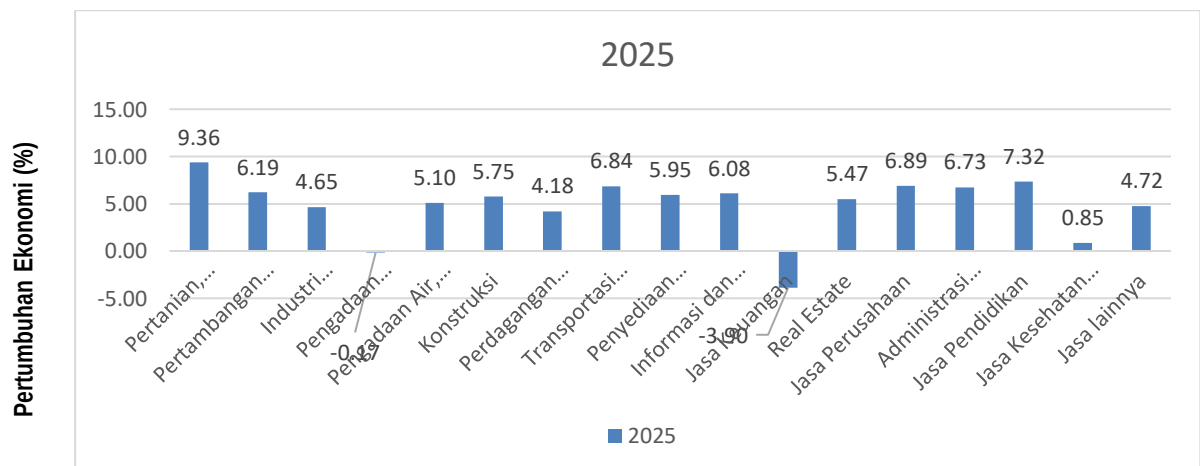
Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi menjadi bukti tepatnya kebijakan dan Program Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari membaiknya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang tahun 2024 mencapai 4,78 persen, turun sebesar 0,02 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4,8 persen. Tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2025 sebesar 5,17 persen.

Hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif di tahun 2025. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan negatif -3,9 persen. Program strategis yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan IKM serta berbagai fasilitas infrastruktur yang dikembangkan agar pelaku usaha memperoleh kenyamanan dalam mengembangkan usahanya. Lapangan Usaha lainnya yang tumbuh positif diantaranya lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,8 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,2 persen; Real Estate sebesar 5,5 persen; industri Pengolahan sebesar 4,7 persen; Jasa Lainnya sebesar 4,7 persen; Pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar 9,4 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,39 persen; Jasa Perusahaan sebesar 0,9 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,2 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,1 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,7 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2025, sumber positif tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian. Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,4 persen; diikuti Jasa Perusahaan sebesar 6,9 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,8 persen; serta Administrasi Pemerintahan. Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,7 persen.

Pertumbuhan ekonomi per sektor Kabupaten Serang tahun 2025 ditunjukkan dalam gambar berikut :

Grafik 3. 5 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)



Sumber : Kabupaten Serang Dalam Angka 2026

Peningkatan status UMKM secara umum terkendala modal. Salah satunya akses permodalan yang bisa dilakukan melalui sektor jasa keuangan banyak terkendala dengan syarat administratif. Kebijakan pemerintah dalam mendorong pelaku usaha agar naik kelas antara lain dengan memfasilitasi sertifikasi produk UMKM, serta mendorong pemenuhan persyaratan perijinan usaha. Kelengkapan administratif diharapkan akan memudahkan para pelaku usaha mengakses permodalan yang selama ini menjadi kendala. Dan mendorong peningkatan kapasitas pemasaran yang lebih luas melalui pelatihan pemasaran.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ ilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau persatu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Serang atas dasar harga berlaku konsisten mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, PDRB per kapita tercatat sebesar 56,52 juta rupiah yang terus mengalami kenaikan hingga tahun 2025 mencapai 63,28 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan nilai tambah ekonomi tercatat mampu tumbuh sejalan dengan pertumbuhan penduduk secara umum. Selengkapanya dapat dilihat pada table 3.5

Tabel 3. 6 PDRB Per Kapita Kabupaten Serang Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Proyeksi 2027
PDRB per Kapita (juta rupiah)	48,92	52,96	56,52	60,01	63,28	65-70,18	65,28-68,00

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2026; RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045, Hasil Rakortekbang Provinsi Banten 2026

Berdasarkan kondisi PDRB Kabupaten Serang dan Untuk mewujudkan berbagai target indikator diatas maka Kebijakan Perekonomian Daerah perlu diarahkan pada :

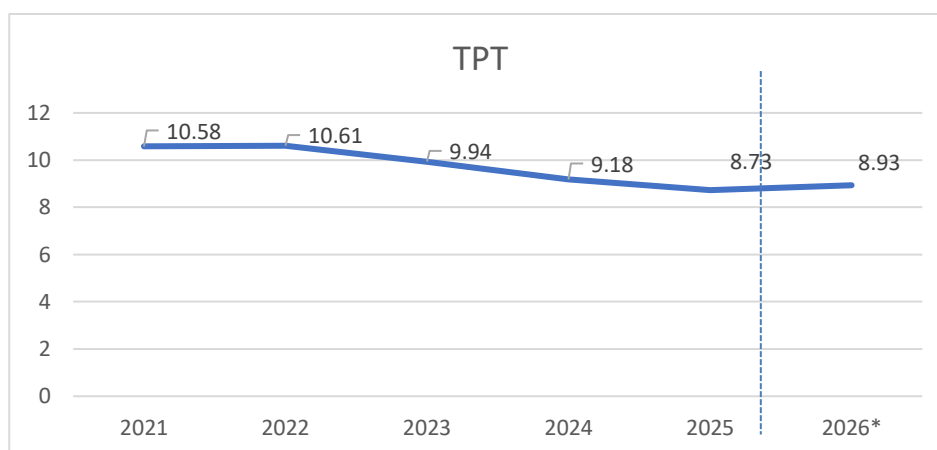
1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan potensi besar dalam menopang ketahanan pangan, memperluas lapangan kerja di pedesaan, serta mendukung pengurangan ketimpangan wilayah. Optimalisasi irigasi, diversifikasi komoditas, dan pemanfaatan teknologi pertanian presisi bisa menjadi arah kebijakan

utama.

2. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor kunci dalam menciptakan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Dukungan dalam bentuk infrastruktur industri, insentif investasi, serta penguatan hubungan hulu-hilir menjadi penting untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja
3. Sektor Konstruksi memiliki peran penting dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas umum, termasuk perumahan, jalan, dan jaringan utilitas dasar. Pertumbuhan sektor ini akan berdampak langsung terhadap aktivitas sektor lain seperti perdagangan dan jasa.
4. Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencerminkan dinamika konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan kelas menengah. Peningkatan akses pasar, penguatan UMKM, serta digitalisasi sistem distribusi menjadi fokus utama pengembangan sektor ini.
5. Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor penunjang logistik yang krusial di tengah pertumbuhan industri dan perdagangan. Penguatan konektivitas antarwilayah serta integrasi sistem logistik terpadu sangat dibutuhkan untuk mendorong efisiensi ekonomi.
6. Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dan memperkuat pembiayaan pembangunan, khususnya melalui kemitraan dengan lembaga perbankan dan non-bank.
7. Sektor Real Estate menunjukkan prospek cerah sebagai cerminan kebutuhan hunian, komersial, dan industrialisasi. Penataan tata ruang yang terintegrasi dengan pembangunan kawasan ekonomi dan pemukiman menjadi aspek penting dalam pengelolaan sektor ini.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kabupaten Serang tahun 2021-2024 bersifat fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan.

Grafik 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serang Tahun 2021-2025

Sumber : Bappeda Provinsi Dalam Angka 2021-2024; RPJPD Kab. Serang 2025-2045; BPS Kab. Serang 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja yang tersedia. TPT pada tahun 2025 sebesar 8,73 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar delapan sampai sembilan orang penganggur (pencari kerja). TPT mengalami penurunan sebesar 0,45 poin persen dibandingkan dengan Agustus 2024. Pada tahun 2026, ketika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan naik menjadi 8,93% - 9,18%.

Tabel 3. 7 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Serang (Ribu Orang)

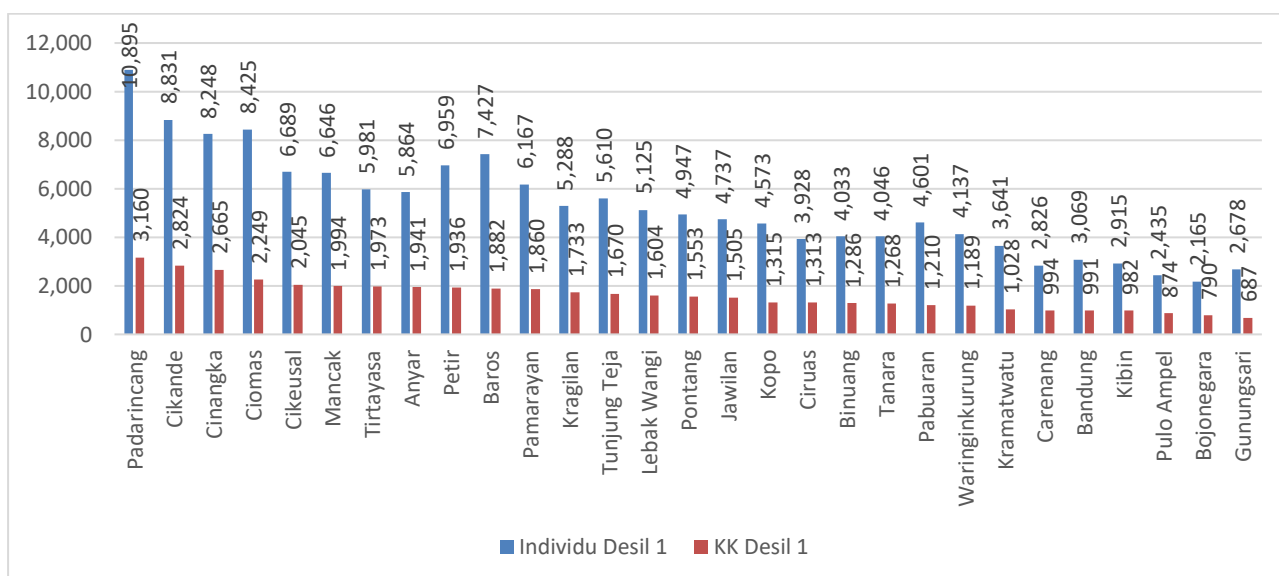
Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
2021	634.825	75.111	709.936
2022	643.277	76.368	719.645
2023	717,58	79,24	796,82
2024	786,38	79,52	865,90
2025	797,49	76,37	873,86

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2026; Rakortek Provinsi Banten 2026

C. Kemiskinan

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Grafik 3. 7 Sebaran Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang 2026

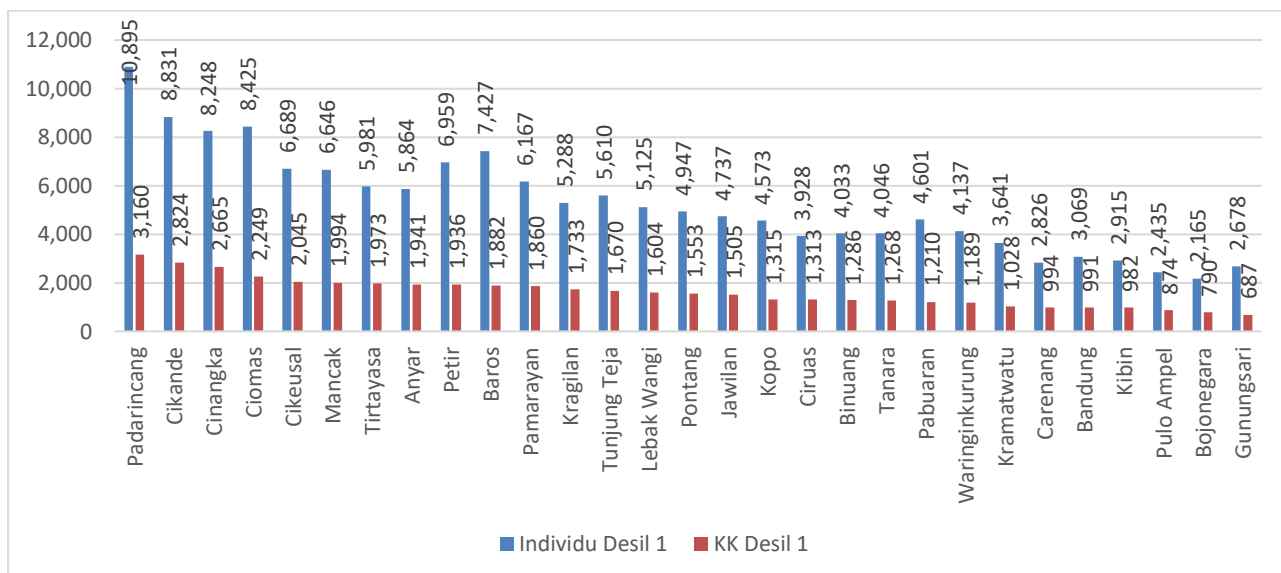


Sumber: Data DTSEN Periode Maret 2026

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diatasi hampir di setiap daerah termasuk Kabupaten Serang. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kabupaten Serang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, jumlah penduduk Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2025 adalah 68.510 jiwa. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencapai 68,86 ribu jiwa. Garis kemiskinan di Kabupaten Serang pada 2025 adalah sebesar Rp. 461.388 per kapita per bulan. Angka ini menunjukkan kenaikan 2,69% dibandingkan periode Maret 2024, yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok. Namun, tingkat kemiskinan justru turun menjadi 4,48%. Garis kemiskinan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non-makan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Persentase penduduk Kabupaten Serang yang berada

di bawah garis kemiskinan pada Maret 2025 adalah sebesar 4,48%. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,03 poin persen dibandingkan periode Maret 2024.

Grafik 3. 8 Sebaran Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serang 2026



Sumber: Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 2026

Tabel 3. 8 Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Serang

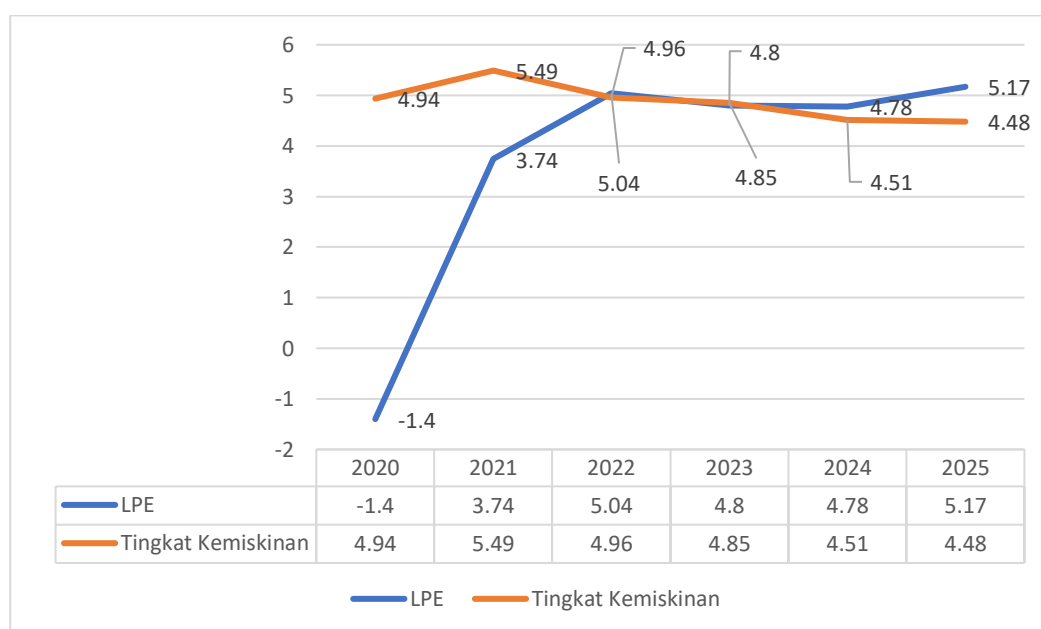
Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penduduk Miskin Kab Serang	5.49	4.96	4.85	4.51	4.48
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab Serang (%)	0.61	0.56	0.67	0.79	0.62
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab Serang (%)	0.12	0.11	0.15	0.2	0.12
Garis Kemiskinan di Kab Serang (Rp/Kapita/Bulan)	362,102	385,864	425,751	449,291	461,388
Penduduk Miskin Kab Serang (Ribu Jiwa)	83.09	75.45	73.83	68.86	68.51
Garis Kemiskinan di Kab Serang (Rp/Kapita/Bulan)	362,102	385,864	425,751	4,291	461,388
Persentase Kemiskinan Ekstrem	0.62	0.75	0.34	0.64	0.35
Kemiskinan Ekstrem Desil 1-4 (Jiwa)		348,100	641,608	555,970	585,515
Kemiskinan Ekstrem Desil 1-4 (KK)		77,076	153,973	139,256	180,132

Sumber: Data diolah Bapperida, 2026

Tabel 3. 9 Angka kemiskinan. tingkat kemiskinan dan garis kemiskinan Tahun 2025

Tahun	Angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Garis kemiskinan
2023	73.83 ribu jiwa	4.85%	Rp. 425.751.- per kapita per bulan
2024	68.86 ribu jiwa	4,51%	Rp. 449.291.-per kapita per bulan
2025	68.51 ribu jiwa	4,48%	Rp. 461.388.-per kapita per bulan

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2026

Grafik 3. 9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Serang Tahun 2020-2025

Sumber: BPS Kabupaten Serang 2021-2026

Angka kemiskinan Kabupaten Serang pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu dari 68,86 ribu jiwa menjadi 68,51 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Kabupaten Serang pada tahun 2025 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu dari 4,51% menjadi 4,48%. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Serang sudah mulai membuahkan hasil.

Pada tahun 2025. pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama. yaitu melalui: (1) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan. baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (2) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan; (3) perbaikan indfrastruktur dan permukiman

di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh; (4) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin.

D. Indeks Pembangunan Manusia

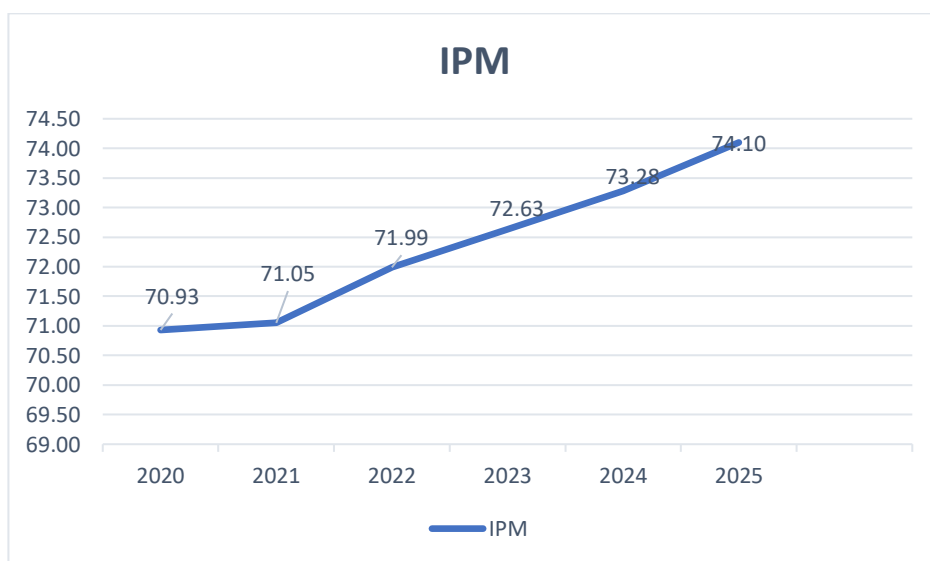
Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (knowledge); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (standard of living).

Tabel 3. 10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang Tahun 2020-2025

Komponen IPM	Satuan	IPM Kabupaten Serang					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	Tahun	73,7	73,81	74,22	74,62	74,91	75,39
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,57	12,58	12,78	12,86	12,87	13,02
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,5	7,51	7,78	7,79	7,88	8,03
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	10.665	10.713	10.916	11.320	11.767	12.065
IPM		70,93	71,05	71,99	72,63	73,28	74,10

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2026

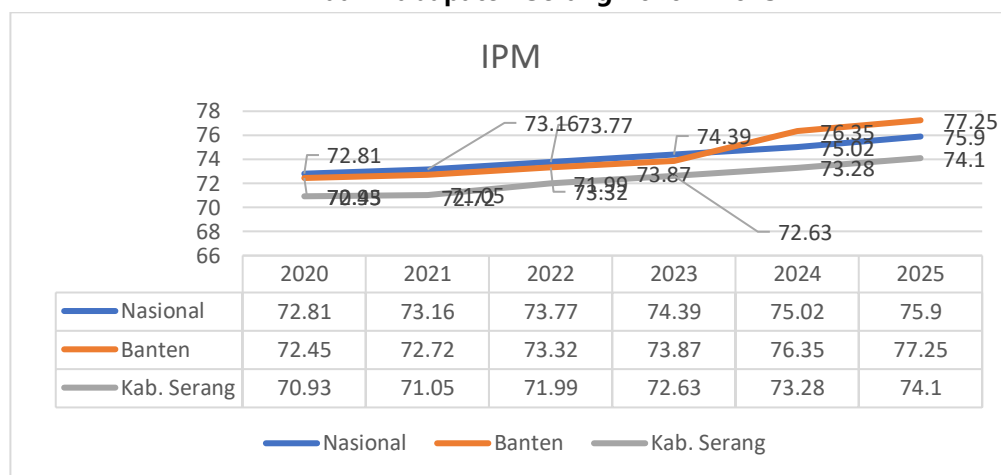
Grafik 3. 10 IPM Kabupaten Serang 2020-2025



Sumber: BPS Kabupaten Serang. 2026

IPM Kabupaten Serang menunjukkan adanya peningkatan secara berkelanjutan pada periode 2020-2025. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang meningkat tajam. Terlihat dari angka IPM yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. IPM pada tahun 2025 berada di angka 74,10. Angka ini termasuk dalam kelompok IPM Tinggi.

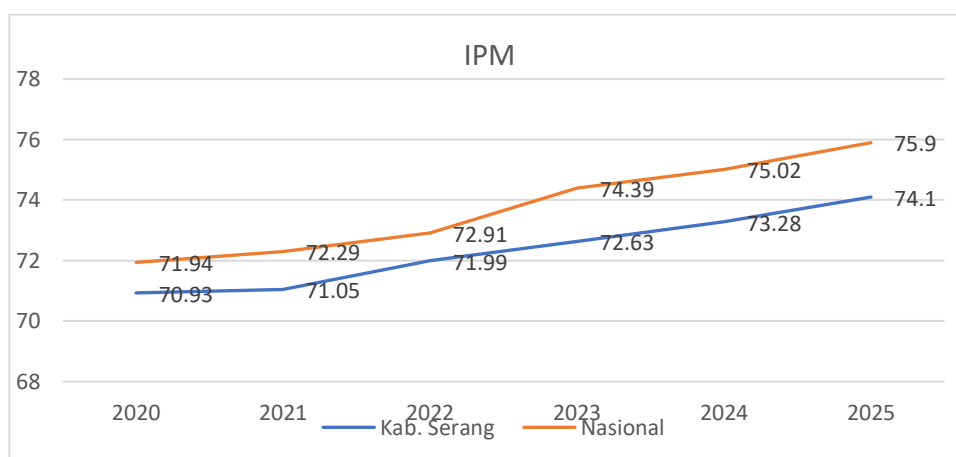
Grafik 3. 11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Serang 2020 – 2025



Sumber: BPS Kabupaten Serang 2026

Jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan provinsi Banten, IPM Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2025 merupakan IPM rendah di bandingkan dengan Nasional dan Banten.

Grafik 3. 12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Nasional Tahun 2020-2025



Sumber : BPS Kabupaten Serang 2025

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Serang masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan

lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; dan (2) pendidikan dasar dan menengah, Peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang. Pada dimensi kesehatan. peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (4) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (5) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi. peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut. IPM Kabupaten Serang pada tahun 2027 dalam ditargetkan di angka 75,00-75,60.

Kerangka kebijakan ekonomi daerah untuk Kabupaten Serang pada RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 adalah serangkaian arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi agar tujuan dan sasaran daerah tercapai. Sesuai dengan Misi 3 pada RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 yaitu Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan. Dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa. Kerangka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Serang pada RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 berfokus pada meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, optimalisasi penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan. dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa.

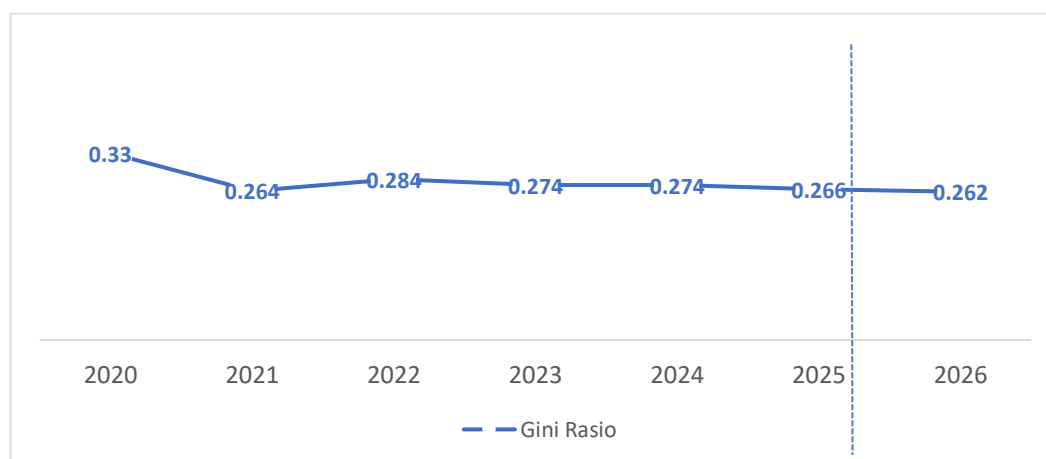
E. Indeks Gini (Gini Ratio)

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (gini ratio). Indeks gini (gini ratio) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (gini ratio) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah

lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Meskipun Gini Ratio Kabupaten Serang mengalami penurunan, namun tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Serang masih tergolong tinggi. Pemerintah Kabupaten Serang perlu terus berupaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Gini ratio adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk. Angka Gini ratio yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang rendah, sedangkan angka yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 nilai Gini ratio 0,267 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Serang tergolong rendah. Gini ratio proyeksi tahun 2026 sebesar 0,257-0,262. Gini ratio Kabupaten Serang masih berada di atas angka 0,2 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Serang.

Grafik 3. 13 Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Serang Tahun 2020-2026



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023; P-RKPD 2024 Kabupaten Serang; RPJMD Kabupaten Serang 2021- 2026; Rakortekbang Provinsi Banten 2026

Tabel 3. 11 Target Indikator Makro Daerah tahun 2026 – 2027

No	Indikator Makro	Realisasi 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,17	5,95	5,75-6,05
2	PDRB Per Kapita (juta)	63,28	65-70,18	65,28-68,00
3	Kontribusi PDRB Provinsi	11,87	11,85	11,87-11,95
4	Tingkat Kemiskinan	4,48	3,57-4,00	3,40-4,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,73	8,93-9,18	7,90-8,50

No	Indikator Makro	Realisasi 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027
6	Indeks Rasio Gini	0,252	0,257-0,262	0,245
7	Indeks Modal / Pembangunan Manusia	74,10	74,78	75,00-75,60
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	n/a	17,03	17,38
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,67	68,02	68,09

Sumber: RPJMD 2025-2029; Rakortekbang Provinsi Banten 2026

Tabel 3. 12 Sandingan Target Indikator Makro Nasional dan Daerah Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target 2027		
			Nasional	Provinsi	Kab. Serang
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,3 – 7,5	6,43-7,10	5,75-6,05
2	PDRB per Kapita	Rp Juta	5.980–6.050	85-87,38	65,28-68,00
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	-	3,9	11,87-11,95
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,0 – 6,5	4,34-4,65	3,40-4,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,30 – 4,87	6,43-6,60	7,90-8,50
6	Indeks Rasio Gini	Nilai	0,375-0,378	0,333-0,355	0,245
7	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	0,58	0,575	75,00-75,60
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	39,57	47,58	17,38
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	76,84	67,42	68,09

Sumber: RPJMD 2025-2029; Rancangan RKPD Provinsi Banten 2027; RKP 2027

Adapun target indikator makro berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten tahun 2027 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Target Indikator Makro 2027 berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Sasaran awal RKPD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,75–6,05
2	PDRB per Kapita	Rp.	65,28–68
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	11,87–11,95
4	Tingkat Kemiskinan	%	3,40-4,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,90-8,50
6	Indeks Rasio Gini	Indeks	0,245
7	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,00-75,60

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Sasaran awal RKPD
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	17,38
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,09

Sumber: Rakortek Renbang 2027

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Serang Tahun 2027 disusun sebagai bagian penting dari upaya pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah, meningkatkan kapasitas fiskal, memperkuat kualitas belanja daerah, serta mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Implementasi kebijakan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global, nasional, dan regional yang masih diwarnai oleh ketidakpastian ekonomi, tekanan inflasi, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan kebijakan fiskal nasional, Pemerintah Kabupaten Serang dituntut untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengelolaan pembiayaan daerah yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil Kajian Analisis Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Serang, kapasitas fiskal daerah masih menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, kebutuhan belanja pembangunan terus meningkat seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, pengendalian inflasi daerah, serta penguatan daya saing ekonomi lokal. Oleh karena itu, kebijakan keuangan daerah Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat ruang fiskal melalui peningkatan kemandirian fiskal daerah dan efisiensi pengelolaan belanja daerah.

Kebijakan fiskal daerah Tahun 2027 juga mempertimbangkan hasil analisis korelasi dan regresi dalam Kajian Analisis Kerangka Ekonomi Daerah yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas belanja publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, memiliki pengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi daerah, serta

penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, peningkatan PAD memiliki hubungan yang kuat terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperluas ruang intervensi pembangunan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2027 diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah (KFD) dan kemandirian keuangan daerah yakni melalui beberapa skema, antara lain:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah:

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- 2) Meningkatkan retribusi daerah;
- 3) Mengembangkan potensi daerah pada beberapa sektor, seperti pariwisata, UMKM, pertanian, dan perikanan;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah;
- 5) Digitalisasi sistem pajak dan retribusi untuk menekan kebocoran dan meningkatkan transparansi;
- 6) Meningkatkan kinerja BUMD.

b. Meningkatkan Dana Transfer

- 1) Memperkuat basis kualitas data daerah yang sinkron dengan data pusat untuk menunjukkan kebutuhan fiskal yang tinggi dan akurat;
- 2) Melakukan pemetaan usulan daerah yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan nasional untuk memastikan perolehan dana alokasi khusus yang tepat sasaran;
- 3) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan Dana Insentif Fiskal (DIF);
- 4) Melaksanakan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dana transfer khusus;
- 5) Melakukan pemetaan skema pendanaan lain untuk meningkatkan dana transfer ke daerah, seperti program hibah, program kompetitif, dan sebagainya.

2. Menekan Belanja Daerah

a. Melakukan efisiensi dan efektivitas belanja daerah

- 1) Melakukan review dan rasionalisasi belanja daerah
- 2) Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel
- 3) Memperkuat sistem pengendalian internal

b. Meningkatkan kualitas belanja daerah

- 1) Mengarahkan belanja daerah pada program dan kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung pada Masyarakat

- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah
3. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah
 - a. Memperkuat pengelolaan keuangan daerah
 - 1) Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Memperkuat sistem informasi keuangan daerah;
 - 3) Meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Pentingnya Keterlibatan Stakeholder :
 - a. Masyarakat:
 - 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
 - b. Swasta:
 - 1) Meningkatkan investasi swasta di daerah
 - 2) Menjalin Kerjasama dengan pihak swasta dalam Pembangunan daerah
5. Pemanfaatan Teknologi:
 - a. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah:
 - 1) Menerapkan e-government
 - 2) Memanfaatkan big data dan *artificial intelligence* untuk pengambilan keputusan
6. Pentingnya Monitoring dan evaluasi:
 - a. Mengukur efektivitas dan efisiensi upaya yang dilakukan
 - b. Melakukan penyesuaian terhadap strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran tahun 2025 pada tabel 3.12, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi Pendapatan Daerah, yakni sebesar 31,28 persen dari total pendapatan yang berhasil dihimpun. Kontribusi PAD ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya daerah secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di sisi lain, porsi terbesar pendapatan masih berasal dari Pendapatan Transfer, yang menyumbang 68,31 persen dari total Pendapatan Daerah, mencerminkan ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Adapun sisanya, sebesar 0,41 persen, berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang melengkapi struktur pendapatan daerah secara keseluruhan.

Hasil analisis terhadap kondisi ekonomi daerah, tantangan yang dihadapi, serta prospek pertumbuhan ekonomi ke depan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Serang terus berupaya mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah. Upaya ini dilakukan guna memastikan kemampuan fiskal daerah yang

memadai untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027, proyeksi Pendapatan Daerah dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp. 1.133.457.096.944
2. Pendapatan Transfer: Rp 2.064.637.305.426
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp 12.175.000.000

Dengan proyeksi ini, Kabupaten Serang diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskalnya melalui penguatan PAD, efisiensi pengelolaan transfer, serta eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru yang sah untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan daerah.

Secara rinci, tabel berikut menyajikan data realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBD serta proyeksi Pendapatan Daerah dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027.

Tabel 3. 14 Realisasi Pendapatan Kabupaten Serang Tahun 2024, APBD 2025, APBD 2026 dan Proyeksi Tahun 2027

NO.	URAIAN	REALISASI		APBD 2026	Pagu Indikatif RKPD 2027
		APBD 2024 (Audited)	APBD 2025 (Audited)		
01.00	PENDAPATAN DAERAH	3.490.580.570.407	3.535.684.299.055	3.240.502.310.952	3.210.269.402.370
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	944.295.326.625	1.107.264.900.400	1.150.332.389.125	1.133.457.096.944
04.01.01	Pajak Daerah	573.381.060.252	736.179.846.949	796.832.706.134	770.011.142.032
04.01.02	Retribusi Daerah	336.384.978.614	270.387.639.630	256.269.796.253	267.165.068.175
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.600.932.217	18.905.083.376	18.932.083.377	19.030.083.376
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.928.355.542	81.792.330.445	78.297.803.361	77.250.803.361
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.535.392.002.194	2.414.003.256.862	2.078.369.921.827	2.064.637.305.426
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.226.087.824.008	2.226.197.854.318	1.857.292.639.000	1.857.292.639.000

NO.	URAIAN	REALISASI		APBD 2026	Pagu Indikatif RKPD 2027
		APBD 2024 (Audited)	APBD 2025 (Audited)		
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	309.492.044.441	187.805.402.544	221.077.282.827	207.344.666.426
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.893.241.588	14.416.141.793	11.800.000.000	12.175.000.000
04.03.01	Pendapatan Hibah	10.893.241.588	11.802.146.672	11.800.000.000	12.175.000.000
04.03.03	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU		2.613.995.121	-	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2024 (Audited) dan 2025 (Audited).
APBD 2026 dan Proyeksi RKPD tahun 2027

Dalam struktur APBD pada RKPD, Dana Desa (DD) belum dimasukkan karena masih menunggu kebijakan Pemerintah Pusat terkait alokasi dana desa dari Presiden terpilih yang baru. Namun, estimasi bantuan keuangan untuk alokasi Dana Desa dari DAU APBD telah disiapkan sebagai langkah antisipasi. Pagu indikatif pada RKPD tahun 2027 untuk pendapatan pajak daerah sudah mencakup pendapatan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Untuk memastikan akurasi data pada opsen PKB dan opsen BBNKB, Pemerintah Kabupaten Serang melakukan koordinasi dengan BAPENDA Provinsi Banten terkait data kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Serang.

Pada kategori pendapatan transfer antar daerah, pendapatan bagi hasil daerah telah mencakup bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Khusus pada pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi, Pemerintah Kabupaten Serang hanya menerima dana bagi hasil pajak yang berdasarkan capaian pendapatan yang dipungut atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Selain itu, Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik tercatat dalam komponen pendapatan transfer khusus untuk DAK non-fisik.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang diarahkan pada upaya meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah agar perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi, bahkan diupayakan melebihi target yang telah ditetapkan. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara umum, struktur Anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Serang hingga tahun 2027 masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer, yang diperkirakan berada pada kisaran 64,42 persen, sementara kontribusi PAD mencapai 35,19 persen. Ketergantungan ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang masih bergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan terkait pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD, diperlukan perhatian khusus terhadap penetapan arah kebijakan yang berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang dapat memperkuat kemandirian fiskalnya sekaligus memastikan bahwa pendapatan yang dihimpun mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kebijakan Pendapatan Daerah yang dicantumkan dalam RKPD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Mengoptimalkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan;
- c. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR Serang, Bank BJB berupa perolehan deviden;
- d. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan

pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah;

- e. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- f. Penguatan Serta Peningkatan Sistem/Aplikasi Database Seluruh Jenis Pajak Dalam Kaitan Pengelolaan Database Pajak Secara Elektronik
- g. Secara rutin dan berkala melakukan kegiatan ekstensifikasi pendataan objek- objek pajak baru (Update data potensi pajak)
- h. Optimalisasi program program inovasi terbaru seperti ketuk pintu yaitu penagihan pajak yang dilakukan langsung dari pintu ke pintu serta Bapenda sanjung program sasar dan berkunjung pada hari libur (weekend) petugas Bapenda melakukan pelayanan langsung ke titik titik yang telah dijadwalkan pada hari libur (weekend) untuk melayani para wajib pajak
- i. Melakukan kegiatan mobil pelayanan keliling pajak daerah ke 326 desa sekabupaten serang bekerjasama dengan Bank BJB.
- j. Untuk PBJT - Jasa Perhotelan dan PBJT – Makanan dan/atau Minuman yaitu secara intensif melakukan pengawasan dan rekonsiliasi secara rutin dan maksimal agar pajak yang disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah dapat diterima secara optimal
- k. Untuk Pajak Air Tanah akan dilakukan Rasionalisasi harga air baku (HAB) yang sejak tahun 2011 belum ada rasionalisasi, rasionalisasi harga air baku tersebut diterapkan penyesuaian atas peraturan gubernur no. 35 tahun 2018 tentang pedoman penetapan nilai perolehan air tanah (NPA)
- l. Untuk pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu dalam pengelolaanya melakukan kerjasama dengan instansi vertikal, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP);
- m. Untuk Pajak PBB yaitu dengan melakukan pemutakhiran nilai tanah (Rasionalisasi NJOP) bekerjasama dengan UNPAD
- n. membuat regulasi seperti keringanan pengenaan denda dan diskon bagi wajib pajak yang membayar pajak secara tepat waktu;
- o. Untuk pajak BPHTB yaitu dengan memaksimalkan pendapatan atas ijin lokasi yang diterbitkan oleh DPMPSTSP atas permohonan beberapa perusahaan di wilayah serang utara;
- p. Untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BAPENDA Provinsi Banten berkaitan dengan data kepemilikan Kendaraan

Bermotor di wilayah Kabupaten Serang.

- q. Retribusi Pelayanan Persampahan yaitu dengan memaksimalkan pelayanan persampahan di wilayah kabupaten serang serta mengoptimalkan dari wajib pajak retribusi;
 - r. Retribusi kios pasar yaitu dengan memaksimalkan pembayaran secara digital (non tunai) serta melakukan pendataan para pedagang secara konsisten;
 - s. Retribusi parkir tepi jalan umum yaitu dengan membuat regulasi berkaitan dengan penataan dan pengelolaan parkir di wilayah Kabupaten Serang;
 - t. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka peningkatan pendapatan deviden bagi Pemerintah Daerah serta dalam upaya daya saing daerah;
 - u. Hasil penjualan dan pemanfaatan Barang Milik daerah yaitu dengan membuat regulasi berkaitan dengan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk mengelola aset-aset Pemerintah Daerah yang memiliki potensi pendapatan bagi Pemerintah Daerah.
2. Pendapatan Transfer
- a. Peningkatan kualitas Proposal. KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan TOR (Term Of Reference) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah;
 - b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer;
 - d. Peningkatan kualitas prasyarat untuk mendapatkan Insentif Fiskal. Dikarenakan Insentif Fiskal dialokasikan berdasarkan beberapa indikator-indikator yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atas kinerja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan;
 - e. Pada komponen pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya terkait Dana Transfer Umum maupun Dana Transfer Khusus, Pemerintah Kabupaten Serang hanya menerima dana bagi hasil atas capaian pendapatan pajak yang dipungut atau dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai Upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan

dari provinsi

- g. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Pada komponen pendapatan transfer antar daerah khususnya pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi, Pemerintah Kabupaten Serang hanya menerima dana bagi hasil pajak provinsi atas capaian pendapatan yang dipungut atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024, realisasi penerimaan PAD semester 2 tahun 2025, serta target penerimaan PAD Tahun 2026.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Proyeksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2027 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, ditetapkan secara rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah terdiri atas hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan tukar-menukar hibahasuransi, dan / atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian.

Tabel 3. 15 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024-2025

No.	Uraian	2024 (Audited)			2025 (Audited)		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	6	7	8	6	7	8
04.01.01	Pajak Daerah	789.769.680.391	573.381.060.252	72,6	725.174.381.504	736.179.846.949	101,51
04.01.02	Retribusi Daerah	350.923.371.865	336.384.978.614	95,87	252.142.584.022	270.387.639.630	107,23
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.600.932.217	19.600.932.217	100	18.932.083.377	18.905.083.376	99,85
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.648.385.082	14.928.355.542	79,84	101.301.093.311	81.792.330.445	80,74
Pendapatan Asli Daerah		1.178.942.369.555	944.295.326.625	80,1	1.097.550.142.214	1.107.264.900.400	100,88

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2024 dan 2025

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2027 ini meliputi :

- a. Optimalisasi penguatan pendapatan daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha melalui :
 1. Penguatan Serta Peningkatan Sistem/Aplikasi Database Seluruh Jenis Pajak Dalam Kaitan Pengelolaan Database Pajak Secara Elektronik
 2. Secara Rutin Dan Berkala Melakukan Kegiatan Mobil Pelayanan Keliling Pajak Daerah Ke 326 Desa Sekabupaten Serang Bekerjasama Dengan Bank BJB Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
- b. Memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis Online System;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat;
- d. Optimalisasi kinerja BUMD dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
- e. Evaluasi dan reformasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
- f. Melakukan pendekatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Serang untuk membantu peningkatan PAD diluar dana bagi hasil yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat;

- g. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- h. Revitalisasi, optimalisasi dan inventarisasi aset-aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat tercatat sebesar 99,22 persen, sementara Pendapatan Transfer antar daerah mencapai 100,28 persen. Data selengkapnya mengenai Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 16 Capaian Pendapatan Transfer Kabupaten Serang Tahun 2024-2025

No.	Uraian	2024 (Audited)			2025 (Audited)		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.243.493.030.000	2.226.087.824.008	99,22	2.272.975.539.889	2.226.197.854.318	97,94
04.02.02	Transfer Antar Daerah	308.623.882.460	309.492.044.441	100,28	203.525.991.061	187.805.402.544	92,27
Pendapatan Transfer		2.552.116.912.460	2.535.392.002.194	99,35	2.476.501.530.950	2.414.003.256.862	97,47

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan realisasi yang telah dicapai, arah kebijakan Pendapatan Transfer tahun 2027 dirumuskan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan pajak dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2027. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan maka penganggarnya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2027. Dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH Pajak dan bukan pajak 2027 tersebut ditetapkan Setelah Perda APBD ditetapkan. maka akan disesuaikan dalam perubahan APBD 2027.
2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi. Kabupaten. dan Kota Tahun Anggaran 2027. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran

DAU didasarkan pada alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 ditetapkan. maka pemerintah daerah Kabupaten Serang harus menyesuaikan dalam perubahan APBD 2027.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2027. Sepanjang ketentuan tersebut belum ada. maka dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 tidak mencantumkan alokasi DAK, khususnya DAK fisik.
4. Penganggaran Dana Insentif Fiskal (IF) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2027. Apabila Peraturan Menteri Keuangan belum ditetapkan. maka penganggaran IF tersebut didasarkan pada alokasi IF Tahun Anggaran 2026. dalam hal Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027. maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi IF dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
5. Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2027. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 ditetapkan. maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
6. Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2027. Apabila Peraturan Gubernur dimaksud belum ditetapkan. maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut didasarkan pada alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026. Dalam hal Peraturan Gubernur diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud pada

peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.

7. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serang 2027, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten 2027. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturandaerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
8. Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan badan layanan umum daerah dianggarkan pada pendapatan retribusi sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 295 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 46. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terbagi atas tiga komponen utama.yang meliputi: (1) Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan tabel 3.15, Hibah tahun 2025 mencapai 103,3 persen dibandingkan dengan tahun 2024 hanya mencapai 75,29 persend dari total pagu. Selain itu, Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2025 mencapai 2,61 milyar rupiah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100 persen.

**Tabel 3. 17 Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Serang Tahun 2024-2025**

No.	Uraian	2024 (Audited)			2025 (Audited)		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
04.03.01	Hibah	14.468.762.014,00	10.893.241.588	75,29	11.425.000.000	11.802.146.672	103,30
04.03.03	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU				2.613.685.121	2.613.995.121	100,01
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		14.468.762.014	10.893.241.588	75,29	14.038.685.121	14.416.141.793	102,68

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan pencapaian target tahun sebelumnya serta kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam RKPD Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut :

- a. Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga baik dari badan lembaga organisasi swasta dalam negeri/luar negeri kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan kelompok pendapatan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40). Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

A. Arah kebijakan umum belanja daerah

Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1). terdiri dari :

- a) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
- c) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya; dan

- d) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Berdasarkan Tabel 3.17, kinerja pelaksanaan belanja daerah Kabupaten Serang menunjukkan tren yang cukup baik dan semakin efektif. Tingkat realisasi total belanja daerah pada Tahun 2024 mencapai 92,44 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3,77 triliun, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 95,09 persen dari pagu Rp3,61 triliun. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Meskipun pagu belanja Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024, kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran justru meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan penganggaran mulai lebih terarah, realistis, dan fokus pada prioritas pembangunan daerah.

Tabel 3. 18 Capaian Target Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024-2025

No.	Uraian	2024 (Audited)			2025 (Audited)		
		Pagu(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
02.00	BELANJA DAERAH	3.770.394.851.697,00	3.485.295.242.921,00	92,44	3.615.967.850.057	3.438.456.744.824	95,09
05.01	BELANJA OPERASI	2.709.222.572.109,53	2.561.521.309.939,00	94,55	2.787.040.489.327	2.674.018.508.144,	95,94
05.01.01	Belanja Pegawai	1.393.436.743.654,94	1.325.832.224.608,00	95,15	1.550.446.482.475	1.510.133.055.349	97,40
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.124.845.835.636,06	1.050.074.683.873,00	93,35	1.087.345.292.461	1.015.231.541.811	93,37
05.01.03	Belanja Bunga				306.250.000	306.250.000	100,00
05.01.04	Belanja Hibah	184.331.442.818,53	179.022.715.458,00	97,12	138.849.469.791	138.265.199.207	99,57
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	6.608.550.000,00	6.591.686.000,00	99,74	10.092.994.600	10.082.673.360	99,89
05.02	BELANJA MODAL	478.168.111.554,47	428.320.239.751,00	89,58	262.549.906.930	239.311.625.543	91,14
05.02.01	Belanja Modal Tanah	24.961.855.650,00	1.161.432.715,00	4,65	12.497.880.760	2.438.830.876	19,51
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.776.035.310,00	132.027.958.530,00	95,83	160.179.695.669	154.131.047.995	96,22
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.445.430.905,47	93.613.564.317,00	90,5	42.453.296.361	39.666.670.093	93,43
05.02.04	Belanja Modal Jalan. Irigasi.dan Jaringan	198.367.819.941,00	188.198.027.641,00	94,87	25.508.585.933	21.956.401.229	86,07
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.016.980.248,00	12.970.147.048,00	99,64	21.237.848.207	20.622.500.950	97,10
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	599.989.500,00	349.109.500,00	58,19	672.600.000	496.174.400	73,76
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.775.000.000,00	397.087.640,00	6,88	11.695.194.400	2.498.559.326	21,36
05.04	BELANJA TRANSFER	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00	85,76	554.682.259.400	522.627.840.228	94,22
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	119.439.270.033,00	37.417.907.591,00	31,33	77.164.700.400	76.871.952.400	99,62
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	457.789.898.000,00	457.638.698.000,00	99,97	477.517.559.000	445.755.887.828	93,34

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2024 dan 2025

3.2.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan tabel 3.18 diatas, belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dalam struktur APBD dengan tingkat realisasi yang sangat tinggi, yaitu 94,55 persen pada Tahun 2024 dan meningkat menjadi 95,94 persen pada Tahun 2025. Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal. Detail belanja operasi antara lain:

- a) Belanja Pegawai menunjukkan realisasi sangat tinggi, meningkat dari 95,15 persen menjadi 97,39 persen. Kondisi ini menggambarkan stabilitas pembayaran hak pegawai dan konsistensi pembiayaan aparatur.
- b) Belanja Barang dan Jasa relatif stabil pada kisaran 93 persen, menandakan aktivitas operasional pemerintahan berjalan cukup efektif.
- c) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial memiliki tingkat realisasi sangat tinggi, bahkan mendekati 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program dukungan kepada masyarakat, lembaga, dan kelompok sasaran dapat tersalurkan dengan baik.
- d) Belanja Bunga Tahun 2025 terealisasi 100 persen, yang mengindikasikan kewajiban pembayaran bunga telah dipenuhi seluruhnya sesuai ketentuan.

A. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai PNS dan Pegawai PPPK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan alokasi maksimal 30 persen dari alokasi belanja daerah. Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah :

- a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan P3K untuk tahun anggaran 2027 yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bideang pendayagunaan aparatur negara sesuai perundang-undangan;
- c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen (dua komalima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah / wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN / PNS Daerah;
 - f. Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN dan PPPK ;
 - g. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Serang masih mengalokasikan juga Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi PNS kepada seluruh PNS sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat / PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - i. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui usulan DAK Non Fisik;
 - j. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - k. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30 persen, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - l. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

- m. Belanja Pegawai pada tahun 2027 tercatat sebesar Rp1.311.014.014.652.245,- atau lebih rendah 13,33 persen dibandingkan tahun 2026 yang mencapai Rp1.510.812.863.315,-, dengan selisih penurunan sebesar Rp199.798.211.070,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pegawai yang memasuki masa pensiun serta tidak dilakukannya penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru pada tahun 2027.

B. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan barang dan jasa nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Belanja jasa non ASN tetap dianggarkan untuk pemenuhan gaji tenaga kontrak yang direncanakan akan dilaksanakan menggunakan metode outsourcing sesuai dengan kebijakan pemerintahan pusat;
- b. Dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dapat dianggarkan pengadaan barang dan jasa berupa barang yang di jual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan memperhitungkan estimasi sisa dan proyeksi persediaan barang Tahun Anggaran 2026;
- d. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
- f. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pekerja/pegawai yang menerima

- gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi dan sewa aset tetap lainnya;
 - k. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan;
 - l. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - m. Penganggaran ketersediaan layanan (availability payment) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU;
 - n. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: (1) Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah; (2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- r. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat, dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD TA. 2027;
- t. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- u. Belanja yang dialokasikan untuk mempercepat pencapaian *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
- v. Belanja yang dialokasikan untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada Tahun 2027 dan cakupan peserta aktif Program JKN mencapai minimal 80% terhadap penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

- a. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah;
- b. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan;
- d. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan pada BPKAD selaku SKPKD;
- e. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

D. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani butir D.2.e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang terkait dengan pemberian hibah. Belanja Hibah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan / atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan

- kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan dan memenuhi persyaratan penerima hibah;
- c. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - d. Belanja Hibah berupa barang dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, bangunan, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya serta aset tetap tidak terwujud seperti perangkat lunak ;
 - e. Belanja Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya;
 - f. Belanja Hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - g. Badan, Lembaga dan Organisasi yang memenuhi kriteria kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berikan hibah secara terus-menerus setiap tahun yaitu:
 1. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Serang;
 2. Palang Merah Indonesia Kabupaten Serang;
 3. Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Serang;
 4. Pramuka Kabupaten Serang;
 5. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serang;
 6. Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Serang;;
 7. Lembaga Pendidikan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Serang;
 8. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Serang;
 9. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Serang;
 10. Karang Taruna Kabupaten Serang;
 11. National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Serang; dan
 12. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Serang.
 - h. Belanja Bantuan Keuangan Kepada partai Politik agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 ;
 - i. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- j. Pemberian Hibah pada RKPD 2027 sebesar Rp 85.665.603.000 disalurkan pada lima perangkat daerah dengan pada dibawah ini:

Tabel 3. 19 Alokasi Belanja Hibah TA. 2027

No	Perangkat Daerah	Nama Akun	Penerima
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	FKUB
		Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	PARPOL 1. PKB 2. NASDEM 3. PAN 4. PDIP 5. PPP 6. GERINDRA 7. GOLKAR 8. Demokrat 9. PKS
2.	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1. BAZNASDA 2. MUI 3. FSPP 4. LPTQ 5. Serang Open
3.	Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1. KNPI 2. KONI 3. KORMI
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	SMP Swasta Se-Kab. Serang
		Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	
		Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	PKBM dan SKB
		Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	
5	Dinas Sosial	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Karang Taruna Kabupaten Serang

E. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial mempedomani butir D.2.f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang terkait dengan pemberian hibah serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang terkait dengan pemberian bantuan sosial. Bantuan Sosial memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan / atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
- b. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Instrumen pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati Serang tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dengan tahapan usulan melalui aplikasi e-hibah bansos, yang dimulai dari input usulan dari penerima hibah/bansos, verifikasi TAPD, verifikasi oleh Majelis Pertimbangan serta pembahasan dan penetapan pagu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- d. Pemberian Bantuan Sosial pada RKPD 2027 sebesar Rp 9.980.000.000 disalurkan pada dua perangkat daerah dengan pada dibawah ini:

Tabel 3. 20 Alokasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2027

No	Perangkat Daerah	Nama Akun	Penerima
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1. Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat 2. Masyarakat korban bencana (Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH)
2	Dinas Sosial	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	KUBE
		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Bantuan Sosial UEP

3.2.2.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2027 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

A. Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

C. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

D. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

F. Belanja Aset Lainnya

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis. yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan. Secara rinci. tabel di bawah memperlihatkan realisasi belanja Kabupaten Serang Tahun 2024-2025. Target belanja dalam RKPD Tahun 2027.

Tabel 3. 21 Realisasi Belanja Kabupaten Serang Tahun 2024, APBD Tahun 2025, Pagu APBD 2026 dan Indikatif Rancangan Akhir RKPD 2027

NO.	URAIAN	REALISASI (DILIAT LAGI ANGKANYA)		Pagu APBD 2026	Pagu Indikatif Rancangan Akhir RKPD 2027	Pagu Indikatif 2027 dalam RPJMD 2025-2029
		2024 (Audited)	2025 (Audited)			
05.00	BELANJA DAERAH	3.485.295.242.921	3.438.456.744.824	3.341.090.562.298	3.209.044.402.370	3.270.481.118.760
05.01	BELANJA OPERASI	2.561.521.309.939	2.674.018.508.144	2.650.321.844.487	2.495.075.922.857	2.602.639.128.375
05.01.01	Belanja Pegawai	1.325.832.224.608	1.510.133.055.349	1.510.812.863.315	1.311.014.652.245	1.512.250.231.397
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.074.683.873	1.015.231.541.811	1.043.863.378.172	1.088.415.667.613	1.058.912.508.978
05.01.03	Belanja Bunga	6.591.686.000	306.250.000	0	0	0
05.01.05	Belanja Hibah		138.265.199.207	85.665.603.000	85.665.603.000	20.716.388.000
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	179.022.715.458	10.082.673.360	9.980.000.000	9.980.000.000	10.760.000.000
05.02	BELANJA MODAL	428.320.239.751	239.311.625.543	168.236.218.770	168.236.218.770	144.006.837.394
05.02.01	Belanja Modal Tanah	397.087.640	2.438.830.876	14.100.000.000	14.100.000.000	
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		154.131.047.995	55.807.897.645	55.807.897.645	
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	495.056.605.591	39.666.670.093	46.272.968.001	46.272.968.001	
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37.417.907.591	21.956.401.229	24.007.001.124	24.007.001.124	
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	457.638.698.000	20.622.500.950	27.646.739.000	27.646.739.000	
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.485.295.242.921	496.174.400	401.613.000	401.613.000	

NO.	URAIAN	REALISASI (DILIAT LAGI ANGKANYA)		Pagu APBD 2026	Pagu Indikatif Rancangan Akhir RKPD 2027	Pagu Indikatif 2027 dalam RPJMD 2025-2029
		2024 (Audited)	2025 (Audited)			
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.561.521.309.939	2.498.559.326	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga	1.325.832.224.608	2.498.559.326	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
05.04	BELANJA TRANSFER	1.050.074.683.873	522.627.840.228	512.532.499.041	512.532.499.041	513.835.152.991
05.04.01	Belanja Bagi Hasil		76.871.952.400	109.740.007.041	109.740.007.041	111.042.660.991
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	179.022.715.458	445.755.887.828	402.792.492.000	402.792.492.000	402.792.492.000

Sumber: BPKAD dan Bapperida

Dalam tabel di atas, pagu belanja daerah dalam struktur pagu indikatif rancangan akhir RKPD 2027 masih bersifat proyeksi dikarenakan perangkat daerah belum merinci rencana belanja per sub-kegiatan. Namun, perhitungan untuk belanja program dan prioritas perangkat daerah sudah dipetakan sebagaimana dituangkan dalam bagian lain dokumen ini.

3.2.2.5 Kebijakan Belanja Mandatori

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola pemerintah daerah meliputi:

- 1 Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Arah prioritas kebijakan Mandatory Bidang Pendidikan yang dilaksanakan adalah untuk peningkatan kualitas dan akses Bidang Pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai subkegiatannya yang berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/MK/PK/2026 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan Kebijakan Mandatory Bidang Pendidikan Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:
 - a) Mendukung pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan;
 - b) Mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di satuan

- pendidikan;
- c) Mendukung pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran disatuan pendidikan;
 - d) Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah;
 - e) Mendukung program sekolah nasional terintegratif;
 - f) Pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - g) Mendukung pelaksanaan program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - h) Penguatan kemampuan literasi, numerasi, sains, teknologi, pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial;
 - i) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
 - j) Penguatan pendidikan karakter, dengan penerapan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat dan budaya sekolah aman dan nyaman, didukung dengan penguatan Bimbingan Konseling;
 - k) Pemenuhan, distribusi dan redistribusi, serta profesionalisme, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - l) Mendukung pelaksanaan budaya antikorupsi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di satuan pendidikan;
 - m) Pembinaan terhadap perpustakaan umum, khusus dan perpustakaan sekolah, dalam bentuk layanan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) baik sarana prasarana, akses, pengadaan buku bacaan untuk pojok baca, taman bacaan masyarakat, perpustakaan kabupaten/kota dan perpustakaan desa, serta layanan peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia perpustakaan.
- 2 Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Prioritas Kebijakan Mandatori Spending Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik, berkaitan dengan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public antardaerah, termasuk operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik. Subkegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/MK/PK/2026 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja

Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan Kebijakan Mandatory Bidang Infrastruktur Dasar Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

- a) Penguatan tata kelola air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang berorientasi pada berkelanjutan.
 - b) Perubahan perilaku seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi sampah, termasuk pemisahan, pemilahan dan pengurangan yang terintegrasi sistem serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna serta optimalisasi TPST dan memastikan offtaker hasil olahan sampah.
 - c) Peningkatan ketahanan air dan percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui konservasi, pengendalian daya rusak air, pengelolaan drainase untuk mengurangi risiko genangan maupun banjir, pendayagunaan sumber daya air berkelanjutan dan sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
 - d) Peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemantapan jalan, penetapan fungsi jalan, kelas jalan dan penyusunan rencana umum jalan.
 - e) Mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
 - f) Meningkatkan kualitas konstruksi dengan standar efisiensi, keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur
 - g) Peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan antara lain terminal, pelabuhan penyeberangan, fasilitas angkutan umum, prasarana keselamatan lalu lintas, serta fasilitas pendukung transportasi lainnya.
- 3 Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa);
 - 4 Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 persen dari rencana pendapatan pajak dan retribusi Daerah (PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014);
 - 5 Kontribusi Pajak Rokok sebesar 37,5 persen realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota untuk dukungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (128/PMK. 07 /2018 Pasal 2).

3.2.2.6 Kebijakan Belanja Lainnya

A. Belanja Program Strategis Nasional (Pro-SN) dan Tematik Pembangunan

Program Strategis Nasional (Pro-SN) adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pro-SN menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Pro-SN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Selain aspek ekonomi, Pro-SN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Pro-SN bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan Pro-SN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (Pro-SN) dan Tematik Pembangunan yang dilaksanakan Tahun 2027 di Kabupaten Serang:

1. Digitalisasi Pembelajaran
2. Ekonomi Syariah
3. Irigasi Yang Mendukung Swasembada Pangan
4. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
5. Kampung Nelayan Merah Putih
6. Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih
7. Makan Bergizi Gratis
8. Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)
9. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

10. Pengan Akuatik
11. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/Kota
12. Pembangunan Tiga Juta Rumah
13. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
14. Penanggulangan Bencana
15. Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting
16. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
17. Pengarusutamaan Gender
18. Pengendalian Inflasi
19. Penuntasan Tuberkulosis (TBC)
20. Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah
21. Perlindungan Anak
22. Sekolah Rakyat

Selain melaksanakan program Pro-SN dan temarik pembangunan pada tahun 2027 Kabupaten Serang mendukung kegiatan yang bersifat Direktif Presiden, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 3) Konektivitas Jalan Daerah; 4) Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 5) Pembangunan 3 (tiga) Juta Rumah, 6) Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 8) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu; 9) Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); 10) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 11) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Ramah Lingkungan; 12) Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir; 13) Administrasi Kependudukan; 14) Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); 15) Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); 16) Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP); 17) Inisiasi Kerjasama Desa; 18) Pemberdayaan Desa; 19) Keselamatan Transportasi; 20) Peningkatan Kualitas Pemuda; 21) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; 22) Peningkatan Produksi Garam; 23) Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP); 24) Pengembangan Perikanan Budi Daya; 25) Perhutanan Sosial; 26) Konservasi Energi; 27) Ketahanan Energi; 28) Kawasan Ekonomi Strategis; 29) Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

B. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

Berdasarkan Keputusan Menteri Kuaangan Republik Indonesia Nomor 11/MK/PK/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/Km.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terbagi atas empat bagian yaitu:

1. Penandaan Rincian Belanja Daerah untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana hasil penerimaan opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
2. Penandaan Rincian Belanja Daerah dari hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas tenaga listrik untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dimana hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah daerah dan badan usaha berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
3. Penandaan Rincian Belanja Daerah dari hasil penerimaan Pajak Rokok untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
4. Penandaan Rincian Belanja Daerah dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dimana hasil penerimaan PAT, paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur serapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Target penerimaan pajak dari hasil yang telah ditentukan penggunaannya pada RKPD 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 22 Target Penerimaan Pajak Dari Hasil
Yang Telah Ditentukan Penggunaannya TA. 2027**

NO	URAIAN PAJAK	TARGET (RP)
1.	Opsen PKB	85.690.467.000
2.	Opsen BBNKB	58.459.253.000
3.	PBJT – Tenaga Listrik	244.481.100.625
4.	Pajak Rokok	-
5.	Pajak Air Tanah	7.224.101.890

C. Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Kebijakan penyelenggaraan urusan dan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi:

- 1) Urusan Pemerintahan Umum;
 1. Bidang Pendidikan;
 2. Bidang Kesehatan;
 3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 4. Bidang Sosial;
 5. Bidang Ketenagakerjaan;
 6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Bidang Pangan;
 8. Bidang Pertanahan;
 9. Bidang Lingkungan Hidup;
 10. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
 11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 13. Bidang Perhubungan;
 14. Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo);

15. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
16. Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
18. Bidang statistik;
19. Bidang Persandian;
20. Bidang Kebudayaan;
21. Bidang Perpustakaan;
22. Bidang Kearsipan;
23. Bidang Kelautan dan Perikanan;
24. Bidang Pariwisata;
25. Bidang Pertanian;
26. Bidang Kehutanan;
27. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM);
28. Bidang Perdagangan;
29. Bidang Transmigrasi;
- 2) Unsur Pendukung - Sekretariat Daerah;
- 3) Unsur Pendukung - Sekretariat DPRD;
- 4) Unsur Penunjang – Perencanaan, Riset dan Inovasi;
- 5) Unsur Pengawasan;
- 6) Unsur Kewilayahan

D. Kebijakan Yang Diatur Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

Belanja Kebijakan Tematik diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang pada Rancangan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027, yang selanjutnya pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 akan dilakukan penandaan alokasi belanja sesuai dengan kategorinya. Adapun belanja tematik pada RKPD 2027 adalah:

1. Belanja Fungsi Pendidikan	16. Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan
2. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	17. Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan
3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	18. Belanja Unsur Pengawasan
4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	19. DAK Fisik Bidang Kesehatan
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang	

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20. DAK Fisik Bidang Air minum
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	21. DAK Fisik Bidang Sanitasi
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	22. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	23. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
9. Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	24. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)
10. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	25. DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
11. Pengendalian Inflasi	26. DAK Non Fisik Tunjangan Guru ASN Daerah
12. Penggunaan Hasil Penerimaan PKB Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan	27. Belanja Hasil DBH-SAWIT
13. Penggunaan Hasil Penerimaan Opsen PKB Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan	28. Belanja TKDN
14. Penggunaan Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan	29. Belanja Pegawai
15. Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan	30. Belanja Keselarasan Anggaran dengan Asta Cita
	31. Penandaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah
	32. Penandaan Penggunaan Dana Alokasi Umum yang Telah Ditentukan Penggunaannya
	33. Penandaan Ketahanan Pangan

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah merupakan kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Kebijakan pembiayaan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran SILPA akan menyesuaikan estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024, dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan untuk tahun 2025, yang diestimasikan bersumber dari :

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Menyusun analisis investasi daerah sebelum melakukan penyertaan modal pada BUMD (investasi daerah);
- b. Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal pada BUMD/BUMN atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal;
- c. Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan Tahun Anggaran 2027 telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan.

Tabel 3. 23 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024, APBD-P 2025, Pagu APBD 2026 dan Pagu Indikatif Rancangan Akhir RKPD 2027

NO.	URAIAN	REALISASI		Pagu APBD 2026	Pagu Indikatif Rancangan Akhir RKPD 2027
		2024 (Audited)	APBD-P 2025		
06.00	PEMBIAYAAN DAERAH		27.849.821.961		-
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.866.807.668	65.849.821.961	100.588.251.346	-

NO.	URAIAN	REALISASI		Pagu APBD 2026	Pagu Indikatif Rancangan Akhir RKPD 2027
		2024 (Audited)	APBD-P 2025		
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32.866.807.668	30.849.821.961	100.588.251.346	-
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah		35.000.000.000	0	
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.482.125.637	38.000.000.000	0	1.225.000.000
	Pembiayaan Netto	25.384.682.031	27.849.821.961	100.588.251.346	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	30.334.674.917 30.877.491.772	123.362.973.013 125.077.464.775	0	-

Sumber: BPKAD dan Bapperida

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Serang diwadahi dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp3.210.269.402.370. Dibandingkan dengan target APBD Tahun 2026 sebesar Rp3.240.502.310.952, target pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp30.232.908.582 atau sekitar 0,93 persen. Penyesuaian target tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal nasional dan daerah, khususnya kebijakan efisiensi belanja pemerintah, dinamika Transfer ke Daerah (TKD), serta proyeksi kemampuan riil penerimaan daerah pada tahun perencanaan.

Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), target dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp1.133.457.096.944, lebih rendah sebesar Rp16.875.292.181 dibandingkan target APBD Tahun 2026 yang sebesar Rp1.150.332.389.125. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian target Pendapatan Pajak Daerah, yang turun dari Rp796.832.706.134 menjadi Rp770.011.142.032, serta penurunan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Rp78.297.803.361 menjadi Rp77.250.803.361. Di sisi lain, Hasil Retribusi Daerah diproyeksikan meningkat dari

Rp256.269.796.253 menjadi Rp267.165.068.175, atau naik sebesar Rp10.895.271.922, yang menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemungutan retribusi, dan pemanfaatan aset daerah. Selain itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga meningkat menjadi Rp19.030.083.376, atau bertambah sebesar Rp97.999.999 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada kelompok Pendapatan Transfer, target Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2.064.637.305.426, lebih rendah sebesar Rp13.732.616.401 dibandingkan target APBD Tahun 2026 sebesar Rp2.078.369.921.827. Penurunan tersebut sepenuhnya dipengaruhi oleh berkurangnya target Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah, dari Rp221.077.282.827 menjadi Rp207.344.666.426. Sementara itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tetap diproyeksikan sebesar Rp1.857.292.639.000, sehingga masih menjadi sumber utama pendanaan daerah dari pemerintah pusat.

Adapun pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp12.175.000.000, meningkat sebesar Rp375.000.000 dibandingkan target APBD Tahun 2026 sebesar Rp11.800.000.000. Peningkatan tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah, yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, perbedaan target pendapatan antara RPJMD dan RKPD Tahun 2027 mencerminkan penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan fiskal nasional dan kondisi keuangan daerah yang lebih aktual. Meskipun terdapat penurunan target pendapatan, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, peningkatan efektivitas pemungutan pendapatan daerah, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka menjaga keberlanjutan pendanaan pembangunan daerah. Hal tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 24 Proyeksi Pendapatan Tahun 2027

No	Uraian	RPJMD 2027	APBD 2026	Rancangan Akhir RKPD 2027	(+/-)
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
01.00	PENDAPATAN	3.270.481.118.760	3.240.502.310.952	3.210.269.402.370	(30.232.908.582)
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.191.969.802.563	1.150.332.389.125	1.133.457.096.944	(16.875.292.181)
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	830.105.929.581	796.832.706.134	770.011.142.032	(26.821.564.102)
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	251.922.854.226	256.269.796.253	267.165.068.175	10.895.271.922
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.932.083.377	18.932.083.377	19.030.083.376	97.999.999
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	91.008.935.378	78.297.803.361	77.250.803.361	(1.047.000.000)
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.066.711.316.198	2.078.369.921.827	2.064.637.305.426	(13.732.616.401)

No	Uraian	RPJMD 2027	APBD 2026	Rancangan Akhir RKPD 2027	(+/-)
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.899.645.512.373	1.857.292.639.000	1.857.292.639.000	0
04.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	167.065.803.825	221.077.282.827	207.344.666.426	(13.732.616.401)
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.800.000.000	11.800.000.000	12.175.000.000	375.000.000
04.03.01	Pendapatan Hibah	11.800.000.000	11.800.000.000	12.175.000.000	375.000.000
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	-		

Sumber: BPKAD dan Bapperida,2026

Tabel 3. 25 Proyeksi Belanja Tahun 2027

No	Uraian	RPJMD 2027	APBD 2026	Rancangan Akhir RKPD 2027	(+/-)
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
05.00	BELANJA DAERAH	3.270.481.118.760	3.341.090.562.298	3.185.844.640.668	-155.245.921.630
05.01	BELANJA OPERASI	2.602.639.128.375	2.650.321.844.487	2.495.075.922.857	-155.245.921.630
05.01.01	Belanja Pegawai	1.512.250.231.397	1.510.812.863.315	1.311.014.652.245	-199.798.211.071
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.058.912.508.978	1.043.863.378.172	1.088.415.667.613	44.552.289.441
05.01.03	Belanja Bunga	0	0	0	0
05.01.05	Belanja Hibah	20.716.388.000	85.665.603.000	85.665.603.000	0
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	10.760.000.000	9.980.000.000	9.980.000.000	0
05.02	BELANJA MODAL	144.006.837.394	168.236.218.770	168.236.218.770	0
05.02.01	Belanja Modal Tanah		14.100.000.000	14.100.000.000	0
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		55.807.897.645	55.807.897.645	0
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		46.272.968.001	46.272.968.001	0
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		24.007.001.124	24.007.001.124	0
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		27.646.739.000	27.646.739.000	0
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya		401.613.000	401.613.000	0
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0
	Belanja Tidak Terduga		10.000.000.000	10.000.000.000	0
05.04	BELANJA TRANSFER	513.835.152.991	512.532.499.041	512.532.499.041	0
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	111.042.660.991	109.740.007.041	109.740.007.041	0
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	402.792.492.000	402.792.492.000	402.792.492.000	0
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	100.588.251.346	3.185.844.640.668	-155.245.921.630
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		100.588.251.346	2.495.075.922.857	-155.245.921.630
06.01.01	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)			1.311.014.652.245	-199.798.211.071
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	1.088.415.667.613	44.552.289.441
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah			0	0
06.02.03	Pembayaran Pinjaman Daerah			85.665.603.000	0

No	Uraian	RPJMD 2027	APBD 2026	Rancangan Akhir RKPD 2027	(+/-)
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
	Pembiayaan Netto	-	100.588.251.346	9.980.000.000	0
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	168.236.218.770	0

3.3 Pendanaan Non APBD

Pendanaan Non APBD adalah seluruh sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pelayanan publik, atau operasional lembaga/pemerintah daerah yang tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan Non APBD di Kabupaten Serang berasal dari dana CSR yang disalurkan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan dana beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT)
2. Bantuan pembangunan sekolah
3. Bantuan normalisasi sungai
4. Bantuan bagi korban bencana
5. Bantuan dana pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
6. Bantuan pemasaran destinasi pariwisata
7. Bantuan sarana dan prasarana sekolah
8. Bantuan penerangan jalan kampung
9. Sosialisasi pengelolaan sampah dan bank sampah digital
10. Bantuan infrastruktur jalan kampung (paving block)
11. Pemberdayaan UMKM Binaan
12. Peningkatan Air Bersih Melalui Pengeboran Sumur Pompa
13. Program Penyuluhan Ibu Hamil dan Kualitas Kesehatan melalui Posyandu

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

4.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Tahun 2027

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan tahunan yang menjembatani antara visi dan misi Kepala Daerah dengan program, kegiatan, serta penganggaran daerah dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Serang Tahun 2027. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah disusun sebagai langkah strategis dalam rangka mengarahkan perencanaan tahunan agar selaras dengan visi dan misi serta arah kebijakan Kepala Daerah.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2027, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan berpedoman pada visi Kepala Daerah, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA”

Visi tersebut mengandung makna perwujudan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi dimana masyarakat menikmati kualitas hidup yang baik dan merasakan kesejahteraan secara menyeluruh, baik secara fisik, sosial maupun emosional yang mencakup aspek sosial, kesehatan, lingkungan dan rasa keadilan. **“Kabupaten Serang Bahagia”** akan dapat diwujudkan dengan tingkat kesejahteraan yang menyeluruh mencakup sejahtera secara finansial, mental, kesehatan dan spiritual, serta menciptakan lingkungan yang nyaman sebagai Kabupaten Hunian, Kreatif, Pendidikan, dan Industri yang harmonis dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan daerah yaitu:

- (1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat Nilai-nilai Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan;
- (2) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
- (3) Mewujudkan Kabupaten Serang yang Produktif dengan menciptakan Iklim Investasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Potensi Lokal dan berwawasan Lingkungan;

- (4)Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor Swasembada Pangan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan;
- (5)Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima;
- (6)Mewujudkan Kemajuan Hidup yang Selaras dan Harmonis dengan Nilai-nilai Religius dan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Serang.

Berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Keterangan
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	T1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Manusia	75,60	
		S1.1.1: Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Skor Kemampuan Literasi SD	59,46	Urusan Pendidikan
			Skor Kemampuan Numerasi SD	55,6	
			Skor Kemampuan Literasi SMP	64,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMP	61,13	
			Harapan Lama Sekolah	13,84	
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,31	
		S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	75,37	Urusan Kesehatan
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	97	
		S1.1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan	Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	≥95%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	79,50	
			Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	70%	
		S1.1.4: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,52	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		S1.1.5: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	57,61	Urusan Kependudukan dan Olahraga
			Indeks Partisipasi Olahraga	0,259	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Keterangan
		S1.1.6: Meningkatkan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	62,87	Urusan Perpustakaan
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	77,68	
			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	75	
	T1.2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan		Tingkat Kemiskinan	3,40-4,00	
		S1.2.1: Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,67	Urusan Sosial
		S1.2.2: Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,10	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,492	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,47	
		S1.2.3: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	9,78	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	20,75	
			Persentase unit rumah di dalam perumahan yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	66,16	
	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	T2.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,75-6,75	
		S2.1.1: Meningkatnya	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	68,25	Urusan Pekerjaan Umum dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Keterangan
		akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	(IKLI)		Penataan Ruang
		S2.1.2: Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	44,60	Urusan Perhubungan
		S2.1.3: Meningkatkan kontribusi KUMKM dalam perekonomian	Persentase Koperasi Sehat	22.04	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Rasio Kewirausahaan	1	
			Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	52	
			Pertumbuhan Wirausaha	3	
			Proporsi UMKM yang menjalin kemitraan	1	
		S2.1.4: Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	47,2-47,5	Urusan Perindustrian
		S2.1.5: Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,20%	Urusan Perdagangan
		S2.1.6: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	2,47	Urusan Pariwisata
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.1: Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal		Tingkat Pengangguran Terbuka	8,85-9	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23,75	
		S3.1.1: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	86,57	Urusan Tenaga Kerja
		S3.1.2: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	92,11	Urusan Penanaman Modal
	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan		Gini Ratio	0.254-0.262	
		S3.2.1: Meningkatnya pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	68.04	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,09	Urusan Lingkungan Hidup
		S3.2.3:	Indeks	69	Urusan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Keterangan
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Penyelenggaraan Trantibumlinmas		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB	7.72	
		S4.1.1: Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi hasil pertanian		Urusan Pertanian
			1. Tanaman Pangan	0,27	
			2. Hortikultura	5	
			3. Perkebunan	5	
			4. Peternakan	1	
		S4.1.2: Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82.51	Urusan Pangan
		S4.1.3: Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	65.439,20	Urusan Kelautan dan Perikanan
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	T5.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	78,8	
		S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Urusan Komunikasi dan Informatika
			Indeks Pemerintahan Digital	1,1	Urusan Komunikasi dan Informatika
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	88,90	Urusan Komunikasi dan Informatika
		S5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik	4,4	Unsur Sekretariat Daerah
			Nilai SAKIP Pemda	78,50	Unsur Sekretariat Daerah
		S5.1.3: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.35	Unsur Pengawasan
		S5.1.4: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	96.25	Unsur Perencanaan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Keterangan
		S5.1.5: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	Unsur Keuangan
			Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	30,62	Unsur Keuangan
		S5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	84,64	Unsur Kepegawaian
		S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,69	Urusan Statistik
		S5.1.8: Meningkatkan keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (indeks KAMI)	697	Urusan Persandian
		S5.1.9: Meningkatkan tata Kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	68	Urusan Kearsipan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5	
		S5.1.10: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	83	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		S5.1.11: Meningkatkan tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	72,2	Kewilayahan
		S5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	72,5	Urusan Pertanahan
		S5.1.13: Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase hasil riset, invensi dan inovasi yang dimanfaatkan	67	Unsur Penelitian dan Pengembangan
		S5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	Unsur Sekretariat DPRD
Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	T6.1: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Capaian Aksi HAM	87	
		S6.1.1: Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam	Indeks Kerukunan Umat Beragama	81,4	Unsur Pemerintahan Umum

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Keterangan
		kehidupan bermasyarakat			
		S6.1.2: Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan	Tingkat Warisan Seni, Budaya dan tradisi yang dilestarikan	45,45%	Urusan Kebudayaan

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

4.1.1 Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2027

4.1.1.1 Hasil Kesepakatan Desk ProSN/Tematik

Tabel 4. 2 Hasil Kesepakatan Rakortekbang Desk ProSN/Tematik

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	DIGITALISASI PEMBELAJARAN									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran								
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	200	200	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	100	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	2343	2343	
2.	EKONOMI SYARIAH									
			4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	6	6	
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Pelaku Usaha	10	10	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	1	1	
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Unit Usaha	143	143	
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1200	1200	
3.	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN									
	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)								
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	25	25	
4.	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)									
	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	925145	925145	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	2	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	1	
5.	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH									
	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih								
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	8	8	
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	4	4	
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	80	80	
6.	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH									
	Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih								
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	10	10	
7.	MAKAN BERGIZI GRATIS									
	Perluasan Akses Pendidikan	Makan Bergizi Gratis								

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	1	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	2244	2244	
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	10	10	
8	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)									
	Ketahanan Pangan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)								
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	2500	2500	
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	1	1	
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	unit	1	1	
9	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM									
	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1200	1200	
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	72901	72901	
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1200	1200	
10	PANGAN AKUATIK									
	Ketahanan Pangan	Pangan Akuatik								
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	4	4	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	1	
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	8	8	
11	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA									
	Kesehatan untuk Semua	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	1	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	269	269	
12	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH									
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah								
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	1	1	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	140	140	
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1	1	
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	40	40	
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	1	1	
13	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS									
	Kesehatan untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	2	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Laporan	1	1	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	1	1	

[illegible]

[illegible]

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang	20	20	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	2343	2343	
			2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	30	30	
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Lembaga	29	29	
18	PENGENDALIAN INFLASI									
	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	1	1	
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	12	
19	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)									
	Kesehatan untuk Semua	Penuntasan TBC								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	24327	24327	
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	72901	72901	
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	1	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	5006	5006	
20	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah								
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	
21	PERLINDUNGAN ANAK									
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	Orang	290	290	
			5.01 PERENCANAAN	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	2	
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	2	
22	SEKOLAH RAKYAT									
	Pengentasan Kemiskinan	Sekolah Rakyat								

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	925145	925145	
			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	40	40	

Sumber : Hasil Rakortekbang Provinsi Banten, Tahun 2026

4.1.1.2 Hasil Kesepakatan Desk Urusan Pemerintahan

Tabel 4. 3 Hasil Kesepakatan Desk Urusan Pemerintahan

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
1.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal									
					2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha ; serta Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	100	100	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
							2.18.05.2.01. 0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	50	50	
2.	3.30	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERDAGAN GAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangk an industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global									
					3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
							3.30.04.2.02. 0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	12	
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGA N EKSPOR							

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	10	10	
3.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional									
					3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
							3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	10	10	
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
							3.31.03.2.01. 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	20	20	
							3.31.03.2.01. 0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala	Dokumen	20	20	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
									usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				
4.	1.03	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembang- kan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang									
					1.03.12	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG							

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
							1.03.12.2.01. 0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	
							1.03.12.2.04. 0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	9	9	
				Penyelenggara an Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan									
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
							1.03.03.2.01. 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2	2	
					1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH							
							1.03.05.2.01. 0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	9	9	
							1.03.05.2.01. 0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air	Dokumen	2	2	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
			energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Meningkatnya ketahanan pangan									
					2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
							2.09.03.2.01. 0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	10	10	
							2.09.03.2.01. 0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	1	1	
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
							2.09.04.2.02. 0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	
							2.09.04.2.02. 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	4	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
7.	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan									
					3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
							3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
							3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	5	21	
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	5	10	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
8.	3.27	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Meningkatnya Produksi Pertanian									
					3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN							
							3.27.02.2.01. 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	1	
							3.27.02.2.01. 0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	3.75	3.75	
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN							
							3.27.03.2.01. 0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan	Dokumen	1	1	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Lingkungan Hidup Berkualitas									
					2.11.03	PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
							2.11.03.2.01. 0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	14	14	
							2.11.03.2.01. 0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	1	1	
					2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN							

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
						PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
							2.11.06.2.01. 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	75	40	
							2.11.06.2.01. 0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	70	70	
11.	1.04	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.										
				Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan									
					1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
							1.04.03.2.03. 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	1	2	
							1.04.03.2.03. 0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	1	2	
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
							1.04.05.2.01. 0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	1	1	
							1.04.05.2.01. 0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	1	1	
12.	3.32	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG TRANSMIGR ASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan.										
				Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor									
					3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
							3.32.03.2.01. 0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	30	30	
							3.32.03.2.01. 0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	4	4	
13.	1.06	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.										
				Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial									
					1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAA N SOSIAL							

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
			pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan									
					2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
							2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	80	80	
					2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
							2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	50	50	
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	30	1000	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
15.	2.13	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDA YAAAN MASYARAKA T DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasa n kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa									
					2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							
							2.13.03.2.01. 0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	1	
					2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH N DESA							
							2.13.04.2.01. 0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan	Orang	200	200	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
									Peningkatan Kapasitas				
16.	2.20	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .										
				Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggara an Sistem Statistik Nasional (SSN)									
					2.20.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL							
							2.20.02.2.01. 0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	95	95	
							2.20.02.2.01. 0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	%	97	97	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4
17.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).										
				Terakselerasi transformasi pemerintah digital di daerah									
					2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
							2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Dise minasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Orang	960000	960000	
							2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	Dokumen	2	2	
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
							2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet	Titik	53	73	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
			yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional									
					8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
							8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Orang	1000	1000	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
								Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan				
							8.01.03.2.01. 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Orang	50	50	
					8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
							8.01.06.2.01. 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	Orang	120	120	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
			mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional									
					3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
							3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	5	5	
							3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	4	8	
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
							3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
							3.26.04.2.02. 0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	1	1	
21	2.22	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA N	Melanjutkan pengembanga n infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaa n, mengembangk an industri kreatif serta mengembangk an agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)									
					2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN							

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
							2.22.02.2.01. 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	100	100	
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
							2.22.05.2.01. 0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Objek	5	5	
							2.22.05.2.02. 0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	1	1	
22	1.01	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PENDIDIKA N	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan									
					1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
			pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Kesehatan Untuk Semua									
					1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
							1.02.02.2.01. 0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	2	
							1.02.02.2.01. 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	1	1	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
				eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya									
					2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGA N PEREMPUAN							
							2.08.03.2.02. 0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	60	60	
							2.08.03.2.03. 0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	1	1	
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGA N KHUSUS ANAK							
							2.08.07.2.02. 0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	Orang	120	120	
							2.08.07.2.03. 0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga	Lembaga	2	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
								Kewenangan Kab/Kota	pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi				
25	2.12	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital									
					2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
							2.12.02.2.03. 0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
			generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangsa Kencana yang Berkualitas									
					2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
							2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kegiatan	1	1	
							2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2	2	
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
							2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga	Laporan / Dokumen	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
									Sejahtera (Satyagatra)				
							2.14.04.2.02. 0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	1	
27	2.19	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga									
					2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
							2.19.02.2.01. 0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	80	80	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
							2.19.02.2.02. 0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi	1	1	
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N							
							2.19.03.2.03. 0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	15	240	
							2.19.03.2.03. 0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	Orang	480	480	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
28	2.23	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERPUSTAK AAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat									
					2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAA N							
							2.23.02.2.01. 0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan	Perpustak aan	10	10	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
			alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
					1.05.03	PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA							
							1.05.03.2.01. 0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	300	300	
							1.05.03.2.02. 0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/ Kota yang tertangani	Kegiatan	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
							1.05.03.2.02. 0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	250	250	
							1.05.03.2.02. 0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan- strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	2	2	
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
					1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM							

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)4)
			peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa									
					2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
							2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	58	58	
							2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	137	137	

Sumber : Hasil Rakortekbang Provinsi Banten, Tahun 2026

4.2 Tema dan Fokus Pembangunan

Dalam menuju visi “Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”, Pembangunan Kabupaten Serang tahun 2027 diarahkan agar adanya peningkatan SDM dan perekonomian, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta infrastruktru yang berkelanjutan. Maka dari itu, Kabupaten Serang mengambil tema pembangunan Kabupaten Serang tahun 2027 yang termuat dalam RKPD tahun 2027 yaitu “Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung Pelayanan Publik yang berkualitas dan Infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup.”

Penjabaran dalam tema tersebut, dijabarkan ke dalam beberapa fokus pembangunan Kabupaten Serang tahun 2027 yang diarahkan untuk mencapai setiap Misi pembangunan Kabupaten Serang pada tahun tersebut, sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan Kabupaten Serang dalam mencapai “Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan”, antara lain:
 - a. Perluasan akses pendidikan, pengembangan model pembelajaran dan penguatan literasi serta penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah;
 - b. Pembangunan atau peningkatan kualitas fasilitas kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pengembangan program intervensi spesifik dan sensitive untuk pencegahan stunting;
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan fasilitas untuk peningkatan kapasitas pelayanan, peningkatan kualitas layanan;
 - d. Penguatan perekonomian keluarga melalui pengembangan program ekonomi keluarga, sinkronisasi program;
 - e. Pembangunan fasilitas olahraga baru untuk meningkatkan akses dan kualitas olahraga, Peningkatan kualitas pelatihan olahraga untuk meningkatkan prestasi, Pengembangan program-program kepemudaan untuk meningkatkan peran pemuda dalam

- pembangunan daerah;
- f. Pembangunan perpustakaan digital untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas;
 - g. Pengembangan koleksi digital untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan bacaan;
 - h. Peningkatan literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. Peningkatan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial melalui program-program rehabilitasi;
 - j. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial untuk meningkatkan efektivitas layanan;
 - k. Peningkatan Akses Layanan: Peningkatan akses layanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan;
 - l. Peningkatan Akses Kesehatan: Peningkatan akses kesehatan bagi perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup;
 - m. Pengembangan Program Pemberdayaan: Pengembangan program-program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi dalam pembangunan;
 - n. Peningkatan Perlindungan: Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi melalui program-program pencegahan dan penanganan;
 - o. Penyediaan Hunian Layak: Penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program-program perumahan subsidi;
 - p. Penataan Kawasan Permukiman: Penataan kawasan permukiman kumuh untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian dan mengurangi kemiskinan;
 - q. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman melalui program-program pemberdayaan;
2. Fokus pembangunan Kabupaten Serang dalam mencapai "Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan

ekonomi dan daya saing daerah”, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas jalan penghubung utama, pengembangan sistem irigasi kabupaten untuk mendukung ketersediaan air baku, serta pembangunan jaringan SPAM di pusat pertumbuhan;
 - b. Pembangunan satu kantor Perangkat Daerah dan penataan kawasan Pusat Pemerintahan;
 - c. Peningkatan kualitas armada transportasi umum, penyediaan halte/terminal yang lebih representatif, serta pengembangan infrastruktur keselamatan jalan di jalur utama;
 - d. Penguatan branding, kemasan, dan sertifikasi produk UMKM, serta fasilitasi promosi dan pemasaran lokal;
 - e. Pengembangan hilirisasi produk, sertifikasi mutu, serta penguatan fasilitas pendukung industri pengolahan berbasis lokal;
 - f. Penguatan jejaring kerjasama perdagangan antar daerah dan antar pelaku usaha lokal dengan fasilitasi pemerintah, serta penyediaan sistem perlindungan konsumen yang lebih baik;
 - g. Peningkatan mutu daya tarik wisata alam maupun buatan, diversifikasi produk wisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan promosi regional berbasis platform digital;
3. Fokus pembangunan Kabupaten Serang dalam mencapai “Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan”, antara lain:
- a. Penguatan link and match pendidikan kejuruan dan industri, peningkatan pelatihan lanjutan berbasis teknologi, serta pengembangan awal bursa tenaga kerja daerah;
 - b. Pengembangan inovasi layanan perizinan terpadu, fasilitasi investasi prioritas daerah, serta promosi investasi secara regional dan nasional;
 - c. Pengembangan usaha bersama berbasis potensi lokal, fasilitasi akses permodalan, dan pembentukan kelembagaan ekonomi desa;
 - d. Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu, pembinaan rutin terhadap pelaku usaha/industri, serta fasilitasi program lingkungan

- berbasis masyarakat di desa/kelurahan;
- e. Pelatihan dasar kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kebakaran, peningkatan kompetensi awal SDM kebencanaan, serta penyediaan sarana-prasarana mitigasi darurat di kawasan prioritas;
4. Fokus pembangunan Kabupaten Serang dalam mencapai "Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan", antara lain:
- a. Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan petani, pengembangan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan, serta keterlibatan generasi muda dalam usaha tani modern;
 - b. Peningkatan kapasitas dan modernisasi sarana penyimpanan (cold storage, silo, gudang), serta pendampingan petani untuk menghasilkan komoditas pangan yang beragam dan berkualitas;
 - c. Pengembangan jaringan distribusi & logistik hasil perikanan antar wilayah; fasilitasi kemitraan dengan industri pengolahan & eksportir; peningkatan kapasitas kelompok nelayan/petani ikan dalam manajemen usaha;
5. Fokus pembangunan Kabupaten Serang dalam mencapai "Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima", antara lain:
- a. Integrasi antar-aplikasi layanan publik menjadi satu platform terpusat, penguatan infrastruktur jaringan internet di seluruh kecamatan, dan peningkatan kapasitas SDM aparatur serta masyarakat pengguna layanan digital;
 - b. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang transparan, serta pengembangan model bisnis BUMD berbasis potensi lokal;
 - c. Integrasi sistem pengawasan dengan teknologi informasi, penguatan unit pengawasan internal di setiap OPD, serta peningkatan maturitas SPIP menuju level menengah;
 - d. Penguatan kemitraan dengan lembaga akademis, riset, dan komunitas

praktisi untuk mendukung kualitas produk perencanaan, serta implementasi awal sistem monitoring dan evaluasi pembangunan terintegrasi;

- e. Implementasi sistem informasi keuangan daerah terintegrasi dengan aset, peningkatan transparansi laporan keuangan, serta penataan lanjutan BMD melalui sertifikasi, validasi, dan penertiban administrasi;
- f. Penguatan mekanisme penempatan ASN sesuai keahlian dan kompetensi, pengembangan sistem karier berbasis kinerja, serta penguatan budaya kerja profesional, adaptif, dan berintegritas;
- g. Pengembangan ekosistem data dengan integrasi lintas OPD, penyempurnaan sistem aplikasi pengelolaan data, serta pembinaan rutin SDM statistik untuk memastikan kualitas data sesuai standar;
- h. Pengembangan pusat data daerah dengan sistem backup dan recovery, integrasi perangkat keamanan ke seluruh OPD, serta penyusunan SOP pengelolaan insiden siber;
- i. Implementasi sistem pengelolaan arsip digital tahap awal dengan pilot project di OPD tertentu, serta pembinaan SDM arsiparis untuk mendukung transformasi digital;
- j. Perluasan layanan berbasis digital hingga ke desa/kelurahan, integrasi awal dengan sistem arsip daerah berbasis elektronik, serta peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan data kependudukan digital;
- k. Perluasan layanan publik digital ke berbagai jenis layanan administrasi kecamatan;
- l. Penguatan kapasitas SDM dalam pelayanan prima berbasis teknologi; peningkatan keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat desa/kelurahan;
- m. Perluasan program bimbingan teknis aparatur bidang pertanahan dengan standar nasional;
- n. Penguatan koordinasi dengan lembaga terkait (ATR/BPN, pemerintah desa/kelurahan);
- o. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum pertanahan;

- p. Implementasi awal kebijakan pengembangan potensi unggulan daerah berbasis hasil riset;
 - q. Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui inkubasi dan pendampingan inovasi lokal;
 - r. Perluasan jejaring riset daerah;
 - s. Optimalisasi layanan pendukung melalui integrasi sistem informasi DPRD dengan sistem pemerintahan daerah;
 - t. Penguatan SDM sekretariat DPRD melalui pelatihan teknis;
 - u. Peningkatan kualitas layanan dokumentasi, publikasi, dan arsip DPRD.
6. Fokus pembangunan Kabupaten Serang dalam mencapai "Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang", antara lain:
- a. Peningkatan intensitas dialog publik, diskusi tematik, dan forum masyarakat mengenai penerapan nilai demokrasi dan HAM;
 - b. Perluasan jejaring kemitraan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi kepemudaan; pembentukan kader masyarakat peduli nilai kebangsaan;
 - c. Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya daerah; penguatan kapasitas pelaku budaya dan komunitas seni;
 - d. Penyelenggaraan festival budaya tahunan sebagai wadah promosi dan regenerasi pelestarian budaya;

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah

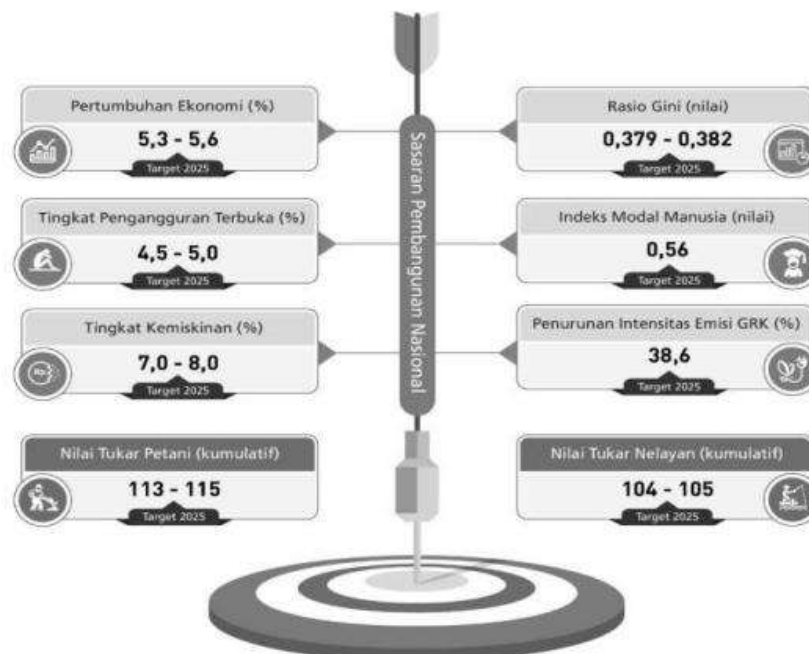
Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serang tahun 2027 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, dan RKPD Banten Tahun 2027, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah.

4.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2027 disusun sebagai perkuatan fondasi transformasi. Dalam RPJPN Tahap I yaitu Periode Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027 berkedudukan sangat strategis, karena memuat perkuatan fondasi untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Dengan tema "Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif".

Sasaran pembangunan nasional tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi GRK. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2027 ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4. 1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027



Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2027, ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional sebagai misi pembangunan yang disebut asta cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Adapun arah kebijakan dari Prioritas Nasional tahun 2027 dijelaskan sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkuat ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia dengan sasaran meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia yang ditargetkan sebesar 81,69- 85,23 pada tahun 2025. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkuat ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui:

1. penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;
2. pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan
3. pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan

4. internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu

- (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
- (2) menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas;
- (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum;
- (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan;
- (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif. Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui
- (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik;
- (7) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta
- (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut

- (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku;
- (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya;
- (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya; serta
- (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Prioritas Nasional 2 difokuskan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui

- (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI,
- (2) memperkuat komponen cadangan,
- (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara,
- (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber,
- (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI,
- (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar,
- (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme
- (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta
- (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

Selanjutnya arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi

- 1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri,
- 3) pembentukan ekosistem industri pertahanan,
- 4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest, dan

5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi

- (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme,
- (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara,
- (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia,
- (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme,
- (5) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar,
- (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.

Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Nasional 2 telah disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 2. Highlight intervensi kegiatan yang berada di wilayah Banten dan seluruh provinsi adalah sebagai berikut:

- Penguatan kapabilitas pertahanan termasuk CBRNE, penyempurnaan doktrin, penguatan postur, dan penguatan operasi lintas medan;
- Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest;
- Penguatan intelijen dan kontra intelijen;
- Pengawasan dan pemeliharaan keamanan laut di ALKI dan choke point;
- Operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis;
- Pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme;
- Diplomasi kedaulatan;
- Kontribusi penjagaan stabilitas dan global ;
- Penguatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia;
- Penguatan postur kelembagaan diplomasi;
- Ekstensifikasi dan intensifikasi tata kelola kerjasama pembangunan internasional;
- Promosi aset soft power Indonesia di dunia internasional dan kerja sama

sosial-budaya

- Penguatan jejaring diplomasi publik dan kemitraan diaspora Indonesia di luar negeri;
- Pengembangan pangan akuatik, hewani dan nabati;
- Penguatan cadangan pangan, penjaminan mutu dan keamanan pangan serta penguatan satu data pangan;
- Peningkatan produktivitas hutan
- Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
- Penguatan pengelolaan hutan lestari
- Pemulihan ekosistem yang terdegradasi
- Pemulihan luas lahan mangrove
- Penyediaan pasokan air berkelanjutan
- Rehabilitasi hutan dan lahan
- Pemulihan ekosistem danau dan mata air
- Penyediaan data dan informasi DAS
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS
- Peningkatan pengelolaan kualitas udara di kab/kota di Indonesia
- Peningkatan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa
- Peningkatan kualitas lahan
- Penurunan laju deforestasi
- Peningkatan kualitas ekosistem gambut
- Pengelolaan B3 dan limbah B3
- Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan
- Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang
- Peningkatan sarana, prasarana, dan kelembagaan dalam rangka penegakan hukum lingkungan di pusat dan daerah serta pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang
- Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
- Pengamanan dan pengawasan kualitas air minum
- Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan air minum
- Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan air minum

- Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim
- Penguatan tata kelola penyelenggaraan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan iklim
- Penyusunan dan penerapan pengaturan untuk mendukung penyelenggaraan sanitasi aman dan berkelanjutan
- Pengembangan ekosistem berbasis inovasi penyelenggaraan sanitasi
- Penguatan peran masyarakat dalam penyediaan dan penyelenggaraan sanitasi yang aman
- Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air
- Penyediaan pasokan air berkelanjutan
- Pengelolaan risiko daya rusak air
- Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air
- Peningkatan penyediaan dan layanan BBM
- Peningkatan penyediaan dan layanan gas bumi Peningkatan cadangan dan produktivitas energi
- Peningkatan investasi dan pembiayaan transisi energi
- Penyiapan regulasi energi baru
- Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK
- Penguatan SDM digital
- Digitalisasi sektor ekonomi
- Digitalisasi sektor strategis
- Riset dalam rangka penguasaan teknologi
- Peningkatan keamanan dan kondusifitas ruang digital
- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di pemerintahan (AI, blockchain,metaverse)
- Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Penguatan industri halal
- Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional
- Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah (UMKM) halal
- Penguatan keuangan syariah
- Penguatan dana sosial syariah
- Peningkatan kapasitas terpasang PLT energi terbarukan
- Peningkatan infrastruktur transmisi listrik
- Pengembangan transportasi hijau
- Perluasan implementasi teknologi bersih

- Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi (terutama daratan)
- Pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional
- Penerapan efisiensi sumber daya
- Pengembangan produk ramah lingkungan
- Penerapan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material
- Penguatan ekosistem daur ulang
- Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer
- Efisiensi energi
- Peningkatan transportasi berkelanjutan
- Peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan
- Peningkatan pencegahan pengurangan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan.
- Peningkatan implementasi praktik pertanian yang rendah karbon.
- Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru
- Pengembangan industri hijau
- Peningkatan pengelolaan limbah dan ekonomi Sirkular
- Penyediaan, optimalisasi, rehabilitasi, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pengawasan infrastruktur persampahan, termasuk konservasi tempat pemrosesan akhir dan landfill mining
- Penyadartahuan dan pemicuan perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah, terutama peningkatan permintaan, partisipasi, serta kemauan untuk membayar retribusi.
- Penguatan landasan regulasi, pedoman penyelenggaraan, dan implementasinya dalam sektor persampahan
- Reformasi tata kelola persampahan, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas perencanaan serta pemisahan regulator, operator, dan pengawas serta penegakan hukum;
- Penegakan hukum dan penyediaan skema insentif dan disinsentif berbasis kinerja dalam pengelolaan sampah
- Penerapan ekonomi sirkuler pada persampahan untuk mendorong reformasi value chain sampah, termasuk melalui pelibatan sektor informal dan integrasi dengan pengelolaan sampah spesifik
- Penanganan sampah melalui pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle serta

fasilitas pengolahan lainnya (Kota Cilegon)

- Pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau
- Pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau
- Penguatan peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau dan tenaga kerja hijau
- Pemulihan ekosistem yang terdegradasi
- Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem
- Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati
- Pengendalian spesies asing invasif
- Penguatan data, informasi, dan IPTEK keanekaragaman hayati
- Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar dilakukan secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan
- Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan
- Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru
- Peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik Pengembangan pengelolaan keamanan hayati (biosafety)
- Pemulihan luas lahan mangrove
- Penurunan laju deforestasi
- Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan
- Peningkatan produktivitas hasil hutan
- Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
- Penguatan pengelolaan hutan lestari
- Penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari
- Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
- Prioritas Nasional 3 difokuskan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Nasional 3 telah disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 3. Highlight intervensi

kegiatan yang berada di wilayah Banten dan seluruh provinsi adalah sebagai berikut:

- Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas
- Integrasi layanan usaha
- Pengembangan dan pemeliharaan basis data tunggal koperasi dan UMKM
- Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan
- Formalisasi usaha serta standarisasi dan sertifikasi produk
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis koperasi
- ▪ Pengembangan koperasi sektor produksi skala besar
- Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif
- Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts
- Penguatan ekosistem seni, budaya, kerajinan
- Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim
- Penguatan ekosistem kuliner
- Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
- Peningkatan kapasitas sisi pasokan industri digital
- Digitalisasi sektor ekonomi
- Digitalisasi sektor strategis
- Pembangunan kelapa dalam dan industri turunannya
- Perluasan akses dan inovasi pembiayaan
- Penguatan peran perbankan
- Penguatan peran sektor keuangan non bank
- Peningkatan inklusi dan literasi keuangan

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Prioritas Nasional 3 menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Pengembangan Infrastruktur:

- Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
- Pengembangan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Pengembangan kperasi sektor produksi
- Percepatan pembangunan destinasi pariwisata
- Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Prioritas Nasional 4 difokuskan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Nasional 4 telah disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 4. Highlight intervensi kegiatan yang berada di wilayah Banten dan seluruh provinsi adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dengan melakukan penguatan layanan 1 tahun pra sekolah (TK/RA/BA) dan percepatan wajib belajar 12 tahun yang berfokus pada jenjang pendidikan yang masih membutuhkan akselerasi pelaksanaan wajib belajar
- Penguatan pembelajaran berbasis teknologi digital
- Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, diantaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas
- Perluasan cakupan bantuan pendidikan prestasi dan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar sampai jenjang pendidikan tinggi, termasuk beasiswa atlet dan seniman
- Pengembangan budaya literasi dan peningkatan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
- Pemenuhan layanan pendidikan pesantren yang berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya

- Penguatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis industri dan keunggulan wilayah
- Peningkatan keahlian tenaga kerja
- Mobilitas dan perlindungan tenaga kerja
- Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter peserta didik
- Penataan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi dan program studi untuk peningkatan kualitas dan penguatan bidang STEAM
- Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing
- Pengembangan Manajemen Talenta Nasional di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga
- Penurunan kematian ibu dan bayi
- Penurunan stunting
- Pengendalian penyakit tuberkulosis
- Eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta & schistosomiasis)
- Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa
- Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga
- Investasi pelayanan kesehatan primer
- Penguatan layanan unggulan dan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah sulit akses
- Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendanaan kesehatan
- Produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan
- Penyediaan layanan yang ramah anak dalam rangka pemenuhan hak anak secara universal
- Penguatan resiliensi dan peningkatan partisipasi anak secara bermakna
- Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan
- Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya
- Peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda
- Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak
- Penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga

- Penguatan keluarga tunggal, pasca perceraian, dan pekerja migran untuk mengoptimalkan fungsi pengasuhan keluarga
- Pemenuhan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga dan afirmasi bagi keluarga rentan
- Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan
- Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
- Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di proses pembangunan
- Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
- Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SumberDaya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada

- (1) Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- (2) Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta
- (3) Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas yang berada di wilayah Provinsi Banten dijabarkan sebagai berikut.

- Hilirisasi industri sawit
- Hilirisasi industri karet
- Penguatan industri logam dasar
- Penguatan industri kimia dasar
- Pengembangan industri alat angkut (termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan)
- Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman

- Penguatan produktivitas industri tekstil, produk tekstil dan alas kaki
- Penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan
- Peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru
- Standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu

- (1) membangun desa dan membangun dari desa;
- (2) pemerataan ekonomi; serta
- (3) memberantas kemiskinan.

Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas dijabarkan sebagai berikut.

- Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan
- Transformasi dan pemberdayaan ekonomi perdesaan
- Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan perdesaan
- Penguatan tata kelola, keuangan, dan pendampingan desa adaptif
- Pembangunan kawasan perbatasan (pusat kegiatan strategis nasional dan kecamatan perbatasan prioritas)
- Transformasi pembangunan daerah lambat Tumbuh(42 kabupaten yang terindikasi daerah lambat tumbuh)
- Fasilitasi pembangunan rumah baru layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (250 kabupaten/kota di bawah capaian akses rumah layak huni nasional tahun 2023)
- Pembangunan rumah susun (milik dan sewa) di perkotaan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk generasi milenial dan generasi Z kawasan perkotaan prioritas
- Penanganan permukiman kumuh yang dilakukan secara terpadu kawasan permukiman kumuh prioritas
- Fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, terutama bagi

- pembelian rumah pertama, masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya (seluruh provinsi)
- Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat
 - Rehabilitasi sosial dan layanan pengasuhan bagi penerima manfaat dari kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, termasuk melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial, Permakanan, dan Layanan Lansia Terintegrasi
 - Memastikan lingkungan yang inklusif dan bebas hambatan untuk penyandang disabilitas, termasuk dalam mengakses informasi dan kesempatan kerja
 - Mendukung Basis Data Terpadu untuk pemberantasan kemiskinan melalui Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi
 - Penyediaan infrastruktur dan layanan angkutan umum massal
 - Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Prioritas Nasional dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara. Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas yang berada di wilayah Provinsi Banten dijabarkan sebagai berikut.

- Optimalisasi local taxing power
- Optimalisasi kualitas belanja TKD
- Pengendalian inflasi pangan bergejolak

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Pada tahun 2027 kebijakan Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas dijabarkan sebagai berikut.

- Peningkatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermasalah
- Peningkatan bimbingan keagamaan dan bimbingan perkawinan
- Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik
- Peningkatan kerukunan umat beragama
- Peningkatan peran lembaga agama dan keagamaan dalam layanan keagamaan
- Revitalisasi layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif
- Transformasi layanan penyelenggaraan ibadah haji ▪ Penjaminan produk halal
- Pengembangan dana sosial keagamaan untuk mendukung program pembangunan
- Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, serta pembinaan ideologi Pancasila
- Pengelolaan terpadu cagar budaya
- Pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal
- Pengembangan produk dan jasa berbasis seni budaya
- Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional
- Pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
- Perlindungan hutan adat dan tanah ulayat serta pemberdayaan masyarakat dan komunitas adat
- Pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional
- Pelestarian bahasa, sastra daerah
- Transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan
- Melaksanakan peningkatan peran lembaga dan kapasitas sumber daya

manusia bidang penanggulangan bencana

- Membangun sistem peringatan dini multi ancaman bahaya dan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana terpadu
- Memulihkan pelayanan dasar bidang fisik, sosial, dan ekonomi di daerah terdampak bencana
- Meningkatkan layanan literasi dan edukasi kebencanaan berbasis masyarakat, termasuk melalui desa tangguh bencana
- Melakukan peningkatan keandalan dan kebermanfaatan infrastruktur tahan bencana, termasuk penguatan perijinan bangunan gedung
- Melakukan pembangunan pusat logistik dan peralatan berbasis kewilayahan
- Menyediakan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana, pencarian dan pertolongan (SAR)
- Penetapan dan penyelenggaraan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (RAK LLAJ) secara komprehensif dan sinergis
- Peningkatan penanganan daerah rawan kecelakaan (DRK)
- Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi udara, laut, dan darat
- Meningkatkan ketahanan pesisir dan laut
- Meningkatkan pembangunan dan konservasi sumber daya air
- Mengembangkan pertanian ramah iklim
- Mencegah dan mengendalikan penyakit sensitif iklim
- Tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan berketahanan iklim.

4.3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2027

Perencanaan tahunan dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2027 disusun sebagai fondasi dalam memperkuat transisi estafet pembangunan antar RPJPD (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMD (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKPD Tahun 2027 berkedudukan sangat strategis. Untuk itu, *"Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global"* menjadi rancangan tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2027.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 di daerah, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Provinsi Banten tahun 2027, ditetapkan 5 (lima) prioritas daerah sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh;
- (2) Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial;
- (3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif;
- (4) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas;
- (5) Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana.

Adapun arah kebijakan dari Prioritas Daerah tahun 2027 dijelaskan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh.

Prioritas Daerah 1 berfokus Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial. Peningkatan pembangunan manusia diarahkan pada upaya:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, penyediaan sarana prasarana kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan pada pelayanan dasar kesehatan melalui pemanfaatan sistem pelayanan kesehatan berbasis digital serta dukungan terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang.
- 2) Pemenuhan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- 3) Pemenuhan kualitas SDM dan pengelolaan data dalam percepatan penurunan stunting.
- 4) Pemenuhan sarana, prasarana dan SDM dalam penemuan kasus dan pengelolaan data TBC secara digital.
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung keberhasilan pengobatan TBC melalui lintas program dan lintas sektor.
- 6) Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh masyarakat.
- 7) Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun melalui ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan diversifikasi layanan pendidikan.
- 8) Penguatan kurikulum dan tenaga kependidikan menengah umum dan kejuruan secara adaptif berbasis soft skill, karakter dan agama, digital dan teknologi informasi, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
- 9) Pemenuhan sarana dan prasarana menuju terpenuhinya 100 persen daya tampung bagi lulusan sekolah menengah pertama.
- 10) Peningkatan akses pendidikan menengah atas berkualitas serta peningkatan kualitas

dan kapasitas tenaga kependidikan yang mendorong daya saing dan kemampuan kerja melalui penguatan kompetensi dan keahlian baru.

- 11) Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan melalui penguatan manajemen dan kepemimpinan di lembaga pendidikan.
- 12) Penguatan lembaga pendidikan dan peningkatan kapasitas instruktur yang mendorong daya saing dan kemampuan kerja melalui peningkatan kompetensi, kualifikasi dan keahlian baru.
- 13) Penjaminan bantuan sosial terhadap pembiayaan pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal layak bagi masyarakat rentan.
- 14) Peningkatan kesadaran terhadap hak atas perlindungan sosial bagi masyarakat.
- 15) Pemenuhan hak atas perlindungan dan pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja di sektor formal bagi kelompok penyandang disabilitas.

2. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial

Prioritas Daerah 2 berfokus pada:

- 1) Pembangunan SDM, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi IKM, pemanfaatan KPI, pembangunan dan pengembangan KI, dan hilirisasi berbasis sumber daya alam.
- 2) Penguatan 6A (atraksi, amenitas, aksesibilitas, aktivitas, ancillary, dan available package), penciptaan pusat niaga lokal dan integrasi infrastruktur konektivitas pariwisata menuju destinasi wisata.
- 3) Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis Kearifan dan sumber daya lokal, peningkatan SDM pariwisata, pengembangan infrastruktur kebencanaan pada destinasi wisata.
- 4) Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, dan pembiayaan,
- 5) Peningkatan kualitas data dan sistem informasi klasifikasi usaha kecil dan menengah non pertanian.
- 6) Peningkatan kualitas industri kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi,
- 7) Penguatan budaya, iklim, dan karakter wirausaha sejak usia dini dan pada lembaga kependidikan, dan pembangunan pusat inkubasi bisnis.
- 8) Peningkatan kualitas data dan sistem informasi, dan kejelasan sasaran pembinaan koperasi berdasarkan standar klasifikasi,
- 9) Korporatisasi BUMD melalui penguatan penerapan asas-asas good governance,

- 10) Peningkatan keahlian angkatan kerja melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi link and match, teaching factory dan pemagangan yang berbasis kebutuhan, dual system, dan kewirausahaan,
- 11) Pengurangan praktek diskriminasi gender dan Penguatan kesadaran kesamaan hak dalam akses pekerjaan kepada masyarakat,
- 12) Peningkatan kualitas, percepatan fondasi dan arah kebijakan penataan kelembagaan dan regulasi pengembangan daya saing daerah dan inovasi daerah,
- 13) Peningkatan efisiensi dan pengurangan terhadap penggunaan sumber daya, perpanjangan daya guna produk dan material, peningkatan daur ulang, pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi, dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan,
- 14) Penerapan Konservasi dan Diversifikasi Energi,
- 15) Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- 16) Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan serta penciptaan ekosistem logistik yang efisien,
- 17) Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung iklim investasi, pengembangan skema pendanaan dan biaya inovatif serta penguatan pelaksanaan badan usaha milik daerah melalui tata kelola dan proses bisnis yang efektif,
- 18) Peningkatan infrastruktur Distribusi Rantai pasok,
- 19) Kolaborasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan investasi guna meningkatkan iklim investasi, mendorong ekonomi domestik dan kepastian berusaha, serta terciptanya integrasi konektivitas infrastruktur dengan barang dan jasa secara inklusif,
- 20) Peningkatan hunian layak berbasis green and smart infrastructure and resilience,
- 21) Penguatan kapasitas desa, kerjasama antar desa lintas kabupaten, penyediaan sarana dan prasarana, kelembagaan, dan regulasi desa serta harmonisasi dan koordinasi kelembagaan desa. Percepatan peningkatan pembangunan perdesaan diarahkan pada pembangunan ekonomi desa, pembangunan sosial masyarakat pedesaan, dan peningkatan daya dukung lingkungan di pedesaan. Peningkatan daya saing infrastruktur melalui peningkatan kualitas infrastruktur kelistrikan, kualitas jalan, dan peningkatan keamanan berkendara dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman diarahkan untuk meningkatkan akses infrastruktur persampahan, akses infrastruktur dasar permukiman dan meningkatkan tata kelola pertanahan yang tertib.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif

Prioritas Daerah 3 berfokus pada upaya:

- 1) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi beserta kompetensi perancang produk hukum daerah,
- 2) Penguatan proses bisnis, regulasi dan kelembagaan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung dengan kompetensi SDM yang terampil tinggi dalam pemanfaatan teknologi informasi,
- 3) Peningkatan kapasitas aparaturnya pengawas internal pemerintah daerah.

4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas

Prioritas Daerah 4 berfokus pada upaya:

- 1) meningkatkan penegakan peraturan daerah dan tertib hukum,
- 2) Peningkatan Rumusan Kebijakan Terkait Trantibumlinmas,
- 3) Harmonisasi Kelembagaan Demokrasi,
- 4) Penguatan Kebijakan, inovasi, dan digitalisasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif,
- 5) Penguatan Kebijakan peran lembaga yang terkait dengan stabilitas harga,
- 6) Penguatan peran Pemerintah Provinsi Banten dalam mengoordinasikan berbagai stakeholder Dana Pihak Ketiga,
- 7) Peningkatan literasi dana pensiun,
- 8) Peningkatan literasi pasar saham,
- 9) Peningkatan literasi kredit,
- 10) Penguatan profil keuangan masyarakat,
- 11) Penguatan koordinasi antar stakeholder dalam rangka perencanaan kerjasama sister province dan peninjauan kerjasama,
- 12) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Ekonomi.

5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana

Prioritas Daerah 5 berfokus pada :

- 1) Penguatan regulasi, perlindungan, pengembangan dan pelestarian warisan kebudayaan, cagar budaya dan permuseuman yang tersertifikasi serta peningkatan sertifikasi kompetensi pelaku kebudayaan,
- 2) Peningkatan kerukunan dan harmoni antar umat beragama melalui penguatan moderasi beragama, pencegahan konflik agama serta pengembangan dan

pendidikan karakter setiap generasi khususnya generasi muda untuk memiliki moral, etika dan berakhlakul karimah,

- 3) Pengendalian penduduk untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, peningkatan pemahaman dalam membangun keluarga dan peningkatan kapasitas serta keterampilan keluarga,
- 4) Internalisasi kesetaraan gender dalam pembangunan, pemenuhan hak dan perlindungan (anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia), peningkatan ketahanan keluarga melalui penguatan kebijakan ramah keluarga dan layanan dukungan keluarga serta pemberdayaan pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas,
- 5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kebijakan, inisiasi (tujuan dan rencana), identifikasi dan inventarisasi pengelolaan keanekaragaman dan perlindungan keanekaragaman sumber daya hayati,
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam hayati, perlindungan kawasan pencadangan konservasi laut, dan penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup,
- 7) Peningkatan advokasi, edukasi, sosialisasi penyehatan lingkungan melibatkan peran aktif masyarakat dan pemenuhan fasilitas infrastruktur akses sanitasi aman yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan sanitasi permukiman,
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah organik dan anorganik melalui penerapan kebijakan berbasis extended producer responsibility (EPR), jaringan pengangkutan sampah, kerja sama antar daerah dan kemitraan melalui penggunaan teknologi terkini dan kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir,
- 9) Peningkatan literasi dan paradigma masyarakat terhadap pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, serta pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomis untuk meningkatkan ekonomi sirkular masyarakat,
- 10) Penyediaan energi dan peningkatan pemanfaatan listrik bagi masyarakat melalui perluasan akses, kapasitas, dan jangkauan pelayanan infrastruktur energi (gas dan listrik), pengembangan prioritas energi terbarukan, serta penerapan upaya dekarbonisasi energi untuk mendukung ketahanan energi daerah dan nasional ,
- 11) Diversifikasi sumber energi, peningkatan ketahanan energi melalui riset, inovasi dan eksplorasi potensi dan cadangan energi, serta penguatan literasi publik dalam pemanfaatan energi secara efisien dan berkelanjutan,

- 12) Peningkatan sarana dan prasarana produksi, keanekaragaman pangan lokal dan kualitas pangan (bergizi cukup, beragam, seimbang, dan aman) melalui intensifikasi, penggunaan teknologi mutakhir dan menjamin kecukupan pangan melalui pendekatan terpadu FEW Nexus (Food, Energy, Water),
- 13) Konservasi SDA dalam rangka peningkatan ketersediaan air baku melalui, perbaikan dan pengelolaan kawasan resapan air, pengelolaan limbah yang terintegrasi, dan peningkatan kualitas sungai (DAS) dan mitigasi struktural dan non struktural,
- 14) Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum dan peningkatan akses layanan air siap minum dengan mekanisme kerjasama antar daerah, kemitraan serta penyediaan aturan kelembagaan dalam peningkatan penyelenggaraan SPAM,
- 15) Penguatan dan harmonisasi kebijakan penanggulangan risiko bencana yang sinergis pusat dan daerah, perencanaan tata ruang dan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan risiko bencana sesuai RTRW, penanggulangan bencana yang kolaboratif dan responsif melalui penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi mutakhir yang terintegrasi serta ditunjang dengan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim secara inklusif,
- 16) Peningkatan kapasitas masyarakat, kawasan strategis dan daerah dalam menghadapi risiko bencana dan krisis iklim melalui mitigasi dan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim.

4.3.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2027

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik cascading (penurunan) kinerja.

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disinkronkan dengan program nomenklatur sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Peningkatan layanan Gizi dan Ketersediaan *Cold Storage* ASI (Air Susu Ibu) untuk mencegah dan memberantas *stunting* (gizi buruk);
2. Optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) pada setiap desa dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;
3. Transparansi pengelolaan APBD dengan penerapan *e-planning*, *e-bugdeting*, *e-procurement* dan *e-reporting* untuk menjamin informasi dan kesempatan dapat diakses semua warga;

4. Meningkatkan insentif tenaga fungsional (Guru Madrasah dan Honorer, Tenaga Kesehatan, Kader Pos Yandu RT dan RW serta Perangkat Desa);
5. Membangun fasilitas olah raga, dan ruang publik terpadu untuk masyarakat Kabupaten Serang;
6. Penyediaan internet gratis di ruang umum dan ruang publik;
7. Meningkatkan edukasi pengolahan sampah di tiap Kecamatan dan membangun sarana-prasarana pengolahan sampah, penambahan armada dan petugas kebersihan;
8. Memastikan pelaksanaan perda wajib belajar diniyah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;
9. Membangun pusat oleh-oleh sebagai sentral pemberdayaan, pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Serang;
10. Membangun kanal pengaduan dan pelayanan masyarakat yang terintegrasi;
11. Pengembangan sektor pariwisata untuk mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Serang;
12. Meningkatkan prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan;
13. Meningkatkan beasiswa bagi anak-anak berprestasi, penghafal Qur'an, yatim piatu, dan tidak mampu;
14. Membangun pusat pelatihan ekonomi kreatif dan budaya di Kabupaten Serang;
15. Meningkatkan program air bersih untuk masyarakat Kabupaten Serang;
16. Membangun pariwisata halal dan destinasi religi yang terintegrasi.

Tabel 4. 4 Misi, Program Unggulan dan Program Prioritas Daerah

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	1. Peningkatan layanan Gizi dan Ketersediaan <i>Cold Storage</i> ASI (Air Susu Ibu) untuk mencegah dan memberantas <i>stunting</i> (gizi buruk);	1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik, Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, wajib belajar diniyah, Pelayanan Kesehatan dan penurunan stunting.
	2. Optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) pada setiap desa dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;	
	4. Meningkatkan insentif tenaga fungsional (Guru Madrasah dan Honorer, Tenaga Kesehatan, Kader Pos Yandu RT dan RW serta	

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	Perangkat Desa);	
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	5. Membangun fasilitas olah raga, dan ruang publik terpadu untuk masyarakat Kabupaten Serang;	2. Penataan Ruang Publik Terpadu dan Peningkatan Infrastruktur.
	6. Penyediaan internet gratis di ruang umum dan ruang publik;	
	7. Meningkatkan edukasi pengolahan sampah di tiap Kecamatan dan membangun sarana-prasarana pengolahan sampah, penambahan armada dan petugas kebersihan;	5. Peningkatan akses air layak minum, sanitasi, kawasan kumuh dan lingkungan hidup berkelanjutan.
	15. Meningkatkan program air bersih untuk masyarakat Kabupaten Serang;	
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	9. Membangun pusat oleh-oleh sebagai sentral pemberdayaan, pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Serang;	4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan, pariwisata, budaya dan kreatif.
	11. Pengembangan sektor pariwisata untuk mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Serang;	
	16. Membangun pariwisata halal dan destinasi religi yang terintegrasi.	
	14. Membangun pusat pelatihan ekonomi kreatif dan budaya di Kabupaten Serang;	6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	12. Meningkatkan prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan;	4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan, pariwisata, budaya dan kreatif.
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	3. Transparasi pengelolaan APBD dengan penerapan <i>e-planning, e-bugdeting, e-procurement</i> dan <i>e-reporting</i> untuk	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang handal.

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	menjamin informasi dan kesempatan dapat diakses semua warga;	
	10. Membangun kanal pengaduan dan pelayanan masyarakat yang terintegrasi;	
6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	8. Memastikan pelaksanaan perda wajib belajar diniyah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;	1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik, Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, wajib belajar diniyah, Pelayanan Kesehatan dan penurunan stunting.

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Selain itu, program prioritas pembangunan daerah juga harus diselaraskan dan mendukung program pendukung Asta Cita yang merupakan Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebagai Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah. Pemetaan asta cita Presiden yang termuat dalam prioritas nasional dijabarkan ke dalam Penyelenggaraan Urusan Pembangunan Daerah yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Pemetaan Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Nasional dalam Asta Cita Presiden

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1	Kesatuan Bangsa dan Politik
		2	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		3	Komunikasi dan Informatika
		4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5	Sekretariat Daerah
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1	Pangan
		2	Pertanian
		3	Kelautan dan Perikanan
		4	Energi dan Sumber Daya Mineral
		5	Lingkungan Hidup
		6	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8	Penelitian dan Pengembangan

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		9	Perindustrian
		10	Pariwisata
		11	Komunikasi dan Informatika
		12	Sekretariat Daerah
		13	Tenaga Kerja
		14	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		15	Kesehatan
		16	Perhubungan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Pertanahan
		3	Perhubungan
		4	Komunikasi dan Informatika
		5	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		6	Pariwisata
		7	Kebudayaan
		8	Perindustrian
		9	Perencanaan
		10	Persandian
		11	Penelitian dan Pengembangan
		12	Energi dan Sumber Daya Mineral
		13	Sekretariat Daerah
		14	Keuangan
		15	Perdagangan
		16	Kelautan dan Perikanan
		17	Lingkungan Hidup
		18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1	Pendidikan
		2	Perpustakaan
		3	Kesehatan
		4	Kepemudaan dan Olahraga
		5	Sosial
		6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		8	Tenaga Kerja
		9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		11	Sekretariat Daerah
		12	Perencanaan
		13	Transmigrasi
		14	Komunikasi dan Informatika

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		15	Statistika
		16	Sekretariat Daerah
		17	Penelitian dan Pengembangan
		18	Keuangan
		19	Kebudayaan
		20	Perhubungan
		21	Pendidikan dan Pelatihan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1	Perindustrian
		2	Penanaman Modal
		3	Perdagangan
		4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	Perhubungan
		6	Energi dan Sumber Daya Mineral
		7	Sekretariat Daerah
		8	Lingkungan Hidup
		9	Pertanahan
		10	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		12	Komunikasi dan Informatika
		13	Penelitian dan Pengembangan
		14	Tenaga Kerja
		15	Pendidikan
		16	Kelautan dan Perikanan
		17	Pangan
		18	Pertanian
		19	Pendidikan dan Pelatihan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2	Transmigrasi
		3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4	Perencanaan
		5	Sosial
		6	Komunikasi dan Informatika
		7	Persandian
		8	Statistika
		9	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		10	Tenaga Kerja
		11	Pertanian
		12	Lingkungan Hidup
		13	Pertanahan

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		14	Kelautan dan Perikanan
		15	Pariwisata
		16	Perindustrian
		17	Keuangan
		18	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		19	Perdagangan
		20	Perhubungan
		21	Pendidikan
		22	Kebudayaan
		23	Kesehatan
		24	Sekretariat Daerah
		25	Pendidikan dan Pelatihan
		26	Kehutanan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1	Statistik
		2	Arsip
		3	Persandian
		4	Sekretariat Daerah
		5	Sekretariat DPRD
		6	Perencanaan
		7	Keuangan
		8	Kepegawaian
		9	Pendidikan dan Pelatihan
		10	Penelitian dan Pengembangan
		11	Pengawasan
		12	Kesatuan Bangsa dan Politik
		13	Pertanian
		14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		15	Transmigrasi
		16	Pendidikan
		17	Kebudayaan
		18	Kesehatan
		19	Lingkungan Hidup
		20	Energi dan Sumber Daya Mineral
		21	Tenaga Kerja
		22	Komunikasi dan Informatika
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	1	Kehutanan
		2	Kesatuan Bangsa dan Politik
		3	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		4	Lingkungan Hidup
		5	Kebudayaan
		6	Sosial
		7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		8	Kesehatan
		9	Pendidikan
		10	Pendidikan dan Pelatihan
		11	Arsip
		12	Perhubungan
		13	Kelautan dan Perikanan
		14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		15	Energi dan Sumber Daya Mineral

Adapun dukungan program Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Nasional diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Program Perangkat Daerah dalam Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		3	Pengembangan Pangan Hewani	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		4	Pengembangan Pangan Lokal Dan Nabati	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		5	Fortifikasi Dan Biofortifikasi Pangan	Program Penyuluhan Pertanian
		6	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		7	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		8	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		9	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		10	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		11	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		12	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		13	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan
		14	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		2	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		3	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		4	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan
		2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan
		3	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		4	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan
		5	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.9. pelatihan, in-service training), perlindungan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
			hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	
		6	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Program Pengembangan Kurikulum
		7	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		8	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		9	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		10	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		11	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		12	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		13	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		14	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		15	Investasi pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		16	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		17	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		18	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
		19	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		20	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1	Pengembangan Hilirisasi Nikel	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		2	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		3	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		4	Pengembangan Hilirisasi Timah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		5	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		6	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		7	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		8	Pengembangan Industri Kimia	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		9	Pembangunan Industri Semi konduktor	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		10	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		11	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		2	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha produktif	Program Pemberdayaan Sosial
		3	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		4	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
		5	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Program Penataan Desa
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		2	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		4	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		5	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	1	Penguatan Karakter Dan Jati Diri Bangsa	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		2	Pemanfaatan Khazanah Budaya Dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		3	Peningkatan Ketahanan Lklm Pesisir Dan Laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam menuju visi "Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia", Pembangunan Kabupaten Serang tahun 2027, arah kebijakan pembangunan daerah dijabarkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam visi-mis RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 7 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia				
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	T1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan	S1.1.1: Meningkatnya intelegualitas dan karakter anak usia sekolah	Penguatan dan peningkatan akses serta mutu/kualitas layanan pendidikan formal dan non formal secara merata pada seluruh jenjang pendidikan di seluruh wilayah	Penguatan Tata kelola sistem pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Perluasan akses pendidikan melalui penyediaan Sarana prasarana utama dan penunjang pendidikan termasuk untuk layanan pendidikan anak usia dini berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak pada jenjang menengah dan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan kompetensi peserta didik melalui pengembangan model pembelajaran dan penguatan budaya literasi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pemberian makanan bergizi secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan dan perluasan akses layanan kesehatan berkualitas termasuk	Peningkatan kualitas dan perluasan akses layanan kesehatan termasuk pengembangan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas dan jumlah tenaga Kesehatan berdasarkan standar pelayanan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			upaya promotif-preventif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui pemberdayaan masyarakat	minimal yang berlaku
				Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan lansia berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Penguatan dan pengembangan upaya pengendalian dan pencegahan kasus stunting melalui pemberdayaan Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pencegahan dan pengendalian penyakit menular melalui peningkatan kesadaran dan pemberdayaan Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan dan perluasan cakupan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat
				Penguatan dan peningkatan kualitas tata kelola manajemen layanan Kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
		S1.1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan	Pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan sesuai standar Kemenkes berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pemenuhan jenis pelayanan sesuai standar Kemenkes sebagai rumah sakit pengampunan dan mitra JKN
				Peningkatan kemandirian rumah sakit berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia baik kuantitas, kualitas, dan distribusi berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		S1.1.4: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing	Optimalisasi digitalisasi informasi dan manajemen rumah sakit
				Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui penguatan perekonomian keluarga
				Perlindungan jaminan sosial yang adil dan tepat sasaran berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
		S1.1.5: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Peningkatan dan perluasan akses peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah dan peningkatan prestasi olahraga	Sinkronisasi data antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
				Peningkatan peran dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah
				Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana olah raga
				Peningkatan dan pengembangan prestasi olah raga di tingkat nasional
		S1.1.6: Meningkatnya literasi masyarakat	Pengembangan dan perluasan akses terhadap bahan bacaan berbasis digital	Pengembangan dan peningkatan bahan bacaan berbasis digital
				Peningkatan akses masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pembangunan dan pengembangan fasilitas perpustakaan daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	T1.2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan	S1.2.1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan perlindungan sosial yang adaptif serta pembinaan dan pemberdayaan penyandang masalah sosial	Peningkatan, perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan layanan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
		S1.2.2: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Peningkatan perlindungan anak dan perempuan serta perluasan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan
				Peningkatan perlindungan perempuan dan anak
		S1.2.3: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak serta peningkatan kualitas lingkungan hunian	Peningkatan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan hunian berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Penyediaan dan pengembangan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Penataan kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	T2.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas	S2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar secara merata dan berkelanjutan	Peningkatan dan pengembangan infrastuktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pembangunan, penataan, dan pengembangan Infrstruktur kawasan pusat pemerintahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas pengolahan sampah serta limbah domestik/rumah tangga yang ramah lingkungan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan ketersediaan air baku melalui peningkatan kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis dan prioritas di wilayah kabupaten berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
		S2.1.2: Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Peningkatan kualitas layanan konektivitas yang aman, nyaman dan terjangkau	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas transportasi umum yang aman dan nyaman
			Penyediaan dan pengembangan sarana dan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				prasarana penunjang keselamatan pada jalan kewenangan kabupaten
		S2.1.3: Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian	Peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM	Peningkatan pembinaan dan bantuan teknis untuk peningkatan mutu/kualitas produksi
				Peningkatan kerjasama kemitraan antara pelaku UMKM dengan industri yang ada di Kabupaten Serang
		S2.1.4: Meningkatnya daya saing industri	Pengembangan komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan daya saing industri	Peningkatan dan pengembangan mutu/kualitas produksi
				Peningkatan pemanfaatan komoditas produk lokal dalam industri pengolahan
		S2.1.5: Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Peningkatan kualitas komoditas perdagangan dan perluasan akses pemasaran berbasis digital	Peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen
				Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan pemasaran produksi
		S2.1.6: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata potensial dan unggulan serta perluasan pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan promosi dan pemasaran potensi obyek wisata, daya tarik wisata alam dan buatan serta ekonomi kreatif melalui platform digital
				Pengembangan desa wisata, paket wisata dan fasilitas penunjang kegiatan/atraksi wisata
				Pengembangan dan peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif
				Perencanaan, pengembangan dan diversifikasi

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				obyek, daya tarik wisata serta ekonomi kreatif Fasilitasi, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif Pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana yang mendukung ekosistem kreativitas
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.1: Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	S3.1.1: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan dan perluasan akses kesempatan kerja berbasis kompetensi	Peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri
				Peningkatan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Kejuruan, Balai Latihan Kerja Negeri, Balai Latihan Kerja Swasta maupun Balai Latihan Kerja Komunitas dengan industri
				Peningkatan fasilitasi kerjasama bursa tenaga kerja dengan pelaku industri/usaha di dalam dan luar negeri
				Peningkatan fungsi hubungan industrial, perlindungan serta jaminan sosial bagi tenaga kerja
		S3.1.2: Terwujudnya iklim yang investasi yang kompetitif	Peningkatan dan pengembangan kemudahan dan keamanan investasi di daerah	Peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan perizinan
				Peningkatan promosi potensi unggulan daerah
				Pengembangan Peningkatan inovasi pelayanan kemudahan perizinan
				peta digital potensi investasi
	T3.2: Mewujudkan	S3.2.1: Meningkatnya	Peningkatan dan penguatan	Pengendalian pelaksanaan perijinan dan penanaman modal
				Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat guna mendorong peran aktif masyarakat dalam

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah Berwawasan Lingkungan	pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa	peranserta masyarakat dalam pembangunan guna mendorong kemandirian desa	pembangunan
				Mendorong kemandirian desa melalui pengembangan usaha bersama berbasis potensi dan kearifan lokal
				Pengembangan kawasan perdesaan prioritas Kabupaten Serang
		S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan sampah melalui kerjasama dalam pengelolaan sampah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
				Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepatuhan pelaku usaha/industri dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan
				Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan
				Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup
		S3.2.3: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Peningkatan rasa aman dan nyaman dilingkungan masyarakat	Peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
				Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Peningkatan kemitraan dengan pihak terkait dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban wilayah berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, bencana non alam dan kebakaran berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Pengembangan kompetensi SDM kebencanaan, peningkatan sarana prasarana mitigasi dan evakuasi bencana berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam mendorong kesiapsagaan bencana alam dan kebakaran melalui penyebaran informasi kebencanaan terutama pada kawasan rawan bencana berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan	S4.1.1: Meningkatnya Produksi Pertanian	Peningkatan dan pengembangan nilai tambah komoditas pertanian	Peningkatan akses petani terhadap ketersediaan sarana prasarana pertanian termasuk benih dan pupuk bersubsidi
				Peningkatan perlindungan dan jaminan untuk petani dan perlindungan komoditas pertanian Peningkatan dan pengembangan kapasitas petani serta pelibatan petani muda dalam pengelolaan pertanian
		S4.1.2: Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Optimalisasi ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas, berkelanjutan dan terjangkau	Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penyimpanan komoditas pertanian dalam rangka pemenuhan cadangan pangan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pengembangan dan diversifikasi komoditas pangan untuk memperkuat cadangan pangan daerah
		S4.1.3: Meningkatnya Produksi Perikanan	Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau secara merata	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan
				Peningkatan dan pengembangan kerjasama kemitraan pemanfaatan dan pemasaran hasil perikanan
				Peningkatan perlindungan dan jaminan untuk petani dan perlindungan komoditas perikanan
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	T5.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Peningkatan dan pengembangan kualitas layanan public berbasis digital	Peningkatan dan perluasan layanan publik berbasis digital yang cepat, mudah dan sesuai kebutuhan masyarakat
				Perluasan akses/jangkauan layanan internet gratis untuk mendukung pengembangan kegiatan produktif potensial
				Peningkatan dan pengembangan aplikasi layanan publik yang terintegrasi
				Peningkatan kompetensi SDM untuk peningkatan layanan publik berbasis digital
		S5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adil dan adaptif	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah serta penerapan sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
		S5.1.3: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam	Peningkatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan	Pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUMD
				Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM pengawasan sesuai dengan standar yang ditetapkan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penyelenggaraan pemerintahan	pemerintahan	
				Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah
		S5.1.4: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan dan pengembangan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM perencanaan
				Peningkatan kualitas serta ketersediaan data dan informasi sebagai dasar penyusunan perencanaan
				Pengembangan kemitraan atau kerjasama dalam perencanaan terutama dengan lembaga akademis dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan
				Peningkatan konsistensi proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan
		S5.1.5: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan dan pengembangan kualitas tata Kelola keuangan dan aset daerah	Peningkatan kompetensi SDM pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
				Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah
				Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah
				Pengembangan sistem informasi keuangan dan penataan barang milik daerah berbasis digital
		S5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN	Peningkatan dan pengembangan profesionalitas ASN	Peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
				Pengembangan penilaian ASN berbasis bukti dan capaian kinerja
				Penataan dan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan keahlian

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan	Peningkatan dan pengembangan kualitas data statistik sektoral daerah	Pengembangan dan peningkatan kualitas data dan informasi statistik sektoral sesuai standar yang ditetapkan
				Pengembangan ekosistem data dan informasi di daerah
				Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM bidang statistik
		S5.1.8: Meningkatnya keamanan informasi	Peningkatan dan pengembangan sistem keamanan data dan informasi berbasis digital	Peningkatan keamanan data dan layanan publik berbasis digital
				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang sistem pengamanan data dan informasi digital
		S5.1.9: Meningkatnya tata Kelola arsip	Peningkatan dan pengembangan tata Kelola arsip daerah	Peningkatan sistem, SDM pengelola arsip daerah, dan sarana pengelolaan arsip daerah
				Peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip daerah berbasis digital
		S5.1.10: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	Peningkatan dan perluasan akses layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan dan perluasan akses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital
				Peningkatan kualitas dan perlindungan terhadap keamanan data kependudukan
		S5.1.11.: Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Peningkatan tata Kelola penyelenggaran dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Peningkatan dan pengembangan layanan publik yang mudah diakses, cepat dan terjangkau
				Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan publik

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		S5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Peningkatan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Peningkatan kompetensi aparatur bidang pertanian melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis
				Peningkatan peranserta Peningkatan kualitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kapasitas masyarakat dalam permasalahan pertanahan
				Peningkatan dan pengembangan kualitas rekomendasi kebijakan berbasis hasil riset
		S5.1.13: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Peningkatan dan pengembangan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Penyusunan kebijakan pengembangan potensi unggulan daerah
				Peningkatan kualitas pembangunan daerah melalui penciptaan dan pemanfaatan inovasi berbasis potensi daerah
		S5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
				Pemenuhan kebutuhan penunjang layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	T6.1: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	S6.1.1: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan masyarakat
				Peningkatan dan pengembangan kemitraan dalam upaya pengenalan dan penerapan nilai-nilai

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan masyarakat
		S6.1.2: Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal
				Pengenalan budaya lokal kepada masyarakat khususnya pelajar

4.5 Program Prioritas RKPD Tahun 2027

4.5.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan provinsi keselarasan prioritas pembangunan daerah mutlak diperlukan. Sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Serang tahun 2027 terhadap prioritas provinsi dan nasional sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 4. 8 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang dengan Prioritas Provinsi Banten dan Prioritas Nasional

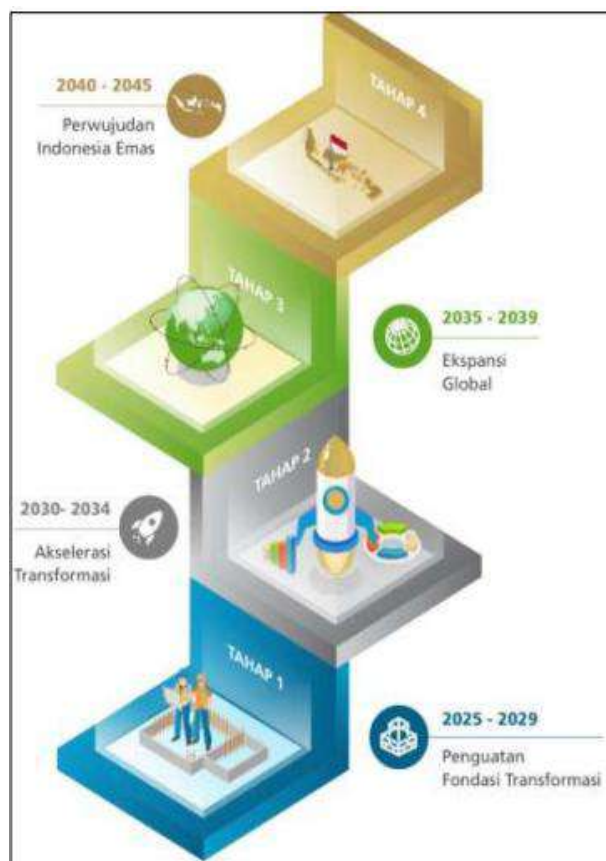
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten
1	2	3
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN1)	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh (PD1)	Aktualisasi nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat berlandaskan asas hak asasi manusia (PP8)
		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kulaitas Pelayanan Publik (PP7)
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (PN2)	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial (PD2)	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi (PP3)
		Sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan (PP6)
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas (PD4)	Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan (PP5)
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi (PD2)	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi (PP3)

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten
1	2	3
Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN3)		Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (PP4)
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas (PN4)	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif (PD3)	Kualitas Sumber Daya Manusia Pada aspek Pendidikan dan Kesehatan (PP1)
		Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan (PP2)
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (PN5)	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial (PD2)	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi (PP3)
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan (PN6)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi (PD2)	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi (PP3)
		Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (PP4)
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (PN7)	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh (PD1)	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (PP7)
		Aktualisasi nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat berlandaskan asas hak asasi manusia (PP8)
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman	Aktualisasi nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten
1	2	3
Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur (PN8)	dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh (PD1)	berlandaskan asas hak asasi manusia (PP8)
	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana (PD5)	Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan (PP5)

Selain sinkronisasi prioritas pembangunan, sinkronisasi tema pembangunan daerah Kabupaten Serang tahun 2027 dengan tema pembangunan Nasional tahun 2027 dan RKPD Provinsi Banten 2027. Tahun 2027 merupakan tahun ketiga dari RPJPN dalam periode pertama bagi Indonesia, dikarenakan Tahun 2027 merupakan tonggak awal Indonesia untuk menuju Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-2045 dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) tema besar lima tahunan sebagai berikut.

Gambar 4. 2 Tahapan RPJPN Tahun 2025-2045

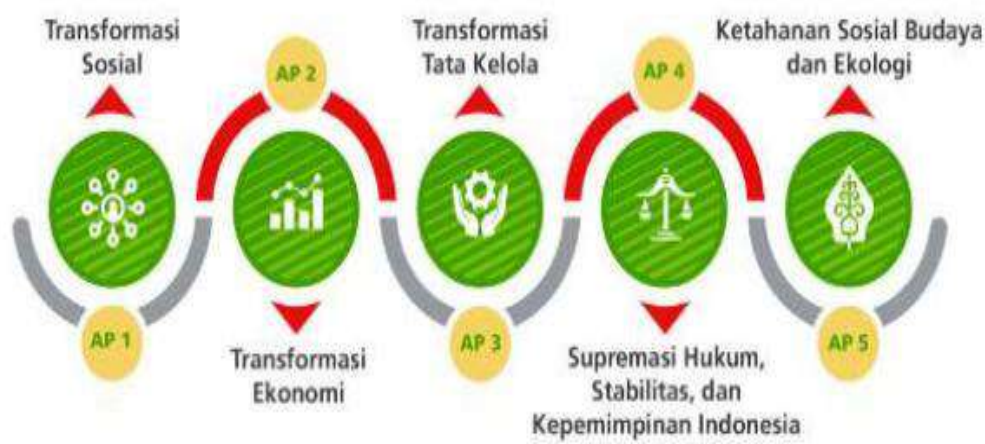


Sumber: Bapperida Kabupaten Serang, diolah

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi, Indonesia akan memulai tahap pertama pembangunannya dengan 5 (lima) sasaran utama, yaitu :

- a. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju
- b. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurangan;
- c. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat;
- d. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; dan
- e. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menurun Menuju Net Zero Emission

Gambar 4. 3 Tahapan RPJPN Tahun 2025-2045



Untuk mencapai visi dan sasaran sebagaimana di atas, arah kebijakan untuk jangka menengah Indonesia difokuskan pada penguatan fondasi transformasi yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Agenda Pembangunan, yaitu : (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi Hukum; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Kelima Agenda Pembangunan tersebut didukung oleh beberapa sasaran dan indikator pembangunan sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah.

Tabel 4. 9 Agenda, Sasaran, dan Indikator Pembangunan
Jangka Menengah Indonesia

NO	Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
1	2	3	4
1	Transformasi Sosial	a. Kesehatan untuk Semua	a. Usia Harapan Hidup (tahun)
			b. Kesehatan Ibu dan Anak
			1) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

NO	Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
1	2	3	4
			2) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
			c. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
			d. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
		b. Pendidikan Berkualitas yang Merata	a. Hasil Pembelajaran
			1) Rata-Rata Nilai PISA: Membaca, Matematika, Sains
			2) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun) Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
			3) Harapan Lama Sekolah (tahun)
			b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)
			c. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
		c. Perlindungan Sosial yang Adaptif	a. Terbangunnya Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif Bagi Seluruh Penduduk
			b. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
			c. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
2	Transformasi Ekonomi	a. Iptek Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	a. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)
			b. Pengembangan Pariwisata
			1) Rasio PDB Pariwisata (%)
			2) Devisa Pariwisata (miliar USD)
			c. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)
			d. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN
			1) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)

NO	Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
1	2	3	4
			2) Rasio Kewirausahaan (%)
			3) Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDB (%)
			4) Return of Aset BUMN (%)
			e. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
			f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
			g. Tingkat Penguasaan IPTEK
		b. Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
			1) Indeks Ekonomi Hijau
		c. Transformasi Digital	2) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)
			Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (Peringkat)
			a. Biaya Logistik (% PDB)
		d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global	b. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)
			c. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)
		e. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan
			1) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan Terhadap Nasional (%)
			2) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Berkelanjutan (%)
3	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	a. Indeks Materi Hukum
			b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			c. Indeks Pelayanan Publik
			d. Anti Korupsi
			1) Indeks Integritas Nasional
			2) Indeks Perilaku Anti Korupsi
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	a. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan	a. Indeks Pembangunan Hukum
			b. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)
			c. Indeks Demokrasi Indonesia

NO	Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
1	2	3	4
		Demokrasi Substansial	
		b. Stabilitas Ekonomi Makro	a. Rasio Pajak Terhadap PDB (%)
			b. Tingkat Inflasi (%)
			c. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan
			1) Aset Perbankan / PDB (%)
			2) Aset Dana Pensiun / PDB (%)
			3) Aset Asuransi / PDB (%)
			4) Kapitalisasi Pasar Modal / PDB (%)
			5) Total Kredit / PDB (%)
			d. Inklusi Keuangan (%)
		c. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	a. Asia Power Index (Diplomatic Influence)
			b. Asia Power Index (Military Capability)
5	Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
			b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
		b. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
			b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
		c. Lingkungan Hidup Berkualitas	a. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			b. Kualitas Lingkungan Hidup
			1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
			3) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan

NO	Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
1	2	3	4
		d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1) Ketahanan Energi – Indeks Ketahanan Energi
			2) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)
			3) Ketahanan Air
			▪ Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)
			▪ Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
		e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	a. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)
			b. Persentase Penurunan Emisi GRK
			1) Kumulatif
			2) Tahunan

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Adapaun program prioritas nasional dan program hasil terbaik cepat nasional diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 10 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
5. Pemberantasan kemiskinan.	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.	
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.	
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.	
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.	
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.	
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.	
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.	
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.	
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	

Sedangkan pemetaan program Perangkat Daerah dalam mendukung kegiatan prioritas utama nasional untuk mencapai Asta Cita diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4. 11 Program Perangkat Daerah dalam Kegiatan Prioritas Utama
RPJMN 2025-2029**

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		3	Pengembangan Pangan Hewani	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		4	Pengembangan Pangan Lokal Dan Nabati	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		5	Fortifikasi Dan Biofortifikasi Pangan	Program Penyuluhan Pertanian
		6	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		7	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		8	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		9	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		10	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		11	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		12	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		13	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan
		14	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		2	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		3	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		4	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan
		2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan
		3	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		4	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan
		5	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.9. pelatihan, in-service	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
			training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	
		6	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Program Pengembangan Kurikulum
		7	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		8	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		9	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		10	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		11	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		12	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		13	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		14	Etiminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		15	Investasi pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		16	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		17	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		18	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
		19	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		20	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1	Pengembangan Hilirisasi Nikel	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		2	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		3	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		4	Pengembangan Hilirisasi Timah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		5	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		6	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		7	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		8	Pengembangan Industri Kimia	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		9	Pembangunan Industri Semi konduktor	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		10	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		11	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		2	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha produktif	Program Pemberdayaan Sosial
		3	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		4	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
		5	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Program Penataan Desa

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		2	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		4	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		5	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	1	Penguatan Karakter Dan Jati Diri Bangsa	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		2	Pemanfaatan Khazanah Budaya Dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		3	Peningkatan Ketahanan Lklm Pesisir Dan Laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Adapun Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam mendukung Asta Cita diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 12 Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam mendukung Asta Cita

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0010 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.03.0013 - Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota
3	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0016 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0015 - Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.03.2.01.0005 - Penyuluhan Transmigrasi
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.03.2.01.0006 - Pelatihan Transmigrasi
7	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
8	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
9	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
11	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
12	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
13	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya
14	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya
15	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0026 - Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0026 - Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik
17	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0027 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
18	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0027 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
19	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0040 - Penyediaan Akses Internet
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0040 - Penyediaan Akses Internet
21	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0042 - Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi
22	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0042 - Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						elektronik yang terintegrasi
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan
24	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0033 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
25	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0033 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)
26	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan	2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dan Kesejahteraan Keluarga	
27	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0020 - Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota
28	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
29	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0011 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
30	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0013 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
31	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0009 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
32	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0009 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
33	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
34	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
35	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
36	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0023 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)			
37	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
38	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
39	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
40	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
41	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian,

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					dan Pendaftaran Naskah Kuno
42	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
43	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
44	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
45	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
46	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
47	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0015 - Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
48	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0015 - Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
49	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
50	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
51	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
52	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
53	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
54	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
55	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
56	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
57	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi	3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
58	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual
59	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas
60	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit
61	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
62	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia	1.02.03.2.02.0005 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Manusia Kesehatan Sesuai Standar
63	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
64	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
65	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
66	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil,	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital			
67	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
68	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
69	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
70	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
72	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
73	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
74	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
75	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
76	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
77	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
78	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
79	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
80	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
81	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
82	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
83	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
84	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
85	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
86	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kebakaran sesuai standar			
87	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
88	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
89	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
90	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
91	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
92	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
93	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota
94	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
95	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
96	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
97	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
99	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
100	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
101	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
102	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0012 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
103	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
104	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	kewenangan kabupaten/kota
105	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
107	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
108	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
109	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
110	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
111	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
112	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
113	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					Kapasitas Bidang Pendidikan
115	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
116	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
117	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
118	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
119	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
120	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
121	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0018 - Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha
123	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal
124	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0007 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
125	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
126	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
127	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
128	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
129	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0009 - Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
130	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0009 - Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
132	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
133	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
134	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
135	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
136	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
137	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
138	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
139	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
140	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
141	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
142	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
143	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
144	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
145	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
146	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
147	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai
148	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
149	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai
150	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai
151	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
152	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
153	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
154	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
155	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.0012 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
156	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.0012 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
157	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
158	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
159	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
160	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
161	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
162	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
163	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan
164	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan
165	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan
166	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
167	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
168	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
169	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
170	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
171	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
172	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
173	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.3.01.0004 - Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota
174	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.3.01.0004 - Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota
175	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
176	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa		Administrasi Pemerintahan Desa	Aparatur Pemerintah Desa
177	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
178	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
179	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
180	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
181	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
182	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
183	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
184	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
185	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
186	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
187	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
188	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
189	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan program strategis nasional yang dilaksanakan melalui proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah pusat meliputi sebagai berikut.

Tabel 4. 13 Program Strategis Nasional (ProSn)

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 3. Sekolah Rakyat 4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan) 2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian 3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah 4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/ <i>Food Estate</i>)
3.	Kesehatan untuk semua	1. Stunting 2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis 3. Jaminan Kesehatan Nasional 4. Penuntasan TBC 5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD 2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran 4. Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi 2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,) 5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

4.5.2 Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2027

Dari uraian program prioritas dan program strategis nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang merumuskan Program Prioritas Perangkat Daerah sebagai mana tabel di bawah ini.

Tabel 4. 14 Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2027

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan	
Visi: Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia							
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.	Tujuan 1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah		Indeks Pembangunan Manusia			
				Skor Kemampuan Literasi SD			Urusan Pendidikan
				Skor Kemampuan Numerasi SD			
				Skor Kemampuan Literasi SMP			
				Skor Kemampuan Numerasi SMP			
				Harapan Lama Sekolah			
				Rata-Rata Lama Sekolah			
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partiiipasi Sekolah usia 5-6 dalam PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
				Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 dalam Pendidikan Dasar		
				Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 dalam Pendidikan kesetaraan		
			Meningkatnya kualitas hasil belajar Peserta Didik	Skor Kemampuan Literasi SD		
				Skor Kemampuan Literasi SMP		
				Skor Kemampuan Numerasi SD		
				Skor Kemampuan Numerasi SMP		
			Meningkatnya Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B		
			Meningkatnya Jumlah Pendidik PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4		
			Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Dasar	Nilai Inklusivitas SD		
				Nilai Inklusivitas SMP		
			Meningkatnya Keamanan di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Nilai Iklim Keamanan SD		
				Nilai Iklim Keamanan SMP		
			Meningkatnya proses pembelajaran SD yang mendukung toleransi agama, budaya dan komitmen kebangsaan	Nilai Iklim Kebinekaan SD		
				Nilai Iklim Kebinekaan SMP		
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru PAUD	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Indeks Pemerataan Guru SD		
				Indeks Pemerataan Guru SMP		
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik PAUD		
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD		
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP		
				S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional				
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)			
			Angka kematian balita (AKBa)			
			Angka kematian bayi (AKB)			
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)			
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)			
			Persentase Desa Stop BABS			
			Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi			
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	
		Meningkatnya kualitas	Persentase cakupan sediaan	Program Sediaan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan		
			dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
			S1.1.3: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lanjutan		Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit			Urusan Kesehatan
		Tingkat Kemandirian Rumah Sakit						
		Tercapainya Indikator Pelayanan Rumah Sakit		Bed Occupancy Rate (BOR)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
						Length of stay (LOS)		
						Bed Turn Over (BTO)		
						Turn Over Interval (TOI)		
						Angka Kematian bersih (NDR)		
						Angka Kematian Kasar (GDR)		
						ERTR (Emergency Response Time Rate)		
						Tercapainya SDM yang mengikuti diklat sesuai standar kompetensi	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	
		Terlaksananya kegiatan pemenuhan standar akreditasi		Persentase elemen akreditasi yang mengalami peningkatan nilai	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan			
		S1.1.4: Terwujudnya keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		Urusan Pengendalian Penduduk dan KB		
				Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk			Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/RTF</i>)	Program Pengendalian Penduduk
							Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Spesific Fertility/ASFR 15-19</i>)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS(	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
		S1.1.5: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
				Indeks Partisipasi Olahraga		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaaan	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
		S1.1.6: Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		
				Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki		
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Indonesia	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	
				Indeks Pembangunan Literasi		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
				Masyarakat		
	Tujuan 1.2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan			Tingkat Kemiskinan		
		S1.2.1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial				
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial		
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			
			4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			
			5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			
			6.Indeks Kesejahteraan Sosial			
6. Indeks Kesejahteraan Sosial						

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
				Penyandang Disabilitas		
				7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		
			Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		
				3. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		
				6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
		S1.2.2: Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan	
			kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak				
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			
		S1.2.3: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Persentase penangananana Kawasan kumuh		Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Persentase penanganan rumah tidak layak huni Persentase unit rumah didalam perumahan yang terfasilitasi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)			
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan		
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni			
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman		
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utikitas Umum) dan sudah diserahkan dalam kondisi baik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)		
		Misi 2: Meningkatkan	T2.1: Meningkatkan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas					Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		S2.1.1: Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air		
			Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)			
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan		
		Meningkatnya kualitas bangunan	Persentase bangunan Gedung dalam kondisi baik	Program penataan bangunan gedung		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			gedung			
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengolahan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Program Pengelolaan dan pengembangan system air limbah	
		S2.1.2: Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas		Urusan Perhubungan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
				Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	
		S2.1.3: Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian		Persentase koperasi sehat		
				Rasio kewirausahaan		
				Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal		
				Pertumnbuhan wirausaha		
				Proporsi UMKM yang menjalin kemitraan		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
				Pertumbuhan wirausaha		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan	Program Pengembangan UMKM	
		S2.1.4: Meningkatkan daya saing industri		Kontribusi sector industri terhadap PDRB		Urusan Perindustrian
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi investasi sector industri dan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		S2.1.5: Meningkatkan nilai tambah perdagangan		Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB		Urusan Perdagangan
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		S2.1.6: Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum		Urusan Pariwisata
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
			Meningkatnya kualitas	Persentase pelaku ekonomi kreatif	Program	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			ekosistem kreatif	yang memiliki kekayaan intelektual	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.1: Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal			Tingkat Pengangguran Terbuka		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)		
		S3.1.1: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Urusan Tenaga Kerja
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sector prioritas yang meningkat produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		S3.1.2: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi 1. PMA 2.PMDN	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan			Gini Ratio		Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		S3.2.1: Meningkatnya pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Program Penataan Desa	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	· Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				· Persentase fasilitasi tata kelola desa		
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
		S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indek Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Meningkatnya tata Kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah	
		S3.2.3: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya		
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan			Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB		
		S4.1.1:		Persentase peningkatan produksi		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
		Meningkatnya Produksi Pertanian		hasil pertanian 1. Tanaman Pangan 2. Holtikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
				Peningkatan produksi holtikultura		
				Peningkatan produksi perkebunan		
				Peningkatan populasi komoditas peternakan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Persentase unit usaha panga nasal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		
		S4.1.2: Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk	Persentase jumlah cadangan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			kedaulatan dan kemandirian pangan		Kemandirian Pangan	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase jumlah Cadangan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Skor Pola Pangan Harapan (PHH Konsumsi)		
				Skor Pola Pangan Harapan (PHH Ketersediaan)		
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		S4.1.3: Meningkatkan Produksi Perikanan		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota		Urusan Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	T5.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Reformasi Birokrasi		
				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Indeks Pemerintahan Digital		Urusan Komunikasi dan Informatika

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan	
				Indeks PPID		Unsur Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pemerintahan Digital	Program Aplikasi Informatika		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi public pemerintah daerah	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public pemerintah daerah	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik		
		S5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien			Indeks Pelayanan Publik		
					Nilai Sakip Pemda		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Nilai LPPD	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		
			Meningkatnya Kualitas fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi			
				Kerja Sama Dalam Negeri			
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
				Linmas		
			Meningkatnya Kualitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai Indeks Reformasi Hukum		
			Meningkatnya Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan pemerintah daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum		
			Meningkatnya layanan pendukung urusan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Tingkat capaian layanan urusan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
		S5.1.3: Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Unsur Pengawasan
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
		S5.1.4: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		Unsur Perencanaan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD		
		S5.1.5:		Opini BPK Atas Laporan Keuangan		Unsur Keuangan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel				
				Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah		
			Meningkatnya tata Kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik		
			Meningkatnya tata Kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar		
				Persentase penurunan SILPA		
			Meningkatnya tata Kelola akutansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu		
			Meningkatnya tata Kelola aset daerah	Persentase penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengasawab pengelolaan pendapatan		
			Meningkatnya tata Kelola akutansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu		
		S5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah	Unsur Kepegawaian
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			Meningkatnya tata Kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai kompetensinya		
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik		
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerialan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Unsur Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancang, Pengembangan dan Evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		
			Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
		S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Urusan Statistik
		S5.1.8: Meningkatnya keamanan informasi		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Urusan Persandian
		S5.1.9: Meningkatkan tata Kelola arsip		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah		
			Meningkatnya tata Kelola arsip dinamis dan statis	Nilai hasil pengawasan kearsioan	Program Pengelolaan Arsip	Urusan Kearsipan
			Men ingkatnya ketersediaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip		
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip		
		S5.1.10: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase kepemilikan Kartu Identitas		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program Pencatatan Sipil	
				Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
				Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
				Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
			Meningkatnya	Persentase informasi kependudukan	Program Pengelolaan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			pemanfaatan informasi kependudukan	yang dimanfaatkan	Informasi Administrasi Kependudukan	
		S5.1.11:: Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan		Nilai SAKIP Kecamatan		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Unsur Kewilayahan
			Meningkatnya masyarakat yang diberdayakan	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase kejadian kasus ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti/diselesaikan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		S5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan		Urusan Pertanahan
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah Garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum tersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Program Pengelolaan Tanah Kosong	
			Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan pemerintah daerah	Persentase tahaoan persiapan pengadaaana tanah bagi pembangunan yang diselesaikan tepat waktu	Program Penatagunaan Tanah	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan		
		S5.1.13:		Persentase hasil riset, invensi dan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		inovasi yang dimanfaatkan		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Unsur Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah		
			Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi dalam dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait riset dan inovasi di daerah		
		S5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Unsur Sekretariat DPRD
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N		
				Persentase penetapan Ranperda Tahun N		
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		
Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten serang	T6.1: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM			Capaian Aksi HAM		
		S6.1.1: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan		Indeks Kerukunan Umat Beragama		Unsur Pemerintahan Umum

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas PD	Keterangan
		bermasyarakat				
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
		S6.1.2: Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan		Tingkat Warisan Seni, Budaya dan tradisi yang dilestarikan		Urusan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	Program Pembinaan Sejarah	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan		

Dari penjabaran di atas, dilakukan proses cascading untuk menjabarkan kinerja dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan hingga Strategi pencapaiannya dalam bentuk Program Perangkat Daerah. Secara rinci proses cascading diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Cascading RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	T1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Manusia	75,6					
		S1.1.1:					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan Pendidikan
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Skor Kemampuan Literasi SD	59,46	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
							Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
							Pengembangan konten digital untuk pendidikan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
							Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
							Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
							Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
			Skor Kemampuan Numerasi SD	55,6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa		
							Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
			Skor Kemampuan Literasi SMP	64	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
							Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
							Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
							Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
							Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
							Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		
			Skor Kemampuan Numerasi SMP	61,13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa		
							Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		
				13,84	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					N PENDIDIKAN		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
							Pembangunan Ruang Kelas Baru		
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		
							Pengadaan Mebel Sekolah		
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
							Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah		
							Pengadaan Mebel Sekolah		
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
							Pembangunan Ruang Kelas Baru		
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
							Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD		
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
			Harapan Lama Sekolah						

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan		
							Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
							Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
							Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
							Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
							Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
							Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,31	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas		
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
							Pembangunan Ruang Kelas Baru		
							Pengadaan Mebel Sekolah		
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah		
							Pengadaan Mebel Sekolah		
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pembangunan Ruang Kelas Baru		
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD		
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan		
							Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
							Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
							Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		
		S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	75,37	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ; - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ; - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ; - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	97	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					KESEHATAN MASYARAKAT				
		S1.1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan	Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	≥95%	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	79,5	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	70%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
		S1.1.4: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,52	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas	DKBPPPA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
							Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Pengembangan media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).		
						Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		
							Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
							Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		
							Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
							Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		
							Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan		
							Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Tim Pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
							Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		
							Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		
							Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
						Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
							Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga		
							Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
		S1.1.5: Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	57,61	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAA N	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	DISPORAP AR	Urusan Kepemud aan dan Olahraga

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
			Indeks Partisipasi Olahraga	0,259	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAWAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		
							Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		
		S1.1.6: Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	62,87	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	DPKD	Urusan Perpustakaan
							Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
							Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		
							Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		
							Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat		
							Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
							Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan		
							Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		
							Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	77,68	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		
							Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		
							Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
							Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		
			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	75	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		
							Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
	T1.2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan		Tingkat Kemiskinan	3,40-4,00					
		S1.2.1:				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinas Sosial	Urusan Sosial
		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,67	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
							Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan		
							Penyediaan Sandang		
							Penyediaan Alat Bantu		
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		
							Pemberian Layanan Kedaruratan		
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
							Pemberian Layanan Rujukan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota		
							Pemberian Layanan Kedaruratan		
							Penyediaan Permakanan		
							Penyediaan Sandang		
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		
							Pemberian Layanan Rujukan		
							Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
							Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PROGRAM PENANGANA N BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan		
							Penyediaan Sandang		
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		
							Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		
					PROGRAM PENGELOLAA N TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
					S1.2.2: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangu nan Gender (IPG)	93,1		
		Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota							
		Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota						

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,492	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota		
						Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota		
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota		
							Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota		
							Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota		
							Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota		
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		
							Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
							Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota		
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,47	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota		
					PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota		
							Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota		
							Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota		
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota		
							Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota		
		S1.2.3: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	0,42916667	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
			Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	0,88541667	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
			Persentase unit rumah di dalam perumahan yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	66:16:00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		
Misi 2:	T2.1:								
Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,75-6,75					
		S2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	68,25	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	- Pembangunan Jalan	DPUPR	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							- Rekonstruksi Jalan - Pelebaran Jbt - Pemb Jembatan		
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
		S2.1.2: Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	44,6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	DISHUB	Urusan Perhubungan
						Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		
						Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		
						Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
		S2.1.3:Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian	Persentase Koperasi Sehat	22:04	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DINAS KOUMPERINDAG	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
					PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNG AN KOPERASI	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
							Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi		
			Rasio Kewirausahaan	1	PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pembinaan dan Fasilitas Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha		
							Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM		
							Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Produk		
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pembinaan Perkuatan Lembaga Inkubator		
							Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha		
							Pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM		
							Pembinaan dan Fasilitas Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pembinaan dan Fasilitas Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha		
			Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	52					

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
			Pertumbuhan Wirausaha	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha		
			Proporsi UMKM yang menjalin kemitraan	1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha		
		S2.1.4:	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	47,2-47,5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	DINAS KOUMPERINDAG	Urusan Perindustrian
		Meningkatnya daya saing industri					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
						Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
		S2.1.5:	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,20%	ROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Urusan Perdagangan	
		Meningkatnya nilai tambah perdagangan			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		
							Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
						Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
						Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
							Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		
					PROGRAM PENGEMBAN GAN EKSPOR	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Peningkatan Citra Produk Ekspor		
							Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		
							Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		
							Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
		S2.1.6: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	2,47	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DISPORAPAR	Urusan Pariwisata
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
							Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
							Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
						Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.1: Meningkatkan Investasi di Sektor Penyerapan Kerja Lokal		Tingkat Pengangguran Terbuka	8,85-9	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	Urusan Tenaga Kerja
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23,75					
			S3.1.1: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	86,57	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	Urusan Tenaga Kerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan	S3.1.2: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	92,11	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja		
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Urusan Penanaman Modal
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
			Gini Ratio	0.254-0.262					
		S3.2.1: Meningkatnya pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	69,02	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DPMD	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		
							Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
							Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		
							Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
							Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		
							Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		
							Pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan lembaga kerjasama antar desa		
							Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
							Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		
							Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		
							Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan keluarahan		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten /kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa		
							Peningkatan Kapasitas kelembagaan lembaga masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa / kelurahan dan masyarakat hukum adat.		
							Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa		
							Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
							Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa		
							Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
		S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,09	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan rehabilitasi		
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
		S3.2.3: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	69	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	BPBD Kabupaten Serang	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
									serta Linmas
							Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		
						Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		
							Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		
							Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		
							Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
							Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
							Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		
							Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
							Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota		
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
							Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		
						Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
							Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		
							Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
							Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
							Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		
					PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		
							Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		
							Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		
							Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		
							Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
							Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		
							Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
							Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota		
						Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan		
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		
							Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		
							Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran		
							Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar		
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan , dan Perikanan Terhadap PDRB	0,3416 6667					

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
		S4.1.1: Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkata n produksi hasil pertanian				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	DKPP	Urusan Pertanian
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan penggunaan sarana pertanian			
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PRASARANA PERTANIAN		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		
							Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota		
							Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota		
					Pembangunan Prasarana Pertanian		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		
							Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota		
							Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota		
							Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa		
			1. Tanaman Pangan	0,27					
			2. Hortikultura	5					
			3. Perkebunan	5					
			4. Peternakan	1					

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
		S4.1.2: Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyaluran cadangan pangan pemerintah kab/kota Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota		
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota		
						Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		
							Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
							Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
		S4.1.3: Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten /Kota	65439, 2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan	Urusan Kelautan dan Perikanan
							Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		
						Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		
							Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		
						Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		
							Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
						Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
							Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
							Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
							Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha Pembudidayaan ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota		
							Pengawasan usaha pemasaran hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan hasil perikanan Sesuai Kewenangan kabupaten/kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
						Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Makro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	T5.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	78,8					

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
		SS.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital	1,2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Diskominfo	Urusan Komunikasi dan Informatika
						Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			
						Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			
						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab_Kota			
						PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi pembangunan dan_atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		
					Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
							Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		
							Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		
			Indeks Keterbuka an Informasi Publik (PPID)	88,90	PENGELOLAA N INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	pelayanan informasi publik		
		S5.1.2:	Indeks Pelayanan Publik	4,4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/K OTA	PENATAAN ORGANISASI	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat DPRD	Unsur Sekretaria t Daerah
	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Nilai SAKIP Pemda	78,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/K OTA	PENATAAN ORGANISASI	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
		S5.1.3:		3,35					

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi Ueusan Pemerintah Daerah	Inspektora t	Unsur Pengawas an
		S5.1.4: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencana an Pembangunan Daerah	96,25	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Unsur Perencan aan
		S5.1.5:Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Unsur Keuangan
					Program Pengelolaan Aset Daerah	Pengelolaan Aset Daerah	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah		
			Rasio Derajat Desentralis	30,62	PROGRAM PENGELOLAAN	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BAPENDA	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
			asi Fiskal Daerah		PENDAPATAN DAERAH		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		
		S5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	84,64	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pembinaan Disiplin ASN Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Unsur Kepegawaian

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
		S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,69	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Diskominfo	Urusan Statistik
							Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		
							Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional		
		S5.1.8:Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (indeks KAMI)	697	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	Urusan Persandian
							Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		
		S5.1.9: Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintahan Daerah	68	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	DPKD	Urusan Kearsipan
						Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		
						Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		
					Program Perizinan dan Penggunaan Arsip	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		
							Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		
		S5.1.10:	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5				Disdukcapil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	83	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
							Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
						Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
							Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		
							Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil		
						Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil		
							Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil		
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		
							Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		
						Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
							Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		
							Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
		S5.1.11: Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	72,2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Kewilayah an
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		S5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	72,5	PROGRAM PENATAGUNAHAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	DPU	Urusan Pertanahan
		S5.1.13: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase hasil riset, invensi dan inovasi yang	67	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	BAPPERIDA	Unsur Penelitian dan Pengembangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
			termanfaat						
							Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset		
							Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan		
							Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan		
							Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi		
							Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual		
							Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat		
							Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi		
							Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
							Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi		
							Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi		
		S5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	Unsur Sekretariat DPRD
Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	T6.1: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Capaian Aksi HAM	87					
		S6.1.1: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	81:04:00	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bakesbang pol	Unsur Pemerintahan Umum
		S6.1.2:		45,45%					

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
		Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan	Tingkat Warisan Seni, Budaya dan tradisi yang dilestarikan		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan Kebudayaan
							Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
							Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota		
						Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		
							Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		
					Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		
							Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD	KET
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		
							Penetapan Cagar Budaya		
							Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda		
						Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya		
							Pengembangan Cagar Budaya		
							Pemanfaatan Cagar Budaya		

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja

Rencana kerja pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2027 merupakan tahapan pelaksanaan pembangunan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 yang menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan rencana kerja Tahun 2027 mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Serang, yaitu "Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas serta Perekonomian Daerah yang Unggul, Didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Infrastruktur Wilayah sesuai dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup." Sejalan dengan tema tersebut pelaksanaan rencana kerja Tahun 2027 diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan pada setiap Perangkat Daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara terarah, terpadu, dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan rencana kerja yang terpadu, diharapkan target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Serang yang berdaya saing dan berkelanjutan.

5.2 Pendanaan Daerah

Pendanaan daerah Kabupaten Serang Tahun 2027 disusun untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Pendanaan indikatif dialokasikan berdasarkan kemampuan fiskal daerah dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil pembangunan, sehingga setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Arah pendanaan daerah Kabupaten Serang Tahun 2027 difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang, meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, serta unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, pendanaan daerah juga diarahkan untuk mendukung Program Strategis Nasional (ProSn), serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2027.

5.2.1 Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2027

Pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Serang dalam RKPD tahun 2027 ini disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program Unggulan KD/WKD
2. Mengakomodir usulan pokok DPRD sesuai usulan yg terdapat di SIPD
3. Mengakomodir usulan hasil musrenbang kecamatan sesuai usulan yg terdapat di SIPD
4. Prioritas NSPK PD
5. Tidak mengurangi belanja Gaji dan TPP yg sudah di tetapkan
6. Belum termasuk belanja hibah dan Banparpol di luar program unggulan KD/WKD (mekanisme usulan pagu hibah)
7. Sudah termasuk belanja rutin kesekretariatan PD, bagian, bidang dan kecamatan
8. Sudah termasuk belanja non ASN (seluruh jenis)
9. Pagu Indikatif masih menyesuaikan Belanja efisiensi Inpres 1 Tahun 2025
10. Pagu Indikatif dapat di sesuaikan oleh Bapperida setelah verifikasi oleh mitra bidang pada setiap tahapan penyusunan Renja PD sampai SE Final Renja PD 2027 di terbitkan.

Adapun terdapat selisih total antara jumlah belanja Perangkat Daerah dalam rancangan struktur APBD tahun 2027 dengan jumlah Pendanaan/Pagu Indikatif Perangkat Daerah tahun 2027 dalam RKPD tahun 2027 ini diantaranya karena Pagu Indikatif Perangkat Daerah tahun 2027 ini belum disertakannya perhitungan:

- a. Belanja Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Daerah
- b. Bantuan keuangan khusus (BKK) yang bersumber dari Pemerintah Pusat (AD dan ADD)

Pagu Indikatif pada masing masing Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan dan program Tahun 2027 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2027

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif 2027
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,122,809,365,786.00
2	Dinas Kesehatan	339,907,884,479.00
3	Rumah Sakit dr. Dradjat Prawiranegara	311,316,183,418.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97,631,268,952.00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15,425,403,708.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12,644,430,680.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16,166,856,525.00
8	Dinas Sosial	12,911,340,101.00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9,881,841,349.00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16,681,377,084.00
11	Dinas Lingkungan Hidup	45,076,591,431.00

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif 2027
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18,297,715,200.00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27,809,221,026.00
14	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24,449,473,180.00
15	Dinas Perhubungan	33,505,340,451.00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	12,751,548,540.00
17	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	14,661,718,445.00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12,390,239,787.00
19	Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata	12,273,194,620.00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7,592,134,710.00
21	Dinas Perikanan	12,992,084,320.00
22	Sekretariat Daerah	71,713,356,167.00
23	Sekretariat DPRD	100,268,636,797.00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	22,034,685,111.00
25	Badan Pendapatan Daerah	56,804,194,238.00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	607,057,153,112.00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11,562,856,085.00
28	Inspektorat daerah	28,523,342,681.00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12,298,033,840.00
30	Kecamatan Anyar	6,019,539,408.00
31	Kecamatan Bandung	3,468,595,880.00
32	Kecamatan Baros	4,372,866,463.00
33	Kecamatan Binuang	3,278,066,584.00
34	Kecamatan Bojonegara	3,639,307,613.00
35	Kecamatan Carenang	3,403,087,033.00
36	Kecamatan Cikande	4,815,854,730.00
37	Kecamatan Cikeusal	3,375,547,276.00
38	Kecamatan Cinangka	4,379,723,772.00
39	Kecamatan Ciomas	4,028,131,312.00
40	Kecamatan Ciruas	5,909,654,246.00
41	Kecamatan Gunungsari	3,504,171,360.00
42	Kecamatan Jawilan	3,645,460,155.00
43	Kecamatan Kibin	5,475,379,192.00
44	Kecamatan Kopo	3,773,000,169.00
45	Kecamatan Kragilan	6,076,326,932.00
46	Kecamatan Kramatwatu	6,241,941,216.00

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif 2027
47	Kecamatan Lebak Wangi	3,653,562,902.00
48	Kecamatan Mancak	3,662,879,304.00
49	Kecamatan Pabuaran	4,293,235,256.00
50	Kecamatan Padarincang	3,515,641,380.00
51	kecamatan pamarayan	3,745,633,160.00
52	Kecamatan Petir	3,690,769,552.00
53	Kecamatan Pontang	5,083,132,468.00
54	Kecamatan Pulo ampel	3,211,561,760.00
55	Kecamatan Tanara	3,926,847,384.00
56	Kecamatan Tirtayasa	4,221,904,340.00
57	Kecamatan Tunjung Teja	3,186,224,460.00
58	Kecamatan Waringinkurung	4,008,885,240.00
TOTAL		3,209,044,402,370

Sumber: Data Olahan Bapperida Kabupaten Serang, Tahun 2026.

Adapun rincian indikatif pelaksanaan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 2 Indikatif Prioritas RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
DINAS PENDIDIKAN	TOTAL PAGU PROGRAM	1,122,809,365,786
	TOTAL PAGU PRIORITAS	102,722,704,700
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	1,017,660,412,086
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	1,500,000,000
	Belanja Gaji	520,267,105,086
	DAK Non Fisik	495,893,307,000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PAGU PROGRAM	104,263,334,000
	PAGU PRIORITAS	102,263,334,000
	MDA, Ngaji, TPQ, MDTA (RA, MI, MTS)	40,077,200,000
	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	54,264,762,000
	Beasiswa PAUD, SD, SMP	4,421,372,000
	Rehab Ruang Sekolah dan Bangunan Pendukung Sekolah	2,500,000,000
	Sarana Prasarana Sekolah dan Pendukung Sekolah	1,000,000,000
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PAGU PROGRAM	50,000,000
	PAGU PRIORITAS	50,000,000
	Perda 7 2020 Takmiliyah	50,000,000
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PAGU PROGRAM	4,156,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
	PAGU PRIORITAS	0
	Insentif Guru NON PNS	0
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PAGU PROGRAM	12,030,000
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PAGU PROGRAM	225,000,000
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	PAGU PROGRAM	409,370,700
	PAGU PRIORITAS	409,370,700
	Optimalisasi Kesenian Tradisional (Kajian dan Penciptaan Lagu Daerah dan Tarian Daerah Kabupaten Serang)	409,370,700
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PAGU PROGRAM	35,063,000
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PAGU PROGRAM	150,000,000
DINAS KESEHATAN	TOTAL PAGU PROGRAM	339,907,884,479
	TOTAL PAGU PRIORITAS	93,017,833,074
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	245,447,107,680
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	1,860,000,000
	Belanja Gaji	134,144,368,680
	BLUD/DAK Dinkes	36,190,759,000
	BLUD Puskesmas	73,251,980,000
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PAGU PROGRAM	93,517,833,074
	PAGU PRIORITAS	93,017,833,074
	DAU Belanja Obat-obatan	6,125,573,000
	Obat-obatan Gizi	297,459,000
	Bagi Hasil Cukai Rokok BPJS Kes PBPU dan BP Pemda	0
	DAU BPJS Kes PBPU dan BP Pemda	81,872,191,481
	Pembangunan Gedung Kesehatan dan Penunjang	2,673,009,593
	Belanja Alat Kesehatan, Kedokteran dan Penunjang	1,022,000,000
	Jasa Tenaga Kesehatan	777,600,000
	Hibah Bidang Kesehatan	250,000,000
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PAGU PROGRAM	750,000,000
	PAGU PRIORITAS	0
	Jasa Tenga Kesehatan	0
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PAGU PROGRAM	150,000,000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PAGU PROGRAM	42,943,725
1.02.07 PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	PAGU PROGRAM	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
RSDP	TOTAL PAGU PROGRAM	311,316,183,418
	PAGU PRIORITAS	1,000,000,000
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	310,316,183,418
	Belanja Gaji	93,835,667,000
	Belanja BLUD	216,480,516,418
	PAGU PRIORITAS	0
	Belanja Jasa Layanan Kesehatan ASN BLUD Pegawai	0
	Belanja Jasa Layanan Kesehatan Non ASN BLUD Barjas	0
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PAGU PROGRAM	1,000,000,000
	PAGU PRIORITAS	1,000,000,000
	Gedung Bangunan RS / Alat Kesehatan	0
	Jamian Kesehatan Kelas 3	1,000,000,000
DPUPR	TOTAL PAGU PROGRAM	97,631,268,952
	TOTAL PAGU PRIORITAS	46,294,085,432
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	37,351,623,520
	Belanja Gaji	33,351,623,520
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	2,000,000,000
	Operasional UPT Dinas	2,000,000,000
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PAGU PROGRAM	2,897,345,432
	PAGU PRIORITAS	2,247,345,432
	Jaringan Irigasi dan Pemeliharaannya	2,247,345,432
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PAGU PROGRAM	1,400,000,000
	PAGU PRIORITAS	1,200,000,000
	Jaringan Air Minum dan Pemeliharaannya	1,200,000,000
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PAGU PROGRAM	1,200,000,000
	PAGU PRIORITAS	913,720,000
	Pengadaan Gedung, Peralatan dan Pengolahan Sampah	913,720,000
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PAGU PROGRAM	932,300,000
	PAGU PRIORITAS	632,300,000
	Pemeliharaan Pengolahan Air Limbah	632,300,000
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PAGU PROGRAM	950,000,000
	PAGU PRIORITAS	750,000,000
	Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase	750,000,000
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PAGU PROGRAM	7,750,000,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
	PAGU PRIORITAS	7,550,720,000
	Bangunan Gedung dan Pemeliharaan	2,350,720,000
	Gedung Pemerintahan	0
	Bangunan Pusat Oleh-oleh dan Wisata 2027	3,000,000,000
	Bangunan Pusat Ekraf dan Budaya 2028	0
	Bangunan Ikonik Anyer (Tugu Selamat Datang)	1,500,000,000
	Kajian Lokasi Landmark Kabupaten Serang (SID)	250,000,000
	Kajian Lokasi Pusat Pertumbuhan / Ruang Terbuka Publik (SID)	250,000,000
	Kajian dan FS Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Serang	200,000,000
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PAGU PROGRAM	2,200,000,000
	PAGU PRIORITAS	1,700,000,000
	Fasos/Fasum Kecamatan dan Ruang Publik (Ciruas)	1,700,000,000
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAGU PROGRAM	40,000,000,000
	PAGU PRIORITAS	30,000,000,000
	Bangun dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan	30,000,000,000
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAGU PROGRAM	1,100,000,000
	PAGU PRIORITAS	300,000,000
	Sosialisasi Pelayanan Perizinan PBG	300,000,000
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAGU PROGRAM	1,800,000,000
	PAGU PRIORITAS	1,000,000,000
	Revisi RTRW lanjutan sampai Penetapan Perda	1,000,000,000
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PAGU PROGRAM	50,000,000
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PAGU PROGRAM	0
	PAGU PRIORITAS	0
	Lahan Persampahan / Fasilitas Lainnya	0
DPRKP	TOTAL PAGU PROGRAM	15,425,403,708
	TOTAL PAGU PRIORITAS	5,184,697,000
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	9,042,469,209
	Belanja Gaji	8,156,962,046
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	885,507,163
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PAGU PROGRAM	148,237,952
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PAGU PROGRAM	1,484,697,000
	PAGU PRIORITAS	1,184,697,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
	Rehabilitasi kawasan Permukiman (Jalan Lingkungan)	1,184,697,000
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PAGU PROGRAM	3,500,000,000
	PAGU PRIORITAS	3,000,000,000
	Bantuan Rutilahu	3,000,000,000
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PAGU PROGRAM	1,200,000,000
	PAGU PRIORITAS	1,000,000,000
	Bangunan Fasilitas Umum, Sarpras dan Pemeliharaanya	1,000,000,000
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PAGU PROGRAM	49,999,547
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
SATPOL PP	TOTAL PAGU PROGRAM	12,644,430,680
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	11,944,430,680
	Belanja Gaji	11,134,925,042
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	809,505,638
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PAGU PROGRAM	700,000,000
BPBD	TOTAL PAGU PROGRAM	16,166,856,525
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	15,166,856,525
	Belanja Gaji	14,384,301,896
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	782,554,629
	PAGU PRIORITAS	0
	Pengadaan Kendaraan Kebakaran	0
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PAGU PROGRAM	500,000,000
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PAGU PROGRAM	500,000,000
	PAGU PRIORITAS	0
	Pengadaan Kendaraan Kebakaran	0
DINAS SOSIAL	TOTAL PAGU PROGRAM	12,911,340,101
	TOTAL PAGU PRIORITAS	5,321,953,000
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	7,114,471,000
	Belanja Gaji	6,499,546,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	614,925,000
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PAGU PROGRAM	898,126,201
	PAGU PRIORITAS	882,800,000
	Tenaga Ahli TSKS	382,800,000
	Hibah Karang Taruna	500,000,000
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PAGU PROGRAM	300,000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PAGU PROGRAM	194,939,900
	PAGU PRIORITAS	100,000,000
	Rehabilitasi sosial PMKS	100,000,000
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PAGU PROGRAM	4,000,000,000
	TOTAL PAGU PRIORITAS	3,700,000,000
	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin/Rentan (UEP)	3,250,000,000
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat (KUBE)	300,000,000
	Dukungan Sekolah Rakyat	150,000,000
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	TOTAL PAGU PROGRAM	668,428,000
	PAGU PRIORITAS	639,153,000
	Pangan Siaga Bencana	533,268,400
	Barang Siaga Bencana	105,884,600
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		35,075,000
DISNAKERTRANS	TOTAL PAGU PROGRAM	9,881,841,349
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1,225,000,000
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	8,101,784,349
	Belanja Gaji	7,396,995,644
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	704,788,705
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PAGU PROGRAM	130,900,000
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PAGU PROGRAM	1,100,000,000
	PAGU PRIORITAS	1,000,000,000
	Pelatihan Angkatan Kerja	1,000,000,000
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PAGU PROGRAM	375,000,000
	PAGU PRIORITAS	225,000,000
	Job Fair	225,000,000
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PAGU PROGRAM	100,000,000
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PAGU PROGRAM	74,157,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PAGU PROGRAM	
DISKETAPANG DAN PERTANIAN	TOTAL PAGU PROGRAM	16,681,377,084
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1,429,288,001
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	14,339,538,688
	Belanja Gaji	13,497,042,600
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	842,496,088
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PAGU PROGRAM	225,000,000
	PAGU PRIORITAS	150,000,000
	LPMDes (Lumbung Pangan Masyarakat Desa)	150,000,000
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PAGU PROGRAM	325,205,000
	PAGU PRIORITAS	265,000,000
	Cadangan Beras	100,000,000
	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	165,000,000
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PAGU PROGRAM	32,600,000
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PAGU PROGRAM	6,000,000
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PAGU PROGRAM	1,250,000,000
	PAGU PRIORITAS	1,000,000,000
	Belanja Pupuk	500,000,000
	Bibit dan Sarana Ternak/Pertanian (Bawang Merah)	500,000,000
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PAGU PROGRAM	250,000,000
	PAGU PRIORITAS	0
	Belanja Pemeliharaan Irigasi	0
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PAGU PROGRAM	56,579,520
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PAGU PROGRAM	32,769,975
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PAGU PROGRAM	13,683,901
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PAGU PROGRAM	150,000,000
	PAGU PRIORITAS	14,288,001
	Belanja Bahan Bibit Tanaman	14,288,001
DLH	TOTAL PAGU PROGRAM	45,076,591,431
	TOTAL PAGU PRIORITAS	22,052,322,931

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	21,552,766,968
	Belanja Gaji	20,030,169,088
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	1,522,597,880
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PAGU PROGRAM	72,000,000
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PAGU PROGRAM	150,000,000
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PAGU PROGRAM	198,202,532
	PAGU PRIORITAS	186,400,000
	Belanja Bibit Tanaman	186,400,000
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PAGU PROGRAM	56,800,000
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PAGU PROGRAM	65,165,000
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PAGU PROGRAM	6,600,000
	PAGU PRIORITAS	0
	Edukasi Persampahan edukasi dan penyediaan alat persampahan)	0
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PAGU PROGRAM	52,134,000
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PAGU PROGRAM	57,000,000
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PAGU PROGRAM	22,865,922,931
	PAGU PRIORITAS	21,865,922,931
	pembayaran pembuangan sampah ke TPA (Tipping Fee)	13,629,598,000
	Honor Petugas Persampahan	0
	Operasional Kendaraan Sampah	2,197,264,931
	Bahan Habis Pakai Persampahan	539,060,000
	Belanja Modal Alat Persampahan	3,500,000,000
	Pemeliharaan Kendaraan Persampahan	2,000,000,000
DISDUKCAPIL	TOTAL PAGU PROGRAM	18,297,715,200
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1,500,000,000
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	18,157,050,600
	Belanja Gaji	15,657,050,600
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	1,000,000,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
	PAGU PRIORITAS	1,500,000,000
	Belanja modal Alat Pelayanan Kependudukan	500,000,000
	Belanja Bahan Habis Pakai Administrasi Kependudukan	1,000,000,000
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PAGU PROGRAM	30,000,000
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PAGU PROGRAM	30,000,000
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PAGU PROGRAM	72,735,600
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PAGU PROGRAM	7,929,000
DPMD	TOTAL PAGU PROGRAM	27,809,221,026
	TOTAL PAGU PRIORITAS	18,982,919,056
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	8,190,338,969
	Belanja Gaji	7,665,751,786
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	524,587,183
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	PAGU PROGRAM	24,200,001
	PAGU PRIORITAS	24,200,000
	Supporting KPP Kemendes (Cikedung)	24,200,000
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PAGU PROGRAM	35,165,000
	PAGU PRIORITAS	35,165,000
	Supporting KPP Kemendes (Cikedung)	35,165,000
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PAGU PROGRAM	7,559,517,056
	PAGU PRIORITAS	7,359,517,056
	BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa	5,709,517,056
	Pilkades	1,500,000,000
	PAM Pilkades	
	Pembinaan dan Pelatihan Administrasi Desa	150,000,000
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PAGU PROGRAM	12,000,000,000
	PAGU PRIORITAS	11,564,037,000
	Reward Kader Posyandu	9,258,000,000
	PKK	350,000,000
	BUMDESMA	23,000,000
	TTG	38,101,000
	LKBB	400,000,000
	Belanja JKK dan JKM	1,494,936,000
DKBP3A	TOTAL PAGU PROGRAM	24,449,473,180
	TOTAL PAGU PRIORITAS	185,000,000
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	23,237,098,433
	Belanja Gaji	9,864,815,880
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	538,742,553
	DAK Non Fisik	12,833,540,000
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PAGU PROGRAM	250,000,000
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PAGU PROGRAM	88,920,000
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PAGU PROGRAM	49,999,984
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PAGU PROGRAM	11,999,763
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PAGU PROGRAM	26,455,000
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PAGU PROGRAM	285,000,000
	PAGU PRIORITAS	185,000,000
	UPTD PPA	150,000,000
	Kabupaten Serang Layak Anak	35,000,000
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PAGU PROGRAM	200,000,000
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PAGU PROGRAM	150,000,000
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PAGU PROGRAM	150,000,000
DISHUB	TOTAL PAGU PROGRAM	33,505,340,451
	TOTAL PAGU PRIORITAS	14,285,349,609
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	18,682,265,842
	Belanja Gaji	17,397,533,228
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	1,284,732,614
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PAGU PROGRAM	14,685,349,609
	PAGU PRIORITAS	14,285,349,609
	Pengadaan PJU	2,000,000,000
	Pemeliharaan PJU	2,000,000,000
	Pengadaan Rambu-Rambu	100,000,000
	Pemeliharaan Rambu-rambu	200,000,000
	Listrik PJU BPJT	9,985,349,609
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PAGU PROGRAM	100,000,000
2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	PAGU PROGRAM	225,000
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PAGU PROGRAM	37,500,000
DISKOMINFOSATIK	TOTAL PAGU PROGRAM	12,751,548,540
	TOTAL PAGU PRIORITAS	4,044,510,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	7,720,038,540
	Belanja Gaji	6,740,700,880
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	979,337,660
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PAGU PROGRAM	2,944,510,000
	PAGU PRIORITAS	2,544,510,000
	PPID dan Kanal Pengaduan	50,000,000
	Media Nasional, Luar Ruangan dan Online	2,100,000,000
	Publikasi	94,510,000
	Serang Gawe	300,000,000
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PAGU PROGRAM	1,700,000,000
	PAGU PRIORITAS	1,300,000,000
	Internet Gratis Ruang Publik (smart city)	1,000,000,000
	Layanan Nomor Kedaruratan 112 (smart city)	200,000,000
	Pengembangan Aplikasi E-Gov (Lisensi)	100,000,000
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PAGU PROGRAM	187,000,000
	PAGU PRIORITAS	150,000,000
	Pengembangan Satu Data Indonesia	150,000,000
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PAGU PROGRAM	200,000,000
	PAGU PRIORITAS	50,000,000
	penguatan Indeks KAMI	50,000,000
DISKOUMPERINDAG	TOTAL PAGU PROGRAM	14,661,718,445
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1,843,792,000
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	12,093,602,645
	Belanja Gaji	11,393,381,812
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	700,220,833
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PAGU PROGRAM	50,000,000
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PAGU PROGRAM	50,000,000
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PAGU PROGRAM	12,705,200
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PAGU PROGRAM	53,792,000
	PAGU PRIORITAS	53,792,000
	Dukungan Kopdes Merah Putih	53,792,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PAGU PROGRAM	19,600,000
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PAGU PROGRAM	150,000,000
	PAGU PRIORITAS	108,000,000
	Pembinaan dan Fasilitasi UMKM Pelaku UMKM	108,000,000
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PAGU PROGRAM	1,100,000,000
	PAGU PRIORITAS	1,000,000,000
	Pelatihan UMKM Pelaku UMKM	1,000,000,000
2.17.09 PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	PAGU PROGRAM	0
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PAGU PROGRAM	850,000
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PAGU PROGRAM	30,822,600
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PAGU PROGRAM	313,171,000
	Bazar dan operasi Pasar	250,000,000
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PAGU PROGRAM	196,575,000
	PAGU PRIORITAS	150,000,000
	Pameran Trade Expo Kab. Serang	150,000,000
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PAGU PROGRAM	37,800,000
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PAGU PROGRAM	250,000,000
	PAGU PRIORITAS	232,000,000
	Pameran APKASI	232,000,000
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PAGU PROGRAM	300,000,000
	PAGU PRIORITAS	300,000,000
	Pelatihan Sumber Daya Industri	200,000,000
	Pameran Dekranasda	100,000,000
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PAGU PROGRAM	2,400,000
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PAGU PROGRAM	400,000
DPMPTSP	TOTAL PAGU PROGRAM	12,390,239,787
	TOTAL PAGU PRIORITAS	30,000,000
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TOTAL PAGU PROGRAM	11,937,615,161
	Belanja Gaji	10,087,615,161
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	1,850,000,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PAGU PROGRAM	118,495,800
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PAGU PROGRAM	101,028,001
	PAGU PRIORITAS	30,000,000
	Pameran Penanaman Modal	30,000,000
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PAGU PROGRAM	63,717,750
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PAGU PROGRAM	94,383,075
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PAGU PROGRAM	75,000,000
DISPORAPAR	TOTAL PAGU PROGRAM	12,273,194,620
	TOTAL PAGU PRIORITAS	5,766,200,001
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	5,806,700,969
	Belanja Gaji	5,358,379,979
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	448,320,990
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PAGU PROGRAM	316,605,001
	PAGU PRIORITAS	250,000,000
	Hibah KNPI	250,000,000
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGA	PAGU PROGRAM	4,350,000,000
	PAGU PRIORITAS	4,200,000,000
	Hibah KONI	4,000,000,000
	Hibah KORMI	200,000,000
	Bonus Atlet	0
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PAGU PROGRAM	300,000,000
	PAGU PRIORITAS	300,000,000
	Hibah Pramuka	300,000,000
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PAGU PROGRAM	277,700,000
	PAGU PRIORITAS	127,700,000
	Penetapan Integrasi Wisata Halal dan Religi, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Fasilitas Bantuan Sarpras Pariwisata, Sosialisasi Daya Tarik Wisata/ Desa Wisata	127,700,000
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PAGU PROGRAM	1,029,182,400
	PAGU PRIORITAS	846,000,000
	Pengelolaan Media Pariwisata dan Ekraf (Influencer dan penyelenggaraan acara)	96,000,000
	Festival Anyer-Panarukan	750,000,000
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PAGU PROGRAM	6,500,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PAGU PROGRAM	186,506,250
	PAGU PRIORITAS	42,500,001
	Pelatihan dan Sertifikasi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	42,500,001
DPKD	TOTAL PAGU PROGRAM	7,592,134,710
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	7,153,825,736
	Belanja Gaji	6,153,825,736
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	1,000,000,000
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PAGU PROGRAM	235,009,697
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PAGU PROGRAM	16,573,752
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PAGU PROGRAM	184,725,525
	Digitalisasi Arsip (scanner dan sewa cloud)	75,000,000
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PAGU PROGRAM	1,000,000
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PAGU PROGRAM	1,000,000
DINAS PERIKANAN	TOTAL PAGU PROGRAM	12,992,084,320
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1,382,800,583
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	10,546,381,734
	Belanja Gaji	9,690,099,680
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	856,282,054
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAGU PROGRAM	456,945,117
	PAGU PRIORITAS	359,404,500
	Pengembangan Nelayan Kecil dan Bantuan Sarpras	359,404,500
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PAGU PROGRAM	1,885,749,757
	PAGU PRIORITAS	1,000,000,000
	Pelatihan Gapokdakan dan Bantuan Sarpras	1,000,000,000
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAGU PROGRAM	11,970,400
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PAGU PROGRAM	91,037,312
	PAGU PRIORITAS	23,396,083
	Pembinaan Ijin Usaha, Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan dan Fasilitasi Usaha Mikro Perikanan	23,396,083
SETDA	TOTAL PAGU PROGRAM	71,713,356,167

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
	TOTAL PAGU PRIORITAS	10,899,000,001
4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	56,373,014,567
	Belanja Gaji	36,765,223,969
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	18,607,790,598
	PAGU PRIORITAS	1,000,000,000
	Fasilitasi dan Operasional KD/WKD dan Sekretariat Daerah (faspim)	1,000,000,000
	Pelantikan KD/WKD	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAGU PROGRAM	13,485,000,000
	PAGU PRIORITAS	9,835,000,000
	Belanja Tenaga Ahli Bantuan Hukum	1,200,000,000
	Honorarium Keterangan Ahli (Banhuk)	225,000,000
	Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat	0
	Hibah Kesra/MTQ dll	7,500,000,000
	Hibah Beasiswa Lanjutan	910,000,000
	Penunjang	3,650,000,000
	Iuran wajib anggota APKASI	30,000,000
	Iuran wajib anggota ASPEKSINDO	20,000,000
	Iuran Sewa Kantor Perwakilan Perdagangan dan Investasi Daerah (PPID) APKASI	200,000,000
	Penyusunan Dokumen LKPJ	200,000,000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	300,000,000
	Penyusunan Dokumen LPPD	250,000,000
	Penyusunan Dokumen Laporan SPM	125,000,000
	Fasilitas MoU dan PKS Pemda dan Pihak Ketiga	125,000,000
	Naskah akademik perubahan Perda Lambang Daerah	250,000,000
	Sayembara Lambang Daerah	150,000,000
	Penunjang lainnya	2,000,000,000
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PAGU PROGRAM	1,855,341,600
	PAGU PRIORITAS	64,000,001
	TPID	64,000,001
SET DPRD	TOTAL PAGU PROGRAM	100,268,636,797
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
4.02 SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	65,768,636,797
	Belanja Gaji	61,685,903,772
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	4,082,733,025
	PAGU PRIORITAS	
	Pelantikan DPRD	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
	Pelantikan KD/WKD	
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PAGU PROGRAM	34,500,000,000
BAPPERIDA	TOTAL PAGU PROGRAM	22,034,685,111
	TOTAL PAGU PRIORITAS	3,925,515,473
5.01 PERENCANAAN		
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	15,084,590,638
	Belanja Gaji	12,663,917,653
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	2,420,672,986
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PAGU PROGRAM	3,331,262,381
	PAGU PRIORITAS	3,331,262,381
	Optimalisasi Perencanaan Pengendalian	1,679,785,477
	Dokrenda RKPD	1,651,476,904
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PAGU PROGRAM	2,400,000,000
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PAGU PROGRAM	
	PAGU PRIORITAS	0
	Dukungan Data RPJMD (Indeks Kebahagiaan)	0
5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	PAGU PROGRAM	1,218,832,092
	PAGU PRIORITAS	594,253,092
	Dukungan Data Evaluasi RPJMD	594,253,092
5.02 KEUANGAN		
BPKAD	TOTAL PAGU PROGRAM	607,057,153,115
	TOTAL PAGU PRIORITAS	580,262,159,841
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	35,524,654,074
	Belanja Gaji	23,760,334,074
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	1,500,000,000
	PAGU PRIORITAS	10,264,320,000
	Sewa Kendaraan Dinas	10,264,320,000
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PAGU PROGRAM	570,032,499,041
	PAGU PRIORITAS	569,997,839,841
	Fasilitasi TAPD	613,000,000
	BTT	541,532,499,041
	DD, ADD, BKK, BHPRD (Pilkades dan PAM)	22,500,000,000
	BKK Desa (Pustu)	3,000,000,000
	BPJS Tenaga Kerja Pekerja Rentan	2,352,340,800
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PAGU PROGRAM	1,500,000,000
BAPENDA	TOTAL PAGU PROGRAM	56,804,194,238

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
	TOTAL PAGU PRIORITAS	3,485,388,000
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	51,440,153,238
	Belanja Gaji	48,443,704,434
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	2,996,448,804
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PAGU PROGRAM	5,364,041,000
	PAGU PRIORITAS	3,485,388,000
	Belanja Barang Untuk Masyarakat	
	Aset Tak Berwujud (Software)	
	Souvenir	
	Pajak Award	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	885,388,000
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	600,000,000
	Penagihan Pajak Daerah	500,000,000
	Pemutakhiran Objek Pajak Daerah	500,000,000
	Sinergitas optimalisasi Opsen PKB dan BBNKB	500,000,000
	Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah	500,000,000
BKPSDM	TOTAL PAGU PROGRAM	11,562,856,085
	TOTAL PAGU PRIORITAS	2,672,503,000
5.03 KEPEGAWAIAN		
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	7,949,218,685
	Belanja Gaji	6,996,764,644
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	952,454,041
	PAGU PRIORITAS	0
	Gaji P3K	0
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PAGU PROGRAM	1,371,150,000
	PAGU PRIORITAS	621,150,000
	Pengadaan ASN dan Promosi Mutasi ASN	621,150,000
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PAGU PROGRAM	2,242,487,400
	PAGU PRIORITAS	2,051,353,000
	Diklat Peningkatan Kompetensi ASN	2,051,353,000
INSPEKTORAT	TOTAL PAGU PROGRAM	28,523,342,681
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1,500,000,000
6.01 INSPEKTORAT DAERAH		
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	25,773,342,681
	Belanja Gaji	24,291,314,640
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	1,482,028,041
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PAGU PROGRAM	2,250,000,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
	PAGU PRIORITAS	1,500,000,000
	Pengawasan dan Monitoring Kinerja Perangkat Daerah	1,500,000,000
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PAGU PROGRAM	500,000,000
BAKESBANGPOL	TOTAL PAGU PROGRAM	12,298,033,840
	TOTAL PAGU PRIORITAS	6,028,190,001
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK --> Unsur Pemerintahan Umum		
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	5,707,338,840
	Belanja Gaji	4,962,697,168
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	744,641,672
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PAGU PROGRAM	1,131,368,000
	PAGU PRIORITAS	1,000,000,000
	Paskibra	1,000,000,000
	HANI	0
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PAGU PROGRAM	4,074,240,000
	PAGU PRIORITAS	4,000,000,000
	Hibah Banparpol	4,000,000,000
	Hibah Pileg Pilkada dan PAM	0
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PAGU PROGRAM	52,103,000
	PAGU PRIORITAS	0
	Pembinaan Ormas	0
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PAGU PROGRAM	185,905,000
	PAGU PRIORITAS	120,000,000
	Hibah FKUB	100,000,000
	IKUB	20,000,000
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PAGU PROGRAM	1,147,079,000
	PAGU PRIORITAS	908,190,001
	Fasilitasi FORKOPIMDA	908,190,001
7.01 KECAMATAN		
1. KECAMATAN ANYAR	TOTAL PAGU PROGRAM	6,019,539,408
	TOTAL PAGU PRIORITAS	400,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAGU PROGRAM	5,295,515,808
	Belanja Gaji	5,119,539,408
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	175,976,400

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		400,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	400,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		55,020,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		22,180,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		196,823,600
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		50,000,000
2. KECAMATAN BANDUNG	TOTAL PAGU PROGRAM	3,468,595,880
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,133,891,879
	Belanja Gaji	2,968,595,880
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	165,295,999
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		55,483,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		63,840,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		198,981,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		11,400,001
3. KECAMATAN BAROS	TOTAL PAGU PROGRAM	4,372,866,463
	TOTAL PAGU PRIORITAS	450,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,592,505,463
	Belanja Gaji	3,422,866,463
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	169,639,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		450,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	450,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		50,281,500
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		55,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		189,426,900
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		35,652,600
4. KECAMATAN BINUANG	TOTAL PAGU PROGRAM	3,278,066,584
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,867,531,184
	Belanja Gaji	2,778,066,584
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	89,464,600
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100,740,800

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		83,677,200
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		17,479,200
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		108,638,200
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100,000,000
5. KECAMATAN BOJONEGARA	TOTAL PAGU PROGRAM	3,639,307,613
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,372,383,813
	Belanja Gaji	3,139,307,613
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	233,076,200
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		95,556,800
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		6,900,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		9,900,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		131,167,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		23,400,000
6. KECAMATAN CARENANG	TOTAL PAGU PROGRAM	3,403,087,033
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,069,984,664
	Belanja Gaji	2,903,087,033
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	166,897,631
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		74,122,369
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		39,220,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		9,310,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		180,210,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		30,240,000
7. KECAMATAN CIKANDE	TOTAL PAGU PROGRAM	4,815,854,730
	TOTAL PAGU PRIORITAS	650,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,862,639,058
	Belanja Gaji	3,665,854,730
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	196,784,328
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		650,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	650,000,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		66,052,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		47,620,672
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		149,543,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		40,000,000
8. KECAMATAN CIKEUSAL	TOTAL PAGU PROGRAM	3,375,547,276
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,037,304,876
	Belanja Gaji	2,875,547,276
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	161,757,600
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		56,649,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		55,080,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		10,880,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		188,433,400
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		27,200,000
9. KECAMATAN CINANGKA	TOTAL PAGU PROGRAM	4,379,723,772
	TOTAL PAGU PRIORITAS	500,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,583,871,772
	Belanja Gaji	3,379,723,772
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	204,148,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		500,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	500,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		50,000,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		25,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		190,000,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		30,852,000
10. KECAMATAN CIOMAS	TOTAL PAGU PROGRAM	4,028,131,312
	TOTAL PAGU PRIORITAS	150,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,612,431,312
	Belanja Gaji	3,378,131,312
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	234,300,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		150,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	150,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		50,000,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		30,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		150,000,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		35,700,000
11. KECAMATAN CIRUAS	TOTAL PAGU PROGRAM	5,909,654,246
	TOTAL PAGU PRIORITAS	500,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5,124,489,246
	Belanja Gaji	4,909,654,246
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	214,835,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		500,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	500,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		79,891,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		41,474,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		120,000,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		43,800,000
12. KECAMATAN GUNUNGSARI	TOTAL PAGU PROGRAM	3,504,171,360
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,203,922,360
	Belanja Gaji	3,004,171,360
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	199,751,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		70,863,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		27,189,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		11,733,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		147,214,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		43,250,000
13. KECAMATAN JAWILAN	TOTAL PAGU PROGRAM	3,645,460,155
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,375,232,153
	Belanja Gaji	3,145,460,155
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	229,771,998
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		70,060,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		36,420,001
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5,000,001

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		138,903,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		19,845,000
14. KECAMATAN KIBIN	TOTAL PAGU PROGRAM	5,475,379,192
	TOTAL PAGU PRIORITAS	400,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,807,240,992
	Belanja Gaji	4,575,379,192
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	231,861,800
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		400,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	400,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		47,672,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		46,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		130,586,200
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		43,880,000
15. KECAMATAN KOPO	TOTAL PAGU PROGRAM	3,773,000,169
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,401,349,769
	Belanja Gaji	3,273,000,169
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	128,349,600
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		69,035,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		78,651,200
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		40,200,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		159,164,200
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		24,600,000
16. KECAMATAN KRAGILAN	TOTAL PAGU PROGRAM	6,076,326,932
	TOTAL PAGU PRIORITAS	500,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5,309,158,532
	Belanja Gaji	5,076,326,932
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	232,831,600
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		500,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	500,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		38,000,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		39,168,400
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		150,000,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		40,000,000
17. KECAMATAN KRAMATWATU	TOTAL PAGU PROGRAM	6,241,941,216
	TOTAL PAGU PRIORITAS	700,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5,235,603,216
	Belanja Gaji	5,041,941,216
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	193,662,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		700,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	700,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		60,000,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		50,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		146,338,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		50,000,000
18. KECAMATAN LEBAKWANGI	TOTAL PAGU PROGRAM	3,653,562,902
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,381,242,902
	Belanja Gaji	3,153,562,902
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	227,680,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		37,830,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		34,275,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		30,425,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		131,790,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		38,000,000
19. KECAMATAN MANCAK	TOTAL PAGU PROGRAM	3,662,879,304
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,361,734,604
	Belanja Gaji	3,162,879,304
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	198,855,300
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		83,298,700
	Persampahan & Lingkungan 2030	0
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		20,000,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		18,445,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		150,956,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		28,445,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
20. KECAMATAN PABUARAN	TOTAL PAGU PROGRAM	4,293,235,256
	TOTAL PAGU PRIORITAS	300,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,703,097,256
	Belanja Gaji	3,493,235,256
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	209,862,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		300,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	300,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		52,845,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		30,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		175,858,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		31,435,000
21. KECAMATAN PADARINCANG	TOTAL PAGU PROGRAM	3,515,641,380
	TOTAL PAGU PRIORITAS	200,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,081,141,380
	Belanja Gaji	2,815,641,380
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	265,500,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		200,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	200,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		30,000,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		20,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		150,000,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		34,500,000
22. KECAMATAN PAMARAYAN	TOTAL PAGU PROGRAM	3,745,633,160
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,422,571,460
	Belanja Gaji	3,245,633,160
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	176,938,300
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		74,021,700
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		48,600,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		29,240,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		140,000,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		31,200,000
23. KECAMATAN PETIR	TOTAL PAGU PROGRAM	3,690,769,552

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,323,786,902
	Belanja Gaji	3,190,769,552
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	133,017,350
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		137,271,650
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		53,710,600
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		9,988,400
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		145,075,200
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		20,936,800
24. KECAMATAN PONTANG	TOTAL PAGU PROGRAM	5,083,132,468
	TOTAL PAGU PRIORITAS	310,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,517,159,620
	Belanja Gaji	4,273,132,468
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	244,027,152
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		310,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	310,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		45,430,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		31,591,712
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		143,431,136
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		35,520,000
25. KECAMATAN PULOAMPEL	TOTAL PAGU PROGRAM	3,211,561,760
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,858,711,760
	Belanja Gaji	2,711,561,760
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	147,150,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		69,615,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		70,250,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		20,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		161,560,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		31,425,000
26. KECAMATAN TANARA	TOTAL PAGU PROGRAM	3,926,847,384
	TOTAL PAGU PRIORITAS	310,000,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,336,847,384
	Belanja Gaji	3,116,847,384
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	220,000,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		310,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	310,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		50,000,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		40,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		150,000,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		40,000,000
27. KECAMATAN TIRTAYASA	TOTAL PAGU PROGRAM	4,221,904,340
	TOTAL PAGU PRIORITAS	250,000,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,675,400,340
	Belanja Gaji	3,471,904,340
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	203,496,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		250,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	250,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		63,570,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		10,360,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		172,394,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		50,180,000
28. KECAMATAN TUNJUNGTEJA	TOTAL PAGU PROGRAM	3,186,224,460
	TOTAL PAGU PRIORITAS	0
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,846,112,460
	Belanja Gaji	2,686,224,460
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	159,888,000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		67,508,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		41,675,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		30,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		154,474,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		46,455,000
29. KECAMATAN WARINGINKURUNG	TOTAL PAGU PROGRAM	4,008,885,240
	TOTAL PAGU PRIORITAS	150,000,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	2	3
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,680,879,640
	Belanja Gaji	3,358,885,240
	Belanja Penunjang Kesekretariatan	321,994,400
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		150,000,000
	Persampahan & Lingkungan 2030	150,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		40,000,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		15,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		80,000,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		43,005,600
TOTAL BELANJA		3,209,044,402,370

Sumber: Data Olahan Bapperida Kabupaten Serang, Tahun 2026.

5.2.2 Pendanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pendanaan daerah juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Alokasi pendanaan dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat. Pendanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 3 Pendanaan Indikatif Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20,990,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	20,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	144,659,890.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5,784,026,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10,223,600.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6,435,600.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2,000,000.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	4,654,500.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4,654,500.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3,055,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	20,100,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	3,005,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	504,002,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	410,190,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	40,077,200,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3,005,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5,650,000.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	60,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	34,200,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1,421,360,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,500,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20,025,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	60,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	20,000,000.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1,237,113,690.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,000,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,001,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,155,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	42,245,000.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10,185,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5,335,500.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	10,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	55,641,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	15,960,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	20,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	274,938,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10,740,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	39,710,746,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	57,479,500.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	38,996,500.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	20,210,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	79,856,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20,050,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	20,012,500.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	29,681,400.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20,859,500.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	20,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5,681,400.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	20,012,500.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8,359,800,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	82,440,200.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	20,000,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	21,499,692.00
SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	13,914,500.00
SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10,675,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	11,850,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12,684,800.00
SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	14,473,500.00
SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	23,963,500.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	27,500,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	983,958,310.00
SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	15,951,000.00
SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	87,228,000.00
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	132,774,480.00
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	139,976,352.00
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	171,830,000.00
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	99,982,944.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	121,175,424.00
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	332,750,000.00
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	399,300,000.00
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	199,650,000.00
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	173,030,000.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	159,720,000.00
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	139,976,064.00
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	164,744,525.00
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400,000,000.00
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	638,700,000.00
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30,000,000.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota		
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	195,300,000.00
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	128,000,000.00
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	620,000,000.00
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	21,654,000.00
SPM Bidang Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	25,082,100.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
dan Kawasan Pemukiman	huni bagi korban bencana kabupaten/kota		Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10,620,757.00
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	36,907,243.00
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	21,195,000.00
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	68,425,000.00
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	50,000,000.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	48,350,000.00
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	25,000,000.00
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	200,000,000.00
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	40,000,000.00
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25,000,188.00
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50,000,000.00
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	23,350,000.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
			Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	24,999,808.00
SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000.00
SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	150,095,000.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	12,500,000.00
SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2,000,000.00
SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1,500,000.00
SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Pemberian Layanan Kedaruratan	6,000,000.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
			Pengemis di Luar Panti Sosial		
SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	12,000,000.00
SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	500,000.00
SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3,000,000.00

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2027
1	2	3	4	5	6
SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	81,892,000.00
SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	41,690,000.00
SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	12,824,000.00
SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	533,268,396.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RENJA 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	200	200	11,850,000	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	100	10,223,600	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	2343	2343	79,856,000	
2	EKONOMI SYARIAH										
			4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	6	6	222,716,629	
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Pelaku Usaha	10	10	8,000,000	
			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	1	1	14,993,956	

[illegible]

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RENJA 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih									
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembedayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembedayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	8	8	207,566,000	
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	4	4	28,650,000	
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	80	80	24,950,000	
6	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH										
	Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih									
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0009	Pembedayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	10	10	495,000	
7	MAKAN BERGIZI GRATIS										
	Perluasan Akses Pendidikan	Makan Bergizi Gratis									
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	1	50,000,000	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RENJA 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	2244	2244	42,245,000	
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	35,000,000	
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	10	10	42,000,000	
8	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)										
	Ketahanan Pangan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)									
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	2500	2500	27,000,000	
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1,100,000,000	

[illegible]

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RENJA 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ketahanan Pangan	Pangan Akuatik									
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	4	4	0	
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	1	0	
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	8	8	207,566,000	
11	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA										
	Kesehatan untuk Semua	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota									
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	1	0	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas	Orang	269	269	6,204,497,142	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RENJA 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					
12	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH										
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah									
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	1	1	303,000,000	
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	140	140	236,160,000	
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1	1	151,000,000	
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	40	40	2,374,998,000	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RENJA 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	1	1	250,000,000	
13	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS										
	Kesehatan untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis									
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	2	82,872,191,481	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Laporan	1	1	397,166,700	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	1	1	397,166,700	
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPI	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	1	7,672,400	
14	PENANGGULANGAN BENCANA										
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	200,000,000	

[illegible]

[illegible]

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RENJA 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang	20	20	35,999,892	
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	20,000,000	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	2343	2343	79,856,000	
			2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	30	30	50,000,000	
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Lembaga	29	29	12,000,000	
18	PENGENDALIAN INFLASI										
	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi									
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	1	1	10,000,000	
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	5,000,000	

[illegible]

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RENJA 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pendidikan Dasar dan Menengah									
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	5,650,000	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	20,025,000	
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	20,990,000	
21	PERLINDUNGAN ANAK										
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	2,000,000	
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	Orang	290	290	21,455,000	
			5.01 PERENCANAAN	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	259,570,336	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU RENJA 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	2	10,675,000	
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	2	10,850,000	
22	SEKOLAH RAKYAT										
	Pengentasan Kemiskinan	Sekolah Rakyat									
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	925145	925145	75,175,000	
			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	40	40	20,000,000	
TOTAL										191,250,070,572	

Sumber: Hasil Rakortekbang Provinsi Banten Tahun 2026 dan Data SIPD RI Tahun 2027

5.2.4 Pendanaan Urusan Pemerintahan

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 juga disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang. Alokasi pagu indikatif pada masing-masing urusan pemerintahan dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan berdasarkan urusan pemerintahan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 5 Pendanaan Indikatif Urusan Pemerintahan Tahun 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
1.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.											
				Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal										
					2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	100	100	50,000,000.00	
							2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	50	50	20,000,000.00	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15) (4)
			alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.											
				Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional										
					3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
							3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	5,000,000.00	
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	10	10	100,000,000.00	
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								
							3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu	Dokumen	20	20	1,000,000.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
									yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					
							3.31.03.2.01. 0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/sta ndar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/sta ndar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah- Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	20	20	1,400,000.00	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
							1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2	2	128,000,000.00	
					1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
							1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	9	9	620,000,000.00	
							1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	2	2	407,772,000.00	
					1.03.10	PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN								
							1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	0.4	0.4	1,247,572,700.00	
							1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	3.7	3.7	17,178,989,900.00	
					1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
				Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
					2.15.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
							2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	550	550	2,000,000,000.00	
							2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Unit	4	4	10,000,000.00	
6.	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											
				Meningkatnya ketahanan pangan										
					2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
							2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	10	10	30,000,000.00	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
					3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								
							3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	149,990,000.00	
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
							3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	5	21	9,990,000.00	
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	5	10	4,992,400.00	
8.	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											
				Meningkatnya Produksi Pertanian										
					3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN								

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
						N SARANA PERTANIAN								
							3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	1	515,000,000.00	
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	3.75	3.75	50,000,000.00	
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
							3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B di Kabupaten/ Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B yang dikelola	Dokumen	1	1	30,000,000.00	
							3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B	Dokumen	1	1	60,000,000.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATA N	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
9.	2.21	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERSANDIA N	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .											
				Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah										
					2.21.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
			peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
				Lingkungan Hidup Berkualitas										
					2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
							2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	14	14	95,000,000.00	
							2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	1	1	100,000,000.00	
					2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
							2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	75	40	20,000,000.00	
							2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	70	70	50,000,000.00	
11.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
				Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan										
					1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
							1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	1	2	84,999,741.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
							1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	1	2	159,999,812.00	
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
							1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	1	1	400,000,000.00	
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	1	1	674,982,064.00	
12.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
				Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor										
					3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
							3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	30	30	5,000,000.00	
							3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	4	4	5,000,000.00	
13.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
				Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial										
					1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
			milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
				Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan										
					2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
							2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	80	80	1,000,000,000.00	
					2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
							2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	50	50	500,000.00	
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	30	1000	500,000.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
15.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
				Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa										
					2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								
							2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	1	26,618,000.00	
					2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								
							2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	200	200	5,862,317,056.00	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
			penyeludupan . Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).											
				Terakselerasi transformasi pemerintah digital di daerah										
					2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
							2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Dise minasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Orang	960000	960000	13,600,000.00	
							2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	Dokumen	2	2	305,609,000.00	
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
							2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Titik	53	73	903,000,000.00	
							2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi	Layanan	2	2	216,500,000.00	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
				ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional										
					8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
							8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	1000	1000	4,000,000,000.00	
							8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta	Orang	50	50	9,339,600.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
								Situasi Politik di Daerah	Pemantauan Situasi Pol					
					8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
							8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	Orang	120	120	54,627,528.00	
							8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Orang	100	100	53,759,628.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
								Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik					
19	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
				Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM										
					2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
							2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Unit Usaha	25	10	5,500,000.00	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
				Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional										
					3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								
							3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	5	5	911,518,678.00	
							3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	4	8	98,500,000.00	
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								
							3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	1	1	8,870,000.00	
							3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	1	1	5,000,000.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
21	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
				Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)										
					2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	100	100	25,712,500.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
							2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Objek	5	5	10,000,000.00	
							2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	1	1	41,912,700.00	
22	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan										
					1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
							1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Orang	2244	2244	42,245,000.00	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
				Kesehatan Untuk Semua										
					1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
							1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	2	-	
							1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	1	1	-	
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	8	8	6,125,573,000.00	
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
							1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	326	235	6,204,497,142.00	
24	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
				Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya										
					2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
							2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	60	60	4,200,000.00	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
			pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
				Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital										
					2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
							2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	2,999,800.00	
							2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	1	1	1,698,000.00	
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								

[illegible]

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
			kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
				Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga										
					2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								
							2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	80	80	22,657,200.00	
							2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi	1	1	9,967,000.00	
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAA N								
							2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan	Orang	15	240	25,000,000.00	

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
				Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat										
					2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
							2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	10	10	14,407,697.00	
							2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	10	10	9,368,000.00	
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								
							2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	2	2	8,600,000.00	
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	2	2	4,900,000.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
29	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar										
					1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
							1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	300	300	50,000,000.00	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROG RAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIA TAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIA TAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
							1.05.03.2.02. 0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/ Kota yang tertangani	Kegiatan	1	1	550,000.00	
							1.05.03.2.02. 0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota	Orang	250	250	550,000.00	
							1.05.03.2.02. 0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan- kawasan- strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	2	2	550,000.00	
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar										
					1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA								

[illegible]

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	PAGU INDIKATIF 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (14)	(15)4)
			alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa										
					2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								
							2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	58	58	20,933,348.00	
							2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	137	137	24,685,052.00	
TOTAL													53,749,329,876.00	

Sumber: Hasil Rakortekbang Provinsi Banten Tahun 2026 dan Data SIPD RI Tahun 2027

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari suatu kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKPPD) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6. 1 Target Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKPPD) Tahun 2027

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun		Keterangan
				2026	2027	
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	T1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Manusia	74,78	75,60	
		S1.1.1: Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Skor Kemampuan Literasi SD	56,96	59,46	Urusan Pendidikan
			Skor Kemampuan Numerasi SD	52,7	55,6	
			Skor Kemampuan Literasi SMP	62,90	64,00	
			Skor Kemampuan Numerasi SMP	59,63	61,13	
			Harapan Lama Sekolah	13,67	13,84	
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,1	8,31	
		S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	75,08	75,39	Urusan Kesehatan
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	96	97	
		S1.1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan	Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	≥94%	≥95%	
			Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	69,50%	70%	
		S1.1.4: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,5	62	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		S1.1.5: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	57,33	57,61	Urusan Kependudukan dan Olahraga
		S1.1.5: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga S1.1.6: Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Partisipasi Olahraga	0,258	0,259	Urusan Perpustakaan
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	58,43	62,87	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun		Keterangan
				2026	2027	
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	74,70	77,68	
			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	70	75	
	T1.2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan		Tingkat Kemiskinan	3,57-4,00	3,40-4,00	
		S1.2.1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,17	58,67	Urusan Sosial
		S1.2.2: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,95	94,15	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		S1.2.2: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak S1.2.3: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,505	0,492	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,71	64,47	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	7.11	9.78	
			Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	14.45	20.75	
			Persentase unit rumah di dalam perumahan yang terfasilitasi	64.44	66.16	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun		Keterangan
				2026	2027	
			Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum			
Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	T2.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi didukung infrastruktur yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,95	5,75-6,75	
		S2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	67,5	68,25	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		S2.1.2: Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	44,60	44,60	Urusan Perhubungan
		S2.1.3: Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian	Persentase Koperasi Sehat	19.59	22.04	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		S2.1.3: Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian S2.1.4: Meningkatnya daya saing industri	Rasio Kewirausahaan	0,75	1	
			Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	52	52	
			Pertumbuhan Wirausaha	3	3	
			Proporsi UMKM yang menjalin kemitraan	1	1	
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	47,00-47,2	47,2-47,5	Urusan Perindustrian
		S2.1.5: Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,15%	9,20%	Urusan Perdagangan
		S2.1.6: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	2,42	2,47	Urusan Pariwisata
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan	T3.1: Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal		Tingkat Pengangguran Terbuka	8,93-9,18	7,90-8,50	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun		Keterangan
				2026	2027	
berwawasan lingkungan						
		S3.1.1: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	23,17 85,75	23,75 86,57	Urusan Tenaga Kerja
		S3.1.2: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	89,42	92,11	Urusan Penanaman Modal
	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan		Gini Ratio	0,257-0.262	0.254-0.262	
		S3.2.1: Meningkatnya pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	68.85	69.02	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,02	68,09	Urusan Lingkungan Hidup
		S3.2.3: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	67	69	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
			Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB	7.88	7.72	
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan					
		S4.1.1: Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi hasil pertanian			Urusan Pertanian
			1. Tanaman Pangan	0,27	0,27	
			2. Hortikultura	5	5	
			3. Perkebunan	5	5	
			4. Peternakan	0,99	1	
		S4.1.2: Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82.14	82.51	Urusan Pangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun		Keterangan
				2026	2027	
		S4.1.3: Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	64.791,29	65.439,20	Urusan Kelautan dan Perikanan
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	T5.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	78,1	78,8	
		S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Urusan Komunikasi dan Informatika
		S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	1,2	1,2	Urusan Komunikasi dan Informatika
		S5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	88,75	88,90	Urusan Komunikasi dan Informatika
			Indeks Pelayanan Publik	4,3	4,4	Unsur Sekretariat Daerah
		S5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Pemda	78,25	78,50	Unsur Sekretariat Daerah
		S5.1.3: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.30	3.35	Unsur Pengawasan
		S5.1.4: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	95.75	96.25	Unsur Perencanaan
		S5.1.5: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	Unsur Keuangan
		S5.1.5: Terwujudnya pengelolaan	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	30,62	30,62	Unsur Keuangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun		Keterangan
				2026	2027	
		keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel S5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	84,39	84,64	Unsur Kepegawaian
		S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.65	2.69	Urusan Statistik
		S5.1.8: Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (indeks KAMI)	597	697	Urusan Persandian
		S5.1.9: Meningkatnya tata Kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	65	68	Urusan Kearsipan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	86,5	
		S5.1.10: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	82	83	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		S5.1.11: Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	72,2	72,2	Kewilayahan
		S5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	67,5	72,5	Urusan Pertanahan
		S5.1.13: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase hasil riset, invensi dan inovasi yang termanfaatkan	61	67	Unsur Penelitian dan Pengembangan
		S5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	100	Unsur Sekretariat DPRD
Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai	T6.1: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang		Capaian Aksi HAM	86	87	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun		Keterangan
				2026	2027	
religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM					
		S6.1.1: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	81.2	81.4	Unsur Pemerintahan Umum
		S6.1.2: Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan	Tingkat Warisan Seni, Budaya dan tradisi yang dilestarikan	36,36%	45,45%	Urusan Kebudayaan

Tabel 6. 2 Indikator Makro Kabupaten Serang

Hasil pembahasan target indikator makro pembangunan Kabupaten Serang tahun 2027 dalam rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahun 2026.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2027			
			RANCANGAN RKPD PROVINSI	RANCANGAN RKPD KAB/KOTA	RPJMD KAB. SERANG	HASIL RAKORTEK (RANKHIR RKPD)
1	2	3	4	5	6	7
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,0 – 7,4	5,50 - 6,05	5,75-6,75	5,75–6,05
2	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah		65,28- 67,24	68-73	65,28–68
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota	Persen		11,63-11,96		11,87–11,95
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,34 – 4,65	3,9 – 4,3	3,40-4,00	3,40-4,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,45 – 6.60	7,90	8,85-9	7,90-8,50
6	Rasio Gini	Nilai	0.312 – 0.333	0,245	0.254-0.262	0,245
7	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	0,575 (IMM)	75,1	75,60	75,00-75,60
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen		17,38	17,38	17,38
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks		68,09	68,09	68,09

Sumber : RPJMD 2025-2029

Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Serang Tahun 2027

N O	INDIKATOR	SATUA N	TAHUN						PENYESUAI AN TARGET RKPD 2027
			BASELIN E TAHUN 2024	2025			2027	2028	
				TARGET	REALISA SI	CAPAIA N (%)	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MIsi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul. Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan								
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin		73,83	74,1	100,37	75,6		75,6
	Skor Kemampuan Literasi SD	%	51.96	54,46	47,11	86,5	59,46	61.96	59,46
	Skor Kemampuan Numerasi SD	%	46.9	49,8	41,72	83,78	55,6	58.5	55,6
	Skor Kemampuan Literasi SMP	%	60.7	61,8	64,97	105,13	64	65.1	64,99
	Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	56.63	58,13	58,85	101,24	61,13	62.63	61,13
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.87	13,48	13,02	96,59	13,84	14,08	13,84
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.88	7,89	8,03	101,77	8,31	8,51	8,31
	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,91	74,8	75,39	100,79	75,37	75,65	75,39
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	95,04	95	93,64	98,57	97	98	97
	Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	%	≥91,44	≥93	98,93	106,38	≥95	≥96	≥96
	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	%	69,68	69	60,42	87,57	70	70,5	70
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	59,37	59,42	61,2	103	59,52	62	62
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)			57,04	57,04	100	57,61		57,61

N O	INDIKATOR	SATUA N	TAHUN					PENYESUAI AN TARGET RKPD 2027	
			BASELIN E TAHUN 2024	2025			2027		2028
				TARGET	REALISA SI	CAPAIA N (%)	TARGET		TARGET
1	2 Indeks Partisipasi Olahraga	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,256	0,255	99,61	0,259		0,259
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	54,3	54,3	3,52	6,48	62,87	67,67	62,87
	Tingkat Kemiskinan	%	4,51	4.00- 4.08	4,48	90,2	3.40- 4.00	3,25- 3,75	3.40-4.00
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	57,17	57,67	57,17	99,13	58,67	59,17	58,67
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,54	92,72	93,75	101,11	93,1	93,28	94,15
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,531	0,518	0,531	97,49	0,492	0,479	0,492
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62,23	62,97	62,23	98,82	64,47	65,23	64,47
	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	3,92	5,52	5,52	100	9,78		9,78
	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	7,53	10,16	13,1	128,94	20,75		20,75
	Persentase unit rumah di dalam perumahan yang terfasilitasi Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum	%	61	62,72	62,65	99,89	66,16		66,16
	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah								
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%		5.60- 6.60	5,17	92,32	5.75- 6.75	5.75- 6.75	5.75-6.75
	Indeks Kepuasan Layanan	Skor	65,62	66,25	71,71	108,24	71,71	71,71	71,71

N O	INDIKATOR	SATUA N	TAHUN					PENYESUAI AN TARGET RKPD 2027	
			BASELIN E TAHUN 2024	2025			2027		2028
				TARGET	REALISA SI	CAPAIA N (%)	TARGET		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Infrastruktur (IKLI)								
	Rasio Konektivitas	%	44,6	44,6	44,6	100	44,6	44,6	44,61
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%		46.70-47	46,44	99,44	47.2-47.5	47.2-47.5	47.2-47.5
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%		9,1	8,94	98,24	9,2	9,2	9,2
	Persentase Koperasi Sehat	%		14,69	10,92	74,34	22,04	22,04	22,04
	Rasio Kewirausahaa n	%		0,5	0,4	80	1	1	1
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi. Makan. Minum	%		2,4	2,37	98,75	2,47	2,47	2,47
	Misi 3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan								
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%		9.18-9.74	8,73	110,37	8.85-9	7,90-8,50	7,90-8,50
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp. Triliun		22,61	22,97	101,59	23,75	23,75	23,75
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta/TK	41,5	84,94	128	150,69	86,57	46,01	44,75
	Persentase Peningkatan Investasi	%	84,28	86,82	109,09	125,65	92,11	94,87	92,11
	Indeks Gini	%		0.262-0.266	0,252	105,26	0.254-0.262	0,245	0,245
	Indeks Desa	Angka	0	67,51	68,7	101,76	69,02	69,02	69,02
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	61,406	67,77	64,67	95,43	68,09	68,50	68,09

N O	INDIKATOR	SATUA N	TAHUN					PENYESUAI AN TARGET RKPD 2027	
			BASELIN E TAHUN 2024	2025			2027		2028
				TARGET	REALISA SI	CAPAIA N (%)	TARGET		TARGET
1	2 Indeks Penyelenggara an Trantibumlinm as	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nilai	-	65	66,44	102,22	69	71	69
	Misi 4. Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan								
	Kontribusi Sektor Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan Terhadap PDRB	%	9,37	8,06	9,82	121,84	7,72	7,53	7,72
	Persentase peningkatan produksi hasil pertanian								
	1. Tanaman Pangan	%	0,73	0,44	9,65	2.193,18	0,27	0,28	0,27
	2. Hortikultura	%	173	5	-12	-240	5	5	5
	3. Perkebunan	%	6	5	5	100	5	5	5
	4. Peternakan	%	-29	0,98	14	1.428,57	1	1	1
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	81,39	81,76	82,12	100,44	82,51	82,88	82,51
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Nilai Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kot a	Ton	66.660,91	64.368,25	67.584,74	105	65.439,20	66.093,58	65.439,20
	Misi 5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih. handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima								
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,77	77,4	80,77	104,35	78,8	79	PENYESUAIAN TARGET
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,15	4,2	4,15	98,81	4,4	4,5	4,4
	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	77,11	78	77,11	98,86	78,5	79	78,5

N O	INDIKATOR	SATUA N	TAHUN					PENYESUAI AN TARGET RKPD 2027	
			BASELIN E TAHUN 2024	2025			2027		2028
				TARGET	REALISA SI	CAPAIA N (%)	TARGET		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maturitas Penyelenggara an Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3,204	3,25	3,02	92,92	3,35	3,40	3,35
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	n/a	95,25	94,39	99,1	96,25	96,75	96,25
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Skor	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	WTP
	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	27,05	31,57	31,32	99,21	30,62	30,62	30,62
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	84,14	84,14	85,43	101,53	84,64	84,89	84,64
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,73	3,75	3,97	105,87			
	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Nilai					1,2	1,3	1,2
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	%	94,60	88,5	99,67	112,62	88,90	88,95	88,90
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,55	2,6	2,55	98,08	2,69	2,72	2,69
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	3,97	497	366	73,64	697	772	697
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	51,33	61	65,13	106,77	68	70	68
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,89	84	83,81	99,77	86,5	88	86,5

N O	INDIKATOR	SATUA N	TAHUN					PENYESUAI AN TARGET RKPD 2027	
			BASELIN E TAHUN 2024	2025			2027		2028
				TARGET	REALISA SI	CAPAIA N (%)	TARGET		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Skor	76,99	81	80,63	108,98	83	84	83
	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	72,2	72,2	72,3	100,14	72,2	72,9	72,2
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Angka	55	62,5	55	88	72,5	77,5	72,5
	Persentase hasil riset. invensi dan inovasi yang termanfaatkan	%		55	71,43	129,87	67	72,00	71,5
	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	84,43	100	90,98	90,98	100	100	100
	Misi 6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten serang								
	Persentase Capaian Aksi HAM	point	83,9	85	83,9	98,71	87	88	87
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	70,8	81	73,77	91,07	81,4	81,6	81,4
	Tingkat Warisan Seni. Budaya dan tradisi yang dilestarikan	%	18,18	27,27	27,27	100	45,45	54,55	45,45

Tabel 6. 4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Serang Tahun 2027

N O	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TAHUN				
				2025			2027	2028
				TARGE T	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	TARGE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81,39	81,76	82,12	100,44	82,51	82,88
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	2,13	2,123	2,47	85,95	2,109	2,102
3	Rasio Rumah Tangga Menggunakan Listrik	%	96,66	100	BPS	#VALUE!	100	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Akses aman Air Perpipaan	%	12,87	12,92	12,92	#VALUE!	13,2	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	61,406	67,77	64,67	95,43	68,09	68,50
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Skor	0,99	0,99	0,99	100	1	
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	65,62	66,25	71,71	#VALUE!	68,25	
8	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	25,97	27,85	10,08	36,19	31,59	33,47
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%		16,63	na	#VALUE!	17,38	17,68
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	123,3	123	138,44	112,55	115	110
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,71	0,73	0,73	100	0,77	0,81
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,229	1,354	1,22	90,1	1,61	1,73
13	Rasio Penduduk	%	1,039	10,391	104,15	103,75	104,20	104,30

N O	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TAHUN				
				2025			2027	2028
				TARGE T	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	TARGE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Kepadatan Penduduk	Orang/k m ²	1159,9	1177,9	1.249,10	106,04	1250	1252
15	Kapasitas Air Baku	%	100	100	100	#VALUE!	100	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,78	5.60-6.60	5,17	78,33	5.75-6.75	
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,51	4.00-4.08	4,48	88	3.40-4.00	
3	PDRB per Kapita	Rp Juta	60,01	60-63.58	63,3	99,56	68-73	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,18	9.18-9.74	8,73	104,9	8.85-9	
5	Indeks Gini	%	0,267	0.262-0.266	0,252	103,82	0.254-0.262	
6	Persentase BOR (Bed Occupancy Rate)	%	78%	≥78%	90	115,38	80	81
7	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	8	8	DINKES	#VALUE!	11	
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,28	73,83	74,1	100,37	75,6	
9	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,91	74,8	75,39	100,79	75,37	
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	95,04	95	93,64	98,57	97	
11	Prevalensi Stunting	%	20,20	18,8	NA	NA	16,3	15,2
12	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,88	7,89	8,03	101,77	8,31	8,51
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	13,48	13,02	96,59	13,84	14,08
14	Skor Kemampuan Literasi SD	%	51,96	54,46	47,11	86,5	59,46	61.96

N O	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TAHUN				
				2025			2027	2028
				TARGE T	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	TARGE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Skor Kemampuan Literasi SMP	%	60,7	61,8	64,97	105,13	64	65.1
16	Skor Kemampuan Numerasi SD	%	46,9	49,8	41,72	83,78	55,6	58.5
17	Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	56,63	58,13	58,85	101,24	61,13	62.63
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	54,3	54,3	3,52	6,48	62,87	67,67
19	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintah daerah	Nilai	51,33	61	65,13	106,77	68	70
20	Indeks Literasi Digital	Angka	61,66	62,2	57,59	92,59	62.5	
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	44,10	50,87	85,82	168,7	53,02	54,17
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	70,8	81	73,77	91,07	81,4	81,6
23	Tingkat Warisan Seni. Budaya dan tradisi yang dilestarikan	Angka	18,18	27,27	27,27	100	45,45	54,55
24	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62,23	62,97	62,23	98,82	64.47	65,23
25	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Angka	59,37	59,42	61,2	103	62	62
26	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,531	0,518	0,531	97,49	0,492	0,479
27	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,54	92,72	92,54	99,81	93,1	93,28

N O	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TAHUN				
				2025			2027	2028
				TARGE T	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	TARGE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93,3/100.000 KH	122	20 jiwa (69.1/100.000 KH)	143,36	97	
29	Cakupan Penemuan Tuberkulosis	%	75	90	82	91,11	90	
30	Persentase pasien tuberkulosis sensitif obat yang memulai pengobatan	%	91	95	93	97,89	95	
31	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	%	90%	90	91	101,11	90	
32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	44,1	44,1	85,82	194,6	44.65	44,75
33	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	57,17	57,67	57,17	99,13	58,67	59,17
34	Capaian Produksi Pertanian							
	1. Produksi Tanaman Pangan							
	- Produksi Padi	Ton	576.649	541.435	635.076	117,29	541.480	541.508
	- Produksi Jagung	Ton	2.747	4.754	2.809	59,09	4.806	4.833
	2. Produksi Hortikultura							
	- Produksi Cabai Besar	Kuintal	4.039	4.241	4.904,40	115,64	4.676	4.910
	- Produksi Bawang Merah	Kuintal	6.190	6.809	7.635,20	112,13	8.239	9.063
	- Produksi Buah-buahan	Kuintal	132.025	138.626	25.034,76	18,06	152.835	160.477

N O	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TAHUN				
				2025			2027	2028
				TARGE T	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	TARGE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Produksi Perkebunan							
	- Produksi Kelapa	Ton	287.563	301.941	7.047.700	2.334,13	332.890	349.534
	- Produksi Kopi	Ton	629	661	726,6	109,92	728	765
	- Produksi Cengkeh	kg	136	142	136	95,77	157	165
	- Produksi Lada	kg	4	5	4	80	5	5
	3. Populasi Komoditas Peternakan							
	- Populasi Sapi	Ekor	4.875	4.923	5.582	113,39	5.022	5.072
35	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota	ton	63.660,91	64.368,25	67.584,74	105	65.439.20	66.093,58
36	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,62	0,64	0,6	93,75	0,68	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Angka Ketergantungan (usia produktif 15-64 tahun) tidak produktif (0 - 14 dan diatas 65tahun)	%	43,62	43,75	46,5	106,29	46.60	46,70
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	46,69	46.70-47	46,69	99,34	47.2-47.5	
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,37	2,4	2,37	98,75	2,47	
4	Rasio Kewirausahaan	%	0,2	0,5	0,4	80	1	1
5	Tingkat Partisipasi	%	67,77	68	67,48	99,24	68.50	68,75

N O	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TAHUN				
				2025			2027	2028
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Angkatan Kerja							
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	36,90	37	50,1	135,41	38	38,5
7	Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi Primer di wilayah Kabupaten Serang	%	5	5,5	0,68	12,36	6.5	7
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	22,1	22,61	22,97	101,59	23,75	24,34
9	Ekspor Barang dan Jasa	(\$ Juta)	116,96	550	557	101,27	118	119
10	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	65,62	66,25	65,62	99,05	68.25	68,90
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	98,24	98,29	98,43	100,14	98,48	98,52
12	Persentase Desa Mandiri	%	4,6	5,21	7,06	135,42	8,28	8,9
13	Indeks Desa	Angka	0	67,51	68,7	101,77	69,02	69,19
14	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,56	0,57	0,68	119,30	0.59	0,57
15	Jumlah Tamu Wisatawan	Ribuan Orang	19,87	19,87	52,6	264,72	21	22,5
	Mancanegara (Hotel Berbintang)							
16	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	2,26	2,35	Dalam proses perhitungan	DISKOUMPERINDAG/DKPP	2.42	2,45
17	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	1,38	1,4	0,58	41,43	1.44	1,47
18	Persentase Koperasi Aktif	%	76,37	77	82	106,49	78	78

N O	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TAHUN				
				2025			2027	2028
				TARGE T	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	TARGE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,29	2,29	2,53	110,48	2,32	2,35
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	51,86	52,62	49,66	94,37	54,18	54,97
21	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	%	27,05	31,57	31,32	99,21	30,62	30,62
22	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	8,94	9,1	8,94	98,24	9,2	9,25
23	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp	44,1	84,94	128	150,69	44,75	46,01
24	Persentase Peningkatan Investasi	%	84,28	86,82	109,09	125,65	92,11	94,87
25	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	9,37	8,06	9,82	121,84	7,72	7,53
26	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Poin	3,88	3,95	3,82	96,71	3,91	4,04
27	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%		1	BPS	#VALUE!	1,2	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka		98	98,9	100,92	98,4	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Skor		3,75	3,97	105,87		
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai		4,2	4,15	98,81	4,4	
	Nilai SAKIP Pemda	Nilai		78	75,67	97,01	78,5	

N O	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TAHUN				
				2025			2027	2028
				TARGE T	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	TARGE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Trantibum dan Perda	%		5	5,41	108,2	5	
5	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlin mas	Angka		65	66,44	102,22	69	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Poin		85	83,9	98,71	87	
7	Indeks Rasa Aman	%		99	SATPOL PP / KESBANGPOL	#VALUE!	99	
8	Indeks Daya Saing Daerah	Angka		3,68	3,66	99,46	3.65	
9	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah	Jumlah		17	28	164,71	20	
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka		77,4	80,77	104,35	78,8	
11	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor		3,25	3,02	92,92	3.35	
12	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%		95,25	94,39	99,1	96,25	96,75
13	IKLIBPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP
14	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	82,79	84,14	85,43	101,53	84,64	84,89
15	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin		2,6	2,55	98,08	2,69	2,72
16	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	51,33	61	65,13	106,77	68	

N O	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TAHUN				
				2025			2027	2028
				TARGE T	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	TARGE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pada Lingkup Pemerintah Daerah							
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		84	83,81	99,77	86,5	
18	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Skor		81	80,63	99,54	83	84
19	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai		72,2	72,3	100,14	72,2	
20	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Angka		62,5	55	88	72,5	
21	Persentase Hasil Riset. Inovasi dan Inovasi yang Termanfaatkan	%		55	71,43	129,87	71.50	72,00
22	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	84,43	100	90,98	90,98	100	100
23	Jumlah Inovasi Pelayanan	Jumlah		9	9	100	2	
24	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	Jumlah		10	28	280	7	7
25	Jumlah Gedung UPT Pelayanan	Jumlah		29	1	3,45	29	

Cascading indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara target pemenuhan layanan dasar dengan sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah yang bertanggung jawab. Melalui proses ini, indikator SPM dijabarkan secara berjenjang dari target daerah ke indikator kinerja perangkat daerah hingga pelaksana layanan, sehingga setiap unit memiliki peran yang jelas dalam pencapaian target SPM.

Penerapan cascading indikator SPM mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah serta memperkuat pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan layanan dasar. Dengan demikian, target SPM dapat dicapai secara terukur, efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Tabel 6. 5 Cascading Indikator SPM

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
1	Air Minum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	7605 orang	50 orang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	DPUPR
							Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
							Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
							Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
							Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
2		KUANTITAS SPALD							

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	9	22	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan /sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	
		KUALITAS SPALD							
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	0	0					
		Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3	0	0					

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
		tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota							
		Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	9	22	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septic dengan pengolahan lanjutan /sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai standar pelayanan minimal.		5 Orang	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
				5 Orang			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	
				5 Orang			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				5 Orang			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
	Dan Pengemis Di Luar Panti							Kewenangan Kabupaten/Kota	
				5 Orang			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
				5 Orang			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				5 Orang			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	
				5 Orang			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				5 Orang			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				5 Orang			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				5 Orang			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				5 Orang					

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
				5 Orang			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
4	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.		100%	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				100%			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	
5	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	96,67%	100%	PROGRAM PENANGGULAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	BPBD
6	Pelayanan Pencegahan dan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	94,38%	100%	PROGRAM PENANGGULAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan	

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana				Terhadap Bencana	Terhadap Bencana Kabupaten	Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	
							Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	
							Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	
7	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	97,50%	100%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	67,61%	100%	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	
							Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan	

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
								Kebakaran dan Non Kebakaran	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	
9	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96,42	46950	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
10	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	90,75	44816	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
11	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,74	42686	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
12	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	97,69	184925	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	

Dinas Kesehatan

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
					DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota			
13	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase warga negara usia 7-15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan	104,02	322529	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
14	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan	100	1219359	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
15	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan	88,79	156181	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
16	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,16	82564	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
17	Pelayanan Kesehatan Penderita	Persentase penderita Diabetes Melitus yang	100,58	13711	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan	

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
	Diabetes Melitus	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
18	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	97,77	2019	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	
19	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	24327	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
20	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	44245	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
21	PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	89.27	81.25	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	DISDIKBUD

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
		Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 dalam Pendidikan Dasar	99,21	99.60			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	
							Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
							Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	26,51	51.81	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
							Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
							Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	
							Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di	

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
								bidang pendidikan yang dilaksanakan	
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
							Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	
							Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	
							Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
							Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
		Skor Kemampuan Literasi SD	47,11	59.46	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
							Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
							Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
							Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	
							Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	
							Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	
							Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	
		Skor Kemampuan Literasi SMP	64,97	64	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
							Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
						Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
							Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
							Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	
							Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	
							Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	
							Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	
							Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
		Skor Kemampuan Numerasi SD	41,72	55.6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
		Skor Kemampuan Numerasi SMP	58,85	61.13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
							Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
							Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	26,26	31.43	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
							Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
							Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	
							Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
							Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	
							Pemberian layanan pendampingan bagi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan	

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
							satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
							Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	84,63	76.91	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
		Iklim Inklusivitas SD	53,07	62.45	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	
		Iklim Inklusivitas SMP	55,53	60.59	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah literasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	
		Iklim Keamanan SD	67,26	72.95	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
							Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
		Iklim Keamanan SMP	66,15	70.12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di	

N o.	Layanan Dasar SPM	Indikator SPM	Capaian 2025	Target 2027	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output/ outcome	Perangkat Daerah
						Menengah Pertama		bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
							Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
		Iklm Kebinekaan SD	61,07	70.28	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
		Iklm Kebinekaan SMP	63,18	70.24	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	

BAB VII

PENUTUP

Proses penyusunan RKPD tahun 2027 ini berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Serang tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029. Selain mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 ini juga memperhatikan beberapa hal diantaranya; tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam 8 (delapan) misi pembangunan yang disebut Asta Cita sebagai mana tertuang dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045, serta RPJMD tahun 2025-2029.

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 menjadi landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027.

Akhir kata, pelaksanaan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027 ini membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan aktif dalam melaksanakan prioritas kebijakan dan program pembangunan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah.

Serang, Juni 2026

BUPATI SERANG,.

ttd

Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd.,MM.

RKPD KABUPATEN SERANG TAHUN 2027



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERANG



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029, yang memuat visi dan misi Kabupaten Serang sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Kepala Daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui delapan misi pembangunan (Asta Cita) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029,

serta selaras dengan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025–2045, RPJMD Tahun

2025–2029, dan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan Tahun 2025.

Perencanaan tahunan dalam RKPD Tahun 2027 disusun untuk mendukung perencanaan pembangunan Daerah dan Nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung Pelayanan Publik yang berkualitas dan Infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup”

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Serang



Jl. Veteran No. 1, Serang 42112



(0254) 203135



bapperida@serangkab.go.id